



Candy's Bowl:

POLITIK KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA
DI INDONESIA

Candy's Bowl atau wadah permen merupakan imajinasi dari bentuk sosial yang berupaya menampung segala warna, rasa, tampilan dari keunikan yang dimiliki oleh masyarakat. Meskipun warna, rasa, dan tampilan masing-masing elemen itu mencolok akan tetapi tiap elemen itu tidak saling mengubah warna, rasa, maupun tampilan akan tetapi mereka didalam wadah permen tersebut saling menguatkan satu sama lain secara utuh sebagai masyarakat yang bhineka.

Buku ini mencoba mengurai bagaimana politik kerukunan *candy's bowl* menjadi alternatif pengelolaan kerukunan ala Indonesia. Belajar dari kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia, para pengamat dan penggerak kerukunan dunia, dapat belajar sebuah geneologi lahirnya *singular violence, collective violence*, hingga menjadi *structural violence* sebagai mekanisme ketidakadilan terhadap bentuk sosial yang intimidatif. Dalam situasi tersebut, politik memegang kendali untuk mampu melakukan *balancing* agar dinamisasi sosial kembali normal.

Buku ini sangat bermanfaat bagi para pengamat, mahasiswa atau pemerhati *Dispute Resolution*, juga bagi para pemangku kebijakan di negara ini.

ISBN: 978-979-8547-75-1



Munawar Ahmad

Candy's Bowl: POLITIK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA



Candy's Bowl:

POLITIK KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA
DI INDONESIA

Munawar Ahmad



CANDY'S BOWL: POLITIK
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI INDONESIA

CANDY'S BOWL:
POLITIK KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA DI
INDONESIA

Dr. Munawar Ahmad

Candy's Bowl:
Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Dr. Munawar Ahmad

©2013

Cover dan Lay out : Khairul Anam

Gambar Cover : Candy's Bowl by Genjer 2013

Cetakan Pertama : Desember 2013

350+ix; 16 x 23 cm

Penerbit:

SUKA-Press,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Email: avans4u@yahoo.com

Buku diterbitkan atas bantuan dana dari Subdit Penelitian Pendis

Kemenag RI, No. Registrasi: PPDT/39/2013

ISBN: 978-979-8547-75-1

All Rights reserved. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PEMBUKA

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karuniaNya dapat menyelesaikan riset ini.

Riset ini merupakan topik kajian untuk mengembangkan Manajemen Resolusi Konflik di Indonesia, diajukan ke Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga sebagai calon Riset Unggulan Tahun 2011. Dalam seleksi pertama, proposal ini dinyatakan belum diterima dalam anggaran Riset Unggulan tahun 2011, namun berita menarik diperoleh penulis karena proposal ini diajukan oleh Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga sebagai riset Unggulan Gelombang II dan dinyatakan layak dibiayai oleh APBNP tahun 2011. Sungguh suatu karunia dikala telah dinyatakan tidak layak, tetapi datang berita bahwa proposal ini kemudian dalam Gelombang II dinyatakan layak.

Kajian tentang Politik Kerukunan dewasa ini belumlah semarak, sehingga tema-temanya masih berputar pada proses konflik saja, belum menyentuh bagaimana mekanisme yang harus dikerjakan oleh Negara, pelaku konflik dan pihak yang terlibat meresolusi konflik. Kajian ini diharapkan menjadi potret utuh bagaimana konflik keagamaan bermula, mengalami eskalasi hingga

konsekuensi resolusi konfliknya. Kasus yang digunakan adalah konflik Jemaat Ahmadiyah dengan mayoritas muslim Indonesia, yang terjadi sejak tahun 1925, sampai saat ini belum terselesaikan.

Beberapa sumber yang dijadikan bahan tulisan utama berasal dari bahan tulisan penulis bersama Ahmad Mufid, Ariani Ratna Budiati, tentang Sejarah Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Bahan tersebut sebagian besar dituliskan ulang dengan maksud konservasi kajian yang komprehensi tentang Jemaat Ahmadiyah. Sebagai upaya mengkonservasi tulisan tersebut, maka bahan-bahan tersebut, penulis tuangkan kembali dalam laporan ini.

Dalam kajian ini, penulis memberikan beberapa ulasan pada kasus-kasus yang dianggap sebagai sumber konflik, pola konflik, hingga mekanisme *violence* yang menimpa Jemaat Ahmadiyah, dengan maksud untuk menonjolkan anatomi konflik keagamaan secara kuat. Untuk mendukung penjelasan ilmiah, beberapa tulisan pelengkap yang berasal dari e-text, penulis juga sadur untuk menunjukkan korelasi pemikiran yang ditulis oleh beberapa narasumber, sebagai penguat atas maksud dari penelitian ini. Semua bahan rujukan tersebut dikompilasi melalui prosedur tata tulis semestinya untuk menghindari plagiasi.

Akhirnya, dalam kesempatan ini juga penulis haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya karya ini. Khususnya untuk Subdit Penelitian Pendis Kemenag RI, untuk program publikasi ilmiah non tesis non disertasi No. Registrasi: PPDT/39/2013 yang telah membantu biaya publishing.

11-12- 2013

Munawar Ahmad

Daftar Isi

KATA PEMBUKA	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	7
	C. Tinjauan Pustaka.....	8
	D. Ancangan Riset.....	10
	E. Metode Penelitian	14
BAB II	MENAPAKI JEJAK POLITIK KERUKUNAN DI INDONESIA MASA AWAL	16
	A. Instrumentalisasi Agama oleh Kekuasaan..	16
	B. Politik Misionari: Perebutan Ruang Agama Yang Tidak Adil	19
	C. Politik Penjinakan: Membungkam Agama demi Kekuasaan	25
	D. Politik Belah Bambu: Membelah dengan Menginjak.....	40
BAB III	POTRET PERMANENT CONFLICT : MINORITAS AHMADIYAH DARI TAHUN 1925- SEKARANG	45
	A. Kehadiran Ahmadiyah dan konflik kepentingan.....	45

B.	Persemaian Pertama: Misioner Ahmadiyah Qadian ke Indonesia	62	BAB V	CANDY'S BOWL: KONSEP DAN PRAKTEK KERUKUNAN BERAGAMA DI INDONESIA	288
C.	Tahun 1940-1960: Penyebarluasan Daerah Pertabglihatan	147	A.	Keragaman Keyakinan: Fakta Bukan Wacana Sosial	288
D.	Perkembangan Ahmadiyah di Indonesia Timur	209	B.	Sekularisme	296
E.	KONGRES	216	C.	Melting Pot	298
F.	Tahun 1960 – 1980 : Perluasan hingga ke Pelosok Desa	217	D.	Salad Bowl	299
G.	Tahun 1980-2000 : Menebar Perbedaan, Menuai Konflik	231	E.	Agonisme : Candy's bowl	302
H.	Grafik pertumbuhan Jemaat Ahmadiyah dari tahun 1992-2011.....	248	BAB VI	P E N U T U P	305
I.	Seminar seabad buku Filsafat Ajaran Islam	249		DAFTAR BUKU RUJUKAN.....	313
J.	Seminar Internasional Revitalisasi Persatuan Umat Islam	249		LAMPIRAN	319
K.	Kontroversi Teologi yang Tak Mungkin Diselesaikan.....	250			
L.	Metodologi Tafsir.....	256			
M.	Komunitas eksklusif	258			
N.	Masalah Ahmadiyah dan Inggris.....	260			
BAB IV	TRUTH CLAIM TO BE COLLECTIVE TRUTH ...	262			
A.	Singular Violence : Pola Konflik tahun 1925-1945	262			
B.	Collective violence : Pola Konflik Paska tahun 1970	271			
C.	Structural Violence : Negara Berkepentingan dengan Ahmadiyah.....	275			

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Jemaat Ahmadiyah telah berada di Indonesia sejak 1925, beriringan dengan organisasi keagamaan lainnya, seperti Muhammadiyah (1916), Nahdatul Ulama (1926). dengan demikian, hingga tahun 2010 ini, keberadaan JAI telah mencapai usia 85 tahun, suatu rentang usia yang panjang. Bagi suatu organisasi masyarakat, usia tersebut dianggap sebagai ruang diterima (*span of acceptances*) oleh masyarakat terhadap organisasi tersebut, sehingga organisasi tersebut telah menubuh (*embodies*) dengan masyarakat itu sendiri. Secara implisit, sepanjang rentang usia tersebut, tensi diantara keduanya telah tidak ada. Namun, kenyataan tersebut tidak berlaku bagi Jemaat Ahmadiyah, justru memasuki usia ke 80 tahun, keberadaan mereka digugat oleh masyarakat Indonesia.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan elemen masyarakat Indonesia yang ikut andil memberi warna terhadap kehidupan beragama Indonesia kontemporer. Meskipun ajaran Jemaat Ahmadiyah berasal dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, namun komunitas JAI, diakui oleh Soekarno, ikut memainkan

perannya bagi pertumbuhan kehidupan beragama dan menghargai perjuangan kemerdekaan di Indonesia sebagai kiprah yang dari segenap anak bangsa ini..

Sejak datang ke Indonesia pada tahun 1923 untuk Gerakan Ahmadiyah Lahore dan 1925 untuk Ahmadiyah aliran Qadian, Indonesia memiliki khazanah pemikiran keagamaan yang semakin beragam. Sejalan dengan pertumbuhan masyarakat keagamaan Indonesia pada tahun 1920-an, corak pemikiran keagamaanpun semakin menunjukkan spektrumnya. Orthodoxi berhadapan dengan progresif, fundamentalisma berhadapan dengan liberalisma dan moderatisma. Spectrum pemikiran keagamaan tersebut ikut membentuk gerakan-gerakan mainstream antara salafi berhadapan dengan khalafi. Pada situasi demikian, pemikiran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikembangkan oleh Ahmadiyah baik aliran Lahore maupun Qadian juga ikut membentuk corak pemikiran pada satu spektrum, yakni rasionalisma. Penguatan rasionalisma begitu terasa ketika membaca pamparan tafsir versi Ahmadiyah. Beberapa tokoh mengagumi corak tafsir versi Ahmadiyah ini, seperti HOS Tjokroaminoto,¹KIT Ahmad Dahlan dan Soekarno,² sendiri hingga Dawam Rahardjo dan Djohan Effendi,³ yang memuji tafsir Ahmadiyah sangat rasional.

1 Kedekatan HOS Tjokroaminoto terhadap ajaran Ahmadiyah, dijelaskan oleh Mukti Ali seperti yang dikutip oleh Anhar Gonggong, *HOS Tjokroaminoto*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, halaman 56. Mukti Ali mengatakan alasan mengapa tafsir Alquran yang dibuat oleh Tjokroaminoto ditolak oleh Serikat Islam dalam Konggres Muhamadiyah tahun 1928, yakni karena "bahwa beliau sangat dipengaruhi oleh penulis-penulis dan ahli pikir India, seperti Maulvi Muhammad Ali, Kwaja Kamaluddin, dan Amir Ali."

2 Pengakuan Soekarno tersebut dapat ditemui dalam buku *Di bawah Bendera Revolusi* jilid I halaman 100.

3 Penjelasan tentang kedekatan pemikiran Djohan Effendi dengan Ahmadiyah dijelaskan oleh Barton, Keberanian mengutip pendapat Iqbal hanya keberanian yang tidak mencolok, tetapi secara positif merujuk kepada para pemimpin Lahore dan Qadian untuk skripsi IAIN sungguh mengindikasikan keteguhan keyakinan tersendiri. Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1999, halaman 213.

Persentuhan pemikiran Ahmadiyah dengan intelektualisma Indonesia bersumber pada perkembangan wacana keislaman dan situasi perpolitikan Belanda saat itu yang mulai menerapkan Kersteningspolitiek⁴. Semangat rasionalitas yang dimiliki Ahmadiyah terhadap Alquran mampu menarik perhatian kaum terpelajar yang peduli dengan bahaya Kristenisasi dan imperialisme Belanda untuk bangkit dan bergerak melakukan pembebasan, khususnya pembebasan kejuduman pemikiran keagamaan bangsa Indonesia saat itu.

Persentuhan ini juga yang mengantarkan beberapa murid Sumatra Thawalib, mulai mengenal Ahmadiyah. Pertengahan tahun 1922, Khawaja Kamaluddin, seorang misioner Ahmadiyah, diberitakan "Tjahaya Sumatra" melakukan kunjungan ke Jawa. Misioner tersebut, melakukan berbagai pidato tentang kebesaran dan ketinggian Islam. Ulasan-ulasan yang dmuat dalam "Tjahaya Sumatra" sangat menarik perhatian para pemuda Sumatra Thawalib, salah satunya Ahmad Nurrudin⁵, Abubakar Ayyub, dan Zaini Dahlan.⁶

Sebelum lebih jauh menguraikan persemaian bibit Ahmadiyah Qadian di Indonesia, terlebih dahulu akan dijelaskan bahwa pemikiran Ahmadiyah mulai dikenal oleh kalangan intelektual Indonesiaa pada tahun 1920-an. Tahun 1924 dan 1925, merupakan tahun bersejarah bagi Ahmadiyah di Indonesia, baik Lahore, maupun Qadiani. 2 Mubaligh Lahore secara resmi tiba di Jawa tahun

4 Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1985, halaman 23

5 JAI, *Jubilium 75 Tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, 1975, halaman 39

6 Zaini Dahlan adalah teman sekolah Dr.Hamka, mengenai ini Hamka menuliskan kesannya : "Kawan-kawan saya yang dahulunya sama belajar di Sumatra Thawalib, setelah pulang dari sana (qadian) telah "berobah". Orang-orangnya tenang dan penuh perasaan dan khidmat kepada kepercayaannya. Sikapnya kebanyakan menarik hati, terutama kesabarannya ketika dimaki dan diejek. Diantara kawan saya itu ialah Zaini Dahlan, yang seketika sama mengaji terhitung murid

1924⁷, yakni Mirza Wali Ahmad Beg, dan Maulana Ahmad, menuju Yogyakarta. Kemudian mereka menjalin hubungan baik dengan para pemuka Muhammadiyah, seperti Mas Ngabehi Joyosugito, Muhammad Husni, Sadewo P.K, Soetopo, Mustopo, Syamsu Rijal, Supratolo, Kayat, Muhammad Kusban, Muhamad Irshad, Mufti Syarif, Sunarto, Ustman⁸, dan lain-lain. Mereka adalah intelektual dan tokoh terkemuka Muhammadiyah saat itu.

Kehadiran tokoh Ahmadiyah tersebut, telah memberikan wawasan dan roh baru bagi para intelektual Muhammadiyah, termasuk Irfan Dahlan⁹, putra KH.Ahmad Dahlan menjadi mubaligh Ahmadiyah Lahore. Alasan mereka tertarik terhadap pemikiran Ahmadiyah, yakni karena interpretasi keagamaan yang diajarkan oleh 2 tokoh mubaligh Lahore sangat rasional. Banyak tokoh-tokoh dari HIS Muhammadiyah dan Kweekschool Muhammadiyah, tertarik dengan pemikiran yang digulirkan Ahmadiyah. Sambutan terhadap tokoh Ahmadiyah, ditunjukkan secara antusias dan hangat

7 yang tidak memperhatikan kaji dan hanya suka bergarah dan bersenda gurau, sehingga bergelar "si Komik". Tetapi, setelah kembali dari Qadian, dia menjadi seorang yang tenang dan saleh dan yakin memegang kepercayaannya. Antara lain, Abubakar Ayyub, dan Ahmad Nurruddin yang sama belajar dengan daku di sekolah Diniyah"

Hamka, *Ayahku*, Penerbit Uminda, Jakarta 1982, halaman 127 *Qanun Asasi*, hal 94

8 *ibid*, hal.96

9 bahkan Djumhan Dahlan (putra KH. Ahmad Dahlan) belajar ke Lahore, kemudian is menjadi mubaligh Ahmadiyah. Setelah selesai belajar di Lahore, Djumhan ditugaskan sebagai mubaligh di Thailand hingga akhir hayatnya. Sampai saat ini anak-anak Djumhan Dahlan masih hidup dan menetap di Thailand, salah satunya adalah Prof.Dr. Winai Dahlan, ahli makanan halal dari Tjulangkronng Univ. hal. 95 dalam versi Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, penerbit Pustaka Rakjat, Jakarta, 1949, halaman 91 disebutkan nama Erfan Ahmad Dahlan adalah anak pendiri Muhammadiyah memeluk aliran Ahmadiyah. Jadi ada perbedaan nama di dalam *Qanun Asasi* disebutkan nama Djumhan. Kajian secara komprehensif tentang hubungan Muhammadiyah dan Ahmadiyah dijelaskan oleh Herman Beck dalam artikelnya *The rupture between the Muhammadiyah to the Ahmadiyya*, Pada halaman 227-229 menjelaskan bahwa 4 putra dari pembesar Muhammadiyah dididik sebagai mubaligh Ahmadiyah di Lahore, yakni Ma'sum, Sabit, Jundab dan Jumhan. Setelah berada di India, Djumhan Dahlan mengganti nama menjadi Erfan Dahlan..

oleh warga Muhammadiyah. Bahkan, di Yogyakarta, pada saat Mukhtar Muhammadiyah tahun 1924 mereka berkesempatan memberikan materi ceramah.

Namun, seiring dengan munculnya kelompok Ahmadiyah di dalam tubuh Muhammadiyah, memunculkan reaksi keras dari para ulama senior. Setelah peristiwa tersebut, datang ulama Minang, Dr. Abdul Karim Amrullah, pada tahun 1926, yang mengkhususkan diri menemui Mirza Ahmad Wali Beig, untuk berdiskusi. Terjadi dialog diantara mereka, yang pada intinya Dr. Abdul Karim, melarang Ahmadiyah disebarkan di lingkungan Muhammadiyah, sambil memberikan sebuah buku "Alqawloes'Shahih"¹⁰, bertuliskan Arab berbahasa Latin. Isi buku tersebut, penjelasan mengenai itikad-itikad Ahmadiyah yang sesat. Buku Alqawloes'Shahih ini, merupakan buku yang telah dipersiapkan oleh Dr. Abdul Karim Amrullah, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid Jembatan Besi atau Sumatra Thawalib, karena ada diantara murid-murid Sumatra Thawalib mengikuti ajaran Ahmadiyah. Tiga orang dari mereka sekolah di Lahore kemudian pindah ke Qadian, yakni Ahmad Nurruddin, Abubakar Ayub, dan Zaini Dahlan. Tiga tokoh inilah, kemudian menjadi pelopor masuknya Ahmadiyah Qadiani ke Indonesia. Jadi, buku tersebut memang sudah dipersiapkan untuk menjelaskan berbagai kesalahanan tentang Ahmadiyah.

Reaksi kedua, tahun 1927 datang ulama dari India, Abdul Alim Assidiqi, yang mempropagandakan gerakan anti-Ahmadiyah. Berdasarkan peningkatan animo tokohtokoh Muhammadiyah terhadap Ahmadiyah, yang dipandang akan merugikan Muhammadiyah, maka pada tahun 1928, PB Muhammadiyah membuat Maklumat tanggal 5 Juli 1928 No. 294¹¹. Isi maklumat tersebut, melarang ajaran Ahmadiyah berkembang di lingkungan

10 Hadji Abdul Karim Amroella, *Alqawloesh'shahih*, diterbitkan di Yogyakarta oleh Datoek Nan Bareno alias Marah Intan, Yogyakarta, 1926

11 *Qanun Asasi*, hal.100

Muhammadiyah, karena beberapa tokoh penting di Muhammadiyah menjadi pengikut ajaran Ahmadiyah, termasuk putra K.H. Ahmad Dahlan sendiri. Kebijakan ini sangat mengecewakan simpatisan Ahmadiyah. Akhirnya, dengan berat hati Djoyosugito, Sadewo, Muhammad Husni, dll, memilih keluar dari Muhammadiyah. Sejak itulah mereka mendirikan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), yang berpusat di Yogyakarta. Tahun 1994, kebijakan PB Muhammadiyah ini kembali ditegaskan oleh Majelis Tarjih tertanggal 12 September 1994, ditanda-tangani oleh Prof.Dr. H. Asjmun AR, selaku ketua dan Drs. H.M. Fahmi Muqaddas, selaku sekretaris, yang menyimpulkan bahwa aliran Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam yang dijadikan anutan mayoritas umat Islam Indonesia. hal tersebut didasarkan pada 7 alasan.

Secara struktural, tekanan terhadap Ahmadiyah, baik Lahore maupun Qadiani, semakin keras semenjak dikeluarkannya fatwa MUI tahun 1980 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan, di luar Islam berdasarkan 9 buku Ahmadiyah. Fatwa tersebut diputuskan dalam musyawarah Nasional II tanggal 26 Mei - 1 Juni 1980 di Jakarta. Keputusan tersebut didasarkan pada 2 pertimbangan yakni :

- a) Sesuai dengan data dan fakta yang diketemukan dalam 9 buah buku tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan.
- b) Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah hendaknya Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan pemerintah.

Peran negara atau pemerintah semakin jelas ketika Pemerintah Arab Saudi mengirimkan surat kepada pemerintah melalui Menteri Agama mengenai desakan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah untuk secara aktif membentuk gerakan Ahmadiyah di Indonesia. Surat bernomor : 8/1/10/b374/1401 tanggal 6 Mei

1981. untuk menegaskan sikap Arab tersebut, Atase Keagamaan Kedutaan Besar Saudi Arabia, Ibrahim Yusuf Khan mengirimkan surat bernomor 79/50/958 tanggal 10 Rajab 1401 atau 10 Juli 1981 kepada Dirjen Binmas Islam, Departemen Agama. Surat dari Atase Keagamaan tersebut direspon oleh Dirjen Binmas Islam dengan menyebarkan surat perintah kepada seluruh Kantor Wilayah Departemen Agama di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan.

Kajian tentang fatwa MUI pernah dikaji oleh Atho Mudzhar (1993), dalam kajian Atho tersebut, fatwa pelarangan JAI termasuk qudran ketiga, yakni tersebar di masyarakat tetapi tidak menyebabkan ketegangan di masyarakat. Akan tetapi, tesis Atho tersebut kini telah mengubah fatwa JAI masuk dalam quadran satu, yakni tersebar di masyarakat dan menyebabkan ketegangan di tengah masyarakat. Ada perubahan yang drastis atas analisis Atho tersebut

B. Rumusan Masalah

Mengamati situasi tersebut, kajian resolusi konflik memandang jika ketegangan yang terjadi antara jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat agama di Indonesia, telah menjadi penghaambat terjalannya hubungan yang harmonis diantara mereka, sehingga dipandang perlu untuk memahami pola dan peta atas upaya yang telah dilakukan untuk mereduksi ketegangan diantara komunitas JAI dengan masyarakat Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mempertanyakan:

1. Bagaimana pengaruh fatwa pelarangan JAI yang dikeluarkan oleh MUI terhadap lahirnya kekerasan sistemik pada tingkat grass root?
2. Bagaimana upaya dan dampak resolusi konflik yang telah dilakukan terhadap permasalahan Ahmadiyah dengan

masyarakat Islam di Indonesia baik oleh masyarakat maupun pemerintah Indonesia?

3. Bagaimana prototype rekonsiliasi yang efektif bagi meresolusi permasalahan beda keimanan di tengah masyarakat homo-fide?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Menemukan hubungan *behavioral* antara fatwa dengan lahirnya kekerasan sistemik pada masyarakat agama
- b) Memetakan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga ulama dan masyarakat Indonesia terhadap mereduksi ketegangan akibat beda keyakinan
- c) Menemukan perubahan *truth claim* menjadi *collective truth* serta bagaimana perannya dalam masyarakat agama
- d) Menemukan model yang efektif upaya resolusi konflik terhadap permasalahan yang berbasis pada beda-iman

2. Kegunaan Penelitian

- a) Inventarisasi berbagai upaya resolusi konflik berbasis beda-iman di Indonesia
- b) Rekonstruksi hubungan perilaku keagamaan dengan fatwa dalam konstruksi pengetahuan masyarakat agama
- c) Eksplorasi berbagai upaya resolusi konflik yang unik bagi konflik berbasis keagamaan.

C. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang menarik tentang peran negara dalam mengelola kehidupan beragama di Indonesia, pernah diteliti oleh Aqib Suminto (1979). Kajian Aqib secara historis menjelaskan adanya

peran negara baik pada masa kolonial Belanda, Jepang, maupun pada masa berdirinya Departemen Agama, hingga tahun 1980. Aqib menemukan jika pengelolaan kehidupan masyarakat berbasis beda iman ternyata dibangun atas sebuah platform politik tertentu. Tiap periode memiliki *political will* yang berbeda tergantung pada anggapan atas gerakan agama itu sendiri. Anggapan dan kecurigaan atas gerakan agama tersebut, -mengharuskan pemerintah untuk mensikapinya dengan *political will* kawan atau lawan.

Dimensi temuan Aqib, dipandang masih relevan dengan kenyataan Indonesia pada abad 21 ini, walaupun dengan profil pemerintahan yang berbeda, tetapi pola penanganan kehidupan masyarakat dengan basis beda agama, tetap menempatkan politik sebagai orientasi sebagai dasar pembuatan kebijakan dan peraturan. Memang kajian Aqib masih bersifat umum, tidak khusus melihat tindakan pemerintah terhadap salah satu golongan masyarakat. Kini, pemerintah dihadapkan pada kasus pelik, yakni mengelola kelompok-kelompok minoritas agama yang ditekan, khususnya dalam Islam, seperti Ahmadiyah, Syiah, dan Islam lainnya.

Kajian tentang Ahmadiyah Indonesia telah banyak dilakukan peneliti. Tercatat Iskandar Zulkarnaen (2004), yang mengkaji masalah perbandingan teologi Ahmadiyah Qadian dan Lahore. Selain karya-karya dari kelompok anti-Ahmadiyah, yang dipelopori oleh Amin Jamaluddin serta ulama-ulama lainnya. Namun semua buku tersebut belum membahas secara khusus tentang politik pemerintah tentang penanganan kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai bahan awal, dapat ditemukan dari hasil riset ICRS UGM, yang menerbitkan catatan kritis tentang kehidupan beragama di Indonesia pada akhir tahun 2010. dari catatan tersebut dapat ditemukan beberapa kritik, yakni

1. Pemerintah Indonesia tidak memiliki platform politik penanganan kebinekaan berbasis agama, sehingga sikap

pemerintah masih pasang surut sesuai dengan tekanan yang dihadapinya

2. Kebijakan otoda, menyebabkan peran pemerintah pusat beralih ke daerah termasuk penanganan kehidupan beragama, sehingga tiap pemerintah daerah memiliki format dan skema yang berbeda dalam menangani kasus beda agama.

Dari catatan tersebut, ditemukan jika kondisi terparah dari korban kekerasan atas nama agama adalah kelompok Ahmadiyah. Kelompok ini sepanjang 5 tahun terakhir menjadi targer penganiayaan kolektif baik di level nasional maupun daerah. Tekaanan kepada kelompok Ahmadiyah ini juga secara struktural. Hal ini terbukti dari munculnya berbagai Surat Keputusan dari beberapa unsur pemerintah dan Kepala Pemerintahan setempat untuk melarang aktivitas Ahmadiyah. Fakta ini membuktikan jika pemerintah Indonesia masih mencari bentuk politik pengelolaan masyarakat plural. Langkah positif juga telah diambil oleh pemerintah dengan akan dikeluarkan UU Kerukunan Umat Beragama.

D. Ancangan Riset

Resolusi konflik merupakan upaya atau proses untuk mengeliminir perselisihan atau konflik. Keberhasilan resolusi konflik ditunjukkan dengan kesediaan untuk mendengar dan membuka ruang saling bertemu dari semua pihak. Proses tersebut dibagi menjadi dua pola besar yakni *adjudicative* dan *consensus*. Pola yang pertama lebih menekankan pada pendekatan penegakan keadilan dan yang kedua lebih pada terjalannya komunikasi.

Konflik sendiri memiliki dua impact, baik positif maupun negatif. Konflik merupakan cara alam dalam membentuk suasana menuju keadaan baru. Meskipun dalam situasi konflik terkadang membawa dampak buruk bagi berbagai pihak yang

tidak siap dengan perubahan, yakni munculnya kekerasan, rasa sakit dan kematian itu sendiri. Dengan demikian, konflik harus di kendalikan secara ketat agar impact buruk tersebut dapat ditekan, ketegangan di dalam masyarakat juga dapat dikurangi. Apabila dilihat dari sisi stimulan, banyak sekali pembentuk konflik di dalam sosial, antara lain politik, ekonomi dan agama.

Konflik berbasis agama di Indonesia merupakan konflik yang rentan terjadi, karena kekuatan agama dalam masyarakat agama telah meresap menjadi kekuatan identitas. Agama telah menjadi kontributor identitas kolektif bagi suatu masyarakat. Di tengah tekanan yang sistemik, identitas agama menjadi kekuatan untuk membentuk suatu identitas perlawanan dan gerakan. Hal ini menjadi alasan mengapa identitas kolektif menjadi perhatian politik.

Etno-religious merupakan salah satu identitas kolektif yang tumbuh dalam suatu komunitas. Entitas ini didefinisikan untuk sekelompok komunitas etnik yang berafiliasi pada salah satu agama tertentu. Identitas yang dimiliki komunitas tersebut tidak hanya meletakkan diri pada etnisitas saja, tetapi juga diperkuat oleh ikatan agama. Etnis dan agama menjadi unsur pembentuk identitas komunal. Dua kekuatan ini dapat memainkan peranan dan skop yang berbeda. Dalam definisi ini, komunitas Ahmadiyah disebut kaum Ahmadi. Penguatan identitas Ahmadi semakin menguat ketika terjadi serangkaian tekanan sistemik yang dialaminya. Adapun catatan tekanan sistemik terhadap komunitas Ahmadi tersebut antara lain

No	Perlakuan	Tempat	Tahun
1	Fatwa MUI 1980 yang menyatakan Ahmadiyah adalah sesat dan menyesatkan	Jakarta	1980

2	Pengrusakan masjid JAI Sukawening	Sukawening, Jawa Barat	1993
3	Keputusan Tarjih Muhammadiyah tentang Ahmadiyah sesat	Yogyakarta	1994
4	SK Bupati Lombok tentang Pelarangan kegiatan JAI di NTB	Lombok Barat, NTB	2001
5	Pengrusakan masjid JAI di Sambu Elen	Sambu Elen, Lombok, NTB	2001
6	Provokasi LPPI-Amin Jamaluddin terhadap Ahmadiyah	Masjid Istiqlal, Jakarta	2002
7	Pengrusakan 3 masjid JAI di Pancor	Pancor, NTB	2002
8	SKB Pemda Kuningan tentang pelarangan JAI	Kuningan, Jawa Barat	2002
9	Penyerangan dan pengrusakan masjid JAI di Manislor, Kuningan	Kuningan, Jawa Barat tr,	2002
10	Pengrusakan Masjid JAI di Cigintung	Majenang, Jawa Tengah	2002
11	Surat Edaran Sekjen Depag RI tentang pelarangan JAI	Jakarta	2003
12	Pengrusakan masjid di Tolenjeng	Tasikmalaya, Jawa Barat	2003
13	Pengrusakan panti asukan milik Ahmadiyah Kawalu	Tasikmalaya, Jawa Barat	2003
14	SKB Pemda Kuningan tentang pelarangan JAI di wilayah Kuningan	Kuningan, Jawa Barat	2004
15	Pengrusakan 8 masjid dan mushola JAI Manislor	Kuningan, Jawa Barat	2004

	Pengrusakan masjid JAI di Parigi	Ciamis, Jawa Barat	2004
16	Pengrusakan masjid JAI di Arjasari, Banjaran	Bandung, Jawa Barat	2004
17	SKB pelarangan JAI oleh Pemda Sintang	Sintang, Kalimantan Barat	2005
18	Pengrusakan Masjid JAI di Cenae, Wajo ,	Sulawesi Selatan	2005
19	Demo dan pengrusakan Kampus Mubarak, Parung	Bogor, Jawa Barat	2005
20	SPB Muspida Kab.Bogor tentang Penutupan kegiatan kampus Mubarak	Bogor, Jawa Barat	2005
21	Pengrusakan gedung Pertemuan milik kaum Ibu JAI di Parung, Bogor	Bogor, Jawa Barat	2005
23	Pengrusakan Masjid JAI di Ciaruteun	Bogor, Jawa Barat	2005
24	Fatwa MUI tentang Pelarangan aliran JAI	Jakarta	2005
25	Penyegelan masjid dan mushola di Manislor	Manislor, Jawa Barat	2005
26	SKB pelarangan JAI oleh Muspida Tasikmalaya	Tasikmalaya, Jawa Barat	2005
27	Pengrusakan masjid dan rumah anggota di Cijati	Cianjur, Jawa Barat	2005
28	SKB Pelarangan JAI oleh Muspida Garut .	Garut, Jawa Barat	2005
29	SKB Tiga Menteri (Menag, Jaksa Agung, dan Mendagri) pembekuan kegiatan JAI di seluruh Indonesia	Jakarta	2008
30	SK Gubernur Banten	Banten	2011
31	SK Gubernur Jawa Timur	Jawa Timur	2011

Sumber : Laporan Sekretaris Umur Kharijiah, PB JAI 2005

Sekali lagi, dalam catatan tekanan sistemik tersebut tampak sekali peranan fatwa menjadi kekuatan lahirnya kekerasan pada tingkat grass root. Tekanan sistemik tidak ternyata juga menjadi penguat lahirnya tekanan struktural yang direpresentasikan terbitnya SKB Pelarangan JAI oleh pemerintah. Kenyataan ini terjadi karena kekerasan yang terjadi semakin melebar dan dianggap oleh pemerintah setempat, berbahaya bagi keterbiban umum.

Terakhir, peristiwa memilukan terjadi pada bulan Februari 2011 di Keusik, Banten. Pada kejadian tersebut, 3 orang warga Ahmadiyah menjadi korban kekerasan ,oleh sekelompok orang anti-Ahmadiyah. Peristiwa Cikeusik menjadi pemicu lahirnya gerakan solidaritas kemanusiaan untuk melakukan pembelaan terhadap para korban tindak kekerasan oleh Anti Ahmadiyah di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* atau kajian pustaka terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan seiring upaya resolutif dan berbagai pihak untuk menurunkan ketegangan masyarakat Islam akibat kehadiran JAI.

a. Metode Pengumpulan data

1. Dokumentasi, yakni mengkaji berbagai data yang telah direkam dalam dokumendokumen dari berbagai pihak yang terlibat dalam resolusi konflik kasus JAI
2. Studi Pustaka, yakni mengkaji berbagai informasi dan data terkait dengan masalah resolusi konflik yang telah dilakukan oleh berbagai pihak.
3. Interview yakni upaya menggali data yang tidak tertulis dan pihak-pihak yang terlibat

b. Metode analisa

Metode analisa penelitian ini menggunakan pola deskripsi analitik, yakni menguraikan permasalahan secara kronologis dengan mengedepankan kekritisian terhadap berbagai data dan informasi yang ditemukan.

BAB II

MENAPAKI JEJAK POLITIK KERUKUNAN DI INDONESIA MASA AWAL



A. Instrumentalisasi Agama oleh Kekuasaan

Sejarah yang menjelaskan pemeluk agama-agama oleh penduduk di berbagai bagian Nusantara sebelum kedatangan orang Eropa, tidaklah banyak. Namun, dari bukti yang ada menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara, cenderung memperlihatkan corak pemerintahan agama, sebagaimana umumnya pola pemerintahan masa itu di mana pun. Dalam corak pemerintahan semacam itu, pemeluk suatu agama oleh raja yang berkuasa biasanya diikuti pemeluk agama oleh rakyat, sehingga pada tingkat tertentu diperlukan seperangkat organisasi pemerintahan yang mengelola masalah keagamaan. Di kerajaan Hindu Kutai di Kalimantan, kasta Brahmana (agamawan) diketahui menempati posisi penting dalam kerajaan. Sementara di kerajaan Sriwijaya, para rajanya bertindak sebagai pelindung agama Budha dan memberikan perhatian khusus pada penyebaran agama

melalui lembaga pendidikan yang mereka dukung. Kerajaan Hindu Majapahit di Jawa juga menempatkan para pemuka agama pada posisi yang tinggi. Raja-raja Majapahit menempatkan diri sejajar dengan para dewata. Untuk mengurus persoalan agama, raja-raja Majapahit dibantu pejabat agama yang dihimpun ke dalam Dharmadhyaksa.

Baik selama berada dalam. pengaruh agama Hindu maupun sesudah penetrasi agama Budha, pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara memiliki tradisi pengelolaan masalah keagamaan tersendiri. Tradisi ini masih terus berlangsung ketika Islam mulai menanamkan pengaruhnya. Sejak kelahirannya, Islam mendorong kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan akan pengaturan tersendiri masalah-masalah keagamaannya. Meskipun administrasi bidang agama pada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara tidak banyak diketahui secara rinci, para raja yang memeluk Islam umumnya menggunakan gelar Sultan dan memiliki kekuasaan yang juga mencakup wilayah agama. Tidak jarang para raja sendiri sebenarnya adalah orang-orang yang telah mendalam ajaran Islam sehingga dalam diri mereka tergabung dua fungsi, yaitu sebagai penguasa sekaligus ahli agama.

Hal ini antara lain tampak pada diri Sunan Giri sehingga penguasa Pajang meminta gelar Sultan kepadanya. Demikian pula penguasa Cirebon, Panembahan Ratu, yang disebut sebagai seorang guru susuhunan yang dipercayai memiliki kekeramatan. Di kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, dan Nuruddin Ar-Ramiri pernah menduduki jabatan Syekh al-Islam, jabatan tinggi kerajaan di bawah Sultan. Posisi sebagaimana diduduki Ar-Ranirri sebagai pembantu dan penasihat utama Sultan juga pernah diemban Syekh Yusuf al-Makassari di kesultanan Banten semasa Sultan Agung Tirtayasa.

Pengaruh para pemuka agama di kerajaan seperti Demak dan Mataram sudah umum. diketahui. Sunan Kudus, salah seorang dari

sembilan wali penyebar agama Islam di Jawa, diketahui sangat dekat dengan Sultan Demak dan mempunyai andil dalam penyerangan terhadap kerajaan Hindu Majapahit. Sunan Giri, wali penyebar Islam yang lain, memiliki kekuasaan luas di Gresik dan pengaruhnya sampai ke Ambon, Lombok dan Makassar dan hannya ditundukkan oleh penguasa Mataram di kemudian hari dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan.

Sebagaimana telah dialami kedua ajaran pendahulunya agama Islam juga dijadikan sumber legitimasi bagi raja-raja beragama Islam yang baru memperoleh kekuasaan atau yang ingin memperluas pengaruh. Ketika Ki Ageng Pamanahan melantik puteranya sebagai penguasa Mataram, ia memberikan gelar *Senopati Ing Alaga Sayidin Panatagama*. Gelar *Sayidin Panatagama* memberikan legitimasi kepadanya sebagai pemimpin kerohanian. Demikian pula Sultan-Sultan Mataram, selanjutnya selalu menambah gelar dengan Susuhunan. Sultan Agung, Raja Mataram terbesar, selain bergelar Prabu Anyakrakusuma, juga bergelar Susuhunan Ing alaga Mataram. Gelar Susuhunan bermakna kerohanian karena pada umumnya digunakan para wali penyebar Islam yang biasanya dipendekkan menjadi Sunan, seperti Sunan Kudus, Sunan Giri, dan seterusnya.

Tradisi pengelolaan masalah keagamaan di tingkat pemerintahan tersebut terus bertahan sejalan dengan timbul tenggelamnya kerajaan-kerajaan Islam, khususnya di Jawa, yakni kerajaan Mataram dan kerajaan-kerajaan penerusnya di Surakarta dan Yogyakarta. Fungsi Sultan Mataram sebagai *Sayidin Panatagama* dilakukan melalui sebuah lembaga yang dipimpin

Seorang Penghulu Agung atau biasa disebut Kanjeng Penghulu. Selain di tingkat pusat, ada pula lembaga agama tingkat kabupaten, Kawedanan, serta di tingkat desa. Dalam situasi satu agama menjadi agama resmi kerajaan, maka yang terjadi adalah kerajaan menjadi semakin taktis menjelma sebagai penjaga agama, juga sebaliknya, kerajaan pun semakin diuntungkan dengan melekatnya agama

dalam kerajaan, karena kerajaan akan selalu memiliki kekuatan kharismatik, yang efektif untuk membungkus kepentingan politik dalam malahirkan loyalitas dari rakyatnya. Agama dalam ruang demikian menjadi instrumental yang efektif melanggengkan kekuasaan.

Untuk mengurus hubungan sosial yang terjadi di masyarakat, pada dasarnya kerajaan tidak begitu peduli, karena bagi kerajaan keragaman rakyat adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, selama keragaman tersebut tidak dijadikan kekuatan untuk melawan raja. Jika perbedaan tersebut digunakan untuk gerakan makar, biasanya raja langsung melakukan tekanan politik berupa pemenjaraan. Jadi, pertimbangan raja memperlakukan agama yang berbeda lebih pada pragmatis belaka, yakni mempertahankan kekuasaan raja.

Kerukunan pada ranah *grass root* dipandang sebagai kewajaran atas prinsip harmoni, tetapi jika agama menjadi entitas melawan kekuasaan, maka represivitas merupakan jawaban atas kegiatan agama apapun. Otoritas raja dipandang sebagai simbol yang tak tergoyahkan dalam monarkhi, sehingga apapun dipersembahkan demi tetap berdirinya raja hingga raja itu terguling oleh kekuatan lain yang menggulingkannya, baik kekuatan internal maupun eksternal.

B. Politik Misionari: Perebutan Ruang Agama Yang Tidak Adil

Pada abad ke17 masehi, gereja Katolik Roma yang memiliki kekuasaan atas pemerintahan Eropa, mendirikan Kementerian Propaganda Agama di Vatikan dengan mendirikan dan mengembangkan agama kristen di dunia. Bersamaan dengan gerakan ini, sekolah propaganda agama asing telah dibangun di Paris dengan pembiayaan dari kementrian tersebut. Berbagai institusi juga telah didirikan di Jerman, Perancis, dan Belgia disertai dengan aktivitas

misionaris yang berpengaruh. Dalam rangka propaganda ini pula, sekolah-sekolah baru turut didirikan untuk memberikan latihan yang lebih baik kepada misionaris. Yang memberikan kesempatan bagi meluasnya kehadiran misionaris Kristen di negara-negara timur adalah masuknya tentara imperialis di kawasan itu.

Aksi penjajahan Portugis dan Spanyol mendapat dukungan Paus Iskandar ke-enam pada abad ke 15 masehi. Paus memberi dukungan kepada pemerintah Spanyol dan Portugal dengan syarat kedua imperialis ini memberi jalan kepada misionaris kristen untuk masuk ke negara jajahan dan mendukung segala upaya dan aktivitas delegasi misionaris kristen dalam menyampaikan ajaran mereka kepada rakyat di sana. Kardinal Ximenes pada tahun 1516, dalam rangka perluasan infiltrasi dan pengokohan gerakan kristen, memberi perintah supaya setiap serangan ke India Timur dan Barat haruslah diiringi oleh misionaris Kristen

Invasi dua negara imperialis Portugis dan Spanyol ini, kemudian diikuti pula oleh negara Eropa yang lain seperti Belanda, Perancis, Inggris, dan Rusia. Mereka pun turut melaksanakan kebijakan mengembangkan agama Kristen dan menggunakannya sebagai sebuah faktor pendukung bagi penguasaan dan penaklukan daerah jajahan. Selepas itu, agama Protestan juga turut melakukan aktivitas mereka di dunia timur dan memperluas agama mereka di negara-negara jajahan. Para misionaris agama Protestan yang mendapat dukungan eropa dan berbagai perusahaan mereka di timur ini memulai aktivitas mereka dengan mengkristenkan penduduk daerah jajahan.

Penyatuan kekuasaan politik dan agama pada kerajaan di Jawa, khususnya Mataram, bukan hanya terjadi di tingkat pusat melainkan juga di tingkat lebih bawah. Kedatangan orang Eropa tidak dengan sendirinya. mengubah pola hubungan kekuasaan politik dan agama, karena pada awalnya kedatangan mereka lebih menitikberatkan pada perdagangan. Salah satu institusi warisan

masa lalu yang justru tumbuh di masa penjajahan adalah yang apa dikenal dengan kepenghuluan. Penghulu adalah seorang ahli agama Islam yang diangkat oleh pemerintah untuk secara terbatas melaksanakan ketentuan agama di tengah masyarakat. Jabatan Penghulu memang mengalami proses penertiban administratif selama kurun waktu penjajahan. Sebelumnya tidak ada pembakuan. Meskipun Islam tidak mengenal hierarki keulamaan, jabatan penghulu, khususnya di Jawa, mengenal tingkatan yang mengikuti penganturan kewilayahan pemerintah Hindia Belanda. Penghulu Kepala, misalnya, ada di tingkat Kabupaten, di bawahnya ada Penghulu Distrik dan di tingkat lebih bawah lagi ada Penghulu Onderdistrik.

Selain memiliki wewenang mengawasi pemikahan, perceraian dan pembagian warisan menurut hukum Islam, penghulu juga mempunyai kewenangan di bidang peradilan. Seorang penghulu menangani berbagai persoalan masyarakat yang diputuskan berdasarkan hukum Islam dan untuk itu ia juga menjabat ketua pengadilan agama.

Pada dasarnya politik Hindia Belanda adalah sekuler dengan alasan untuk menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agamanya masing-masing. Namun karena sebagian besar rakyat beragama Islam sedangkan ajaran Islam mengandung unsure-unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kenegaraan, maka pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengatur dan mengawasi bidang agama demi menjaga keamanan dan ketertiban serta kepentingan rakyat, meskipun dalam kenyataannya kebijaksanaan Kolonial Belanda disesuaikan dengan kepentingan mereka sebagai negara kolonial. Demikianlah secara singkat politik keagamaan yang dirumuskan Snouck Hurgronje.

Kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola masalah agama secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Pemerintah menjalin kemerdekaan setiap orang untuk

memeluk agama menurut keyakinannya masing-masing dan ibadah diselenggarakan di rumah-rumah sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum. Ibadah yang diselenggarakan di luar rumah harus mendapat izin. (2) Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi dan gereja, walaupun ada keharusan izin bagi guru agama, pendeta dan petugas misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu. (3) Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan pengawasannya kepada raja, bupati, dan kepala bumiputra lainnya. (4) Pelajaran agama tidak diberikan pada sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah otonom, tetapi dalam penjabarannya diatur dalam ordonantie 1905, yang kemudian diubah dengan Guru Ordonantie yang mengharuskan guru-guru agama meminta izin atau memberitahu dalam memberikan pelajaran agama.

Kolonialisme di Indonesia ternyata tidak hanya membawa dampak terhadap perekonomian pribumi, tetapi juga terhadap pola keberagamaannya. Pada mulanya memang kolonial tidak begitu memperdulikan kehidupan beragama pribumi, namun ketika kolonial banyak mendapat perlawanan dari pribumi yang ternyata dimotori oleh para pemuka agama, maka tak pelak lagi, perhatian kolonial terhadap kehidupan beragama semakin menjadi.

Diantara tokoh kolonial (Belanda) yang memiliki peran besar terhadap sejarah imperialisme di negeri ini adalah Christian Snouck Hurgronje. Tokoh politik Belanda ini merupakan politisi kolonial yang dalam pemikiran politiknya untuk menguasai masyarakat nusantara lebih banyak mempresentasikan strategi perang dengan pendekatan keyakinan (agama). Menurut Snouck, untuk menekan perlawanan penduduk jajahan tidak perlu secara terus-menerus dengan senjata. Dialah tokoh yang merekomendasikan pemetaan politik kepada Pemerintah Belanda untuk meredam perlawanan masyarakat. Baginya, Pemerintah Belanda harus memisahkan

(pemecahan) masyarakat dari gerakan-gerakan perlawanan yang mengusung spirit Islam Politik. Dalam pemikiran politiknya, Snouck tidak melihat bahaya apa pun dari perlawanan masyarakat yang terjajah, selain kefanatikan beragama (Islam). Karena itu, dalam penelitian awalnya terhadap perang di Aceh 1891,

Snouck sangat berkeyakinan gerakan-gerakan perlawanan paling berbahaya dan mengancam kekuasaan kolonial adalah umat Islam (nusantara) yang fanatik. Seperti misal, pada tahun 1849 Asisten Residen Mandailing Ankola berusaha memecah belah masyarakat Batak dalam kotak-kotak agama, sesuai dengan misi *Divide et Impera* dengan menerapkan gagasan untuk memisahkan orang-orang Batak yang sudah Islam dengan mengkristenkan orang-orang Batak pebelegu. A.P. Godon yang sudah pensiun sejak tahun 1857 menyatakan dalam suatu diskusi: "Dalam laporan umum tahun 1849 selaku Asisten Residen Mandailing Angkola, saya menyatakan bahwa guru agama Kristen pada saat itu masih bisa bekerja dengan baik. Saya sarankan agar antara suku Melayu-Batak Islam dan Batak harus dipisahkan dengan jelas. Metode yang paling baik adalah menyeru orang-orang Batak pebelegu agar masuk Kristen."

Pada tahun 1889, Gubernur Jenderal pemerintah penjajah Belanda mengeluarkan surat keputusan rahasia yang menentukan antara lain bahwa di daerah yang penduduknya tidak memeluk agama Islam, tidak boleh diangkat kepala desa atau pegawai muslim. Peraturan atau kebiasaan yang mendukung Islam pun tidak dibenarkan¹.

Dua orang residen Tapanuli bernama Westenberg dan Barth kemudian membuktikan bahwa pemerintah kolonial tidak senang melihat perubahan kepada Islam, bahkan Westenberg memberi contoh memecat kepala desa yang masuk Islam. Pemerintah penjajahan Belanda menyetujui hal itu karena sesuai dengan jiwa

1 Besluit Rahasia Gubernur Jenderal No. 1,3 Juni 1889

beslit rahasia 1889 tersebut. (M. C. Jongeling, *Het Zendingconsulaat in Nederlands Indie, 1906-1942*,

Syeikh H Ibrahim melakukan perlawanan dan melakukan aksi politik dengan menayakannya kepada Dr. Hazeu, Adviseur voor Islandsche zaken. Alih-alih mendapat tanggapan, laporannya baru resmi diterima enam tahun kemudian, yaitu pada tahun 1909. Dr. Hazeu berusaha melakukan himbauan kepada kekuatan penjajah yang ditolak mentah-mentah oleh Residen Westenberg dengan penegasan sekali lagi bahwa pegawainya telah melaksanakan kebijakan yang digariskan pada tahun 1889.

Sikap Residen Westenberg kemudian dipertegas oleh rezim penjajah dengan pernyataan Frijling, Penasehat Urusan Luar Jawa, untuk menerapkan kebijakan rahasia tersebut apa adanya. Di lain pihak pada tahun 1903, Janji Angkola Pabea Sitompul, saudara Syeikh Ibrahim Sitompul, berusaha keras untuk mengembalikan kehormatan ayahnya. Namun kali ini tanggapan keras datang dari pihak penjajah. Dia terbentur tembok dengan adanya surat keputusan dari pimpinan tertinggi penjajah di Indonesia yakni keputusan Gubernur Jenderal Penjajah tanggal 5 Juni 1919 yang tidak mengabulkan pengaduan tersebut.²

Dalam laporan tahunannya 1906/1907, Konsul Zending mengakui bahwa pemerintah penjajahan Belanda sering mendukung aktivitas Kristen; bahkan kadang-kadang pemerintah meminta kepada zending agar mereka membuka cabangnya di suatu tempat, seperti di Simalungun tahun 1904 dan Pakpaklanden tahun 1906, dua daerah yang sudah banyak menganut agama Islam selain animisme.

Gubernur Jenderal kemudian memerintahkan agar pegawai pemerintah penjajah Belanda, kapanpun dan dimanapun tidak

2 Lihat; "Christelijke Zending en Islam in Indonesia", dalam Koleksi GAJ. Hazeu, No. 42, KITLV, Leiden. Bandingkan dengan Lance Castles, *The Political Life of Sumatran Residency: Tapanuli 1915-1940*, disertasi, Yale University, 1972, Hal. 91-93

memihak penduduk muslim; sebaliknya secara moral harus membantu dan mendukung zending. Sementara itu, peraturan rahasia itu ditambah lagi dengan satu artikel yang berbunyi; "Orang Kristen (yakni pribumi sebagai objek yang dijajah) tidak harus melakukan kerja paksa pada hari Minggu."

C. Politik Penjinakan: Membungkam Agama demi Kekuasaan

Politik Penjinakan Politik Snouck yang memfokuskan pada pemisahan praktik keagamaan umat Islam sangat berpengaruh terhadap mentalitas keyakinan umat Islam kemudian. Materi pengkategorian dari urusan ubudiyah (ibadah), muamalat (hubungan sosial), hingga gerakan Islam politik menjadi strategi baru pemerintah kolonial menguasai negeri ini. Snouck yang pernah mengenyam pendidikan di Mekkah, berkeyakinan bahwa persoalan ubudiyah dan muamalat umat Islam sangat sensitif untuk ditekan. Karena itu, dia pun menyarankan kepada Pemerintah Belanda untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas umat Islam yang mengarah pada kegiatan politik. Namun sebaliknya, membebaskan umat dalam melaksanakan kegiatan ubudiyah dan muamalat.

Untuk menyukseskan proyeknya, Snouck pun merumuskan strategi perang, yang dalam sejarah disebut-sebut dengan gaya politik "belah bamboo", yakni, siasat pemisahan (pemecahan) aktivitas umat Islam dari urusan ibadah, muamalat, dan politik. Dalam upaya meredam segala bentuk perlawanan umat, Snouck kemudian menyarankan pemerintah kolonial merekrut umat Islam (tokoh, ulama, masyarakat) dalam struktur kekuasaan Belanda. Disinilah awal penjinakan dan pembungkaman daya kritis umat Islam dibangun terhadap kolonialisme. Snouck tidak menginginkan umat Islam mengadopsi ajaran agama sebagai kritik sosial.

Selain melakukan pemisahan urusan agama dan politik. Snouck juga meminggirkan umat Islam dari keingintahuan misi politik kolonial, termasuk proyek penjajahan di nusantara. Puncaknya, Pemerintah Belanda melakukan pendisiplinan terhadap aktivitas dan pemahaman agama umat. Kebebasan agama diatur, diadministrasi, dan dikontrol. Demikian halnya, Produk hukum Islam dipilah, diseleksi dan disesuaikan dengan selera penguasa. Islam masa kolonial adalah Islam yang diciptakan untuk “sujud” dan loyal terhadap kekuasaan Pemerintah Belanda. Watak Agama Kolonial Pengawasan, pendisiplinan, pengontrolan, dan pencatatan terhadap aktivitas ibadah umat Islam adalah bagian watak politik agama kolonial.

Kehadiran *Kantoor Voor Inlandsche zaken* merupakan bukti keseriusan Belanda untuk mengamati Islam sebagai kekuatan sosial masyarakat yang patut diperhatikan. Banyak alasan mengapa Belanda berupaya untuk memahami Islam, yakni :

1. Islam merupakan gerakan transnasional yang territorial nya sulit dibatasi sehingga pergerakan Islam di suatu Negara dapat mempengaruhi keberadaan Islam di Indonesia.
2. lahirnya Pan Islamisme yang dikembangkan oleh AlAfghani menjadi genderang kekuatan Islam untuk bersatu secara internasional, semangat pembebasan yang didengungkan oleh Al Afghani menjadi daya yang nantinya sulit dikendalikan apabila sudah sampai ke Indonesia
3. gerakan kaum Padri atau Tarekat menjadi pendorong lahirnya jiwa-jiwa yang ingin lepas dari keterkungkungan colonial, sehingga Belanda memandang perlu mengamati pola pendidikan Islam di kalangan pesantren.

Kalau urusan agama di tingkat pusat saat ini ditangani satu departemen, di masa penjajahan Belanda urusan tersebut ditangani beberapa instansi. Misalnya, urusan peribadatan umum,

terutama bagi golongan Nasrani, menjadi wewenang Departemen Pengajaran dan Ibadah. Urusan pengangkatan pejabat agama pribumi, urusan perkawinan, kemasjidan, haji dan lain-lain menjadi urusan Departemen Dalam Negeri melalui para Residen dan Kepala Pemerintahan Swapraja lain. Soal politik dan gerakan agama ditangani *Kantoor der Adviseur voor Inlandsche en Mohammedansche Zaken*, sedangkan soal Mahkamah Islam Tinggi menjadi wewenang Departemen Kehakiman.

Adapun pengurusan bidang agama di daerah, para raja, bupati dan kepala. pribumi lainnya melakukan tugasnya menurut tata cara dan kebiasaan yang berlaku, yaitu tata aturan masyarakat serta tata pemerintahan pribumi sejak pra Kolonial di mana bidang agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan. Sampai akhir masa penjajahan Belanda susunan dan tata pemerintahan di daerah di bawah tingkat keresidenan pada dasarnya masih merupakan bentuk-bentuk pribumi.

Masuk dan menyebarnya agama Kristen (Katolik maupun Protestan) di Indonesia terjadi serentak dengan masuknya kolonialisme Barat. Portugis maupun Belanda sama-sama datang dengan membawa misi Kristen. Di dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*, Jilid IV, tentang Zending, hlm. 829 disebutkan, “Mengenai sikapnya terhadap perkara agama di kepulauan ini (Nusantara), orang Belanda berdasarkan contoh sama dengan orang Portugis. Di mana pun dia tinggal dan didapatinya telah ada pribumi yang Kristen, keadaan mereka itu tidak disia-siakan. Sebaliknya, di mana pun didapatinya belum ada, dia berusaha menanam Kristen di tengah-tengah mereka.”

Jadi, selain mengeksploitasi kekayaan alam, kolonialisme Barat juga berusaha menghancurkan Islam yang dipeluk oleh pribumi. Pribumi yang masuk Kristen tentu lebih setia kepada pemerintah kolonial, yang sama-sama beragama Kristen, dibanding pribumi yang beragama Islam. Tulisan singkat berikut akan memaparkan

hubungan erat kolonialisme dan misi Kristen dalam sejarah Indonesia.

Beberapa sarjana Kristen berpendapat bahwa pengkabarannya Injil ke beberapa tempat di Indonesia ini sudah dimulai pada zaman Patristik, pada masa sebelum kedatangan Islam. Diduga bahwa orang-orang Kristen Nestorian dari Mesir dan Persia sempat singgah di beberapa tempat di Indonesia dalam perjalanan mereka ke Tiongkok pada abad V. Peristiwa ini terjadi pada masa menjelang timbulnya Kerajaan Sriwijaya. Namun demikian, nasib agama Kristen untuk jangka waktu yang lama tidak begitu jelas setelah periode ini dan tidak meninggalkan bekas. Tidak ada data sejarah yang dapat menjelaskan perkembangan Kristen Nestorian itu.

Baru pada awal abad XVI agama Kristen mulai berkembang dan menyebar dengan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Portugis datang dengan semangat Perang Salib dan memandang semua penganut Islam adalah bangsa Moor dan musuh yang harus diperangi. Oleh karena itulah ketika Alfonso d'Albuquerque berhasil menduduki Malaka pada 1511, dia berpidato,

“Tugas besar yang harus kita abdikan kepada Tuhan kita dalam mengusir orang-orang Moor dari negara ini dan memadamkan api Sekte Muhammad sehingga ia tidak muncul lagi sesudah ini... Saya yakin, jika kita berhasil merebut jalur perdagangan Malaka ini dari tangan mereka (orang-orang Moor), Kairo dan Mekkah akan hancur total dan Venesia tidak akan menerima rempah-rempah kecuali para pedagangnya pergi dan membelinya di Portugis.”³

Dalam ekspansinya, Portugis juga mendapatkan mandat dari Paus untuk menyebarkan agama Kristen kepada penduduk yang mereka jumpai. Ketika Paus Alexander VI pada 4 Mei 1493 membagi dunia baru antara Portugis dan Spanyol, salah satu

³ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat; Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 372.

syaratnya adalah raja atau negara harus memajukan misi Katolik Romawi di daerah-daerah yang telah diserahkan kepada mereka itu. Maka dari itu, kedatangan Portugis ke Nusantara –yang waktu itu penduduknya telah banyak yang masuk Islam– tersebut dengan diikuti oleh sejumlah pendeta dan misionaris. Seorang misionaris, Franciscus Xaverius, selama lima belas bulan bekerja di Maluku berhasil membaptis beribu-ribu orang. Selain Maluku, misi Katolik juga segera menyebar di daerah-daerah yang ditaklukkan Portugis, seperti Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

Sejak 1600, Belanda dan Inggris berhasil merebut kuasa di laut dari Portugis dan Spanyol. Dua tahun berikutnya, didirikanlah *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), sebuah organisasi dagang yang dibentuk untuk mencegah persaingan antarkelompok dagang Belanda. Selain mengejar keuntungan ekonomis dan ikut membangun imperium Belanda, VOC juga mendapat mandat dari Gereja Protestan Belanda (*Gereformeerde Kerk*), yang waktu itu berstatus sebagai gereja negara, untuk menyebarkan iman Kristen, sesuai dengan isi pasal 36 Pengakuan Iman Belanda tahun 1561, yang antara lain berbunyi, “Juga jabatan itu (maksudnya tugas pemerintah) meliputi: mempertahankan pelayanan Gereja yang kudus, memberantas dan memusnahkan seluruh penyembahan berhala dan agama palsu, menjatuhkan kerajaan Anti-Kristus, dan berikhtiar supaya kerajaan Yesus Kristus berkembang.

Seperti halnya Portugis, kedatangan VOC ke Nusantara juga disertai oleh pendeta-pendeta sebagai pegawai VOC. Mereka bertugas bukan saja menyelenggarakan kebutuhan ruhani para pedagang, pegawai dan pasukan Belanda di pulau-pulau tempat VOC telah membuka kantornya, tetapi juga mengusahakan pertaubatan orang kafir dan pendidikan anak-anak mereka. Yang dimaksud dengan orang kafir di sini tentu saja semua orang di luar penganut Kristen Protestan, termasuk orang Islam.

Akan tetapi, selama 200 tahun menguasai beberapa wilayah di Nusantara, pertumbuhan agama Kristen pada zaman VOC mempunyai hasil minim. VOC hanya memprioritaskan daerah-daerah bekas koloni Portugis dan Spanyol, seperti Maluku, Minahasa dan lainnya. Kegiatan para pendeta terbatas pada melayani orang-orang Eropa dan orang-orang pribumi yang telah masuk Kristen. Orang-orang Maluku yang sudah beragama Katolik dipaksa untuk berpindah ke Protestan aliran Calvinisme. VOC lebih memedulikan keamanan keuntungan komersial yang diraih daripada mengonversikan orang-orang Indonesia. Upaya-upaya konversi terhadap pribumi, terutama di Jawa, dihindari karena mereka takut akan pengaruh negatifnya terhadap perolehan keuntungan ekonomi.

Setelah VOC runtuh pada 1799, Indonesia tidak lagi milik suatu badan perdagangan, tetapi menjadi wilayah jajahan negara Belanda. Sejak 1795, Belanda diduduki oleh tentara Perancis. Hal ini mendorong pemerintah Inggris menginvasi Jawa dan mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintah Belanda. Masa peralihan sementara ini berlangsung dari 1811 hingga 1816. Di bawah Thomas Stamford Raffles, Gubernur Inggris yang ditunjuk untuk memerintah di Indonesia, agama Kristen—khususnya Kristen Protestan—mulai bisa menghirup udara segar. Orang-orang Kristen Inggris memainkan peran menonjol dalam kerja-kerja misionaris, dan Masyarakat Misionaris London (*London Missionary Society*) kemudian mendirikan Gereja Baptis Inggris pertama di Batavia

Dengan berakhirnya pelbagai perang yang disulut Napoleon, Hindia Belanda kembali jatuh ke tangan pemerintah Belanda. Sejak saat itu dan selanjutnya, agama Kristen mulai mengakar di tanah Indonesia. Berbagai lembaga misionaris pun dibentuk dan berlomba-lomba mengembangkan agama Kristen di kalangan pribumi. Di antara lembaga misionaris tersebut, misalnya, adalah sebagai berikut. Pada 1797 di Belanda dibentuk *Nederlandsche*

Zending Genootschap (NZG) yang pada 1848 mengirim Jallesma ke Jawa. Tahun 1847, Gereja Mennonite di Belanda mendirikan *Doopsgezinde Vereeniging ter bevordering der Evangelie-verbreiding in de Nederlandsche bezittingen* (DZV) yang mengirim Janz ke Jawa empat tahun kemudian. Tahun 1851 di Batavia didirikan *Het Genootschap voor In-en Uitwendige Zending* oleh orang-orang non-Gereja yang terimbau oleh gerakan Kristenisasi, seperti Esser, residen di Timor, dan F.L. Anthing, wakil ketua Mahkamah Agung di Batavia. Tahun 1855 dibentuk *Het Java Comite* di negeri Belanda. Tahun 1858 berdiri *Nederlandsche Zending's Vereeniging* yang memilih daerah berbahasa Sunda sebagai lokasi kegiatan. Tahun 1859 terbentuk pula *De Utrechtsche Zending's Vereeniging*. Juga tahun 1859 berdiri *De Nederlandsche Gereformeerde Zending's Vereeniging* (NGZV) yang beroperasi di Jawa Tengah kecuali beberapa daerah di sekitar Gunung Muria dan Salatiga. Kedua daerah ini digarap oleh lembaga misionaris lainnya.

Oleh karena sangat pesatnya perkembangan Kristen pada abad XIX, sampai-sampai Sierk Coolsma dalam bukunya *Dezendingseeuwvoor Nederlandsche Oost-Indie* menjuluki seluruh abad XIX sebagai periode misioner agung dan jaya. Julukan ini memang oleh Karel Steenbrink dikatakan tidak benar. Sebab, baru setelah tahun 1850 terjadi kebangkitan religius dan misioner di Belanda, dan dampaknya di daerah koloni baru menjadi jelas tahun 1870-an ketika jumlah misionaris meningkat. Namun demikian, dibandingkan abad-abad sebelumnya, penyebaran agama Kristen mengalami peningkatan yang cukup berarti pada abad XIX. Memasuki abad XX, peningkatan tersebut semakin tajam dengan mendapatkan dukungan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda banyak memberikan dukungan terhadap upaya penyebaran Kristen, baik berupa kebijakan politik maupun finansial. Pada 1810, Raja William I dari Belanda mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa para misionaris akan

diutus ke Indonesia oleh pemerintah. Pada 1835 dan 1840, dekrit lain dikeluarkan yang menyatakan bahwa administrasi gereja di Hindia Belanda ditempatkan di bawah naungan Gubernur Jenderal pemerintah kolonial di Indonesia. Pada 1854, sebuah dekrit lain dikeluarkan, yang mencerminkan bahwa kedua badan di atas saling berkaitan. Dekrit itu menyebutkan bahwa administrasi gereja antara lain berfungsi mempertahankan doktrin agama Kristen. Karena itu, sejumlah fasilitas diberikan kepada para misionaris, termasuk subsidi dan sumbangan finansial serta keringanan pajak.

Agama Katolik yang pada zaman VOC dilarang mulai berkembang kembali sejak 1808. Pemerintah kolonial memberikan gaji kepada para imam Katolik. Dalam paruh pertama abad XIX, pemerintah menyetujui maksimal 7 orang imam yang digaji pemerintah berkarya di Hindia Belanda. Jumlah ini terus mengalami peningkatan. Gaji tersebut menjadi pijakan finansial untuk hampir semua kegiatan misioner sampai dengan tahun 1890-an, ketika jumlah para imam melampaui jatah imam yang digaji pemerintah dan lebih banyak pendapatan berasal dari dukungan misioner di Belanda⁴.

Sampai dengan tahun 1870 sebagian besar gereja dibangun dengan bantuan yang sangat banyak dari pemerintah. Paroki-paroki di Batavia, Surabaya dan Padang menerima subsidi pemerintah untuk membangun dan memugar gereja-gereja mereka. Subsidi terakhir dan terbesar (hampir sebesar f 80.000) diberikan untuk Semarang.

Seringkali pemerintah Hindia Belanda menyatakan bersikap netral terhadap agama. Akan tetapi dalam kenyataannya, pernyataan ini berbeda antara teori dan praktek. Dalam hubungan antara Islam dan Kristen, pemerintah melakukan diskriminasi terhadap pihak Islam. Para fungsionaris agama Islam diperintahkan dengan tegas

agar mereka tidak boleh campur tangan dalam hal politik. Para haji diamati dengan saksama, dan beberapa guru tarekat diasingkan hanya karena alasan sederhana, semisal terlalu berhasil dan mengumpulkan terlalu banyak murid dan pengikut. Para pejabat agama Protestan dan Katolik Eropa mendapat gaji lumayan besar (f 600-800 per bulan, kontras dengan f 100-150 untuk seorang penghulu atau kepala masjid kabupaten). Pemerintah kolonial membayar banyak ongkos perjalanan, termasuk tiket kapal kelas satu dari Eropa ke Indonesia. Di samping itu, banyak pembayaran insidental untuk agama Kristen dibebankan pada anggaran kolonial, khususnya biaya pembangunan gereja-gereja. Jika pada abad XIX strategi penyebaran agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, masih diarahkan pada dakwah langsung, maka pada abad XX strategi ini diganti dengan mendirikan sekolah dan rumah sakit, rumah yatim piatu dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Melalui alat dakwah yang tidak langsung ini akhirnya diharapkan diperoleh penganut yang lebih besar. Strategi ini disebut *pre-evangelisation*: suatu usaha yang perlu diadakan untuk mempersiapkan daerah supaya siap menerima pesan dan intisari dari agama Kristen.

Pemerintah kolonial banyak memberikan subsidi pada sekolah, rumah sakit, klinik, dan kegiatan sosial yang dilakukan para misionaris dan zendeling karena dianggap sejalan dengan politik etis yang berusaha untuk “memperadabkan” pribumi. Politik etis sendiri sejatinya adalah kerangka kerja yang di atasnya konsolidasi agama Kristen di Indonesia dimapankan. Sementara itu, subsidi untuk sekolah-sekolah Islam sangat sedikit, belum lagi dikeluarkannya ordonansi guru; sebuah peraturan yang membatasi dan mempersulit sekolah-sekolah Islam. Pada tahun 1919, di Pulau Jawa terdapat 331 sekolah yang mendapatkan subsidi dari pemerintah kolonial. Dari jumlah itu, 155 adalah sekolah Kristen, sisanya sekolah Jawa

4 Karel Steenbrink, *Orang-Orang Katolik di Indonesia 1808-1942; Suatu Pemulihan Bersahaja 1808-1903*, Jilid I, (Maumere: Ledalero, 2006),

maupun priyayi, baru kemudian sekolah Islam, seperti sekolah yang didirikan oleh Sarekat Islam dan Muhammadiyah⁵

Dalam memberikan anggaran tahunan untuk Islam maupun untuk Kristen (Protestan dan Katolik), nampak sekali diskriminasi pemerintah kolonial. Pihak Kristen yang jumlahnya minoritas itu mendapatkan anggaran tahunan yang jauh lebih besar daripada pihak Islam yang mayoritas. Padahal, anggaran tersebut didapatkan juga dari pajak yang dibayarkan oleh penduduk yang mayoritas beragama Islam. Kita bisa melihat diskriminasi tersebut dalam angka-angka di bawah ini dari anggaran selama 20 tahun. Angka-angka ini telah dibulatkan ke atas supaya genap paling sedikit 100 rupiah⁶.

Tahun	Untuk Protestan dan Katolik	Untuk Islam
1920	f 1.010.100	f 5.900
1921	f 1.010.100	f 5.900
1922	f 1.077.100	f 5.900
1923	f 1.095.100	f 5.900
1924	f 1.116.100	f 5.900
1925	f 1.115.000	f 4.000
1926	f 1.108.000	f 4.000
1927	f 1.417.000	f 4.000
1928	f 1.748.000	f 4.000
1929	f 1.728.000	f 4.000
1930	f 1.641.000	f 4.000

5 Koloniaal Verslag 1920, *Overzicht van de in 1919 toegekende subsidiën ten behoeve van particuliere inlandsche scholen*

6 A. Moechlis, Gereja dan Kerajaan III dalam majalah *Pandji Islam* no 1, 8 Januari 1940, hlm. 7687

1931	f 1.612.000	f 4.000
1932	f 1.862.300	f 4.700
1933	f 1.601.300	f 7.700
1934	f 1.511.500	f 7.500
1935	f 1.176.500	f 7.500
1936	f 1.007.500	f 7.500
1937	f 1.004.500	f 7.500
1938	f 1.022.500	f 7.500
1939	f 1.197.500	f 7.500
1940	f 1.304.400	f 4.600

Kesimpulannya, kolonialisme dan misi Kristen mempunyai hubungan erat. Agama Kristen datang dan menyebar di negeri ini seiring dengan datang dan menyebarnya kolonialisme Barat. Dukungan pemerintah kolonial terhadap misi Kristen juga merupakan fakta keras (*hard fact*) yang tak terbantahkan. Walaupun dalam beberapa kasus pemerintah membatasi dan melarang kegiatan misi, hal itu bukan berarti mereka memusuhi cita-cita agama Kristen.

Pemerintah melakukan itu untuk mengatur serta menjaga keamanan dan ketertiban. Pada masa pendudukan Jepang, aturan-aturan yang berhubungan dengan urusan keagamaan pada umumnya tidak banyak mengalami perubahan, selain penghapusan *Kantoor der Adviseur voor Inlandsche en Mohammedansche Zaken*. Sebagai gantinya Pemerintah Balatentara Jepang mendirikan *Shumubu* (Kantor Urusan Agama) yang menjadi bagian dari *Gunsaikanbu* (Gubernur), sedangkan di daerah-daerah didirikan

Shumuka (Kantor Agama Daerah) sebagai bagian dari Pemerintah Karesidenan (Shu).

Pemerintah pendudukan Jepang mula-mula bermaksud menjadikan Shumubu sebagai pengganti Adviseur voor Inlandsche en Mokammedansche Zaken, dengan tugas (1) memberikan nasehat-nasehat dalam soal Islam, dan (2) menjalankan penyelidikan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan politik pergerakan-pergerakan Islam. Dalam perkembangannya, lembaga ini tidak dapat sepenuhnya melaksanakan tugas tersebut karena politik dan perkembangan Perang Dunia II tidak menguntungkan Jepang, sehingga, bala tentara Jepang membutuhkan bantuan dari bangsa Indonesia dalam berperang menghadapi Sekutu.

Di masa pendudukan Jepang yang relatif singkat ini sejumlah tokoh agama pribumi mendapat kesempatan menduduki jabatan di Shumubu dan Shumuka, seperti Dr Husen Djajadiningrat dan K.H. Hasyim Asy'ari. Keduanya pernah menjadi kepala Shumubu. Dr. Abdul Karim. Amrullah, K.H. Abdul Kahar Muzakkir dan K.H. Mas Mansur sebagai penasehat. Ulama terkemuka yang pernah duduk di Shumuka, antara lain, adalah K.H. Abu Dardiri sebagai kepala Shumuka Karesidenan Banyumas.

Kalau pada masa penjajahan Belanda urusan agama ditangani berbagai instansi atau kementerian, pada masa kemerdekaan masalah-masalah agama secara resmi diurus satu lembaga yaitu Departemen Agama. Keberadaan Departemen Agama dalam struktur pemerintah Republik Indonesia melalui proses panjang. Sebagai bagian dari pemerintah negara Republik Indonesia ; Departemen Agama (awalnya bernama Kementerian Agama) didirikan pada 3 Januari 1946. Dasar hukum pendirian ini adalah Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor I/SD tertanggal 3 Januari 1946.

Apabila pada zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang masalah-masalah Agama, terutama Islam, menjadi bagian

dari pemerintahan penjajah, maka wajar dan dapat dipahami jika umat Islam pada masa kemerdekaan menuntut adanya lembaga yang secara khusus menangani masalah-masalah agama dalam bentuk Kementerian Agama.

Mohammad Yamin adalah orang yang mula-mula mengusulkan dalam salah satu sidang BPUPKI agar pemerintah Republik Indonesia, di samping mempunyai kementerian pada umumnya, seperti luar negeri, dalam negeri, keuangan, dan sebagainya, membentuk juga beberapa kementerian negara yang khusus. Salah satu kementerian yang diusulkannya ialah Kementerian Islamiyah, yang, katanya, memberi jaminan kepada umat Islam (masjid, langgar, surau, wakaf) yang di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan artinya dengan kesungguhan hati. Tetapi meskipun beberapa usulnya tentang susunan negara bisa diterima dan menjadi bagian dan UUD 1945, usulnya tentang ini tidak begitu mendapat sambutan. Mungkin karena ketika ia mengajukan usul ini Jakarta Charter atau Piagam Jakarta dengan tujuh kata bertuah yang merupakan kompromi antara golongan Islam dan kebangsaan telah tercapai. Bukankah ucapan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya telah mencakup semuanya? Hanya saja, setelah Proklamasi Kemerdekaan telah diucapkan dan konstitusi harus disyahkan dalam rapat yang diadakan pada tanggal 18 Agustus, atas usul Bung Hatta, yang didukung oleh beberapa tokoh Islam, PPKI mengganti tujuh kata bertuah itu, dengan Ketuhanan yang Maha Esa.

Ketika Kabinet Presidential dibentuk di awal bulan September 1945, jabatan Menteri Agama belum diadakan. Demikian halnya, di bulan Nopember, ketika kabinet Presidential digantikan oleh kabinet parlementer, di bawah Perdana Menteri Sjahrir. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 11 Nopember 1946 oleh K.H. Abudardiri, K.H. Saleh

Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro, yang semuanya merupakan anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas. Usulan ini mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota KNIP untuk kemudian memperoleh persetujuan BP-KNIP.

Kelihatannya, usulan tersebut kembali dikemukakan dalam sidang pleno BP-KNIP tanggal 25-28 Nopember 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain; Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri.

Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama. Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam, dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama.

Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah; Ia merupakan kelanjutan dari instansi

yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari *Het Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda)⁷. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.

Terlepas dari masalah pengaitan eksistensi Kementerian Agama dengan kelembagaan semacamnya yang pernah ada di masa sebelumnya, beberapa pengamat berargumen bahwa pembentukkan Kementerian Agama merupakan bagian dari strategi Sjahrir untuk mendapatkan dukungan bagi kabinetnya dari kaum Muslimin. Rosihan Anwar, tokoh sosialis Muslim, misalnya, menyatakan, pandangan ini berdasarkan pada pengakuan Sjahrir bahwa kaum Muslimin merupakan mayoritas penduduk Indonesia, yang secara alamiah wajar memerlukan Kementerian khusus untuk mengelola masalah-masalah keagamaan mereka.

Pada pihak lain, sejumlah pemimpin Indonesia, terutama dari kalangan non-Muslim dan nasionalis, memandang Kementerian Agama merupakan konsesi yang terlalu besar dari Republik yang baru berdiri kepada kaum Muslimin. Mereka khawatir, bahwa Kementerian akan didominasi pejabat-pejabat Muslim dan, dengan demikian, akan lebih memprioritaskan urusan-urusan Islam daripada urusan agama-agama lainnya yang ada di Indonesia. Lebih jauh lagi, di antara mereka ada yang menuduh bahwa Kementerian Agama merupakan langkah pertama kaum Muslimin untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia, setelah mereka gagal dalam sidang BPUPKI untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara.

⁷ Aqib Suminto, 1986, *Poliitk Islam Hindia Belanda*, LP3ES, Jakarta

D. Politik Belah Bambu: Membelah dengan Menginjak

Syafii Maarif⁸ menegaskan bahwa Pemerintah Orde Lama hingga Orde Baru menerapkan politik Belah Bambu, yakni mengangkat Islam tetapi sebenarnya memecahkan Islam ke dalam konflik yang berkepanjangan. Kuatnya dominasi Pemerintah terhadap penjinakan kekuatan Masyumi, NU dan partai Islam lainnya, menyebabkan Pemerintah saat itu memerlukan kekuatan untuk menekan tetapi tidak dapat berlutut untuk menahannya tetap ada.

Menurut Ahmad Syafii Maarif, dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, secara sosiologis kita dihadapkan pada dua fenomena yang berbeda dan bahkan bertentangan mengenai hubungan agama dan politik. Pertama, masyarakat yang mendukung partai dan organisasi yang berlabel Islam, mereka beranggapan kekuasaan politik sebagai kendaraan merealisasikan pesan-pesan wahyu. Kedua, kelompok muslim yang berpendapat bahwa kegiatan politik sebagai kegiatan keduniawian, sedangkan agama merupakan persoalan pribadi. Kedua pendekatan tersebut melahirkan pandangan yang berbeda pertama sebagai sekuler dan kedua melahirkan skripturalis atau fundamentalis. Benturan-benturan antara kedua pemikiran tersebut akan terus mengalir, dan tidak mungkin ditemui kesepahaman karena berangkat dari asumsi yang juga berbeda. Disini tidak mencoba untuk memperdebatkan antara kedua cara pandang tersebut, tetapi akan melihat bagaimana kelompok fundamentalis yang mengkonstruksikan agama sebagai bagian dan mencakupi wilayah politik. Kemunculan partai politik berbasis agama merupakan turunan dari perspektif tersebut.

8 Ahmad Syafii Maarif, 1996, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1955-1965)*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta

Tumbuh dan berkembangnya partai politik yang berbasis agama sebenarnya hanya sebuah strategi politik yang menggunakan instrumen agama, berupa ajaran, solidaritas ingroup (ukhwah isalmiah), sentimen keagamaan, dan lain sebagainya. Agama sebagai sebuah doktrin sangat menguntungkan ketika ditransformasikan dalam wujud partai politik. Pola seperti inilah yang dianggap sebagai bentuk dari komodifikasi agama, sehingga memunculkan praktek penyimpangan-penyimpangan agama. Agama menjadi terperangkap dalam kerangkeng besi politik.

Dalam sidang Konstituante (1957-1959). Baik dalam Panitia Persiapan Konstitusi maupun dalam perdebatan tentang Dasar Negara kalangan Kristen dengan gigih menolak Islam dijadikan dasar ideologi negara, didukung oleh kekuatan nasionalis, sekuler, sosialis, Partai Komunis Indonesia dan lain-lain. Indonesia sesungguhnya merupakan ajang pertarungan ideologi.

Dalam Sidang IV MPRS 1966. Golongan Kristen dengan tegas menolak penafsiran Ketetapan No. XX/MPRS/1966 sebagai ketetapan yang menegaskan bahwa Piagam Jakarta yang menjiwai UUD 1945 itu identik dengan Pembukaan, maka merupakan bagian dari UUD dan berkekuatan hukum. Menurut mereka Piagam Jakarta hanya ditempatkan dalam konsiderans Dekrit 5 Juli 1959, bukan dalam diktum atau keputusan Dekrit itu. Jadi (menurut mereka) Piagam Jakarta itu sama sekali tidak berkekuatan hukum.

Dalam Sidang Istimewa MPRS 1967. Sebelum sidang dimulai ke dalam Badan Pekerja MPRS dimasukkan suatu usul tertulis yang antara lain mengajukan agar kewajiban melakukan ibadah diwajibkan bagi setiap pemeluk agama dan agama resmi adalah agama Islam. Presiden dan Wakil Presiden harus beragama Islam. Usul ini dengan gigih ditolak terutama oleh kalangan Kristen (Surat kabar Suluh Marhaen, 3 Maret 1967). Dalam Sidang V MPRS 1968. Golongan Kristen dibantu oleh golongan nasionalis atau non Muslim

lainnya menolak rumusan Pembukaan dari Rancangan GBHN yang berisi: "Isi tujuan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dituangkan dalam UUD 1945 yang terdiri dari batang tubuh dilandasi oleh Pancasila serta dijiwai oleh Piagam Jakarta." Mereka menolak rumusan tersebut dengan beralasan bahwa kata "dijwai" menimbulkan arti seolah-olah Piagam Jakarta adalah jiwa sedangkan UUD 1945 itu tubuhnya. "Secara objektif perkataan 'menjiwai' dalam Dekrit itu harus diartikan sebagian besar dari Piagam Jakarta - kecuali tujuh kata - dimasukkan dalam Pembukaan yang diterima pada tanggal 18-8-1945, dan Pembukaan itu adalah jiwa UUD 1945. Tidak ada jiwa yang lain. Kalau dikatakan oleh sementara pihak, bahwa Piagam Jakarta 'menjiwai' UUD dan bukan Pembukaan yang menjiwainya, itu dapat menimbulkan arti, bahwa justru tujuh kata yang telah dicoret itulah yang 'menjiwai' UUD '45. Jadi hal itu harus ditolak." Demikian antara lain alasan-alasan kalangan Kristen/Katolik.

Sesudah kembali ke UUD '45 melalui Dekrit 5 Juli '59 Bung Karno menindaklanjuti dengan langkah-langkah politik; Membubarkan Konstituante, membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur pembentukan kabinet. Lalu terbentuklah Kabinet Gotong Royong dan melibatkan PKI dalam Kabinet. Kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) disusul berbagai langkah politik yang repressif. Berakhirlah peran DPR pilihan rakyat (Pemilu 1955) dan berakhir pula demokrasi parlementer. Bung Karno berubah dari seorang demokrat menjadi diktatur. Pancasila diperas menjadi Tri Sila, dari Tri Sila diperas menjadi Eka Sila: Gotong Royong dan Poros Nasakom. Lalu digelorkanlah jargon: Nasakom jiwaku, hancurkan kepala batu! Terjadilah proses Nasakomisasi di seluruh bidang di bawah Panji-panji Revolusi "yang belum selesai". PKI mendapatkan ruang bergerak yang sangat terbuka untuk memainkan peran menentukan di panggung politik nasional. Situasi ini baru berakhir

dengan terjadinya Peristiwa 30 September 1965 dengan segala akibat-akibatnya.

Jika di masa 1959-1965 Orde Lama Soekarno memaksakan Nasakom, Demokrasi Terpimpin, Paradigma Revolusi, U.U. Subversi, dll, sebaliknya Soeharto meneruskan dengan kemasan baru: Demokrasi Pancasila, P4, Asas Tunggal, PMP, Aliran Kepercayaan, memperkokoh Dwifungsi ABRI (militerisasi di segala bidang kehidupan) plus U.U. Subversi, selama 32 tahun pemerintahannya. Empat pilar Orde Baru : ABRI, Golkar, Birokrasi (Korpri), Konglomerat, menopang pemerintahannya yang repressif. Pemilu yang penuh rekayasa melanggengkan kekuasaannya. Umat Islam dimarginalkan melalui tahapan: de-ideologisasi (pemaksaan asas tunggal Pancasila); de-politisasi (konsep massa mengambang/floating mass); sekularisasi (antara lain berbagai kebijakan dan konsep RUU yang sangat mengabaikan agama); akhirnya bermuara pada: de-Islamisasi. Sosok Ali Murtopo, Sudjono Humardani, Bakin pada 1970-an memainkan peran utama di panggung pertarungan politik nasional. Bersaing dengan perwira-perwira tinggi lainnya Ali Murtopo menjadi "bintang" di dukung oleh institusi strategis sebagai think-tank yakni CSIS.

Dengan demikian, para penguasa di Indonesia, baik pada masa penjajah hingga kini, tetap saja memperlakukan agama sebagai instrumentasi, bukan sebagai entitas yang mampu memberi kontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang harmonis. Maka, dapat disimpulkan jika agama telah menjadi bagian dari manajemen konflik dari sebuah kepentingan. Tetapi, perlakuan tersebut tidak ditunjukkan dengan kasar, setidaknya masa Kolonial telah meninggalkan sejarah dalam manajemen perbedaan keyakinan tersebut dengan memberikan ruang dalam kebijakan politiknya untuk agama-agama tumbuh di nusantara. Ruang tersebut *Kantoor Voor Inlandsche zaken* diubah menjadi *Kantoor der Adviseur voor Inlandsche en Mohammedansche Zaken*. Pada masa pendudukan

Jepang, aturan-aturan yang berhubungan dengan urusan keagamaan pada umumnya tidak banyak mengalami perubahan, selain penghapusan *Kantoor der Adviseur voor Inlandsche en Mohammedansche Zaken*. Sebagai gantinya Pemerintah Balatentara Jepang mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama), kemudian lahirnya Kementerian Agama hingga saat ini.

BAB III

POTRET *PERMANENT CONFLICT*: MINORITAS AHMADIYAH DARI TAHUN 1925- SEKARANG



A. Kehadiran Ahmadiyah dan konflik kepentingan

Kehadiran Jemaat Ahmadiyah dalam masyarakat Indonesia merupakan awal konflik permanent yang berkepanjangan. Ahmadiyah merupakan organisasi keagamaan yang sangat menarik untuk kontroversial. Meskipun Ahmadiyah hadir di Indonesia seiring dengan hadirnya beberapa organisasi keagamaan lainnya, seperti Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad dan NU, namun, Ahmadiyah tetap dianggap sebagai “kerikil” yang hadir dalam mozaik perbedaan masyarakat Indonesia.

Membaca kehadiran Ahmadiyah di Indonesia perlu menarik *memory collective* bangsa Indonesia ke awal abad 19. Sesudah penyerbuan bangsa Barat ke Timur, maka timbullah kesadaran akan keinginan untuk merdeka. Pada saat itu Negara Islam yang masih dalam kemegahannya di Turki Usmani. Bangsa barat mulai

menghancurkan citra kemegahan Islam dengan memberi gelar “orang sakit” kepada Sultan Mahmud Abdul Azis Murad dan Abdul Hamid. Ini memberi pengaruh terhadap peradaban Islam saat itu, raja-raja Islam di Arab, Persia dan India mulai berputus asa melihat bentuk tekanan dari Barat tersebut.

Pada saat itu semangat kebangkitan didengungkan Syech Muhammad bin Abdul Wahab dari Nedjab. Semangat ini diteruskan oleh para keturunan Raja-raja Saudi. Muhammad Ali Pasha di Mesir, mendirikan Mesir baru. Gerakan kaum Wahabi tersebut berpengaruh besar kepada ulama-ulama Islam di Sumatra.

Pada permulaan abad 19 beberapa alim ulama yang telah pergi berhaji ke Mekkah, telah melihat bagaimana praktek ajaran Islam yang sebenarnya dilaksanakan oleh Amir-amir Wahabi di Nejab. Maka, ketika mereka kembali ke Sumatra, mereka kecewa karena melihat agama Islam tidak dilaksanakan seperti apa yang mereka lihat di Nejab. Agama bercampur aduk dengan adat kebiasaan buruk, sehingga agama dan masyarakat ibarat air dan minyak.

Maka timbullah cita-cita dari tiga orang haji, yakni Haji Muhammad Arif, dikenal dengan Haji Sumanik, dari Luhak Tanak Datar, Haji Abdurrahman, atau Haji Piobang, dari Luhak Lima Puluh Kato, dan Haji Miskin Pandai Sikek, Luhak Agam. Mereka telah lama bermukim di Mekah. Tahun 1802, mereka pulang ke kampung halamannya. Niat mereka pulang ke kampungnya, adalah untuk memperbaiki keadaan bid'ah. Niat tersebut diwujudkan dengan mendirikan surau Pandai Sikat, Kota Baru, di Padang Panjang.

Surau Pandai Sikat, merupakan suatu babak baru dalam penerahan pemikiran keagamaan di Sumatra. Pengajaran di Surau Pandai Sikat, telah banyak menarik perhatian dari para pemuda untuk belajar agama. Muncullah nama-nama besar seperti Tuanku Imam Bonjol. Kelompok ini dikenal dengan kaum Paderi. Paderi, merupakan gelar yang diberikan kepada murid-murid dari ketiga

haji tersebut. Mereka terpengaruh oleh gerakan Wahabi di Nejab, yang ingin membersihkan Islam dari berbagai bentuk bid'ah. Akibat sikap keras kaum paderi, muncullah penentangan dari para ulama tarekat dan pemangku adat.

Keinginan Tuanku Imam Bonjol, selain untuk melawan kekuasaan adat dan menentang pengaruh Belanda, juga berusaha untuk mengembangkan Islam ke negeri yang masih belum memeluk Islam. Penyebaran tersebut hingga ke daerah Mandailing, Batak hingga Sipirok. Melihat ekspansi Tuanku Imam Bonjol, Belanda sudah dapat memperkirakan apabila pengaruh Islam telah meluas maka pengaruh kekuasaan mereka akan pudar, Untuk menandingi gerakan Islam tersebut, dikirimlah gerakan missionaris ke Mandailing untuk menyebarkan agama Kristen. Setelah menghadapi Pangeran Diponegoro, Belanda mengarahkan kekuatannya untuk menumpah kaum Paderi. Gerakan kaum paderi dan Imam Bonjol, telah mampu ditumpas oleh Belanda, namun cita-cita kaum Paderi kembali dikobarkan oleh Tengku Syech Muhammad Saman di Tiro, Aceh.

Tahun 1902, merupakan tahun yang membawa perubahan terhadap pengembangan Islam di Sumatra. Beberapa orang pelajar-pelajar Sumatra pulang dari Mekah. Mereka telah belajar dari seorang Syech Ahmad Khatib Al Minangkabau, yakni putra dari Tuanku Nan Tuo, ulama besar Minangkabau, yang juga kaum Paderi. Ia menjadi imam besar di Mekkah dari mahzah Syafi'i. Murid-murid Syech Ahmad Khatib Al Minangkabau tersebut adalah :

1. Syech Muhamad Jamil Jambek, Bukit Tinggi
2. Haji Abdullah Ahmad, Padang
3. Haji Abdul Karim Amrullah, Maninjau
4. Haji Muhammad Thaib Umar, Bukit Tinggi
5. Syech Daud Rasyidi, Balingka
6. Syech Abas, Padang Jepang
7. Syech Mustafa, Payakumbuh

8. Syech Ibrahim Musa, Parabek, Bukit Tinggi
9. Syech Sutan Darap, Pariaman
10. Haji Muhammad Saleh atau Syech Madin
11. Haji Agussalim
12. Ahmad Rasjid, atau Sutan Mansur
13. Syech Hasan Ma'sum, Kerajaan Delli
14. Haji Muhammad Nur, Langkat
15. Kyai Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta
16. Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Tebuireng.

Syech Muhammad Djamil Djambek, Haji Abdullah Ahmad (Padang), Haji Abdul Karim Amrullah, (Maninjau), dan Haji Muhammad Taib Umar (Bukit Tinggi), dikenal "kaum mudo" atau "ulama empat sekawan". Mereka sangat berpengaruh di Sumatra saat itu. Murid-murid mereka antara lain Zainuddin Labay El Junusi, (Padang Panjang), Abdul Hamid Hakim, bergelar Tuanku Mudo

Burhanuddin Daja, mencatat munculnya para ulama tersebut bersamaan dengan terjadinya berbagai perubahan di Indonesia, baik dalam bidang sosial ekonomi, maupun dalam politik dan pendidikan. Pidato ratu Wilhelmina yang diucapkan di akhir tahun 1901 merupakan kunci pembuka perubahan itu. Pidato ini antara lain berisi pokok pikiran baru yang akan ditempuh oleh pemerintahan colonial di Indonesia, yakni dikenal dengan *ethische politiek*, atau *niwe koeers*, yakni isu atau kebijakan politik yang memperhatikan kepentingan Indonesia. Belanda telah melihat beberapa kenyataan yang telah berlaku, yakni :

1. Hasil monopoli perdagangan kopi bagi Belanda semakin tidak membawa untung lagi, karena banyak pribumi berusaha menyelundupkan kopi melalui berbagai jalan ke Singapura, menembus blockade Belanda

2. Pribumi yang menyelundupkan kopi tersebut telah hidup makmur. Penanaman karet dan kopi telah membawa kesejahteraan bagi masyarakat, pembangunan berjalan dengan pesat di seluruh nagari, rumah gaya medan dan Singapura banyak bermunculan bagai jamur di musim hujan. Di daerah banyak penduduk menabung uang, karena tidak diperlukan lagi perluasan bagi perkebunan mereka. Dengan ini berarti pula bahwa sarana-sarana keagamaan, seperti masjid, surau dan rumah-rumah sekolah keagamaan berkembang dengan pesat. Begitu pula kemampuan masyarakat menunaikan haji, belajar Islam ke Mekkah dan Mesir menjadi meningkat dengan pesat.
3. Tanaman paksa perlahan-lahan mulai dihapuskan dan berakhir tahun 1915. Ekonomi rakyat mendadak berubah, dari ekonomi jasa menjadi ekonomi komersial. Penduduk telah mengusahakan pertanian sendiri-sendiri. Setiap orang yang mampu bekerja pergi ke ladang kopi, karet dan kelapa untuk bekerja sebagai buruh atau kuli kasar. Dengan tenaga dan jerih payah yang tidak seberapa mereka mendapat penghasilan yang cukup besar. Dalam soal kerja paksa, orang bias bebas tidak menjalankan asal sanggup membayar denda sebesar f.8 setahun.

Situasi inilah yang mendorong semangat belajar meningkat. Tahun 1918. Dr. Haji Abdulkarim Amrullah, menganjurkan kepada murid-muridnya untuk mendirikan perkumpulan. Maka, berdirilah "Sumatra Thawalib", yang sebelumnya Dr. Abdullah Ahmad (1878-1933) mendirikan sekolah "Adabiah School" di Padang, yakni sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu umum. Sejak itulah, pemuda-pemuda banyak yang belajar di perkumpulan-perkumpulan Sumatra Thawalib, di Padang Panjang, Padang Jepang, Parabek, dan Pariaman.

1. Sumatra Thawalib

Asal usul Sumatra Thawalib tidak dapat dilepaskan dari kehadiran Surau Jembatan Besi, yang mendirikan *Group Studie*, atau perkumpulan membaca. Tahun berikutnya mereka mendirikan Koperasi Pasaiyoaan, atau Perkumpulan Sabu. Tahun 1918 Sumatra Thawalib mendirikan cabang di Padang dan Bukit Tinggi. Atas usulan Dr. Abdulkarim Amrullah, maka kelompok surau jembatan besi, *Group studie*, dan *Pasaiyoaan* menjadi Sumatra Thawalib, yang kemudian dikenal dengan Sumatera Thawalib.

Sumatra Thawalib lahir di Minang, mengawal dirinya sebagai perkumpulan pelajar-pelajar agama Sumatra. Perkumpulan ini juga memiliki koperasi, dan lembaga pendidikan Islam. Dalam kajiannya, Burhanuddin Daja,¹

“Sumatra Thawalib dalam Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam di Sumatra Barat” menguraikan karakteristik pola didaktik pada Sumatra Thawalib, sehingga melahirkan para lulusan yang kritis dan maju dalam pemikiran. Dalam berhadapan dengan kolonialisme dan imperilaisme, wujud Sumatra Thawalib adalah lembaga penentang yang sangat keras. Sepak terjang politiknya sangat keras setelah ia merubah diri menjadi organisasi Islam yang radikal di bawah pimpinan-pimpinan militannya baik laki-laki maupun perempuan. Gerakan mereka adalah suatu perjuangan anti peyajahan berdasarkan Islam dan cinta tanah air. Mereka laksanakan keyakinan agama Islam dalam berorganisasi, karena menggerakkan organisasi, memajukan perkumpulan dan menentang dominasi asing, merupakan suatu kewajiban yang termasuk wajib kifayah menurut mereka.”

Dalam waktu yang singkat Sumatra Thawalib telah menyebar ke seluruh Minangkabau. Berbagai daerah di luar Minangkabau

¹ Burhanuddin Daya, 1995, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam, Kasus Sumatera Thawalib*, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta

mendirikan sendiri Sumatra Thawalib, antara lain Padang Jepang, Batu Sangkar, Maninjau, Padang, Bukit Tinggi, Kubang Putih, Simabur, Pinan, Kurai Taji, Bengkulen (Aceh), Tapak Tuan (Aceh), Meulaboh, dan Labuhan Haji.

Atas dasar inilah Sumatra Barat dirangsang untuk menerima Sumatra Thawalib, yang telah mampu merubah pemikiran para pemuda. Mereka semakin terbuka dengan perubahan. Pada waktu rapat besar menentang Land rente, masuk ke Sumatra Barat, tanggal 1 April 1923 di Padang hadir 2000 orang yang didominasi oleh Sumatra Thawalib. Ini membuktikan kehadiran Sumatra Thawalib telah merubah pola pikir pada pemuda menuju moderen. Kebangkitan intelektual Sumatra Thawalib ditunjukkan dengan 55 surat kabar dari 80 surat kabar yang terbit di Sumatra Barat tahun 1910-1930, adalah dikelola oleh pemuda Sumatra Thawalib, yang diterbitkan dalam bahasa melayu tulisan Arab.

2. Persentuhan dengan pemikiran Ahmadiyah

Kegairahan pelajar Sumatra Thawalib terhadap membaca, guna mencari dan mengembangkan wawasan keilmuan Islam, sangat tinggi. Akibatnya, banyak dari mereka menemukan kajian-kajian yang dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap, sehingga banyak diantara mereka yang mengikuti dan mendirikan bermacam-macam organisasi atau perkumpulan, termasuk menjadi anggota dan propaganda komunisme.²

Persentuhan ini juga yang mengantarkan beberapa murid Sumatra Thawalib, mulai mengenal Ahmadiyah. Pertengahan tahun 1922, Khawaja Kamaluddin, seorang misioner Ahmadiyah, diberitakan “Tjahaya Sumatra” melakukan kunjungan ke Jawa. Misioner tersebut, melakukan berbagai pidato tentang kebesaran dan ketinggian Islam. Ulasan-ulasan yang dmuat dalam “Tjahaya

² Hamka, *Ayahku*, 1960, halaman 126

Sumatra” sangat menarik perhatian para pemuda Sumatra Thawalib, salah satunya Ahmad Nurrudin³, Abubakar Ayyub, dan Zaini Dahlan⁴.



“Tiga serangkai” Mubaligh Awal: Ahmad Nurrudin, Abubakar Ayub, dan Zaini Dahlan, Sumber: Yubiliem 75 tahun JAI

Sebelum lebih jauh menguraikan persemaian bibit Ahmadiyah Qadian di Indonesia, terlebih dahulu akan dijelaskan bahwa pemikiran Ahmadiyah mulai dikenal oleh kalangan intelektual di Indonesia pada tahun 1920-an. Tahun 1924 dan 1925, merupakan tahun bersejarah bagi Ahmadiyah di Indonesia, baik Lahore, maupun Qadiani. 2 Mubaligh Lahore, secara resmi tiba di Jawa tahun

3 JAI, *Jubilium 75 Tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, 1975, halaman 39

4 Zaini Dahlan adalah teman sekolah Dr.Hamka, mengenai ini Hamka menuliskan kesannya :“Kawan-kawan saya yang dahulunya sama belajar di Sumatra Thawalib, setelah pulang dari sana (qadian) telah “berubah”. Orang-orangnya tenang dan penuh perasaan dan khidmat kepada kepercayaannya. Sikapnya kebanyakan menarik hati, terutama kesabarannya ketika dimaki dan diejek. Diantara kawan saya itu ialah Zaini Dahlan, yang seketika sama mengaji terhitung murid yang tidak memperhatikan kaji dan hanya suka bergarah dan bersenda gurau, sehingga bergelar “si Komik”. Tetapi, setelah kembali dari Qadian, dia menjadi seorang yang tenang dan saleh dan yakin memegang kepercayaannya. Antara lain, Abubakar Ayyub, dan Ahmad Nurrudin yang sama belajar dengan daku di sekolah Diniyah” Hamka, *Ayahku*, 1960, halaman 127

1924⁵, yakni Mirza Wali Ahmad Beg, dan Maulana Ahmad, menuju Yogyakarta. Kemudian mereka menjalin hubungan baik dengan para pemuka Muhammadiyah, seperti Mas Ngabehi Joyosugito, Muhammad Husni, Sadewo P.K, Soetopo, Mustopo, Syamsu Rijal, Supratolo, Kayat, Muhammad Kusban, Muhamad Irshad, Mufti Syarif, Sunarto, Ustman⁶, dan lain-lain. Mereka adalah intelektual dan tokoh terkemuka Muhammadiyah saat itu.

Kehadiran tokoh Ahmadiyah tersebut, telah memberikan wawasan dan roh baru bagi para intelektual Muhammadiyah saat itu, termasuk Erfan Dahlan atau Jumhan⁷, putra KH.Ahmad Dahlan. Mereka tertarik terhadap interpretasi keagamaan yang diajarkan oleh 2 tokoh mubaligh Lahore. Banyak tokoh-tokoh dari HIS Muhammadiyah dan *Kweekschool* Muhammadiyah, tertarik dengan Ahmadiyah. Sambutan terhadap tokoh Ahmadiyah, ditunjukkan secara antusias dan hangat oleh warga Muhammadiyah. Bahkan, di Yogyakarta, pada saat Mukhtar Muhammadiyah tahun 1924 mereka berkesempatan memberikan materi ceramah.⁸

Kehadiran 2 mubaligh Ahmadiyah dalam muktamar Muhammadiyah, memunculkan reaksi keras. Setelah peristiwa tersebut, datang ulama Minang, Dr. Abdul Karim Amrullah, pada tahun 1926, yang mengkhususkan diri menemui Mirza Ahmad Wali Beig, untuk berdiskusi. Terjadi dialog diantara mereka, yang

5 Qanun Asasi, hal 94

6 *ibid*, hal.96

7 bahkan Jumhan (putra KH. Ahmad Dahlan) belajar ke Lahore, kemudian ia menjadi mubaligh Ahmadiyah, di Thailand sampai meninggal nya, *ibid*, hal. 95 penjelasan lebih rinci, lihat Herman L Beck, dalam *The Rupture Between The Muhammadiyah and The Ahmadiyya*, halaman halaman 227-228

8 Herman L Beck, *The Rupture between The Muhammadiyah and The Ahmadiyya*, *Bijdragen tot de Taal- Land en Volkenkunde (BKI)*161-2/3 (2005) 210-246, Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkenkunde. Lebih lanjut Beck menuliskan Mukhtar 1924 merupakan peristiwa keretakan (rupture) secara organisatoris antara Muhammadiyah dan Ahmadiyah, salah satu penyebabnya karena beberapa elit potensial Muhammadiyah tertarik dalam Ahmadiyah, seperti HOS Tjokroaminoto, Joyosugito, dll.

pada intinya Dr. Abdul Karim, melarang Ahmadiyah disebarkan di lingkungan Muhammadiyah, sambil memberikan sebuah buku "Alqawloes'Shahih"⁹, bertuliskan Arab berbahasa Latin. Isi buku tersebut, penjelasan mengenai itikad-itikad Ahmadiyah yang sesat. Buku *Alqawloes'Shahih* ini, merupakan buku yang telah dipersiapkan oleh Dr. Abdul Karim Amrullah, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid *Jembatan Besi* atau *Sumatra Thawalib*, karena ada diantara murid-murid *Sumatra Thawalib* mengikuti ajaran Ahmadiyah. Tiga orang dari mereka sekolah di Lahore kemudian pindah ke Qadian, yakni Ahmad Nurrudin, Abubakar Ayub, dan Zaini Dahlan. Tiga tokoh inilah, kemudian menjadi pelopor masuknya Ahmadiyah Qadiani ke Indonesia. Jadi, buku tersebut memang sudah dipersiapkan untuk menjelaskan berbagai kesalahpahaman tentang Ahmadiyah.

Reaksi kedua, tahun 1927, datang ulama dari India, Abdul Alim Assidiqi, yang mempropagandakan gerakan anti-Ahmadiyah. Berdasarkan peningkatan animo tokoh-tokoh Muhammadiyah terhadap Ahmadiyah, yang dipandang akan merugikan Muhammadiyah, maka pada tahun 1928, PB Muhammadiyah membuat Maklumat tanggal 5 Juli 1928 no. 294¹⁰. Isi maklumat tersebut, melarang ajaran Ahmadiyah berkembang di lingkungan Muhammadiyah, karena beberapa tokoh penting di Muhammadiyah menjadi pengikut ajaran Ahmadiyah, termasuk beberapa putra K.H. Ahmad Dahlan. Kebijakan ini sangat mengecewakan simpatisan Ahmadiyah. Akhirnya, dengan berat hati Djoyosugito, Sadewo, Muhammad Husni, dll, memilih keluar dari Muhammadiyah. Sejak itulah mereka mendirikan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), yang berpusat di Yogyakarta.

9 Hadji Abdul Karim Amroellah, *Alqawloesh'shahih*, diterbitkan di Yogyakarta oleh Datoek Nan Bareno alias Marah Intan, Yogyakarta, 1926

10 Qanun Asasi, hal.100

Selanjutnya Budi Setiyono¹¹ menuliskan bagaimana proses kedekatan tokoh Muhammadiyah dan Ahmadiyah di waktu awal. Tulisannya dimulai dengan ungkapan rumah tinggal Mirza Wali Ahmad Baig, mubaliq Ahmadiyah Lahore, menjadi tempat bertemu orang-orang Muhammadiyah, khususnya anak-anak muda. Mereka terutama belajar bahasa Inggris. Haji Oemar Said Tjokroaminoto dan para anggota Sarekat Islam (SI) juga kerap datang. Hubungan SI dan Muhammadiyah masih akur.

Tjokro tak sekadar belajar bahasa Inggris. Diam-diam dia menterjemahkan karya Maulana Muhammad Ali, presiden Ahmadiyah Lahore, berjudul *The Holy Qur'an*, ke dalam bahasa Melayu. Dia mendapat dukungan dari Ahmad Baig. Dia bahkan mengerjakannya di kapal ketika dia, sebagai wakil SI, bersama Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah berangkat ke Mekah untuk Mu'tamar 'Alam Islami, merujuk Kongres Islam Internasional (biasa disebut Kongres Mekkah), upaya membangun institusi pan-Islami baru setelah Mustafa Kemal Pasha menghapus sistem khilafah dan mendirikan Republik Turki pada 1924. Tjokro dan Mas Mansur terpilih sebagai utusan dalam Kongres Al-Islam kelima pada Februari 1926 di Bandung. Kongres Al-Islam sendiri merupakan badan yang didirikan di Garut pada Mei 1924, bertujuan memperluas pengajaran agama dan menganjurkan pendirian Majelis Ulama untuk memutuskan perselisihan-perselisihan antara kaum ulama.

Muhammadiyah punya hubungan dekat dengan Ahmadiyah, bahkan memberi bantuan ketika Ahmadiyah didirikan di Yogyakarta pada 1925. Namun, setelah debat publik antara Ahmad Baig dan pemimpin reformis-radikal Sumatra, Haji Rasul (Abdul Karim Amrullah, ayahanda Buya Hamka), Muhammadiyah berbalik melawan Ahmadiyah. Dan, sebagai konsekuensinya,

11 Budi Setiyono, *Jejak Tafsir Kaum Ahmadi*, <http://denagis.wordpress.com/2011/08/27/jejak-tafsir-kaum-ahmadi/>

Muhammadiyah memveto proyek penerjemahan Tjokroaminoto, dan memprotes dalam kongres Sarekat Islam pada 1927¹²

Kongres SI di Pekalongan itu sendiri hanya membahas secara singkat proyek Tjokro dan tak ada keputusan dibuat. Satu keputusan penting justru mengenai pemecatan anggota Muhammadiyah yang juga menjadi anggota SI –sebaliknya dilakukan Muhammadiyah setahun kemudian.

Pada Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada 26-29 Januari 1928, Tjokro memberikan alasan penterjemahan Alquran dan komentar karya Muhammad Ali. Menurutnya, dia tahu terjemahan Alquran beserta komentar karya Muhammad Ali, dari Ahmad Baig, yang juga memperkenalkannya kepada para pemimpin Muhammadiyah. Tjokro berargumen sudah mendapat persetujuan dari para pemimpin Muhammadiyah, Fachruddin dan Kiai Mas Mansur, pada 1925. Bahkan Fachruddin berkontribusi atas terjemahan komentar Muhammad Ali. Namun dia tetap diserang dengan sengit.

Menurut A.K. Pringgodigdo dalam *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Agus Salim tampil dan mengatakan dengan lantang bahwa dari segala tafsir, tafsir Ahmadiyah Lahore yang paling baik untuk memberi kepuasan kepada pemuda-pemuda Indonesia terpelajar.

Menurut Herman L. Beck dalam “The Rupture between the Muhammadiyah and the Ahmadiyah”, dimuat jurnal *Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde*, Muslim ortodoks maupun modernis menyalahkan Tjokro karena kurangnya pengetahuan tentang Islam dan dia, menurut opini mereka, sepenuhnya tergantung pada Ahmad Baig. Baik Tjokro maupun Ahmad Baig mampu melawan kritik-kritik itu. Namun, beberapa hari setelah Kongres Al-Islam, Tjokro menyiarkan keluhannya di media Islam berkala *Fadjar Asia* –media ini juga menerbitkan sebagian terjemahan Tjokro. Antara lain dia menduga beberapa pengkritiknya khawatir tersaingi

12 Moch Nur Ichwan, “Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis”, jurnal *Archipel* 62, 2001, 143-161

dengan terjemahannya, karena mereka juga sedang mengerjakan terjemahan Alquran mereka sendiri.

Dua minggu setelah Kongres Al-Islam, Muhammadiyah menggelar kongres ke-17 yang berlangsung 12-20 Februari 1928 di Yogyakarta. Pada kongres ini, Yunus Anis, sekretaris pertama Dewan Pusat yang baru, mengatakan bahwa Muhammadiyah menyesalkan keputusan SI mendisiplinkan anggota Muhammadiyah. Dia juga mengatakan, dengan menyesal Muhammadiyah tak bisa menyetujui proyek Tjokro. Alasannya: tak cocok dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

Tekanan lain datang dari Muhammad Rashid Ridha, salah seorang ulama dan ahli hukum paling berpengaruh dari generasinya serta murid Muhammad Abduh paling menonjol. Melalui majalah *Al-Manar*, dia menyampaikan metode-metode pembaruan ke penjuru negara Muslim. Beberapa anggota Muhammadiyah punya hubungan dekat dengan Ridha dan *Al-Manar*. Rida juga punya pengaruh kuat di Indonesia. Menurut Nur Ichwan, “Negara, Kitab Suci dan Politik”, termuat dalam *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia* karya Henri Chambert-Loir, dalam fatwanya, menanggapi Syaikh Muhammad Basyuni Imran, Maharaja Imam dari Kesultanan Sambas di Borneo (Kalimantan), Ridha menolak proyek Tjokroaminoto karena menganggap terjemahan (dan tafsir) Alquran yang ditulis Muhammad Ali menyimpang dari ajaran Islam yang baku, karena perlawanan masih keras, penerbitan tafsir itu ditunda sampai Majelis Ulama mengambil ketentuan. Dalam kongres di Kediri pada 27-30 September 1928, SI membentuk Majelis Ulama sendiri – karena Muhammadiyah tak mau terlibat– yang bersidang saat itu juga. Majelis memutuskan bahwa terjemahan itu boleh diteruskan, asal dilakukan dengan pengawasan Majelis.

Pada tahun itu juga tiga bagian pertama terjemahan Tjokro terbit dengan judul *Qoer'an Soetji*,

disertai Salinan dan Keterangan dalam Bahasa Melajoe. Terjemahan bahasa Belanda dilakukan Sudewo Partokusumo Kertohadinegoro, guru HIS Muhammadiyah, dengan judul *de Heilige Qoern*. Karya ini terbit pada 1935 beriringan dengan pengantarnya “*Inleiding tot de Studie van Den Heilige Qoer’an*”. Sementara dalam bahasa Jawa, *Qur’an Suci Jarwa Jawi*, dikerjakan R. Ng. H. Minhadjurrahman Djajasugita dan M. Mufti Sharif, diterbitkan di Yogyakarta pada 1958. Djajasugita adalah ketua Muhammadiyah cabang Purwokerto yang memilih mundur dari Muhammadiyah dan bersama Muh Husni (sekretaris jenderal PB Muhammadiyah) mendirikan Indonesische Ahmadiyah Beweging atau sekarang dikenal sebagai Gerakan Ahmadiyah-Lahore Indonesia (GAI).

Perselisihan Muhamadiyah dan Ahmadiyah terus berlangsung hingga kini. Untuk menegaskan sikap tersebut, tahun 1994. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwanya tertanggal 12 September 1994, ditanda-tangani oleh Prof.Dr. H. Asjmun AR, selaku ketua, dan Drs. H.M. Fahmi Muqaddas, selaku sekretaris, yang menyimpulkan bahwa aliran Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam yang dijadikan anutan mayoritas umat Islam Indonesia. hal tersebut didasarkan pada 7, alasan.

Sedangkan perjalanan Ahmadiyah Qadiani, dimulai dengan kisah pemuda Ahmad Nurrudin dan Abubakar Ayyub, belajar ke Qadian tahun 1922. Pemuda Abubakar Ayyub, berasal dari Paninjauan, Padang panjang, Ahmad Nurrudin dari Parabek, adalah pemuda-pemuda yang belajar di lingkungan Sumatra Thawalib, pimpinan Dr.Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) Padang Panjang.

Setelah selesai belajar di Sumatra Thawalib, mereka memutuskan untuk belajar agama ke Mesir. Namun, Zainuddin Labay El Yunusi, guru mereka di Diniyah School, dan Sjech Ibarahim Musa Parabek, ulama Bukit Tinggi, memberi nasehat agar mereka menuntut ilmu ke Hindustan. Alasan kedua tokoh tersebut, bahwa telah banyak

orang yang belajar di Mesir, sehingga perlu mencari sumber ilmu dari tempat lain. Mereka menganggap Hindustan merupakan salah satu Negara yang memiliki tokoh-tokoh dan perguruan tinggi dalam ilmu pengetahuan agama Islam yang tinggi mutunya. Selain itu, Rasjidin, kakak dari Ahmad Nurrudin, telah lebih dahulu belajar ke Mesir¹³.

Bulan Desember 1922, dua pemuda tadi, mereka berangkat dari Sumatra, melalui Medan menuju Lucknow. Kemudian, selang beberapa bulan kemudian, Zaini Dahlan ikut menyusul. Setelah dua setengah bulan tinggal di Lucknow, ketiga pemuda tersebut, berangkat menuju Lahore untuk belajar agama. Di kota inilah mereka berkenalan dengan ajaran Ahmadiyah secara serius, bahkan mereka berbait ditangan Maulana Muhammad Ali, selaku pimpinan Lahore yang pertama. Selang beberapa bulan, mereka belajar di Jamiah Lahore, ketiga pemuda tersebut berniat untuk berjiarah ke makam pendiri Ahmadiyah di Qadian.

Baru pada akhir tahun 1923, niat mereka terlaksana. Ketiga orang tadi pergi ke Qadian, melalui Batala dengan menumpang Kereta Api dari Lahore, berjarak 70 mil. Selanjutnya dari Batala, mereka melanjutkan perjalanan ke Qadian dengan menggunakan delman, menempuh jarak 11 mil. Perjalanan menuju Qadian terasa sangat berat, karena hujan mengguyur menyebabkan jalan menjadi becek. Begitu memasuki wilayah Qadian, mata mereka tertuju pada bangunan yang menjulang berwarna putih, yang terletak di sebuah bukit kecil. Menara tersebut, baru kemudian hari mereka mengenalnya Minaratul Masih.

3. Perpecahan Ahmadiyah tahun 1914

Dalam kesempatan ini, perlu dijelaskan catatan dari Rakhmat Ali tentang peristiwa perpecahan Ahmadiyah pada tahun 1914. sejak tahun itu, Ahmadiyah menjadi dua firqh, yakni Lahore dan

¹³ Djuwaeni, halaman 1

Qadian. Penjelasan tersebut terdapat dalam buku “Kebenaran Akhir Jaman”¹⁴.

“ ..adapun moela perkataan ini, dinjatakan oleh Maulvi Moehammad Ali, dan Chwadja Kamaloeddin, BA. Pembicaraan ini laloe disiarkan dari satoe Ahmady ke Ahmady lainnja, hingga kelamaan berita itoe telah menjadi amat tersiar. Teranglah bahwa kedoea Toean itoe menghendaki soepaja didalam Ahmadiyyah djangan ada Chalifah, melainkan setjara Djamhoerijah (perlemen) sadja padahal Hazrat Masihil Mau’oed a.s dengan terang-terangan meninggalkan wasiat bahwa sesoedah beliau wafat, hendaklah diadakan Chalifah. Dari sisi kita mengetahui bahwa niat kedoea orang itoe memang tidak benar. “

Rupanya Rakhmat Ali memerlukan ruang yang cukup untuk menjelaskan persoalan crucial di tubuh Ahmadiyah tersebut, sehingga dari halaman 375 – 396 ia menjelaskan kronologi peristiwa perpecahan Ahmadiyah Qadian – Lahore, pada tahun 1914

Alasan dasar perpecahan bukan karena konsep kenabian Mirza Ghulam Ahmad, a.s tetapi karena ambisi pribadi Maulana Muhammad Ali untuk menduduki Khalifah II, meskipun Pihak Lahore menjadikan dalil perpecahan karena alasan teologi, yakni pihak Ahmadiyah Lahore tidak mengakui Hz. Mirza Ghulam Ahmad, a.s sebagai Nabi. Kutipan ini dijadikan rujukan utama Moulvi Muhammad Ali, ketika melakukan pembelaan.

Untuk mengetahui benar tidaknya alasan dasar tersebut, perlu disampaikan suatu bukti bahwa sebenarnya baik Muhammad Ali, Chawadja Kamaludin, dan tokoh Lahore lainnya, sebelum tahun 1914, mengakui bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, a.s adalah Nabi dan Rasul. Bukti-bukti tersebut berupa ucapan dan tulisan mereka di dalam surat kabat “**Pegham Soellah**” tgl 16 Oktober 1913 dan 7 September 1913. pendapat yang sama disampaikan juga oleh

14 Rahmat Ali, 1949, *Kebenaran Akhir Zaman*, Neratja Trading Co. Jakarta, halaman 394

Kwadja Kamaluddin dalam surat kabar “**Al Hakam**” tanggal 30 September 1913, “**Al Badar**” tanggal 9 Januari 1913. begitu juga dengan pendapat Dr. Jacob Baig dalam “**Al Hakam**” 13 Januari 1913, yang mengatakan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s adalah *Basjar Rosul*. Dengan demikian, bahwa Jemaat Ahmadiyah Lahore dan penganjurnya, pada mulanya mengakui baik dengan lisan maupun tulisan bahwa Hz. Mirza Ghulam Ahmad, a.s itu Nabi dan Rasul yang tidak membawa agama atau sjariat baru, tegasnya tidak berbeda sedikitpun dengan pendapat Ahmadiyah Qadian¹⁵. Dalam tulisan berjudul “**Ahmad The Promised Messiah**”, Muhammad Ali menuliskan sebagai berikut

“ this movement holds that the Holy Prophet is the seal of Prophets and not other prophet can appear after him except one who is spiritually his disciple, who receives the gift of Prophecy through him. It is only a true Muslim who walks in the footsteps of the Holy Prophet that can become a Prophet “

Tulisan ini menyiratkan bahwa Maulana Muhammad Ali, sebagai pendiri Ahmadiyah Lahore, mengakui bahwa Hz. Mirza Ghulam Ahmad, a.s adalah Nabi dan Rasul. Maka gugur sudah alasan yang mengatakan bahwa pecahlah Lahore itu dikarenakan perbedaan teologi kenabian. Ini membuktikan bahwa masalah kenabian bukan penyebab utama perpecahan tersebut.

Untuk mencari alasan tersebut, dapat diketahui dari penjelasan Rakhmat Ali, ketika terjadi dialog antara Kalifatul I, Hazrat Maulvi Nurrudin, r.a, dengan Muhammad Ali, pada tanggal 4 Maret 1914. pada saat itu, Khalifah sedang sakit keras, kemudian beliau menuliskan sebuah wasiat mengenai siapakah yang akan menjadi khalifah berikutnya. Wasiat itu diberikan kepada Muhammad Ali, dan meminta untuk membaca wasiat tersebut secara berulang-ulang dengan suara keras di depan umum. Kemudian khalifah bertanya kepadanya “Apakah tidak ada lagi yang mesti saya tambahkan ?

15 *Ibid*, halaman 383

“, Muhammad Ali menjawab “Cukup !”. akan tetapi, dikarenakan kondisi Khalifah semakin bertambah parah, secara diam-diam Muhammad Ali, menyebarkan tulisan yang berjudul “Ek Nihajat Zaroeri ka ilan”, yang isinya berupa himbauan bahwa Khilafat di dalam Ahmadiyah tidak perlu di adakan lagi dan cukup dengan adanya Sadr Anjuman Ahmadiyah saja.. Secara tegas Rakhmat Ali mengatakan alasan terdasar dari Muhammad Ali dan kelompoknya, keluar dari Ahmadiyah Qadian, adalah karena masalah Khilafat.

Persoalan ini perlu dijelaskan karena kedua aliran ini, hadir di Indonesia. Diakui juga bahwa penjelasan ini berasal dari perspektif Ahmadiyah Qadian, karena memang buku ini khusus menjelaskan perjalanan Ahmadiyah Qadian di Indonesia. Jika ingin lebih dalam bagaimana pandangan pihak Ahmadiyah Lahore, dapat ditemukan dalam buku karya Maulana Sadrudin, 1979, **Aqidah Ahmadiyah Anjuman Isha’ati Islam Lahore**, alih bahasa M.Iskandar, GAI, Yogyakarta, sebagai pembandingnya.

B. Persemaian Pertama: Misioner Ahmadiyah Qadian ke Indonesia

1. Periode I : Sumatra

Bulan Agustus 1924, Departemen Da’wat wa Tabligh atas perintah Huzur telah mengutus Maulana Rahmat Ali H.A.T ke Indonesia, sebagai realisasi dari janji Huzur kepada para pelajar Indonesia. Sebelum berangkat Nalulana Rahmat Ali, belajar bahasa Indonesia dari para pelajar Indonesia yang ada di asrama dengan memakai buku “Empat Serangkai” yang sengaja dipesan dari Sumatera.

Riwayat Maulana Rahmat Ali, secara singkat sebagai berikut : lahir pada tahun 1893. Setelah lulus sebagai pelajar generasi pertama dari Madrasah Ahmadiyah di Qadian pada tahun 1917

menjadi guru bahasa Arab dan Agama pada Ta’limul Islam High School di Qadian. Tahun 1924 dipindahkan ke Departemen Tabligh (*Nizarat Da’wat Tabligh*). Dari bulan Agustus 1925 sampai Juli 1950 bertugas sebagai mubaligh di Indoneia, tahun 1950-1958 bertugas di Pakistan Timur, dan tanggal 31 Agustus 1958 wafat di Rabwah.

Pada tanggal 17 Agustus 1925 di musim hujan, Maulana Rahmat Ali, berangkat dari Qadian menuju Indonesia. Biasanya Huzur mengantarkan para utusan yang akan berangkat ke luar negeri sampai di Jalan Moorh, sebuah simpang jalan, berjarak 4 km dari Qadian. Akan tetapi karena jalan tersebut tergenang air, beliau hanya dapat mengantarkan memakai Jalan Basrawan.

Dua hari sebelum keberangkatannya, tanggal 15 Agustus 1925, diadakan acara pelepasan M. Rahmat Ali HAOT yang dipimpin langsung oleh Hazrat Basyiruddin Mahmud Ahmad, selaku khalifah Ahmadiyah ke II. Pada

kesempatan tersebut, Khalifah memberi pidato yang isinya berupa wejangan kepada M Rahmat Ali HAOT agar berhasil dalam melaksanakan tugas di Indonesia. Isi wejangan tersebut dimuat dalam *Al-Fazl*, tanggal 20 Agustus 1925. Isinya antara lain :

1. Jangan memakai cara berdebat
2. Berbicaralah dengan ulama – ulama yang mencintai ilmu
3. Bicaralah dengan ulama-ulama yang memusuhi secara berempat mata
4. Bertablighlah kepada pemuka masyarakat



5. Bertablighlah secara bertahap dan teratur, pertama kepada orang yang baik-baik dan kemudian kepada orang yang tidak baik
6. Setialah dan taatlah kepada kebijakan pemerintah
7. Jangan mengambil muka pemerintah, tetapi mintalah apa yang menjadi hakmu
8. Di mana telah ada orang – orang Ahmadi bentuklah badan pengurus
9. Sibukkan berdoa setiap saat
10. Kirimlah laporan secara teratur kepadaku supaya situasi dapat dipantau
11. Ciptakanlah kebiasaan bertabligh kepada orang-orang baru dan jadikanlah mereka contoh yang baik supaya orang-orang mengerti hakekat Ahmadiyah
12. Ciptakanlah perdamaian untuk keamanan umum dan pemerintah
13. Jauhilah politik, supaya dapat berhubungan dengan masyarakat secara bebas
14. Bertablighlah secara korespondensi, tentukan tempat-tempat pertablighan
15. Jangan lalai menjalankan tugas
16. Tiga perempat dari iuran, belanjakanlah di sana dengan ikhlas dan jujur, sisanya kirim ke pusat
17. Jagalah kewajiban dan kehormatan diri sendiri dengan keagungan iman, orang – orang akan masuk Ahmadiya setelah melihat contoh yang baik
18. Majukan jemaat dengan penuh keikhlasan

Disamping itu juga, para pelajar Indonesia, sebelum keberangkatan M. Rahmat Ali HAOT terlebih dahulu memberi khabar kepada kerabat mereka melalui surat, baik baik yang di

Padang maupun Tapaktuan mengenai rencana kedatangan guru mereka di Sumatera. Bahkan para pelajar pun membekali M. Rahmat Ali HAOT dengan daftar nama beserta alamat para keluarga mereka di kampung.

Jalur yang ditempuh melalui Penang, terus ke Medan, menuju Sabang di Pulau Weh, terus ke Kotaraja (Banda Aceh), dan akhirnya pada tanggal 2 Oktober 1925 tiba di Tapaktuan, Aceh. Setelah melihat-lihat daftar nama dan alamat-alamat yang diberikan oleh para pelajar Indonesia di Qadian, Rakhmat Ali mencari dan tinggal di rumah orang tua Mohammad Samin, seorang pemuda Tapaktuan yang sedang belajar di Qadian.

Sebagaimana di tempat-tempat lain, di Tapaktuan pun masyarakat sudah mengenal kepercayaan akan datangnya Imam Mahdi. Sehingga para pelajar yang belajar di Qadian, menitipkan pesan kepada keluarga mereka melalui surat menjelang Rakhmat Ali tiba di Tapaktuan, agar apabila utusan pertama dari Imam Mahdi datang supaya diterima sebaik-baiknya.

Itulah sebabnya ketika Maulana Rahmat Ali tiba di pantai Tapaktuan, ia disambut oleh ratusan penduduk yang menunggu kedatangannya. Selaku juru bahasa dalam bahasa Arab yakni Abdul Wahid. Setibanya di tempat itu mulailah Maulana Rahmat Ali bertabligh. Walaupun ia belum dapat menguasai bahasa dan adat istiadat setempat, namun berkat sifat ramah tamah, suka bergaul dengan setiap orang, disamping berilmu, pandai bersenda gurau dan sifat pemberani yang ia miliki, ia mudah diterima orang. Maka dalam waktu beberapa bulan saja setelah kedatangannya di Tapaktuan telah berdiri jema'at. Sambutan penduduk amat hangat. Sudah berpuluh orang yang membenarkan pendirian Ahmadiyah dan beratus yang simpati. Suatu kepandaiannya pula, bahwa ia begitu mudah mendekati para hulubalang-hulubalangnya (kepala adat), padahal mereka terkenal sukar ditaklukkan.

Diantara mereka sudah ada yang mengaku terang-terangan mengikuti Ahmadiyah ialah:

1. Abdul Rahman;
2. Muhammad Syam;
3. Mahdi sutan Singasoro;
4. Mamak Gamuk
5. Munir
6. Ali Sutan Marajo
7. Sulaeman
8. Datuk Dagang Mohammad Hasan
9. Abdul Wahid¹⁶⁾
10. Mohammad Yakin Munir
11. Nyak Raja
12. Abas dan
13. Teuku Nasruddin

Peristiwa ini terjadi pada kira-kira akhir bulan Desember 1925. Adapun rumah yang dipergunakan untuk berkumpul ialah rumah Mamak Gemuk. Beberapa minggu setelah Maulana Rahmat Ali tiba di Tapaktuan terjadi perlawanan hebat dari Teuku Abasah di daerah Bakongan terhadap pemerintah Belanda, sehingga Pemerintah

16 *baiat tanggal 25-12-1925, kemudian menjadi mubaligh Markazi pertama dari Indonesia, non India / Pakistan dan sekaligus menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi anggota Majelis IFTA (Majelis Fatwa) terturut-turut selama 5 tahun dari tahun 1976-1981. Majelis tersebut beranggotakan diantaranya Tn. Sir Chaudry Zafrullah Khan, Prof. Abdus Salam. Anggota Majelis ini juga mempunyai hak suara dalam pemilihan Khalifah Masih. Dalam Majalah Al Fazl, 18 Januari 1936, terdaptar dalam Mubalighin Class dan setelah lulus ujian Mubalighin Class, maka bulan Oktober 1935, beliau diangkat menjadi mubaligh Markazi dan bekerja di Kantor Sadr Anjuman Ahmadiyah, Qadian, kemudian 16 Februari 1936 beliau ditugaskan ke Indonesia sebagai mubaligh Markazi (Keterangan tersebut berasal dari Vakillut Tabshir, Rabwah, Pakistan, sebagai lampiran memo Bpk. Mlv Sayuti Azis, Raisut tabligh, kepada tim penulis Sejarah Ahmadiyah tertanggal 20/10/99)*

Belanda merasa bimbang untuk memperpanjang waktu seorang asing berdiam di daerah yang sedang bergolak itu. Kontrolir Gubernur Belanda di Tapaktuan beberapa kali memanggil M. Rahmat Ali dan menyarankan agar bersedia meninggalkan daerah Aceh. Menanggapi hal tersebut, Rakhmat Ali, menjawab bahwa sebagai missionary Islam menurut hukum yang berlaku tidak halangan berdiam di daerah Tapaktuan, karena selama ini tidak akan ada orang yang menggangukannya, karena semuanya orang – orang yang beragama Islam.

Perdebatan di rumah Mamak Gamuk terjadi pada akhir Desember 1925 yaitu diskusi keagamaan antara M. Rahmat Ali dengan beberapa ulama dan guru – guru dari Padang Panjang (Sumatera Barat). Hadir juga dalam diskusi tersebut ialah para pelajar Sumatera Thawalib School dan golongan ahli Hadits. Perdebatan berlangsung sampai beberapa hari.

Persoalan yang dibahas antara lain mengenai :

1. Wafatnya Nabi Isa Almasih a.s
2. Kenabian tanpa syari'at
3. Da'wah Kenabian Hd. Mirza Ghulam Ahmad a.s
4. Hd. Masih Mau'ud a.s

Dalam debat itu para ulama tidak secara terang mau mengakui kekalahan mereka, tetapi menimbulkan kesan yang baik. Mereka yang kalah debat, kemudian menghasut orang-orang untuk melaporkan Rahmat Ali kepada polisi dan minta agar beliau diusir dari sana, seraya mereka menyebarkan isu, bahwa Mubaligh Ahmadiyah sebentar lagi akan lari dari daerahnya¹⁷.

Keadaan semakin menggelisahkan Gubernur Aceh. Akhirnya dengan perintah halus dia dipaksa meninggalkan Aceh. Setelah ia tinggal di daerah itu lebih kurang 3 (tiga) bulan, maka bulan Puasa tahun 1926 ia berangkat menyusuri pantai Barat Sumatera menuju

17 Surat Edaran Khusus, No. 04/1987 hal 18

rumah keluarga dari Abdul Aziz Shareef di Padang. Abdul Aziz Sharif adalah salah seorang pemuda Padang yang sedang belajar di Qadian, keluarga ini dikenal dengan sebutan keluarga Daud.

Keadaan Jema'at di Tapaktuan sepeninggalnya, tetap berkembang. Orang-orang Ahmadiyah tetap mendirikan sembahyang Jum'at di rumah Sulaeman, seorang Ahmadi yang mukhlis dan selalu bersedia mengurbankan segala – galanya untuk kemajuan dan perkembangan Ahmadiyah di daerah itu. Oleh Datuk Raja Ahmad di rumahnya pernah diadakan perdebatan antar Ahmadiyah dengan ulama yang berada di daerah Tapaktuan dua malam berturut-turut. Pendeknya seluruh daerah itu memperbincangkan soal – soal Ahmadiyah, yaitu kedatangan Imam Mahdi, wafat Nabi Isa A.S dan *Khatamannabiyyin*.

Perlu ditambahkan di sini, bahwa pemuda Zaini Dahlan yang telah tinggal di Qadian selama dua tahun, pada tahun 1925 karena urusan pribadi telah kembali ke Sumatera. Setelah selesai urusannya, ke Qadian dengan membawa empat orang pemuda Tapaktuan yaitu Abdul Wahid, Mohammad Yakin Munir (keduanya merupakan kemenakan dari Mamak Sulaeman), Abdur Rahman dan Abdul Rahim (keduanya merupakan putra dari Mamak Sulaeman dan adik dari Abdul Qoyum, yang telah lebih dulu belajar di Qadian), yang kesemuanya telah masuk Ahmadiyah ditangan M. Rahmat Ali. Mereka berangkat dari Tapaktuan pada tanggal 9 Juni 1926 untuk memperdalam studinya dalam agama dan tiba di Qadian pada tanggal 3 Juli 1926¹⁸.

Akan tetapi setelah rombongan tersebut meninggalkan tanah air, pemerintah di Tapaktuan menjalankan siasat untuk mengikis pertumbuhan Ahmadiyah di sana. Mereka dilarang melakukan sembahyang Jum'at di tempat sendiri dan harus bersembahyang sama – sama di mesjid umum. Setiap orang Ahmadi dipanggil oleh

18 JAI, 1975; *Jubilieum 50 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, hal. 13; dan Taslimah W, 1995, *Abdul Wahid, Mubaligh Markazi Pertama*, hal. 3)

Raja, tidak boleh berkumpul lagi. Diantara orang – orang yang anti Ahmadiyah terdapat Mamak Haji Abdullah.

Demikian kisah kedatangan muballigh pertama dari Jema'at Ahmadiyah di Indonesia sampai di Tapaktuan dan perkembangan selanjutnya setelah ditinggalkan pergi ke Padang. Dalam laporan Tahkrik Jadid tahun 1939, dilaporkan keadaan jemaat di Tapaktuan berjumlah 100 orang.

Maulana Rahmat Ali sampai di Padang pada bulan Maret 1926 dan selama di Padang menginap di rumah Sitti Baiman kemenakan dari Daud Bangsudirajo, seorang pedagang menengah dan murid dari Dr. H. Abdullah Ahmad seorang pemuka masyarakat yang terkenal di Sumatera Barat. Sitti Baiman adalah ibu dari Abdul Aziz sheef yang pada waktu itu sedang belajar di Qadian India.

Dengan bantuan Daud Bangsudirajo Maulana Rahmat Ali dapat melakukan tabligh di kalangan temanteman beliau para pedagang dan murid dari Dr. H. Abdullah Ahmad. Pertemuan dalam kelompokkelompok kecil biasa dilakukan di komplek pertokoan Pasar Goan Hoat dan di rumah Sitti Paiman di pasar Miskin Padang. Meskipun Maulana Rahmat Ali pada waktu belum lancar berbahasa Indonesia namun pembawaan beliau yang menarik dan sabar serta kemampuan beliau berbahasa Arab, telah mengundang perhatian yang besar dari masyarakat Padang terhadap dakwah yang dikemukakan beliau. Dakwah beliau sekitar kematian Nabi Isa a.s. berdasar AlQur'an dan hadist, begitu juga mengenai khabar Ghaib yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. tentang kedatangan Imam Mahdi atau Masih Mau'ud di akhir zaman dalam waktu yang dekat telah berhasil menarik symphyaty banyak orang kepada ajaran Ahmadiyah dan menjadi Issu yang menggemparkan kota Padang yang pada waktu itu berpenduduk tidak lebih dari 40.000 jiwa.

Pada suatu kali Maulana Rahmat Ali sedang bertukar pikiran dengan seorang pendeta Kristen di sebuah toko, ketika tiba-tiba

turun hujan lebat. Biasanya bila hujan mulai turun, maka akan berlangsung sampai berjam-jam. Pendeta itu berkata kepada Maulana Rahmat Ali “Bila agama tuan (Islam) adalah benar dan Kristen salah, maka berdoalah kepada Tuhanmu supaya hujan ini berhenti”.

Atas permintaan itu Maulana Rahmat Ali berdoa kepada Tuhan supaya hujan itu berhenti dan menjadi bukti bahwa Tuhan orang Islam adalah benar dan hidup. Tuhan mengabulkan doa beliau, dan dalam beberapa menit kemudian hujan itu berhenti.

Selain itu, pada suatu waktu terjadi kebakaran besar di pasar Miskin dengan api menjalar dengan cepat ke segala arah karena adanya angin yang cepat. Rumah Sitti Baiman tempat beliau menginap tampak terancam untuk segera dilalap api karena gejala api yang demikian besar di luar kekuasaan manusia untuk menguasainya. Dalam keadaan tidak berdaya demikian Sitti Baiman memohon kepada Maulana Rahmat Ali agar beliau berdoa memohon pertolongan Allah s.w.t. menyelamatkan rumah tersebut dari ancaman api. Dengan disaksikan orang banyak yang berkerumun ditempat itu Maulana Rahmat Ali rnenengadahkan tangan beliau sambil berdoa dengan khusus kepada Allah s.w.t. semoga Allah s.w.t. menunjukkan kekuasaan dan perlindungannya kepada hambanya dengan menyelamatkan rumah tempat beliau tinggal itu. Allah s.w.t. mengabulkan do'a beliau itu dan orang banyak menyaksikan dengan penuh keheranan bagaimana kemudian angin segera berputar arah sehingga lidah api yang mulai mendekati rumah itu berpaling kearah lain sehingga rumah itu betulbetul selamat sama sekali berkat pertolongan Tuhan.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh Komite Pencari Hak Penolak Subhat untuk mempertemukan Maulana Rahmat Ali dengan ulama terkemuka di daerah ini dalam suatu perdebatan yang disaksikan oleh orang banyak mengenai berbagai masalah

agama terutama mengenai dakwah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad selaku Imam Mahdi berdasarkan AlQur'an dan Hadits namun tidak berhasil. Jadi telah diperoleh kesepakatan dengan Ulama yang bersangkutan untuk mengadakan perdebatan umum tetapi pada hari perdebatan yang ditentukan Ulama yang bersangkutan tidak datang atau hanya mengirimkan saja muridnya yang tidak dikenal umum sehingga perdebatan menjadi gagal.

Berhubung karena itu dalam rapatnya yang diadakan pada tanggal 24 Juli 1927 dirumah Sitti Baiman tempat Maulana Rahmat Ali tinggal, diambil keputusan oleh Komite untuk membubarkan diri dan sekaligus mendirikan Cabang Jema'at Ahmadiyah Indonesia di kota Padang. Rapat ini disusul kemudian dengan rapat yang lebih besar yang diadakan di tempat yang sama pada tanggal 31 Agustus 1927 dengan mengundang bukan raja seluruh anggota Komite tetapi juga seluruh orang yang dianggap telah menerima da'wah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. rapat tersebut secara aklamasi menerima sepenuhnya keputusan Komite tanggal 27 Juli 1927 dan menetapkan pula tanggal 27 Juli 1927 sebagai hari berdirinya Cabang Jema'at Ahmadiyah di Padang. Rapat juga berhasil mengesahkan pengurus Cabang Padang yang pertama yang terdiri dari:

K e t u a	: Abu Bakar Ragindo Maharajo
Wakil ketua	: Daud Rangsi Dirajo
Sekretaris I	: Muhammad Thahar Sutan Maharajo
Sekretaris II	: Muhammad Saleh Sutan Rajo Endah
Komisaris	: Nurdin Sutan Maharajo
	: Bagindo Muhammad Syarief
	: Mara Baya

: Muhammad Yusuf
: Datuk Saidi Ragindo
Penasehat : Muhammad Saad Lelo Maharajo

Semua yang hadir dalam rapat itu dianggap sah menjadi anggota Jema'at Ahmadiyah Indonesia Cabang Padang yaitu:

Udin Rajo Nan Kayo	Buyung Hitam Marah Sampono
Pakih Isa	Hamid
Abdul Gafur	Lani Malin Malelo
Bakri	Muhammad Yunus Syah Rajo
Muhammad Syarif Sampono St.	Safiuddin
Ganin Randaro Sutan	Husni Pakih Bagindo
Osman	Gul bin Adam
Mandaro	Hitam Paduko Sutan
Nani	Ali bin Basalamah
Nurdin Sutan Marajo	

Abu Bakar Bagindo Maharajo, Ketua Komite Pencari Hak Penolak Subhat yang juga terpilih menjadi ketua Jema'at Ahmadiyah Indonesia Cabang yang Pertama, adalah seorang pedagang menengah di kota ini. Begitu juga hampir seluruh pengurus yang lain dan anggota yang pertama kali masuk kedalam Jema'at Ahmadiyah mempunyai profesi sebagai pedagang. Muhammad Thahar Sutan Maharajo adalah seorang pengacara atau penasehat hukum yang tidak resmi sedang Muhammad Saad Lelo Maharajo adalah seorang Mantri Kesehatan.

Dengan berdirinya Jema'at Ahmadiyah di kota Padang tentu saja menyebabkan reaksi dari para Ulama terhadap aliran baru dalam Islam ini makin meningkat. Anggota Jema'at Ahmadiyah

dicap Kafir dan mendengarkan da'wah dari orang Ahmadiyah dikatakan haram hukumnya. Walaupun demikian seluruh anggota organisasi yang baru berdiri ini mempunyai semangat baja dan tekad yang bulat untuk terus berjuang dengan mengorbankan harta, tenaga dan status sosial mereka ditengah masyarakat dan tersebarnya ajaran Ahmadiyah diseluruh daerah Sumatera Barat ini. Tidak lama kemudian seorang Pejabat Pemerintah yaitu Datuk Putih Gelat Datuk Maharajo yang berpangkat Demang (Wedana) dan seorang guru agama Murid H. Abdullah Ahmad bernama Marah Wahab masuk Jema'at Ahmadiyah. Hal ini makin meningkatkan semangat anggota dalam melakukan kegiatan organisasi.

Pada tahun 1923 jumlah anggota Jema'at Ahmadiyah Indonesia Cabang Padang telah mencapai lebih kurang 80 orang. Kegiatan Jema'at tidak terbatas dalam wilayah kota Padang saja tetapi juga meliputi wilayah sekitar kota Padang atau Sumatera Barat pada umumnya.

Sebagai tempat pusat kegiatan Jema'at disewa sebuah rumah di tepi Bandar Olo No. 19. Pada suatu waktu seorang Demang yang bersympathi kepada jema'at Ahmadiyah bernama Sutan Rezak menyerahkan langgar miliknya bertempat dijalan Damar III kepada Jema'at untuk dipakai untuk tempat salat, tetapi ketika beberapa bulan kemudian beliau meninggal dunia kemenakannya mengambil kembali dan menutup langgar tersebut.

Pada awal tahun 1928 telah dapat didirikan oleh Jema'at sebuah sekolah tingkat dasar dengan mendapat izin dari Residen Sumatera Barat. Sekolah tersebut terdiri dari empat kelas dan dipimpin oleh Maulana Rahmat Ali sebagai Inspektur dan H. Mahmud sebagai Guru Kepala. Gurunya yang lain adalah Osman dan Ja'far.

Pada pertengahan tahun 1928 diadakan rapat anggota untuk memilih pengurus baru dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Pelindung : Demang Datuk Putih Gelar Datuk

Marajo

Penasehat : Maulana Rahmat Ali H.A.O.T.
 Ketua : Abu Bakar Bagindo Maharajo
 Wakil Ketua : Haji Marah Wahab
 Pendahara : Daud Bangso Dirajo
 Sekretaris I : Guru Rahman Marah Suleman
 Sekretaris II : H. Mahmud.
 Komisaris : Nurdin
 : Marah Baya
 : Bagindo Muhammad Syarief
 : M. Marajo
 : Saad Sutan Suleman
 : Datuk Rajo Pesisir
 : Muhammad Yusuf
 : G. Saladin

Pada akhir tahun 1928 berhasil pula diterbitkan sebuah berkala yang mulamula terbit tiga kali sebulan tetapi tidak lama kemudian dijadikan dua kali sebulan.

Kaum ibu juga tidak mau ketinggalan dengan kaum bapak dalam mengabdikan kepada Islam dan Jema'at. Dengan izin Pengurus akhirnya pada tanggal 9 Desember 1928 berhasil didirikan Lajnah Imaillah Cabang Padang dengan ketuanya yang pertama Sitti Alam Sundari. Kegiatan Lajnah Immaillah ini lebih banyak diarahkan pada pembinaan anggota kedalam seperti Bidang Pendidikan dan peningkatan hubungan kekeluargaan antara sesama anggota.

Pada tanggal 9 Desember 1929 diadakan rapat anggota untuk memilih pengurus baru dan susunan pengurus yang terbentuk

adalah sebagai berikut:

Pelindung : Demang Datuk Putih gelar Datuk
 Marajo
 Penasehat : Saad Lelo Marajo
 : Daud Bangso Dirajo
 Ketua : Abu Bakar Bagindo Maharajo
 Wakil Ketua : H. Marah Wahab
 Sekretaris I : Nurdin Marah Marajo
 Sekretaris II : Harun Pakih
 Komisaris : Rahman Marah Sulaiman
 : Bagindo Muhammad Syarif
 : Ajusar Sutan Palindih
 : Marah baya

Pada pertengahan tahun 1929 kembali ke Padang dari Qadian pemuda Zaini Dahlan dan Ahmad Nurdin setelah beberapa tahun memperoleh pendidikan Islam dan Iktikad Ahmadiyah disana. Disamping bertugas sebagai muballigh beliau juga diangkat sebagai guru pada Sekolah di Jema'at Ahmadiyah Cabang Padang.

Pada tanggal 29 Oktober 1929 Maulana Rahmat Ali H.A.O.T. bersamasama dengan Abu Bakar Bagindo Maharajo dan Demang Datuk Marajo berangkat ke Qadian India untuk menghadiri Jalsah Salanah Jema'at Ahmadiyah disana. Abu Bakar Bagindo Marajo dan Demang Datuk Marajo kembali ke Padang tidak lama, kemudian. Selama beliau berada di India tugas beliau sebagai utusan Ahmadiyah telah beliau wakulkan kepada H. Mahmud. Pada tanggal 9 Mei 1930 diadakan rapat anggota untuk memilih pengurus Jema'at Ahmadiyah Indonesia Cabang Padang di Indonesia yang

baru dengan hasil sebagai berikut:

K e t u a : Abu Bakar Bagindo Marajo
Wakil Ketua : M. Thohar Sutan Marajo
Sekretaris I : Muhammad Syarif Sutan Sampono
Sekretaris II : Marah Simon
Rendahara I : Abu Pakar Marah Maharajo
Bendahara II : M. Saleh Sutan Rajo Endah
Komisaris : Uyun
: M. Nur.R. Rongsu
: M. Yusuf Sampono Rajo

Pada tahun ini sebuah buku pedoman untuk naik Haji yang disusun dan diterbitkan oleh Jema'at Ahmadiyah Indonesia Cabang Padang dengan nama Iqbalul Hak Kitaburrahmat selesai dipercetakan dan diserahkan pengurusnya kepada suatu panitia yang diketuai oleh Daud Pangso Dirajo dan Uyun. Dengan meningkatnya pertablighan yang dilancprkan oleh para mubaligh dan anggota Jema'at Ahmadiyah permusuhan dan Fitnah terhadap Jema'at juga makin bertambah keras. Anggota Jema'at dicap kafir, perkawinannya dianggap tidak sah dan anak yang dilahirkan dikatakan anak haram.

Karena berbagai tekanan ini, dua orang anggota Jema'at yang lemah Iman dan tidak tahan uji menyatakan keluar dari Jema'at Ahmadiyah. Mereka ini adalah Osman dan Nurdin Marah Maharajo. Surat kabar di Padang menyiarkan hal ini dan menyebut mereka sebagai orang yang telah bertobat.

Pada saat M. Rahman Ali HAOT berada di Padang, beliau mulai menerbitkan tulisan, baik dalam bentuk buku maupun majalah.

Salah satu buku tersebut berjudul "Iqbalul Haq Kitaboe'rrahmat" terbit tahun 1927, ukuran buku saku tebal 36 halaman, berisi uraian mengenai tata cara ibadah haji. Mereka menerbitkan majalah bulanan "Izhaarul Haq". Adapun jumlah anggota Ahmadi di Padang pada tahun 1931 yaitu 600 orang¹⁹. Semenjak 1 Januari 1931 Jema'at Ahmadiyah Indonesia Cabang Padang kembali menerbitkan sebuah berkala bulanan yang diberi nama "Islam". Majalah bulanan ini redaksinya terdiri deri Ahmad Nurdin dan A.A. Syarif, sedangkan pimpinnan usahanya adalah Marah Baya.



Foto Jemaat Ahmadiyah Padang Sumber : sumber :
Repro Album 1934

2. Periode II : Jawa

Tahun 1931, Rahmat Ali tiba di Batavia, kemudian menumpang di sebuah rumah petak kecil di daerah Bungur yang didiami oleh kerabat Daud Bangso Dirajo, bernama Jamal dan Acin. Rumah tersebut dirasakan oleh para penghuninya kuang besar dan tidak

¹⁹ Album Jemaat, 1939:3

representatif. Oleh sebab itu tidak berapa lama mereka pindah ke sebuah rumah yang besar. Letaknya di Defensielijn van den Bosch nomor 139, Welvreden, (sekarang: Jl. Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat) dengan uang sewa f 40, - sebulan. Pada ketika itu sudah ada pula pengikut Ahmadiyah dari pada Padang yang bernama Abdul Gani. Kemudian menyusul pula pada tahun 1932, Abdul Jalil yang telah bai'at di Padang pada tahun 1929 dan selanjutnya datang Maralin.

Setelah pindah rumah, M. Rahmat Ali mulai melakukan tablighnya sehingga tidak berapa lama rumah tersebut selalu ramai dikunjungi orang yang ingin mendapat penjelasan mengenai Ahmadiyah. Di antara usaha yang dilakukan oleh muballigh Ahmadiyah itu ialah memberi pelajaran bahasa Arab. Kursus itu diikuti oleh beberapa orang antara lain : Soemarna, R.O Hidayat. R.Moh. Anwar, R. Moh. Toha Mihardja, Undun Abdullah, kelima-limanya dari Garut; Abdul Djalil, Tahar Sutan Marajo dari Padang dan Hasan Delais dari Palembang.

Dari Sawah Besar seorang Manado bernama Th. Dengah beserta isterinya yang bernama Nyi. R. Soekarsih asal Sukabumi, dan Simon Sirati Kohongia, orang yang menumpang di rumah keluarga Dengah itu, sering mendatangi M. Rahmat Ali. Rumah di Jalan Defensielijn van den Bosch itu. Akhirnya tempat tersebut menjadi tempat serbaguna, baik untuk da'wah untuk kursus maupun mesjid.

Pada suatu waktu. M Rahmat Ali mencari sebuah buku yang bernama *Fatuhatul Makkiyah* di toko buku Al Ma'arif di Krukut. Kebetulan buku tersebut telah dibeli oleh seorang ustadz bernama Abdul Razak yang tinggal di Krekot. Maka berkunjunglah muballigh Ahmadiyah itu ke rumah ustadz Abd. Razak. Setelah tuan rumah mendengar maksud kedatangan tamunya yaitu untuk mencari buku yang berjudul *Fatuhatul Makkiyah* namun, Abdul Razak kurang percaya terhadap kemampuan muballigh Ahmadiyah dalam

menelaah kitab tersebut. Maka timbullah pembicaraan mengenai berbagai masalah keagamaan. Akhirnya ustadz Abdul Razak sangat tertarik oleh penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh M. Rahmat Ali. Kepada murid-muridnya yang ketika itu sudah mencapai ratusan orang jumlahnya. Abdul Razak mengajak mereka untuk mengunjungi M. Rahmat Ali di Jalan Defensielijn v.d Bosch, termasuk ikut Syatiri, Jian, Muhayar. Abdurahman, Sya'ban, H. Abdullah dan Ahmad Jupri. Murid-murid lainnya dari Pejambon turut pula mengikuti jejak kawan-kawannya antara lain Marji dan isteri, Ibunya Marji, Murdan, Iking, dan Nelan.

Selain dari keluarga Th. Dengah dan Sirati Kahongia telah bergabung pula dari Sawah Besar antara lain Bosch Dengah, S Sumapraja, dan isteri, Noa, Sagaf Tomalo dan Sadrudin Yahya Pontoh. Juga, seorang Arab Totok berasal dari Hadramaut bernama Salim bin Salman bin Sungkar telah pula tertarik oleh Ahmadiyah.

Oleh karena dari hari ke hari pengikut M. Rahmat Ali semakin bertambah, maka mereka bersepakat untuk membentuk pengurus. Susunan pengurus Ahmadiyah di Betawi yang pertama terbentuk dalam tahun 1932 sebagai berikut :

Voorzitter (ketua)	: Abdul Razak
Sekretaris	: Simon (Sirati) Kohongja
Kommissarissen	: Th. Dengah, Ahmad Jupri dan Murdan

Dengan beranggotakan : lk 27 orang



Foto Ahmadiyah Jakarta, 1932, Sumber repro Album, 1934

Sungguhpun Ahmadiyah di Betawi sudah berkembang, akan tetapi untuk melebarkan sayapnya, M. Rahmat Ali masih menghadapi kesulitan, antara lain karena belum begitu menguasai bahasa Melayu (Indonesia). Hal ini diberitahukan kepada Ahmadiyah di Padang. Dari Padang kemudian dikirim seorang anggota bernama H. Marah Wahab, untuk mengajari bahasa Melayu. Selain untuk maksud memberi pelajaran kepada Rakhmat Ali, H. Marah Wahab juga bermaksud menemui adiknya yang telah lama tinggal di Bogor. Taher Sutan Tumenggung, adalah adik Marah Wahab, ia menjabat President Landraad Bogor juga sebagai ketua dari sebuah perkumpulan di kalangan kaum intelek muda yang bernama "Jong Islamieten Bond" cabang Bogor. Kebetulan "Jong Islamieten Bond" di Bogor.

Ketika itu sedang utamanya mengadakan pertemuan-pertemuan minggunya di gedung Rumah Bola Harsodarsono" di Jl, Kebun Jae, untuk membicarakan berbagai masalah agama Islam. Oleh

salah seorang yang bernama S.A.S. Pontoh pernah dikemukakan pertanyaan "apa sebabnya babi haram" yang memberi kesempatan kepada para kyai untuk mem bahas nya. Akan tetapi penjelasan-penjelasan yang dikemukakan mereka tidak memuaskan para cendekiawan yang bergabung dalam perkumpulan tersebut. Ketua perkumpulan itu pernah mendengar bahwa Ahmadiyah pernah menghebohkan Padang, maka Taher Sutan Tumenggung, meminta kakaknya untuk membawa M. Rahmat ali ke Bogor. Dengan adanya permintaan itu kini terbukalah daerah pertablighan di kalangan para intelek. Setiap masalah yang dikemukakan kepadanya termasuk soal "Apa sebabnya babi haram" mendapat penjelasan yang memuaskan. Berkat keuletan dan kesabaran perjuangan muballigh Ahmadiyah itu, akhirnya berhasil memuaskan beberapa orang ke dalam Ahmadiyah, antara lain Mohammad Taher gelar Sultan Tumenggung R. Hidayat, R. Sudita, Sulaeman, S.A.S Pontoh, Usman Natawijaya, Jakaria dan R. Gumiwa Partokoesoemah. Tidak berapa lama kemudian, yaitu pada bulan November 1932 terbentuklah cabang kedua di Jawa, yaitu Bogor dengan susunan pengurusnya sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|----------------|
| Voorzitter (ketua) | : R. Hidajath |
| Sekretaris | : Jakaria |
| Penningmester | : N. Madjid |
| Dengan beranggotakan | : lk. 10 orang |

Selanjutnya Abdoerahman A (1985, hal 7) menjelaskan bahwa M. Rahmat Ali, HAOT pada bulan Maret 1933, pindah rumah dari Deffeenslejn van Den Bosch ke Gang Bunder. Pasar Baru, menempati rumah petak semi permanen milik H. Abdullah. Rumahnya cukup besar dan memiliki serambi depan yang cukup luas juga. Perlu dicatat, bahwa pada suatu malam dalam pengajian telah hadir seorang muballigh Ahmadiuyah Lahore, M. Wali Ahmad

Begh yang rumahnya di Purwokerto, ia diminta oleh Rahmat Ali HAOT untuk ikut berceramah mengenai masalah kenabian, sayang di menolak untuk ikut berbicara, padahal Mln. Rahjmat Ali dan hadirin mendesaknya. Rupanya ia bingung dan tidak yakin atas kepercayaannya, bahwa sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi, ia takut kalau-kalau dibantah oleh M. Rahmat Ali HAOT.

Setelah pindah ke Gang Bunder, jumlah pengikut jemaatpun menjadi meningkat seperti R. Muhjidin, R. Kartaatmaja, Acep Barmawi, Moh. Tojib Ahmadi, R. Isa, R. Muhammad Yusuf Ahmadi, R. Tatang Muhtas Ahmadi, R. Abdoerahman Ahmadi, Sri Gomar, Cutak Gedad, Sali, Jona, Neri (5 orang yang disebut terakhir dikenal sebagai jawara Betawi saat itu).

Suatu peristiwa yang kiranya pantas dikemukakan di sini ialah ketika para jawara Betawi masuk jemaat, bermula pada tahun 1932 seorang Ahmadi bernama Saijim mendengar cerita temannya itu, tak ayal lagi ia mengajak Sri Gomar mendatangi rumah M. Rahmat Ali. Setelah mereka tiba, maka apa yang dilihat oleh Gomar dalam mimpi tersebut sama dengan sosok M. Rahmat Ali, Oleh karenanya sejak itu ia mengikuti Ahmadiyah. Setelah beberapa waktu ia mendapat pelajaran agama dari muballigh Ahmadiyah, Sri Gomar ditugaskan untuk bertabligh. Ia harus mencari empat orang kawannya tukang pukul. Atas usaha Sri Gomar akhirnya Djona asal Tangerang, Hasan asal Kerendang /Angke. Cutak Gedad asal Gondrong, dan Sali asal Perigi, keempat-empatnya jagoan di daerahnya masing-masing masuk Ahmadiyah. Begitu pula Neri dari Cikarang menyusul menjadi Ahmadi. Kelima orang inilah akhirnya merupaka tenaga-tenaga inti yang mengembangkan Ahmadiyah di daerah mereka masing-masing yaitu : daerah Tangerang, Kerendang, Gondrong, Perigi, Pinang dan Cikarang.

Kemudian pada akhir tahun 1936 M. Rahmat Ali HAOT mengambil cuti selama 1 tahun pulang ke Qadian, karena M. Rahmat Ali HAOT cuti, maka para penghuni Gg. Kleykamp itu

masing-masing pindah rumah. Kemudian tahun 1937, M. Rahmat Ali HAOT kembali ke Indonesia, disekitar tahun itu pula ditugaskan 3 muballigh Markazi di Indonesia, yaitu :

1. Mlv. Abdul Wahid, HA, Muballigh Markaz, di Garut, tahun 1936
2. Mlv. Malik Azis Ahmad Khan, muballigh dari program takhrik jadid di Surabaya, tahun 1937
3. Mlv. Sayyid Syah Muhammad Al Jaelani, muballigh dari program takhrik jadid di Purwokerto, tahun 1938

Sekembalinya dari Qadian, M. Rahmat Ali HAOT tinggal bersama dengan Acep Barmawi, Jl, Petodjo illir, Jakarta Pusat yang pada saat itu sebagai ketua jemaat Jakarta. Kemudian pindah ke rumah R. Kartaatmadja, mengisi kamar depan menjelang selesainya pembangunan pavilun mesjid Hidayat. Setelah selesai pembangunan rumah misi tersebut, beliau pindah ke rumah tersebut.

Selanjutnya fungsi mesjid Hidayat ini tidak hanya sekedar untuk sholat namun lebih difungsikan sebagai pusat pertablighan di Indonesia, baik tempat diskusi, bahkan menjadi tempat pencetakan dan penyebaran buku-buku Jemaat yang ditulis oleh M. Rahmat Ali, H.A.O.T

3. Perluasan Daerah Tabligh

3.1. Perintisan Jemaat Ahmadiyah Gondrong

Masuknya Ahmadiyah untuk pertama kali di Gondrong, terjadi pada tahun 1933 sewaktu muballigh dari India bernama Rahmat Ali HAOT datang membawa kabar suka tentang kedatangan Imam Mahdi yang di janjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Cara beliau bertabligh terutama tentang Islam sangat menarik sehingga satu persatu orang masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Termasuk seorang jagoan Betawi yakni Cutak Gedad asal Gondrong.

Diantara ibu-ibu yang pertama kali baiat yang kemudian

merintis pendirian Lajnah Imaillah di sini pada tahun 1940 adalah Ny. Halimah, namun Licabang Gondrong baru diresmikan tahun 1945 dengan ketuanya Ny. Halimah sendiri. Anggota pada waktu itu kurang lebih berjumlah 10 orang

Kurangnya bimbingan dari bapak-bapak, terutama juga hubungan yang sulit antara kediaman anggota, sehingga sukar dikunjungi dan banyaknya ibu-ibu yang masih buta huruf, menjadi sebab kurangnya kemajuan Lajnah Imaillah pada waktu itu.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam membantu cabang, khusus mengenai pengajian dan pendidikan bagi Atfal/Banath dan membantu anggota LI yang ekonominya lemah.

Adanya pertambahan anggota menjadi 15 orang dan munculnya generasi baru, maka sekarang kemajuan Lajnah meningkat sedikit demi sedikit. Pada tahun 1978 terbentuklah pengurus baru untuk masa bakti 1978 s/d 1983 dengan Ketua di Pegang oleh Ny. Rasinah.

3.2. Jemaat Ahmadiyah Tangerang, Jawa Barat

Pada suatu ketika di tahun 1932 Utusan Rahmat Ali H.A.O.T hendak membeli buku di sebuah toko buku di Jakarta. Kebetulan buku tersebut telah habis terjual, baru saja dibeli oleh Abdul Razak, sehingga Rahmat Ali H.A.O.T. berkunjung ke rumah Abdul Rozak, sehingga terjadi diskusi mengenai Ahmadiyah yang disaksikan oleh muridnya. Abdul Razak adalah seorang guru (alim) yang sangat berpengaruh. Dalam diskusi Abdul Razak merasa kalah, kemudian beliau masuk Jemaat bersama beberapa orang muridnya termasuk Jian, sebelum terjadi perdebatan di Gang Kenari. Kemudian Ibu Hapsah masuk Jemaat mengikuti suaminya Jian bekerja keras siang malam untuk bertabligh, sebelum terjadi perdebatan di Gang Kenari. Kemudian Ibu Hapsah masuk Jemaat mengikuti suaminya. Djian Sulaeman.

Djian bekerja keras siang malam untuk bertabligh, baik kepada keluarga sendiri maupun kepada keluarga sendiri maupun

kepada keluarga dari isterinya dan begitu pula kepada masyarakat di sekitarnya. Setelah mendengar adanya Ahmadiyah maka Ibu Hapsah disuruh bercerai oleh saudara-saudaranya. Ibu Hapsah Jian diasuh oleh bibinya yang bernama Ibu Mirah. Sehingga Ibu Hapsah Jian diusir tidak boleh kembali lagi dengan saudara-saudaranya apabila tidak keluar dari Jemaat. Akhirnya Ibu Mirah marah sampai beliau meninggal.

Dari tahun 1932-1974 tidak ada hubungan lagi dengan keluarga. Baru pada tahun 1974 anak-anak ibu Hapsah mengetahui bahwa saudara-saudaranya termasuk orang-orang mampu di Tangerang. Boikotan sangat keras, sehingga jalan menuju rumah Jian di pagar dengan pohon bambu oleh kakaknya sendiri. Namun beliau tidak putus asa malah lebih giat dengan rasa sangat gembira sekali, karena setiap bertablighkan selalu menang /unggul. Atas karunia Allah SWT berturut-turut yang baiat antara lain : Ibu Gomar alm. Ibu Ranem, Ibu Said (di Pondok Aren), Ibu Sinah alm, Ibu Renah alm , Ibu Aisyah Musa di Tanjung Pasir , Ibu Sawi , yang lebih dahulu baiat daripada suaminya . Karena sering ditablighi , akhirnya suami Ibu Sawi baiat,yakni Ali, pada jam 12.00 menerima kebenaran pada Jemaat . beberapa jam kemudian, yakni jam 16.00, diresolusi oleh kampungnya, berbuntut pada pemecatan pada jabatan ke- Amilan -nya.

Ibu Qomar adalah seorang dukun beranak, pada waktu Ibu Ripin akan melahirkan , dicari ke sana ke mari menjadi dukun beranak tidak ada yang mau menolong . Akhirnya bayi lahir dengan selamat ,yang ditolong oleh Ibu Gomar , sehingga mulai itulah yang pertama menerima kebenaran masih Mau' ud a.s.

Ada lagi peristiwa lain, Ibu Renah adalah ibu kandung dari Jian . Waktu Ibu Renah meninggal yang membantu usungan adalah famili mereka yang anti jemaat . Mereka datang dengan membawa usungan tanpa di suruh . Setelah selesai maka usungan itu dipakai, hingga dimakamkan yang diiringi oleh Jian , Nirah dan saudara -

saudara jemaat yang datang dari jauh . ketika mayat itu diturunkan dari usungan dan diletakan, tiba-tiba usungan itu rusak berantakan . Hal itu mungkin disengaja oleh famili mereka yang anti Jemaat , agar supaya mayat itu terjatuh ketika diusung. Kejadian itu sungguh membangunkan bulu roma, Namun Allah SWT memperlihatkan pertolongan – Nya, sehingga usungan itu tidak berantakan dan mayatnya tidak jatuh.

Jarak antara makam dan rumah cukup jauh , jalannya jelek , rusak karena memang jalan itu biasanya untuk kerbau . Timbullah fitnah yang disebarkan oleh familinya / kakaknya, bernama Ibu Arman, mengatakan bahwa dahi mayat di-*tapak jalak* (palang salib) dan dikafani dengan kain hitam bukan dengan kain putih , maka orang sekampung menjadi ramai karena kejadian tersebut .

Ada lagi pengalaman dari Ibu Muinah . Ibu Muinah baiat pada tahun 1969, dijalan Balikpapan Jakarta, beliau adalah seorang murid yang sangat dicintai oleh gurunya ,karena kebolehan suaranya yang lembut dalam membaca Al – Qur'an . Mendengar Ibu Muinah masuk Jemaat , maka guru nya marah dengan melontarkan kata-kata “ *kalau kawin dengan orang Qadian seperti minyak campur air*” Berarti bercerai dengan Tuhan, dengan teman –teman juga dengan guru-guru. Mulai hari ini kamu jangan menginjak lagi rumahku (guru)”. Sampai sekarang ia diasingkan, dibiort, tidak mau menegur lagi. Kemudian Ibu Muinah datang ke rumah Kyai. Kyai itu sudah mendengar bahwa Muinah sudah masuk jemaat. Ketika Ibu Muinah memberi salam, jawab Kyai, “saya tidak mau menerima orang kafir”. Kyai itu langsung kesurupan ? kemasukan setan yang menyatakan “saya Siti Hadijah “. Siti Hadijah itu mengatakan , “Cutak gedad nanti lidahnya dia yang menarik dari bumi sampai ke langit”. Cutak Gedad adalah seorang yang terkenal kegagahannya, mempunyai ilmu-ilmu ghaib, jagoan yang kalau ditembak tidak mempan, bisa menyebrangi sungai hanya dengan mengendarai kudah, lalu masuk Jemaat. Di Jemaat pun ia terkenal keberaniannya. Oleh ayahnya sendiri dia diboikot. Pernah dia cerita Jemaat dengan ayahnya, lalu

ayahnya menghardik dengan ucapan, “jangan bicara Ahmadiyah, saya sudah tidak sudi mendengarnya lagi. Orang yang masuk Ahmadiyah *mah* orang yang enggak punya akal.”

Kegiatan ibu-ibu Lajnah ialah tabligh secara pribadi, masing-masing dengan cara gaya tersendiri. Tidak ada yang tidak mendapat perlawanan. Ibu Maryam sedang mengajar sampai dipanggil penilik SD , H. Saman BA atas perintah Husein, Kep. Dep. P & K Kecamatan Tangerang, karena menyebarkan buku-buku dan brosur-brosur Jemaat, kepada Majelis Ta'lim yang diselenggarakan oleh PGRI dan dilarang mengikuti pengajian oleh H. Munir BA dan Djarnuji BA yang menjadi ustadz pada pengajian itu. Dalam pengajian itu selalu diadakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada ustadz, ternyata beliau tidak dapat menjawabnya maka selalu dijawab oleh Ibu Maryam sendiri yang menjelaskan dihadapan majlis ta'lim . Oleh karena dianggap oleh ustadz itu mengajarkan Jemaat, akhirnya tidak diperbolehkan lagi mengikuti pengajian.

Anggota Jemaat kebanyakan dari keturunan Ibu Sopiah, Ibu Nurjanah, Ibu Aishah, Ibu Zaenab, Ibu Sakinah, Ibu Atun, Ibu Masnih, Ibu Siah,. Ibu Uti, Ibu Hamdah, Ibu Rosinah dan lain-lain.

Dari tahun 1932-1977 tidak ada susunan pengurus cabang, namun baru dibentuk pengurus yang sederhana pada tanggal 9 Ihsan 1356 HS / Juni 1979 dengan jumlah anggota 50 orang. Pada tahun 1981 berdiri ranting Perumas, sehingga anggota bertambah menjadi 80 orang. Oleh Karena tempat tinggal berjauhan maka kegiatan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Kelompok kampung Kosong, 2 kelompok kelapa, yang memberikan ceramah ialah Harun Aswad.

Lajnah Imaillah cabang Tangerang didirikan pada tanggal 9 Ihsan 1358 HS/Juni 1979, dengan perintis Ny. Hapsah Djian beserta anak cucu, menantu dan sekaligus bersama keluarga. Pengurus yang pertama diketuai oleh Ny. Maryam Djian. Kegiatan-kegiatan dibagi menjadi 4 ranting, di ranting Tangerang tiap hari Minggu, di

ranting Perumnas tiap malam Senin, di ranting Kampung Kosong dan ranting Kampung Kelapa setiap Minggu pertama tiap bulan, di rumah-rumah anggota bergiliran. Pelajaran yang diberikan ialah ketrampilan, ceramah dari Ustadz Harun Aswad. Pelajaran untuk athfal / banath diberikan pada tiap-tiap hari Minggu.

3.3. Jemaat Ahmadiyah Cisalada, Jawa Barat

Pada tahun 1309 HS/ 1932, telah datang seorang bapak dari Bogor yaitu Tamin mengunjungi kaum ibu di Cisalada dengan membawa pelajaran-pelajaran Ahmadiyah. Seorang ibu yang bernama Maya bertempat tinggal di Kampung Cibuntu kira-kira 3 km dari Cisalada, mengundang Tamin itu dengan maksud hendak memperdalam pelajaran tersebut di rumahnya. Setelah beberapa kali diadakan pengajian, timbul reaksi dari masyarakat bahwa katanya pelajaran tersebut menyimpang dari ajaran Islam. Suatu waktu, Maya mengadakan lagi pengajian yang diikuti oleh kaum dan juga dihadiri oleh Camat\, Lurah dan tokoh-tokoh ulama di Cibuntu, sampai halaman rumah di mana pengajian itu diselenggarakan penuh sesak oleh tamu. Akan tetapi pada waktu pengajian berjalan timbul kekacauan di luar rumah, sehingga timbul suatu dialog antara mereka dengan Maya. Pada keesokan harinya Maya pergi ke Bogor melaporkan kejadian tersebut kepada Hidayat, yang kemudian langsung melaporkannya lagi kepada M. Rahmat Ali H.A.O.T di Jakarta. Diputuskan pada waktu itu supaya mengadakan lagi pengajian dimana M. Rahmat HAOT akan hadir mengadakan dialog tentang masalah Ahmadiyah dengan mereka. Pada waktu yang telah ditetapkan, tidak seorangpun dari mereka yang hadir, sehingga Maya pergi mendatangi ke rumah-rumah dan meminta hadir dalam pengajian tersebut. Namun mereka kesemuanya menolak. Tiga bulan setelah kejadian tersebut, terjadi musibah terhadap mereka, ada yang mati mendadak. Demikianlah perjuangan Maya selaku perintis Lajnah Imaillah di daerah Cisalada. Pada tahun 1312 HS/1933 M, beberapa keluarga ikut baiat.

Atas petunjuk dari Zakaria dari Bogor, pada tanggal 13 Tabligh 1330 HS/ Februari 1951 M, didirikan Lajnah Imaillah cabang Cisalada dengan dibentuknya susunan pengurus yang diketuai oleh Ibu Ita, hingga sekarang, telah terjadi 9 kali pergantian pengurus yang masing-masing secara berturut diketuai oleh ibu Hindun selama 4 masa bakti, ibu Herti selama 3 masa bakti dan ibu Masyitoh.

3.4. Kongres Jemaat Ahmadiyah Tahun 1935

Pertama kali pada tanggal 25 dan 26 Desember 1935 diadakan Konferensi (Kongres) di Clubgebouw di Kleykampweg 41 Batavia Centrum yang dihadiri 13 pemimping Jemaat Ahmadiyah termasuk M. Rahmat Ali HAOT, maka terbentuklah Hoofbestuur Ahmadiyah dengan R. Moh Muhyiddin sebagai Ketua (Presiden A'la) pertama kali²⁰.

3.5. Kongres Jemaat Ahmadiyah Tahun 1937

Kongres ini dilaksanakan setelah selesai pembangunan pertama mesjid Al Hidayat di Jakarta, ketika R. Moh Muhyidin menjadi Ketua Umum PB Ahmadiyah Indonesia dan hanya dihadiri oleh beberapa Ahmadi dari daerah Jawa Barat. Berlokasi di Petojo Udik VII/10 Batavia Centrum (sekarang : Jl Balikpapan I/10 Jakarta Pusat) pada tanggal 12 & 13 Juni 1937. Sebelum kongres ini Ahmadiyah di Indonesia dinamakan ANJUMAN AHMADIYAH QADIAN DEPARTEMEN INDONESIA (AAQDI) dan dalam Kongres inilah diadakan AD / ART yang bersesuaian dengan bentuk organisasi di Markaz Ahmadiyah Qadian, dan namanya ditetapkan menjadi ANJUMAN AHMADIYAH DEPARTEMEN INDONESIA (AADI)²¹.

20 Surat Edaran Khusus No. 28 Tanggal 5 Juli 1982 hal 5 dalam lampirannya oleh R. Andang Hamid

21 Surat Edaran Khusus NO. 28 tersebut dalam lampirannya hal.5 dan Sinar Islam No. 3 bulan Maret 1956 hal. 15

3.6. Pendirian Neratja Trading Co

Tatkala Ahmadiyah pada tahun 1932 mulai berkembang di Jakarta dan Boagor, dari beberapa orang timbul suatu gagasan untuk menerbitkan majalah bulanan, agar seruan Ahmadiyah lebih luas. Ketika itu Hasan Delais, yang disokong oleh Taher Marajo, Abdul Toyyib, Abdul Samik, Yahya Pontoh, Th. Dengah, Abdul Tazak dan Abdulgani berusaha untuk menerbitkan majalah bulanan yang diberi nama "sinar Islam". Majalah tersebut dipimpin oleh "Commissie van Redactie". Beralamat di Def. V.d. Bosch 139 Weltevreden. Mulai saat itulah Ahmadiyah melancarkan pertablighan melalui majalah "Sinar Islam" yang sekaligus dipergunakan pula untuk menjawab tuduhan-tuduhan dan fitnahan-fitnahan dan berbagai organisasi maupun majalah seperti:

1. Muslim India (padang)
2. Pembela Islam (Bandung)
3. Batu Ujian (Payakumbuh)
4. Dewan (Jogya).
5. Sinar Aceh (Kotaraja), dll.

Dummy-number "Sinar Islam" diterbitkan pada bulan September 1932, dicetak di Percetakan Van Velthussen, Weltevreden (Jakarta). Oleh para pengikut Ahmadiyah pada ketika itu, majalah yang baru tertib tersebut dijadikan mass media yang giat sekali diedarkan, sehingga sampai pula di kalangan kaum intelektual.

Dengan berpindahnya pusat kegiatan Ahmadiyah dari Defensielijin v.d Bosch ke Gang Bunder, maka alamat "Sinar Islam" pun dalam penerbitan selanjutnya memakai alamat yang sama.

Atas prakarsa beberapa anggota di rasa perlu membentuk yayasan atau usaha untuk menlegalkan literatur yang diterbitkan maka atas pertimbangan M. Rahmat Ali HAOT, seperti R. Yusuf Ahmadi, Bachtiar, Yaqin Munir, A. Majid, E. Sulaeman, A Rosadi

Soerpardja, R. Bunyamin dan Bahrur Rangkoeti, memelopori pendirian suatu badan hukum usaha Neratja Trading Company, Pendirian badan usaha tersebut didaftarkan kepada notaris sie Khwan Djioe di Jakarta tanggal 2 Oktober 1947, terdaftar di pemerintahan No. 79 tanggal 7 Oktober 1947 dengan direktur R. Soepardjo. Akta tersebut ditandatangani oleh R.Yusuf Ahmadi, Soepardja, R. Bunyamin dan Bahrur Rangkoeti, dan pejabat notaris O, Gaspers, LS. T. Han Sie Khwan Djioe.



Para pendiri Neratja Trading Co, 1947, Sumber :repro Jubiliun,1974

Badan ini sangat menunjang bagi pertablighan jemaat di kemudian, lewat lembaga ini, M. Rahmat Ali HOAT, semakin produktif menulis buku, selain alasan karena Pemerintah Jepang saat itu melarang semua jenis aktivitas organisasi masyarakat. Beberapa Ahmadi dikerahkan untuk membantu M. Rahmat Ali HAOT, sebagai juru tik, karena cara beliau mengarang buku yaitu langsung seperti ceramah, para juru tiklah yang menulisnya yang kemudian dikoreksi oleh beliau. Menurut R.Ahmad Anwar, salah

seorang juru tik, kadang-kadang beliau suka memberi tanda terima kasih kepada para juru tiknya yaitu dalam bentuk pencantuman namanya dalam naskah tersebut sebagai pengarang, misalnya buku "Takdir" diberikan kepada Soepardja, "Hindu contra Muslim" diberikan kepada R. Yusuf Ahmadi

Dalam masa jeda tersebut, M Rahmat Ali HAOT telah menyusun kurang lebih 90 judul naskah, namun hingga beliau pulang ke Qadian, hanya kurang lebih 20 judul yang diterbitkan. Menurut R.A Anwar jug, hal ini dikarenakan Neratja Trading Co. Dibekukan oleh PB saat itu. Hal tersebut disebabkan adanya kecurigaan dari sebagian mubaligh senior terhadap penggunaan dana neratja Trading Co. Sehingga pada pertengahan tahun 1949, terjadi sidang luar biasa terhadap beberapa pengurus Neratja Trading Co. juga M. Rahmat Ali, HAOT, mempertanyakan keabsahan dana operasional tersebut.

Menurut Supardja bahwa tuduhan tentang keabsahan dana operasional Neratja Trading Co, tersebut, Itu tidak benar karena M. Rahmat Ali ketika meninggalkan Indonesia tidak memiliki harta benda, maka tidak mungkin dana tersebut dari uang jemaat. M Rahmat Ali Meninggalkan 10 buku yang sudah dicetak dan 13 buah buku yang siap disebarkan dan hampir 20.000 buku siap dijual²².

M. Rahmat Ali, HAOT, menjelang kembalinya ke Qadian tahun 1960, menitipkan naskah-naskah yang belum dicetak tersebut kepada para pengurus Neratja Trading Co. yang masih bersemangat untuk diterbitkan kemudian²³

3.7. Perdebatan Antara Ahmadiyah dengan Persis / Pembela Islam

Dengan semakin meluasnya daerah pertablighan, maka semakin banyak pula reaksi dan perlawanan umum terhadap

22 surat Supardja kepada Khalifatul Masih IV tanggal 27 Mei 1987

23 hasil wawancara dengan R.A. Anwar tanggal 3 Maret 2000

Ahmadiyah, antara lain dari fihak Persis / Pembela Islam, Bandung dibawah pimpinan A. Hasan, yang selanjutnya mengakibatkan adanya perdebatan antara kedua belah pihak. Openbare Debatvergadering (pertemuan Perdebatan) yang pertama diadakan bulan April 1933, bertempat di Gedung Societit "Ons Genoegen" Naripanweg, Bandung, dengan acara sebagai berikut :

Tanggal 14 - 4 - 1933 : Tanya Jawab

Tanggal 15 - 4 - 1933 : Masalah hidup matinya Nabi Isa A.s

Tanggal 16 - 4 - 1933 : Lanjutan masalah hidup matinya Nabi Isa a.s

Sebagai debatters dari pihak :

1. Ahmadiyah terdiri dari :

- M. Rahmat Ali HAOT
- M. Abubakar Ayyub H.A
- M. Moh Sadiq H.A. bin Baraktullah

2. Pembela Islam : A. Hasan cs (Persis)

Verslanggever : Taher gelar Sutan Tumenggung

Pimpinan : Moh. Syafi'i dari PSII, Bandung

Pengunjung: Lk. 1.000 orang

Rombongan Ahmadiyah yang berangkat dari Jakarta terdiri dari M. Rahamat Ali AOT, M. Abubakar Ayyub H.A, M. Moh Sadiq H.A. S Sumapraja, Th. Dengah, Sirati Kohongia dan Syekh H Mansoer. Sedangkan dari Bogoro berangkat pula R. Hidayah dan N Majid. Sebelum perdebatan di mulai pada siang harinya R. Hidayat dan N Majid dengan motornya yang berwarna merah menyebarkan selebaran-selebaran sebagai pemberitahuan mengenai berlangsungnya perdebatan tersebut.

Ketika perdebatan dalam beberapa hari berlansung di Bandung surat-surat kabar ramai measang beritanya. Nama Ahmadiyah menjadi populer. Akan tetapi disamping pujian ada juga yang mencaci maki habis-habisan yaitu alim-ulama dari Singapura, Tasikmalaya Garut yang dipelopori oleh Anwar Sanusi, dari Bogor oleh Al Haddad dan dari Cianjur oleh surat Kabar Al Mu'min

Sebagai hasil dari perdebatan tersebut telah diterbitkan buku "Verslag Debat Resmi" yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berdebat, pemimpin dan Verslaggevernya.

Menjelang perdebatan kedua, pihak PERSIS menerbitkan 3 buah buku diterbitkan secara serial yaitu "Risalah Ahmadiyah berisi Kepercayaan yang Sesat" tebal 56 hal, "Risalah Mirzaiyah" tebal 46 hal, ukuran kedua buku 14 x 20 cm, terbit tanggal 17 Juli 1933. Buku ini dijual dengan harga f. 0,25 berisi berbagai alasan pihak PERSIS yang menuduh Ahmadiyah sesat, juga sebagai pembeaan atas kekalahan mereka dalam verslage debat I.

Sementara itu ada usaha-usaha orang-orang yang belum merasa puas untuk mempertemukan kembali kedua belah pihak dalam suatu perdebatan yang kedua. Setelah diadakan persiapan-persiana jmaka ditetapkan bahwa pertemuan tersebut akan diadakan di Gedung Permufakatan Nasional di Gang Kenari, Jakarta dengan acara pada tanggal-tanggal :

28 – 9 – 1933 (Malam Jum'at) : Hidup / matinya Nabi Isa a.s
 29 – 9 1933 (malam Sabtu) : Soal Kenabian
 30 – 9 1933 (malam Minggu) : Kebenaran Dahwah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s

Sebagai debatters dari pihak :

Ahmadiyah : M. Rahmat Ali HAOT dan M. Abubakar Ayyub HA
 Pembela Islam : A. Hasa cs (Persis)
 Verslaggever : M. Saleh S.A (museum)
 Pimpinan : R. Moh Muhyiddin
 Pengunjung : lk. 2000 orang

Verslag resminya ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berdebat, pimpinan dan verslaggevernya. Officieele Debarverslag antara Ahmadiyah dan Pembela Islam kedua kalinya ini juga mendapat perhatian penuh dari masyarakat.

Pada suatu ketika Entoy Moh . Tayyib bersama Kyai Anwar Sanusi mempunyai keinginan untuk menyarankan kepada M. Rahmat Ali agar bersedia diadakan lagi perdebatan dengan Pembela Islam. Saran tersebut diterima olehnya. Juga Pembela Islam dapat menerima saran tersebut. Maka mulailah diadakan persiapan untuk perdebatan yang ketiga kalinya antara Ahmadiyah dengan Pembela Islah. Terbentuklah sebuah Panitia Penyelenggaraan Perdebatan yang beralamatkan di Kantor Persis di Pecenongan, Jakarta. Pertemuan panitia itu dihadiri oleh R. Muhyiddin, Taher Gerlar Sutan Tumeggung, Th Dengah, Moh Tayyib dan Abdurrahman, adik dari R. Moh Muhyiddin. Diputuskan oleh pertemuan tersebut bahwa pertemuan perdebatan yang ketiga kalinya itu akan dilangsungkan di Gedung Permufakatan Nasional, Gang Kenari Jakarta dengan acara sebagai berikut:

Waktu : Tanggal 3 – 5 November 1934 (tiga malam)
 Debatteer : dari pihak Ahmadiyah ilaah
 1. M. Rahmat Ali HAOT
 2. M. Abubakar Ayyub H.A
 Dari pihak Pembela Islam : A. Hasan cs (Persis)
 Pimpinan : H. Dachlan Abdullah, Wethoder Gemeente Batavia
 Verslaggever : M. Saleh D.A
 Pengunjung : lk. 1500 orang

Dengan mengalami sendiri tentang kekurangan-kekurangan, A Hasan cs dan keunggulan M. Rahmat Ali dalam segala bidang, Moh. Tayyib akhirnya menyatakan diri masuk Ahmadiyah. Setelah kian

hari pengikut Ahmadiyah kian banyak, diantaranya R. Kartaatmadja, seorang tasawuf yang dengan perantaraan mimpi telah menerima kebenaran Ahmadiyah dan R. Muhyiddin maka R. Rahmat Ali mulai berusaha mempergunakan tenaga-tenaga terpercaya untuk pergi ke daerah-daerah guna bertabligh diantaranya Moh Tayyib.

Maka berangkatlah ia pada tahun 1934 dengan jabatan pembantu utusan menuju Periangan Timur, antara lain Singaparna, Garut, Tasikmalaya. Begitu juga salah seorang pengikutnya yang bernama Sulaeman asal Cianjur, setelah dari tahun 1932 menyelidiki dan mempelajari Ahmadiyah, pada tahun 1935 ditunjuk sbagai Nabi Muballigh yang diberi tugas oleh M. Rahmat Ali untuk bertabligh di daerah luar kota sekitar Jakarta, seperti di daerah Tangerang ditemani oleh Jian, Gomar dan Jona. Diderah Gondrong dibantu oleh Neri dan Kunen, di daerah Bojong dibantu oleh Tarip, di daerah Pasar Selasa dibantu oleh Junaedi, andul Karim dkk dan di daerah Teluk Jambe dibantu oleh Muhayar.

Dengan bertambahnya pengikut dan simpatisan Ahmadiyah itu maka oleh beberapa tokoh dirasakan perlunya ada rumah yang lebih besar guna dijadikan tempat bertabligh, bertugar fikiran dan lain-lain keperluan. Akhirnya diputuskan untuk mencari perumahan. Didapatnya sebuah gedung besar beserta Pavilun yang letaknya di Kleykampweg No. 41 Pasar baru, Jakarta . Uang sewanya sebesar f. 75,- sebulan dibayar secara gotong royong oleh orang-orang yang menghuninya antara lain terdiri dari keluarga-keluarga : R. Moh Muhyiddin, R. Kartaatmadja, Sirati Kohongia, R. Sumadi Ganda Kusumah, Th Dengah, Syagaf Tomulo dan M Rahmat Ali.

Kini terbukalah kesempatan mengembangkan Ahmadiyah dengan jalan mengadakan pertemuan umum, ceramah-ceramah dan bertukar fikiran. Setiap malam Minggu gedung tersebut dijadikan Clubgebouw dipergunakan untuk tabligh umum dengan mengundang orang – orang dari luar Ahmadiyah. Untuk lebih memperlancar usaha pengembangan Ahmadiyah, maka pada

tahun 1935 Cabang Jakarta mengadakan perubahan pengurus dan diangkat sebagai ketuanya R. Sudita, kemudian diganti oleh R. Kartaatmaja. Pada tanggal 20 Februari 1937, selaku wakil Amir Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia (AQDI)

3.8. Pembentukan *Hoofbestuur* (Pengurus Besar)

Setelah sepuluh tahun Ahmadiyah ada di Indonesia dan sudah berdiri cabang-cabang Jakarta dan Bogor, maka dirasa perlu untuk membentuk Hoofdbestuur atau Pengurus Besar menurut istilah sekarang. Untuk keperluan tersebut pada tanggal 25 dan 26 Desember 1935 berkumpul 13 tokoh Ahmadiyah di Clubgebouw Kleykampweg No. 41 Jakarta antara lain :

1. M. Rahmat Ali H.A.O.T
2. R. Moh. Muhyiddin
3. R. Kartaatmaja
4. Taher gelar Sutan Tumenggung
5. Sirati Kohongia
6. R. Sumadi Gandakusumah
7. Moh Tayyib
8. Th Dengah
9. Syagaf Tomulo
10. R. Hidayath
11. M. Usman Natawijaya
12. Sulaeman Effendi
13. R. Sudhita

Pada konferensi ini terbentuk susun Hoordbestuur Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia (AQDI) sebagai berikut :

Presiden	: R. Moh Muhyiddin
Sekretaris I	: Sirati Kohongia
Sekretaris II	: Moh Usman Natawijaya
Anggota	: 1. R. Markas Atmasasmita 2. R. Hidayat
	1. R. Sumadi Gandakusumah 2. R. Kartamatmaja

Pada tahun 1937 susunan tersebut dilengkapi oleh R. Abdoerrahman Ahmadi sebagai Sun Office Tahrik Jadid. Ditetapkan pula pada pertemuan di atas peraturan-peraturan organisasi yang lazim bagi perkumpulan biasa. Dengan masuknya R. Kertaatmaja ke dalam susun H.B (PB), maka kedudukannya sebagai Ketua Cabang Jakarta, diganti oleh Acep Barmawi

Disamping HB pada tahun 1935 juga dibentuk organisasi Ansharullah (Organisasi Pria) yang diketuai oleh M. Haroen dan H. Abdullah. Pada waktu itu datanglah pula kemalangan yang menimpa Ahmadiyah di Jakarta, ialah dengan adanya larangan orang-orang Ahmadiyah bersembahyang di langgar (surau) di Gg. Pasiam oleh Pemiliknya, sehingga sembahyang Jum'at untuk selanjutnya diadakan di Clubgebuow Kleykampweg. Setelah itu menyusul diadakan permintaan berhenti seorang Ahmadi bernama Abdul Razak dengan alasan kesulitan-kesulitan penghidupan yang ia hadapi.

Pada awal tahun 1936 atas permintaan orang-orang Ahmadiyah di Garut Y.M. Hazarat Khalifatul Masih II a.t.b.a. telah mengirimkan dua orang utusan dari Pusat, yaitu : M. Abdul Wahib. H.A dan M. Malik Aziz Ahmad Khan, untuk membantu tugas M. Rahmat Ali. Mereka tiba di Jakarta pada tanggal 13 Apri 1936, dijemput oleh Abd Jalil dkk. Dan untuk sementara menetap di Gang Kleykamp No. 41. Jakarta.

Pada tahun 1973 tibalah waktunya M. Rahmat Ali untuk menjalani cuti ke Qadian untuk kira-kira satu tahun. Sebagai penggantinya selama ia cuti ditetapkan R. Kartaatmaja dengan jabatan Pembantu Amir Muballigh. Dalam pada itu oleh karena beberapa alasan, seperti perpindahan penghuninya, maka Clubgebouw di Kleykampweg harus ditinggalkan. Dengan adanya pengosongan rumah Gang Kleykampweg itu yang tadinya juga dipergunakan untuk bersembahyang Jum'at, timbul kesulitan baru, untuk sementara Acep Barmawi menyediakan rumahnya di Kp. Petodjo Ilir untuk digunakan sembahyang Jum'at, sementara itu Acep Barmawi, M. Usman Natawijaya dan Sirati Kohongia berusaha menyewa sebidang tanah di Petodjo Oedik Gg VII, Tanah tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan mendirikan masjid. Akan tetapi agar permohonan izin bangunan tidak mendapat kesulitan, untuk sementara didirikan Clubgebouw. Dengan cara gotong royong dalam membiayai dan membangun bangunan itu, akhirnya dapat diresmikan pembukaannya pada beberapa bulan kemudian. Peresmian mesjid dilakukan oleh R. Kartatamaja pada tanggal 20 Februari 1937, selaku wakil Amir Muballigh Jemaat Ahmadiyah Departemen Indonesia (AQDI)

Kembali Ahmadiyah dapat menempati sebuah Clubgebouw-kini miliknya sendiri – untuk memperhebat pertablighannya. Maka sebagaimana Kleykamp, bangunan inipun setiap malam Minggu digunakan untuk pertablighan, lebih-lebih setelah M. Rahmat Ali dari Qadian pada tahun 1938. Juga tiap hari Jum'at diadakan sembahyang Jum'at dengan diberi nama Masjid Hidayat, sekarang menjadi Jalan Balikpapan I/10 Jakarta

Foto Jemaat Ahmadiyah Jakarta 1932
Sumber : Album, 1936

3.9. Perkembangan di Sumatra Barat

Di Padang pertablighan diteruskan oleh Maulana .H. Mahmud Sementara itu M. Ahmad Nuruddin yang bertempat tinggal di Bukittinggi mendapat tugas pula untuk bertabligh di Padang dan sekitarnya, yang dilakukan lima belas hari sekali. Di Dukuh bertugas pula M. Zaini Dahlan dengan daerah pertablighan: Dukuh, Talang, Solok dan Pampangan. Di Talang ketika itu sudah dapat didirikan sebuah masjid atas prakarsa M.H Mahmud.

Kegiatan lainnya di Padang, ialah mendirikan kursus kader dan pada tahun 1932 menerbitkan majalah: *ISLAM*. Dalam majalah tersebut pernah dimuat suatu polemik antara M. Moh Sadiq dan M Abdul Shareef di pihak Ahmadiyah dengan pihak Kristen. Pada tahun 1930 telah berangkat pemuda Muhammad Ayyub dari Padang ke Qadian untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai Agama Islam. Sedang pada tahun 1931 M. Abubakar Ayyub H.A telah kembali dari Qadian menuju kampung halamannya yang telah ia tinggalkan sejak akhir tahun 1922.

Tahun 1951 adalah tahun yang mengandung sejarah bagi Jema'at Ahmadiyah Cabang Padang karena untuk pertama kali Cabang Jema'at yang tertua di Indonesia ini mendapat kehormatan menjadi penyelenggara Konggres Jema'at Ahmadiyah Indonesia yang ke III yang diadakan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Pengurus Cabang Padang enam bulan sebelumnya. Untuk itu ditunjuk Abdul Karim Yusuf sebagai ketua penyelenggara oleh rapat anggota yang diadakan tanggal 1 Juni 1951.



Foto Jemaat Ahmadiyah Padang 1932
Sumber : Album 1934

Rombongan peserta kongres yang datang dari Pulau Jawa yang dipimpin oleh Raisuttabligh Sayyid Shah Muhammad dan Ketua Pengurus Besar Syukri Bermawi dan terdiri dari para utusan, anggota Pengurus Besar dan Utusan-Utusan dari berbagai Cabang dari Pulau Jawa hampir seluruhnya datang dengan Kapal dan disambut oleh Pengurus dan Panitia di Teluk Bayur dan dibawa ke rumah Jema'at Jl. Belakang Ola No. 22 Padang. Resepsi Pembukaan Kongres diadakan di ruang sidang Balai Kota Padang pada tanggal 26 Desember 1951 dengan dihadiri juga oleh para undangan yang terdiri dari wakil Pemerintah setempat, Wakil organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat. Dari pemerintah tampak hadir Dr. A. Rahim Usman dan Wedana A.Muluk. ikut memberikan sambutan pada waktu itu wakil berbagai organisasi seperti Ahmad Mustafa dari partai Murba, B.S. Nursama dari P.R.N dan Ahmadiyah dari P.G.R.I. Rapat-rapat musyawarah kongres sejak tanggal 27 Desember pagi

selam tiga hari diadakan di rumah Jemaat Jln. Belakang Olo No. 22 Padang. Kehadiran pada utusan Jemaat Ahmadiyah di Padang dimanfaatkan pula oleh pengurus dengan mengadakan beberapa kali tabligh umum di kota Padang. Tabligh umum yang pertama diadakan pada tanggal 30 Desember jam 09. 00 pagi bertempat digedung Bioskop Capitol (Raya sekarang). Berbicara dalam tabigh umum ini adalah A. Wahid H.A dengan judul “Susunan Dunia Baru”. Tabligh umum yang kedua tanggal 6 Januari 1952 jam 09.00 pagi juga bertempat di biskop Capitol dengan pembicara Malik Aziz Khan dan Sayyid Shah Muhammad. Malik Aziz Khan pada kesempatan ini mengupas “Masalah adanya Tuhan”, sedang Sayyid Shan Muhammad membicarakan “Revolusi Hakiki”.

Pada tabligh umum ini berbicara tiga orang, yaitu Imammuddin H.A. dengan judul “Islam dan Agama Lain”, Abdul Hayye Ayyub dengan judul “Khabar-khabar Ghaib Dari Rasulloh saw”. Acara-acara tabligh umum ini, terutama yang diadakan di Gedung Bioskop Capitol mendapat perhatian yang besar dari masyarakat dan diberikan oleh surat-surat kabar di kota ini seperti surat kabar “Haluan “dan “Penerangan”.

Pada tanggal 17 Oktober 1951 dengan akte Notaris Hasan Qolbi di Padang, Bagindo Zakaria, seorang pedagang besar. Direktur N.V. Malindo mewakafkan sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 1.500 m dengan sebuah bangunan tua bekas milik Belanda bertempat di Jln. Sawahan (sekarang Jln. Haji Agus Salim No.5) kepada jema'at Ahmadiyah Cabang Padang. Tanah tersebut dibeli dari Padang Spaarbank yang terletak di pusat kota, ternyata bangunan yng atasnya didiami oleh beberapa keluarga pegawai Kantor Pos Telepon dan Telegram di Padang berdasar izin Kantor Urusan Perumahan Padang sehingga tidak mudah dapat dikeluarkan . Baru beberapa hari kemudian mulailah jalan musyawarah antara pengurus Jemaat Ahmadiyah Cabang Padang dengan pihak kantor pos Telepon dan Telegram di Padang dan dengan pemilik rumah yang

didiami oleh jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Padang dengan hak yang juga diberikan oleh Kantor Urusan Perumahan Padang. Pertemuan tersebut dapat diperoleh persetujuan , yaitu keluarga pegawai kantor Pos Telepon dan Telegram, pindah ke rumah Jln. Belakang Ola No. 22 dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Padang pindah ke jalan H.A. Salim No. 5. Persetujuan ini diperoleh pada tahun 1955 dan dikuatkan dengan persetujuan Kantor Urusan Perumahan Padang tanggal 16 pebruari 1955.

Pada pertengahan tahun 1952 datang ke padang A. Arshad H.AA. untuk menggantikan Immammudin. HA sebagai mubaligh Jema'at Ahmadiyah untuk Cabang Padang. Beliau bertugas di Padang sampai akhir tahun 1953 kemudian digantikan kembali oleh Imammuddin H.A yang bertugas akhir tahun 1956.

Pada tahun 1954 untuk pertama kali kota Padang mendapat kunjungan dari seorang keturunan Imam Mahdi a.s dengan kedatangan Sahibzada Mian Rafi Ahmad, cucu dari Khalifatul Masih II. Bersama dengan beliau juga datang ke Padang Muballigh A. Wahid.

Dengan berpindahny rumah Jemaat dari Jalan Belakang Olo No. 22 ke Jalan H.A Salim No. 5, maka perhatian Jemaat dicurahkan sepenuhnya pada pembangunan sebuah masjid di tanah Jemaat yang cukup luas itu. Kegiatan ke arah itu terutama mendapat dorongan yang kuat dari Maulvi Immamudin H..A yang berusaha pembangunan Mesjid itu dapat segera dilaksanakan dan diselesaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih II kepada Jemaat Cabang Padang dan sebagai tanda doa restu beliau atas pembangunan masjid tersebut. Pembangunan mesjid dapat dilaksanakan dan diselesaikan segera berkat adanya sumbangan uang dan material yang ikhlas bukan saja anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Padang, tetapi juga dari anggota Jemaat yang berada di luar kota Padang. Dalam hal ini amat besar artinya sembangan yang diberikan oleh C.V Barisan Medan yang dipimpin oleh Amir Yusuf dan Muhammad Ahmad Yusuf.

Berkat usaha yang giat dari panitia dan dukungan yang besar diberikan oleh para dermawan dan dorongan semangat yang kuat dan Maulwi Immamuddin H.A yang ikut serta bergotong royong bersama anggota melakukan pekerjaan fisik dalam usaha pembangunan mesjid tersebut maka sebelum berakhirnya tahun 1956 mesjid tersebut telah dapat berdiri dan dapat digunakan tidak lama kemudian meskipun belum selesai seluruhnya. Mesjid yang luasnya 15 x 17,5 M2 baru kemudian, yaitu pada tahun 1981 diberi nama mesjid Mubarak. Maulwi Immamuddin H.A meninggalkan kota Padang pindah ke Jakarta pada akhir tahun 1956 itu juga.

Pada awal tahun 1957 Maulana Abu Bakar Ayyub setelah beberapa tahun di negeri Belanda kembali ke Padang untuk menjalani cuti selama beberapa bulan. Selesai cuti beliau ditugaskan sebagai Utusan Jemaat Ahmadiyah di Padang. Berhubungan pecahnya peristiwa PRRI yang berpusat di Padang pada tahun 1957 maka keadaan politik dan keamanan di kota Padang sejak tahun itu mulai menghangat dan memuncak dengan masuknya ABRI ke kota Padang.

Pada tahun 1958 dan diberlakukannya hukum Darurat Perang di daerah ini selama beberapa tahun. Selain waktu ini kegiatan Jemaat lebih banyak diarahkan pada bidang pendidikan anggota dan penyelesaian mesjid yang harus disempurnakan. Kegiatan jemaat bidang pendidikan oleh pengurus diusulkan lebih ditingkatkan dengan mengadakan latihan bertabligh setiap malam minggu dengan dipimpin oleh Maulana Abu Bakar Ayyub H.A. Latihan mendapat perhatian yang cukup besar dari lapisan anggota baik dari kalangan Ansharullah dan Khudamul Ahmadiyah maupun dari kalangan Lajnah Imaillah dimana yang hadir ada lebih kurang 40 orang. Disamping itu diadakan pelajaran bahasa Arab dan Bahasa Inggris bagi yang menaruh minat. Pelajaran Bahasa Arab diadakan dua kali seminggu diberikan oleh A. Karim Maridi.

Pada tanggal 30 Januari 1960 diadakan Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Isra' dan Mi'roj Nabi Besar Muhammad SAW. Bertempat di mesjid Jemaat Ahmadiyah Jalan H.A Salim No. 5 dengan mendapat perhatian yang cukup besar bukan saja dari anggota pejabat pemerintah dan mahasiswa. Dari 200 orang undangan yang hadir lebih kurang 75 orang. Pembicara waktu itu adalah Maulana Abu Bakar Ayyub H.A dan A. Karim Maridi.

3.9.1. Jemaat Ahmadiyah Pampangan, Sumatera

Pampangan terletak tidak jauh dari kota Padang, kira-kira sejauh 16 km saja, sehingga kedatangan Rahmat Ali HAOT yang membawa kabar suka bahwa Imam Mahdi dan Masih Mau'ud a.s telah datang di Padang, beritanya cepat tersiar ke Pampangan Ini terjadi pada tahun 1935.

Ada beberapa orang yang baiat pada tahun 1935 dan tahun 1936 disertai kaum ibu diantaranya Ny. Paitu, Ny. Zaleka, Ny. Ramanih, Ny. Tiarah Patiah, Ny. Masani, Ny. Nurani Jamaluddin dan Ny. Ciani Saura. Seperti halnya Jemaat Ahmadiyah di Padang dan juga di tempat-tempat lain, anggota Jemaat Pampangan pun ikut tidak luput dari hinaan, cacian dan penekanan yang terus-menerus dari masyarakat sekeliling yang sengaja ingin mengucilkan mereka. Kaum ibu pada waktu itu sudah memakai pardah. Ny. Jaelani mewakafkan tanahnya untuk Jemaat yang dikemudian disana dibangun mesjid dimana sekarang berdiri.

Semula, kaum ibu masih bergabung dengan kaum ibu dari Cabang Padan; lama kelamaan terpisah menjadi ranting. Dan pada tahun 1960 diresmikan menjadi cabang, yang menjadi perintisnya adalah Ny. Nurani, Ny. Nursima dan Ny. Nursani yang juga merupakan ibu-ibu yang baiat permulaan. Pengurus Lajnah Imaillah yang pertama diketuai oleh Ny. Nursima dibantu oleh Ny. Nursani.

3.9.2. Jemaat Ahmadiyah Cabang Talang

Di Nagari Talang tahun 1937, terjadilah gerakan pembaharuan pada umat Islam. Gerakan pembaharuan ini dipelopori oleh kepala nagari Talang, Muhammad Husin Dt. Machudum, tamatan Kweek School yaitu sekolah guru berbahasa Belanda. Beliau menjadi kepala nagari Talang pada tahun 1928. Sebagai kepala nagari, beliau berusaha untuk memajukan penduduk nagari Talang. Dalam bidang pendidikan beliau mengadakan studyfonds. Untuk membiayai pendidikan masyarakat Talang yang otaknya cerdas tetapi tidak mampu, maka biaya pendidikan tersebut diambilkan dari iuran anggota yang merupakan bagian dari zakat fitrah.

Kebanyakan dari penduduk nagari Talang pada waktu itu berfaham Jabriah, yang menyerahkan segalanya pada Tuhan tanpa usaha. Oleh karena beliau anggap faham tersebut menghambat kemajuan, maka beliau berusaha untuk mengubah faham ini. Beliau mengadakan pengajian-pengajian, beliau mengumpulkan pemuka-pemuka masyarakat seperti ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, di kenagarian Talang. Oleh karena beliau menguasai bahasa Belanda dengan sangat baik, maka dalam persoalan agama beliau berpedoman (Muhammad Ali Seorang Ahmadi). Pada masa itu kepala Nagari adalah seorang yang sangat berpengaruh dalam kanagarian Talang²⁴.

Hendaklah diketahui bahwa nagari-nagari di Minangkabau merupakan republik-republik kecil yang diperintah oleh ninik mamak. Nagari itu dikepalai oleh Kepala Nagari. Maka dengan kekuasaan itu, Muhammad Husin Dt. Makhudum dengan mudah dapat mengumpulkan orang-orang terkemuka dalam nagari untuk mengadakan pengajian untuk mendalami masalah-masalah agama. Diantara orang-orang terkemuka yang dikumpulkan itu adalah:

²⁴ Penjelasan ini berasal dari Ain Ilyas, Dt Ampang Basa, Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Talang

1. Choiruddin Khatib Sati
Seorang ulama terkemuka di Talang, tamatan Tarbiah Islamiah Jaho Padang Panjang. Murid kesayangan Angku Jaho, menguasai bahasa Arab dengan baik. Tamat dari Tarbiah Islamiah, beliau langsung diangkat menjadi khatib nagari di Talang dan anggota kerapatan ada nagari Talang
2. Syarif Imam Marajo
Beliau juga termasuk ulama yang terkemuka juga tamatan Tarbiah Islamiah Padang Panjang juga murid kesayangan Angku Jaho menguasai bahasa Arab dengan baik. Dalam nagari Talang berpangkat Imam. Juga anggota kerapatan adat nagari Talang.
3. Nuin Gelar Khadi Pamuncak
Seorang guru Al Quran yang fasih sekali. Dalam nagari menjabat Khadi Nikah. Anggota kerapatan adat nagari
4. Fakhruddin Pakieh Mulie
Tamatan Tarbiah Islamiah Jaho Padang Panjang. Fasih membaca Al Quran
5. Ilyas Dt. Paseban, Seorang Ninik mamak terkemuka di Talang
6. Syamsudin Dt. Limbau Sati, Kakak Imam Marajo, seorang ninik mamak yang terkemuka. Anggota kerapatan adat nagari Talang
7. Mema gelar Pakieh Basa, Menjabat Malin Adat dalam suku Piliang, anggota kerapatan adat nagari Talang
8. Datuk Batuah, Suku Koto, seorang ninik mamak, Anggota kerapatan Adat nagari Talang
9. Tamin Dt Rajo Nan Gadang, Seorang cerdik pandai di Talang
10. Ain Ilyas, seorang pemuda, dan banyak lagi orang terkemuka lainnya yang sayangnya waktu pemboikotan terhadap Ahmadiyah malah menghindar, bahkan ada juga yang kembali jadi anti Ahmadiyah

Oleh karena para Kepala Nagari tersebut sangat haus akan ilmu agama, maka beliau mengadakan pangajian-pengajian dengan ulama-ulama yang ada di Kecamatan Gunung Talang. Sekali sebulan memperkatakan agama seperti takdir, tasawuf dan lain-lain. Pertemuan-pertemuan dengan ulama-ulama tersebut tidak memuaskan hatinya. Pada masa itu ada seorang pegawai pemerintah yang bernama Sutan Loteng, menjabat Mantri Belasting di Solok. Beliau adalah seorang anggota Jemaat Ahmadiyah. Datuk Makhudum sebagai Kepala Nagari tentu sering berurusan pajan dengan mantri belasting ini. Atas anjuran Sutan Loteng, beliau dianjurkan bertanya kepada guru-guru Jemaat Ahmadiyah tentang masalah-masalah agama yang belum memuaskan.

Atas mufakat bersama, maka dipanggilah guru Jemaat Ahmadiyah Maulvi Zaini Dahlan ke Talang. Masalah yang mula-mula diperkatakan adalah soal takdir, tasawuf dan puasa. Beliau sangat puas dengan keterangan Maulvi Zaini Dahlan mengenai masalah-masalah tersebut. Tapi Maulvi Zaini Dahlan menambahkannya dengan persoalan – persoalan lain seperti masalah *jahir* dan *syir*-nya bacaan Bismillah pada waktu sembahyang magrib, isya dan shubuh. Dan juga mengenai masalah pentingya shoalat rawatib. Semua alasan-alasan ini dikemukakan oleh Zaini Dahlan dari buku-buku yang telah dibeli oleh *Studyfonds*, seperti hadist Muslim, Bukhori, Annasai, Babuassalam dan kita-kita tafsir Al Quran seperti *Tafsir Al-Ahkam* Muhammad Abduh, dan buku-buku tafsir lainnya. Terakhir Zaini Dahlan mengemukakan tentang hidup matinya Nabi Isa, adanya Nabi yang tidak membawa syariat sesudah Nabi Besar Muhammad Saw dan kebenaran Hazrat Masih Mau'ud as pendiri Jemaat Ahmadiyah

Dengan berdasarkan Al Quran dan Hadist dan fatwa-fatwa ulama yang dikutip dari buku-buku yang tersedia maka Dt. Makhudum, Khatib Sati, Imam Marjajo dan lain-lain mengakui kebenaran yang dikemukakan oleh Zaini Dahlan dan mengakui

adanya bai'at kepada Masih Mau'ud as kemudian mendirikan Jemaat Ahmadiyah, hanya kapan waktunya yang terdapat perselisihan paham. Datuk Makhudum berpendapat bai'at ditunda dulu, harus diusahakan terlebih dahulu pendukung sebanyak mungkin, situasi belum memungkinkan karena boikot sudah ada. Pada saat itu sudah tersiar khabar bahwa jemaat Ahmadiyah sudah mengembangkan sayapnya di Nagari Talang. Tetapi khatib Sati, Ilyas Dt. Paseban. Tamin Dt. Rajo nan Gadang dan Pakieh Mulie berpendapat menyetujui anjuran Zaini Dahlan untuk segera bai'at dan mendirikan jemaat Ahmadiyah tanpa ditunda-tunda lagi. Yang pertama di baiat adalah Choiruddin Khatib Sati (1938) kemudian Ilyas Dt. Paseban, Tamin Dt. Rajo nan Gadang dan Fakrudin Pakih Mulie.

Choirudin Khatib Sati dapat memasukan sebagian besar kaumnya ke dalam jemaat, yang terpenting adalah Ma'ala Datuk Mudo, Mamak Kadung dari Khatib Sati penghulu Suku Tanjung. Dt. Bungsu seorang tua yang sangat berpengaruh, Dt Tanali penghulu suku Koto, juga menyusul Bai'at, kemudian Pakih Basa Dt. Limbau, Hasan Dt. Ampang Basa, mamak dari Ain Ilyas, Dt Rajo di Illie Kakak Pakieh Mulie. Ain Ilyas, putra Dt. Paseban dibawa Zaini Dahlan ke Padang untuk belajar agama pada H. Mahmud dan Abu Bakar HA.

Setelah terjadinya bai'at dan berdirinya jemaat Ahmadiyah terjadilah boikot besar-besaran terhadap anggota jemaat oleh masyarakat Talang. Khatib Sati, Imam Marajo dan Khadi Pamuncak menghindarkan diri dari jabatannya. Syeh Muhammad Jami Jaho tidak mengakui ijazah *Tarbiah Islamiyah* yang dipegang oleh Choiruddin Khatib Sati dan Imam Marajo karena keduanya telah masuk Ahmadiyah. Khatib Sati dan Imam Marajo dengan sukarela mengembalikan ijazah mereka kepada gurunya tersebut.

Sembahyang Jumat mula-mula diadakan di rumah Dt. Paseban. Setelah pemboikotan bertambah keras, maka berpindah ke rumah Tamim Dt. Rajo nan Gadang, kemudian pindah ke rumah Khatib

Sati di Simpang Ampek. Setelah situasi agak membaik baru pindah ke suaru milik Ilyas Dt Paseban. Kerapatan adat Nagari Talang tidak dapat memberhentikan ninik mamak yang sudah masuk ke dalam Jemaat karena pangkat ini merupakan pusaka turun – temurun yang tidak dapat diganggu gugat oleh kerapatan nagari.

Pada tahun 1940, Maulvi Rahmat Ali berkunjung ke Padang. Di tangan Maulvi Rahmat Ali, Imam Marajo, Dt. Tambiro Sati dan Nuin Khadi Pamuncak melakukan bai'at. Dt. Machudum yang sungguhpun belum melakukan bai'at menganjurkan agar orang tuanya Dt. Sati dan Dt. Batuan serta istri beliau Ramutinan untuk segera melakukan bai'at.

Pada tahun 1939 Dt. Machucum diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala Nagari Talang. Pada masa itu masyarakat Talang berpendapat bahwa Jemaat Ahmadiyah akan gulung tikar dari Talang karena orang tuanya telah diberhentikan. Tetapi anggapan masyarakat tersebut tidak tepat karena Jemaat Ahmadiyah terus bertambah banyak anggotanya. Dt. Machudum, diangkat oleh pemerintah Belanda menjadi anggota Minangkabau Raad. Beliau aktif bertukar pendapat tentang Ahmadiyah dengan anggota Raad lainnya termasuk di antaranya Buya Haji Sirajuddin Abas

Kepala Nagari yang baru berusaha menghalangi kedatangan guru-guru jemaat Ahmadiyah yang datang berkunjung ke Talang termasuk Maulvi Zaini Dahlan dan Abu Bakar Ayyub HA. Tetapi karena surat jalan yang dibawa oleh guru-guru tersebut diperoleh dari Residen di Padang. Maka usaha pelarangan itu sia-sia saja.

Untuk membasmi Ahmadiyah, masyarakat Talang mengadakan boikot; tidak boleh mengadakan jual beli, tidak boleh bertolong menolong mengerjakan sawah, kusir bendi dilarang membawa penumpang Ahmadiyah, anggota Jemaat digertak, banyak yang dipukuli, dilempari dan sebagainya. Tempat ibadah Jemaah dilempari dengan batu, diadakan iuran untuk membayar denda sekiranya pengadilan menghukum orang yang menganiaya jemaat

Ahmadiyah, ulama-ulama didatangkan dari luar Talang untuk memaki-maki Jemaat Ahmadiyah. tapi tak seorangpun yang mau meladeni sewaktu diajak bertukar pikiran tentang Jemaat Ahmadiyah

Datuk Machudum meninggal dunia pada tahun 1945. Beliau dibunuh oleh seorang anggota kaum dalam suku beliau karena perkara harta pusaka. Pemakaman jenazah beliau diselenggarakan oleh anggota Jemaat dan juga disembahyangkan oleh yang non Ahmadiyah. Waktu Abu Bakar Ayyub HA berkunjung ke Talang, beliau mengadakan sembahyang goib untuk almarhum Dt. Machudum. Rupanya secara rahasia beliau telah bai'at di tangan Abu Bakar Ayyub HA.

Dalam boikot tersebut, Jemaat Ahmadiyah terus berkembang orang-orang yang bai'at terus bertambah, diantaranya Kaum Nuin Pakieh Muncak, Kaum Hasan Dt. Ampang Basa, dan yang penting juga bai'atnya Syain Dt. Rajo nan Gadang serta adik perempuannya, Kena, serta Ilyas Dt. Paseban. Untuk pendirian masjid Dt. Rajo nan Gadang dan Kena bermurah hati mewakafkan tanahnya yaitu yang terdapat di masjid sekarang ini.

Pada tahun 1948 didirikan mesjid yang pertama secara sederhana yang terbuat dari kayu dan atapnya rumbai. Pada tahun 1950 mesjid tersebut dibakar orang, namun yang terbakar hanya atapnya saja karena dapat segera ditolong.

Sejak berdirinya jemaat ahmadiyah diketuai oleh Chairuddin Khatib Sati. Pada tahun 1951, karena beliau aktif dalam bidang tabligh, maka pimpinan jemaat diserahkan pada Ain Ilyas Dt. Ampang Basa. Dengan usaha yang tidak kenal lelah dari Khatib Sati, dapat digerakkan anggota-anggota jemaat yang berada di Solok dan Selayo.

Dengan bai'atnya seorang pemuda Gugak Sarai yang bernama Nawir, dapat didirikan ranting Guguk Sarai. seorang pemuda murid dari Khatib Sati. Dan juga Nukin Khadi Pamucak ditugaskan ke

Lurah Ingu (di Lalahan Panjang) untuk mendirikan cabang jemaat Ahmadiyah di sana. Usaha tersebut berhasil dengan baik. Sekarang di Lurah Ingu telah berdiri cabang jemaat.

Khatib Sati terus aktif memberikan kan pelajaran kepada ranting di Solok dan Lurah Ingu. Khatib Sati juga rela mengembalikan jabatannya, memberikan waktu dan tenaganya untuk kepentingan dan kemajuan jemaat.

Pada tahun 1968 beliau wafat, meninggalkan dua istri, anak perempuan dan laki-laki, yang semuanya telah menjadi anggota jemaat. Pada tahun 1970 mulai didirikan mesjid yang ada sekarang seluruh anggota jemaat baik laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak-anak turut aktif bergotong royong mencari pasir dan batu. Dengan uang yang hanya dua juta rupiah, ditambah dengan tenaga gotong-royong dapat didirikan sebuah mesjid yang permanen. Pada masa ini terjadi bai'at beberapa keluarga dari Tabek Dangka. Pemuda –pemudi Jemaat aktif belajar membaca Al-Quran, belajar arti Al-quran, dan belajar berbicara di depan umum. Pembacaan alquran diajarkan oleh Fakhruddin Pakieh Mulie dan arti Alquran diajarkan oleh Ain Ilyas Dt. Ampang Basa, dan latihan berbicara dipimpin bersama.

Pada masa Maulvi Zulkifli Lubis berada di Talang, beliau banyak aktif di luar Talang, mengunjungi Jemaat di Batusangkar, Bukit Tinggi, Solok, Guguk Sarai dan lain-lainnya. fungsi pendidikan dalam jemaat dipercayakan pada Ain Ilyas Dt. Ampang Basa dan Fakhruddin Pakieh Mulie.

3.9.3. Jemaat Ahmadiyah Medan, Sumatra

Di sekitar tahun 1309-1319 HS /1930-1940 M, merupakan tahun awal perjuangan jemaat Ahmadiyah di kota Medan. Tepatnya tahun 1934, Mualim Muhammad Sodiq, membawa kabar tentang Ahmadiyah, diikuti dengan pembaiatan bagi kelompok awalin, yakni M.Saidi, Marmin, Hasyim, Saiban, Kenang dan istrinya, A.Halim

Siregar dan Kowinah Siregar, Leman Siregar, dan Nursani..kelompok awalin ini mendirikan tempat sholat beralamat di Jl. Serdang, Medan, Depan Rumah Sakit Gemeente Ziekenhuis. Meskipun masih sedikit, namun jemaat Medan telah menerbitkan majalah Islam, Al Busra, yang dipimpin oleh S.R. Muda. Tahun 1936, sebanyak 51 ulama medan di bawah Syekh Mahmud Al Khayat mengeluarkan fatwa kafir bagi Ahmadiyah.



Foto Jemaat Ahmadiyah Medan 1932
Sumber : Album 1934

Sudah ada beberapa orang perempuan yang turut bersama-sama kaum bapak sebagai pionir-pioner dalam berjuang mempertahankan berdirinya Jemaat Ahmadiyah dari badan reaksi yang hebat dari golongan masyarakat yang anti Ahmadiyah. Namun susunan kepengurusan Lajnah Imaillah cabang Medan baru dapat

kami catat mulai tahun 1335 HS / 1956 M, dengan Ny. Nursani Leman Siregar sebagai ketua. Sikap ghair Ahmadi di Sumatra Utara umumnya, terutama dari golongan Islamnya sangat anti tanpa ada keinginan untuk menyelidiki paham Ahmadiyah secara jujur dan terbuka menghambat kemajuan Jemaat sendiri.

Hal ini jelas terlihat misalnya seperti yang dialami pada pembangunan mesjid Ahmadiyah yang tertunda sudah hampir 15 tahun lebih akibat adanya berbagai protes dari masyarakat; juga pemerintah setempat telah membeli tanah pekuburan khusus untuk anggota jemaat Ahmadiyah, sebab Ahmadiyah dianggap bukan Islam, jadi masyarakat ghair Ahmadi tidak mau menerima orang Ahmadiyah di kubur satu tempat dengan mereka.

Tahun 1952 -1975, pusat kegiatan jemaat Ahmadiyah Medan dipindahkan ke Jl.Poncowati No.8, Sidodadi, Medan. Kemudian tahun 1960, Keluarga Muhammad Yusuf mewakatkan tanah di Jalan Pasar III No. 1, Desaa Kelurahan Gelugur Darat, Medan Timu, seluas 8.500 m² kepada Ahmadiyah. Tahun 1964 mulai didirikan masjid di atas tanah tersebut. Hingga saat ini masjid tersebut menjadi pusat kegiatan Ahmadiyah di Medan, dan telah direhab 2 kali.

3.9.4. Perkembangan di Sumatra Selatan

Seorang Ahmadi asal padang bernama Moh. Rasyid pada tahun 1930 merantau ke Sumatra Selatan untuk mengadu untung dengan jalan berdagang dan menetap di kota Lahat. Sebagai seorang pedagang di tempat yang baru ini ia banyak mengadakan hubungan dengan penduduk setempat. Dan sambil lalu sebagai orang Ahmadiyah iapun sering mengemukakan fahamnya. Beberapa orang sudah mulai memperhatikan dan bersimpati, sehingga menimbulkan hasrat untuk lebih memperluas dan memperdalam pelajarannya.

Akhirnya atas petunjuk Moh. Rasyid maka pada tahun 1934 beberpaa orang simpatisan mengusahakan mendatangkan seorang

guru dari Bukittinggi, yaitu M. Ahmad Nuruddin yang pernah belajar di Qadian.

Setelah mendapat seorang guru tetap, maka di sebuah rumah bertingkat di Simpang Empat mulailah diadakan pengajian berupa pelajaran membaca dan menterjemahkan Al Quran, disamping memberikan penjelasan-penjelasan mengenai berbagai masalah. Rumah tersebut akhirnya dipergunakan baik untuk perguruan maupun balai pertemuan. Maka dari hari ke hari kegiatan pertablighan mulai menampakkan hasilnya. Pengertian dan keyakinan para simpatisan bertambah luas, sedangkan reaksi dari pihak lain juga semakin menghebat. Keadaan ini akhirnya diketahui oleh pimpinan PERSIS. Segera diusahakan akan membendung dan menghalang-halangi perkembangan Ahmadiyah, maka berdirilah Ahmadiyah di tengah – tengah perlawanan yang hebat itu. Berkat keuletan dan kesabaran sang guru itu, maka seorang Jerman bernama G.A. Kunz masuk Ahmadiyah. disusul oleh beberapa orang intelek, antara lain: R. Soengeng seorang guru HIS, Mas Djalie seorang Komisariss Gudang Persediaan SS, M. Idin asli Palembang, M. Sidin, Keluarga R. Trisna Atmadja, dll. Maka setelah anggota Ahmadiyah kian hari kian bertambah pada tahun 1935 dibentuklah Cabang Lahat dengan R. Soengeng sebagai ketuannya.

Di Lubuk Linggau mulai ada beberapa orang yang masuk Ahmadiyah. Orang pertama datang bertabligh di Lubuk Linggau ialah seorang Ahmadi bernama E. Yusak. Mula-mula orang-orang masuk Ahmadiyah itu dari orang – orang pendatang. Seorang bernama Idris dan isterinya Merja, baiat. Pada kira-kira tahun 1936 berdirilah cabang Lubuk Linggau dengan C. Ali seorang pedagang bangsa India, sebagai ketuannya. Kemudian diganti oleh St. Maradjo dan akhirnya memperhatikan dan memeriksa Ahmadiyah. Baru pada tahun 1937 penduduk asli Lubuk Linggau memperhatikan dan memeriksa Ahmadiyah. Masuklah mula-mula Demang Kanasen, Mataser, Muhammad Apil, yang diikuti kaum kerabat yang lain.

Selanjutnya Ahmadiyah melebarkan sayapnya ke kota Palembang. Setelah ada beberapa orang yang masuk Ahmadiyah pada tahun 1937 berdiri pula Cabang Palembang. Sehubungan dengan itu perlawanan bertambah hebat, terutama dari kalangan orang-orang Arab yang dipelopori oleh Sayid Salim bin Jendan. Maka, Hasan Delais seorang asli Palembang yang beberapa tahun yang lalu telah masuk Ahmadiyah di Jakarta, kembali di Palembang, meminta tenaga muballigh. Begitu pula dari Plaju dua orang Ahmadi bernama R. Jusuf dan M. Kasidi sangat mengharapkan kedatangan muballigh di tempat tersebut.



Foto Jemaat Ahmadiyah Palembang 1932
Sumber :Album 1934

Dengan adanya permintaan – permintaan akan tenaga muballigh M. Ahmad Nuruddin merasa perlu untuk menambah tenaga untuk membantunya. Di Bukit Tinggi dan Padang Panjang bekerja seorang guru Ahmadiyah bernama M. Moh. Ayyub yang

pernah belajar di Qadian beberapa tahun dan pada tahun 1933 kembali lagi di Indonesia. pada bulan November 1937 ia diusahakan supaya datang di Sumatera Selatan. Kemudian menyusul M.H, Mahmud dari Padang untuk menjadi guru tetap di Lubuk Linggau. Dengan kedatangan mereka ini, usaha pertablighan bertambah meluas. Dapat pula menerbitkan selebaran-selebaran dan surat-surat tatangan kepada ulama yang memfitnah. Tabligh umum diadakan di berbagai kota seperti Palembang, Lahat, dan Lubuk Linggau.

Di Plaju (Palembang) M. Ahmad Nuruddin pernah mengadakan dialog dengan seorang pendeta Kristen asal Timor ditemani oleh seorang yang bernama Abdullah Hasan. Dalam pembicaraan itu Abdullah Hasan sering membuka-buka Al Quran. Kemudian ternyata bahwa di bekas anggota Muhammadiyah cabang Baturaja yang sudah dipengaruhi gereja. Ia tinggal bersama-sama dengan seorang Pendeta Amerika. Setelah ia sering bertemu dengan muballigh Ahmadiyah yang kemudian lambat laun tertarik oleh Ahmadiyah. Akan tetapi setelah diketahui oleh pendeta yang ditumpanginya itu ia dilarang untuk mengadakan hubungan lagi dengan M. Ahmad Nuruddin di Palembang. Oleh karena ia mendapat ancaman. Maka, atas bantuan seorang Ahmadi bernama Masaruddin yang ketika itu bekerja di perusahaan KPM, ia melarikan diri ke Jakarta dengan hendak melanjutkan hubungan dengan Ahmadiyah di Jakarta. Beberapa tahun kemudian kembali ke Baturaja, dan sejak tahun 1939 ia menganggap dirinya sebagai anggota tersiar. Di Baturaja ia berusaha mengembangkan Ahmadiyah di kalangan kaum kerabatnya. Pada tanggal 28 November 1958, Baturaja menjadi Cabang Ahmadiyah di Indonesia

Demikian perkembangan Jemaat Ahmadiyah berjalan terus sampai pendudukan Jepang. Pada waktu pendudukan Jepang pernah terjadi penahanan terhadap M. Moh Ayyub R. Moejadi dan Mataser oleh Kempeitai, akan tetapi akhirnya dinyatakan

tidak bersalah dan dibebaskan kembali. Pada tahun 1945 M. Moh Ayyub ditunjuk oleh Raisut – Tabligh sebagai muballigh resmi dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan tempat kedudukan di Lahat. Selanjutnya berdirilah Cabang – Cabang di Jati, Lampung dan Curup. Di Bengkulu dan Jambi tinggal beberapa orang anggota tersiar.

4. Perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat

4.1. Ahmadiyah di Garut

Pelopop yang membawa Ahmadiyah ke daerah Garut ialah Entoy Mohammad Tayyib, seorang bekas Boven Digulis. Pada akhir tahun 1934 M. Rahmat Ali menugaskan Moh. Tayyib untuk melakukan pertablighan di daerah Priangan. Kota yang pertama-pertama dikunjungi ialah Tasikmalaya. Dengan bantuan seorang kawannya yang bernama Subhan, ia berhasil menyelenggarakan tabligh di Gedung Sekar Putih, Tasikmalaya. Setelah kota Tasikmalaya, kemudian kota Garut. Pertama-tama ia mendatangi pendeta kristen yang ketika itu sedang mengalami kejayaan.

Pada suatu ketika Moh . Tayyib mendatangi Gereja Advent, Ciledug, Garut. Setelah diterima oleh pendeta, berlangsunglah percakapan dengan lancar, sampai kepada pendirian Ahmadiyah tentang masalah Nabi Isa a.s. Akhirnya pertemuan pertama ditutup dengan suatu janji dari Moh Tayyib akan membawa kawannya untuk mengadakan pertukaran pikiran.

Beberapa hari kemudian Moh. Tayyib telah datang kembali membawa pemuka-pemuka agama dari beberapa golongan, seperti : H. Moestafa Kamil, Mualim Adang, Uding Sayudin dan M. Rahmat Ali HAOT yang sengaja datang dari Jakarta. Dari pihak Kristen tampil pendeta-poendeta Wedding, Francis, dan Meyer. Sebagai

penasehata bertindak R. Idih Prawiradipoera dan ketua pertemuan Moh Tayyib. Judul perdebatan itu diajukan oleh pihak kristen yang berbunyi:

1. Muhammad itu bukan Nabi;
 2. Qur'an itu tiruan dari Bijbel
- Pembicara ditetapkan tiga orang yakni :

1. M. Rahamat Ali dari Ahmadiyah
2. K.H. Moetafa Kamil dari PSII
3. H. Ahmad Sobandi dari Muhammadiyah

Pembicara pertama dari Islam tampil M.Rahmat Ali, hadirin sangat tertarik oleh uraiannya. Pada perdebatan itu nampak keulungan M. Rahamnt Ali dalam mengemukakan keterangan – keterangan dari Bijbel dan Al Quran. Waktu yang ditetapkan telah lewat, sehingga pembicarra yang dua orang lagi tak kebagian waktu. Semua uraian tentang Bijbel tersebut disebutkan oleh M. Rahmat Ali diluar kepala, sehingga pendeta-pendeta itu sukar mencari dalam kitab sucinya sendiri. Akhirnya M. Rahmat Ali mendikte saja pendeta-pendeta itu, menunjukkan letak berbagai ayat yang disebutnya. Kawan dan lawan terpaksa mengakui keunggulannya. Kristen terdesak. Akan tetapi mereka minta supaya diadakan debat sekali lagi dengan bertempat di Bioskop “Odeon”, usul mana diterima dengan gembira oleh golongan Islam. Persiapan-persiapan dilakukan dan masing-masing golongan Islam mengajukan pembicaraan-pembicaraannya yang berikut:

1. H. Agus Salim dari PSII
2. A. Hasan dari Persis
3. Yunus Annis dari Muhammadiyah
4. M. Rahmat Ali HAOT dari Ahmadiyah

Ketua Panitia minta supaya diadakan pembicaraan tunggal saja, yakni M. Rahmat Ali yang sudah terbukti kemahirannya dalam berdebat. Selain itu juga karena ia tidak usah dibayar. Akan tetapi

golongan-golongan tersebut tadi tidak memperdulikan permintaan itu. Dengan demikian timbullah perselisihan dalam panitia. Akibatnya mereka mengundurkan diri dan membentuk panitia baru diluar Ahmadiyah, mereka berniat untuk mengaggalkan perdebatan tersebut. Panitia baru dibawah pimpinan H. Sukantawidjaja menghubungi pendeta-pendeta Kristen dan mengatakan, bahwa panitia lama (Ahmadiyah) tidak mendapat dukungan dari orang-orang Islam, karena pembicaraannya bukan orang Islam (yang dimaksud M. Rahamat Ali) dan pelopornya pun, Moh. Tayyib, seorang komunis Karena isu tersebut, Moh Toyyib, dipanggil oleh polisi selagi mengadakan perundingan dengan Kristen di gereja.

Moh Tayyib ditahan oleh Polisi dan dinasehatkan supaya perdebatan itu dibatalkan. Masyarakat Garut terbagi dua, yang pro dan kontra. Namun sebagian besar mendesak supaya perdebatan tetap dilangsungkan. Mereka tahu Ahmadiyah –lah yang nyata saling sanggup membela kehormatan Nabi Muhammad SAW dan Agama Islam.

Dalam suasana yang panas semacam itu, berdirilah suatu komite yang diberi nama “Komite Penyelidik Qadian” yang terdiri atas : Gada, Satiri, Udin Sayudin, Ganda, Yahya, Satibi, Ahmad bin Abdullah, dan H,. Mansur. Semuan anggota “Komite Penyelidik Ahmadiyah”, setelah menyelediki dengan teliti, mereka tidak ragu-ragu lagi masuk Ahmadiyah.

Sejak itu organisasi disusun dan didirikan cabang dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua	: Ganda
Penulis	: Yahya
Bendahara	: Amat (Ahmad bin Abdullah)
Anggota –anggota	: Udin Sayudin dan Satibi
Penanggungjawab	: Moh. Tayyib

Untuk membendung serangan-serangan musuh, dan untuk memelihara serta memajukan jemaat, timbullah pemikiran perlunya serorang utusan yang tetap dan mendapat didikan dari pusat, Qadian. Permohonan dikirimkan ke Pusat dan sebagai balasan didatangkan seorang pemuda yang alim berasal dari Aceh yakni : M Abdul Wahid H.A, yang tiba di kota Garut pada tanggal 22 April 1936.

Dengan adanya seorang utusan, hati orang-orang Ahmadi menjadi tenang dan pertablighan dipergiat dan diperluas. Dalam waktu singkat telah berdiri ranting Sukaraja dengan M. Kurdi sebagai ketuanya. Pada tahun itu pula Garut mendirikan mesjid secara gotong – royong, ditambah donator utama dari Ahmad bin Abdullah, yang letaknya di Sanding, Garut. Peletakan batu pertamanya disaksikan oleh M. Rahmat Ali dan Pengurus Besar dari Jakarta. Ini terjadi pada tahun 1936.

Pada tahun 1938 ranting Semarang berdiri juga, setelah dapat membai’atkan seorang haji bernama H. Basyari Hasan yang mempunyai murid banyak yang kemudian sebagian besar murid tersebut mengikuti jejak gurunya. Pada tahun 1938 seorang guru kepala HIS “ Budi Prijaji”, Garut, bernama Sukri Barmawi, bai’at masuk Ahmadiyah . Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1940 bai’at pula seorang kakaknya, seorang wedana (camat *sekarang*) Jatibarang, bernama Hasan Ahya Barmawi.

Pertablighan selanjutnya tidak terbatas pada kota Garut, melainkan meluas ke daerah lain, seperti : Gunung halu di daerah Kabupaten Bandung dan beberapa tempat di daerah Cianjur. Pada tahun 1941 diterbitkan sebuah majalah berbahasa Sunda yang bernama : “ Al Huda”

4.2. Ahmadiyah di Sukabumi

Seorang haji dari Cigombong, dekat perbatasan kabupaten Sukabumi-Bogor (kira-kira 25 km dari Bogor), meminta bantuan

Ahmadiyah di Bogor untuk melayani tantangan seorang Kristen Belanda yang selalu mengajak debat dengan Islam. Kyai – kyai dan ajengan – ajengan, juga alim ulamanya tidak ada yang sanggup menghadapinya. Permintaan tersebut oleh Ahmadiyah Bogor disanggupinya, meskipun Ahmadiyah harus datang ke Cigombong.

Pada waktu yang telah ditentukan, malam minggu, berangkatlah rombongan Ahmadiyah dari Bogor ke Cigombong sebanyak 8 orang. R. Muh Muhyiddin, ketua HB JAI yang sedang beristirahat di Bogor pun ikut dalam rombongan. Tiba di Cigombong langsung menuju rumah pak haji, yang telah penuh sesak dengan pengunjung sampai di halamannya, orang Belanda telah siap. Penjaga keamanan yang terdiri dari Veldpolitie dan polisi-polisi desa sudah hadir. Rombongan Ahmadiyah langsung menempati tempat duduk berhadapan dengan orang Belanda tersebut. Perdebatan berlangsung cukup menarik, karena masing-masing pihak menyampaikan pandangan-pandangannya sesuai dengan kitab sucinya. Pihak Ahmadiyah mampu menjawab setiap persoalan yang diajukan, namun sebaliknya pihak Kristen, justru menjadi terdesak menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan oleh Ahmadiyah. Peristiwa tersebut menjadi titik permulaan Ahmadiyah dikenal oleh masyarakat Sukabumi. Namun kekuatan Ahmadiyah di Sukabumi baru mendapat menggeliat setelah R. Gumiwa Partakusumah pindah ke Sukabumi.

Tahun 1940 R. Gumiwa Partakusumah dipindahkan oleh Pemerintah untuk bekerja di kantor PU, Sukabumi. Pada masa itu di Sukabumi sudah ada 2 orang Ahmadi yaitu Rustama Adnan dari Padang, pemilik “Toko Padang” dan Abnu Hasan dari Indramayu sebagai pegawai kantor Listrik Gebeo. Ketiga orang itu selalu membicarakan dan memikirkan cara menyampaikan faham Ahmadiyah kepada orang-orang pilihan, misalnya kepada pegawai-pegawai PU bawahan R. Gumiwa atau kepada teman-teman sepekerjaan mereka. Untuk maksud tersebut, mereka senagaja

mengundang Asy-ari atau Ahmad Barzah dari Bogor, juga utusan M. Abdul Wahib. Buku-buku dan berbagai bacaan Ahmadiyah banyak disebarakan. Hasilnya seorang anggota Muhammadiyah, Gajali, baiat masuk Ahmadiyah diikuti pula oleh beberapa temannya sekantor dan juga lainnya.

Seorang guru mengaji dari Persis yang memiliki pesantren dengan lk. 200 orang muridnya, besar sekali keinginannya untuk menyelediki faham Ahmadiyah. ia bernama Haji Abdullah dari Kerawan, Sukabumi. Dalam dua tiga kali diskusi dengan M. Abdul Wahid H.A ia menyatakan diri bai’at, diikuti oleh beberapa orang saja dari murid-muridnya.

Mesjid yang cukup besar yang memiliki pesantren itu dan berada dipinggir jalan diatas tanah H. Abdullah, dipergunakan oleh Ahmadiyah. Sejak saat itu Ahmadiyah dapat mendirikan sholat Jumat di mesjid tersebut. Meskipun letaknya agak jauh dari kota 3 km dari alun-alun Pada tahun 1940 itu juga Ahmadiyah di Sukabumi merasa bertambah kuat dengan datangnya tenaga baru dari Jakarta, ialah R. Sumadi Gandakusumah

Setelah jumlah anggota Ahmadiyah di Sukabumi memenuhi syarat untuk mendirikan cabang, maka pada tahun 1942 dibentuklah Jemaat Ahmadiyah cabang Sukabumi dengan susunan pengurusnya yang pertama diketuai oleh R. Sumadi Gandakusumah.

Pada tahun 1947 M. Ahmad Nuruddin yang pernah belajar di Qadian, menjadi muballigh Ahmadiyah di Sukabumi. Pertablighan oleh karenanya lebih diperluas, juga kepada orang-orang Kristen Sungguhpun Jemaat sudah dapat mempergunakan mesjid di Karawan, tetapi diperlukan mesjid yang letaknya di dalam kota. Rustam Adnan mewakafkan sebidang tanahnya di kampung Cipelang yang cukup luasnya untuk mesjid. Dengan cara bergotong-royong dalam tempo sebulan mesjid sudah berdiri dan dapat menampung kira-kira 150 orang Kegiatan cabang Sukabumi berjalan terus. Pada tahun 1963 M. Hafiz Qudratullah H.A ditunjuk sebagai muballigh.

4.3. Jemaat Ahmadiyah di Panyairan, Jawa Barat

Sekitar tahun 1938 H. Sanusi, seorang tokoh Partai PERSIS telah mempelajari ajaran Jemaat Ahmadiyah yang dibawah oleh utusan dari Qadian bernama Rahmat Ali H.A.O.T ke Indonesia

Pada kira-kira tahun 1941 – 1942 beliau melaksanakan bai'at di tangan Tuan Rahmat Ali HAOT, sendiri di Jakarta. Setelah beliau bai'at, maka pelajaran kejemaatan sedikit demi sedikit disampaikan pula kepada saudara – saudaranya dari pihak istrinya, diantaranya. Furkon, Ubajuri, Suhada, Atma dan Cece di kampung Ciparay beserta istri-istriknya. Berkat kesabaran H. Sanusi, akhirnya sekitar tahun 1942-1943 mereka bai'at. Kejadian tersebut menjadi pembuka terhadap kegiatan pertablighan di Cianjur.

Sejak tahun 1942-1943 kaum ibu Ahmadiyah dalam kegiatan tidak begitu menonjol, hanya secara diam-diam mereka taat saja kepada pelajarnya yang mereka miliki yang masih jauh kepada kesempurnaan. Mengingat sarana-sarana pelajaran keahmadiyah tidak sempurna seperti sekarang. Dalam zaman revolusi beberapa orang anggota Jemaat Ahmadiyah Bunijaya di mengungsi ke daerah *onderneming* Pasirangka Leuwimanggu, Cianjur Selatan. Di Leuwimanggu mereka bertemu dengan orang-orang pengungsi Bunijaya itu.

Pada tahun 1949 Pak Haji Sanusi itu ditunjuk oleh M. Rahmat Ali sebagai pembentuk Cabang Ciparay, yang berakibat banyak orang yang memaki jemaat. Salah seorang yang melawan Ahmadiyah itu ialah Tjetje Atmaja. Akhirnya, Haji Sanusi pada tahun 1950 di panggil tentara Belanda utnuk dibunuh karena dituduh sebagai pengacau agama, akan tetapi berkat perlindungan Allah SWT ia selamat. Untuk menyempurnakan Cabang Ciparay, maka pada tahun 1951 diadakan pemilihan pengurus, dan terpilih Haji Sanusi terpilih sebagai ketuanya.

Berkat keuletannya akhirnya Tjetje Atmaja setelah diberi pengertian tentang Ahmadiyah ia pun bai'at dan tidak lama kemudian ia pun menjadi pembimbing Jemaat di daerah Ciparay.

Atas usaha Haji Sanusi di daerah Ciparay berdiri beberapa ranting, seperti Penyairan, Cicakra, Cirende, Baros, Ciparay sendiri, Masing-masing ranting tersebut, memiliki mesjid dan memiliki bangunan madrasah serta rumah misi.

4.4. Jemaat Ahmadiyah Cabang Sukapura

“Sukapura ngadaun ngora” , demikian motto yang tertulis pada logo kabupaten Tasikmalaya. Motto itu kira-kira berarti : Sukapura asal Muasal Kabupaten Tasikmalaya sekarang – bersifat sebagai daun muda. Tumbuh terus selalu segar dan tidak pernah layu. Orang Tasik merasa bangga dengan mottonya ini. Menurut sejarahnya, Sukapura merupakan cikal bakal kabupaten ini. Sebelum berganti menjadi Tasikmalaya, kabupaten ini bernama Kedalemana Sukapura dengan ibu kotanya Sukaraja. Daerahnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya sekarang. Makam para Dalem Sukapura yang ada di Sukaraja sampai sekarang masih terpelihara baik dan menjadi tempat ziarah para pembesar Tasik dan umum, yang datang dari berbagai tempat.

Demikian pula jemaatnya, Sukarpura merupakan cikal bakal dari jemaat di Tasikmalaya. Dari Sukarpuralah jemaat Tasikmalaya berasal, kemudian berkembang ke daerah-daerah di sekitarnya menembus batas kabupaten Ciamis, Banjar dan lain-lain

Sebagai pelopor perkembangan Jemaat di sini adalah seorang pemuda enerjik berperawakan kecil, terpelajar dan haus ilmu, ia tidak pernah puas dengan apa yang telah diketahuinya. Pemuda yang lincah dan berani ini bernama Enggit Syarif²⁵, pedagang kapur yang sering membawa dagangannya ke Garut, Tasikmalaya dan kota-

25 hasil wawancara dengan H. Didi Kantadireja, H. Encang Jarkasih; Hj. Siti Saonah; H. Apandi, tahun 17 Mei 2000

kota di sekitarnya. Dari majalah “Dewan Islam”,Yogya dan surat kabar “Pemandangan”, ia membaca tentang adanya satu gerakan baru dalam Islam, bernama Ahmadiyah, pendirinya mengaku sebagai nabi. Selain itu, selama di Garut ia mendengar pula tentang gerakan ini dibawa oleh MohToyyib, orang Jakarta asal Sukapura. Karena penasaran, Syarif mendatangi kyai-kyai untuk menanyakan apakah Ahmadiyah itu. Tetapi tidak seorangpun dapat memberikan jawaban yang memuaskan, melahan mereka menyarankan untuk tidak mendekati organisasi itu. Tekad Syarif bukannya surut, justru ia semakin penasaran. Keinginannya untuk lebih mengetahui gerakan yang bertentangan dengan akidah umat Islam umumnya itu ia teruskan. Dan akhirnya ia mendatangi Sutrisna Senjaya (Sutsen) tokoh NU cabang Tasikmalaya. Sayangnya, jawaban Sutsen tidak menentu. Ini terjadi tahun 1934.

Merasa kecewa dengan jawaban para ulama tadi. Akhirnya syarif pergi ke Indihiang, untuk menemui kawannya Surjah dan Endi. Dalam pertemuan itu mereka sepakat untuk langsung pergi ke Jakarta menemui Moh. Toyyib. Sebelum ke Jakarta mereka singgah di Garut, yang kebetulan sekali, Moh Toyyib sedang berada di kota itu. Setelah berdiskusi panjang lebar dan mendapat penjelasan yang cukup, mereka kembali ke Tasikmalayua. Syarif kembali ke Sukapura dan menyampaikan apa yang didapatnya kepada sanak famili, kerabat dan teman-temannya. Setelah beberapa kali berdiskusi, bolak balik Sukapura-Garut akhirnya Syarif beserta 4 orang kawannya menyatakan bai’at, antara lain, mereka itu adalah :

1. E. Syarif
2. Sadkar, seorang guru asal Garut yang bertugas di Sukapura
3. Ibu Kendasah istri Sadkar
4. Adibin, seorang Guru
5. Syarif Anwar, seorang lurah Cisaat Girang

Mereka inilah yang merupakan Jemaat awwalin Sukapura.

Bai’at awa itu terjadi tahun 1939. Pada tahun itu juga, pada bulan Februari, Rahmat Ali HAOT ditemani Moh Toyyib berkenan datang ke Sukapura, menemui Syarif yang sudah simpati pada Ahmadiyah. Pada kesempatan itu Mlv. Rahmat Ali HAOT memberikan ceramah tentang bagaimana cara menyambut kelahiran anak dan bagaimana mendidik mereka selanjutnya.

Tahun 1939, Jemaat Ahmadiyah cabang Sukarpura terbentuk. Anggotanya terdiri dari 5 orang tadi ditambah beberapa orang simpatisan. Sejak itu roda organisasi mulai berjalan. Pengajian-pengajian, pertablighan mulai diatur, tetapi penentangan pun mulai menyala. Di sana-sini mulai terdengar isu-isu negatif dan fitnah.

Langkah pertama yang diambil cabang baru ini adalah mendirikan masjid, sebab selama ini seluruh kegiatan, baik sembahyang berjamaah, sholat Jum’at maupun pengajian-pengajian selalu diadakan di rumah anggota. Bahan-bahan dikumpulkan secara bergotong royong, tetapi di mana mesjid hendak didirikan, tidak ada yang sudi memberikan tempat. Di tanah anggota sekitar perkampungan, masyarakat tidak mengizinkan. Untunglah seorang simpatisan bernama Guru merelakan tanahnya di pinggir jalan tapi agak terpencil, untuk mendirikan mesjid. Maka berdirilah mesjid pertama terletak di Ciceret berukuran 4 x 6 bertiang bambu, berdinding gedek dengan atap rumbia.



Foto Jemaat Sukapura 1932
Sumber : Album 1934

Sementara itu tantangan dan tekanan dari luar tambah gencar tetapi jemaat terus maju. Setapak demi setapak tapi pasti. Tahun 1940 adalah tahun pembai'atan gelombang kedua. Di tahun ini bai'at antara lain : Didi Kantadireja, beserta istri, Siti Saonah Syarif, Paeji, Karjadinata dan lain-lain. Satu demi satu anggota terus bertambah sehingga mesjid dirasa sudah semakin sempit, juga yang letaknya terlalu jauh, dipindahkan ke daerah Cibuyut, lebih dekat. Didirikan diatas tanah hibah dari Kantadireja. Mesjid diperlebar dan diperkuat, bertiang kayu dan beratap genting.

Jemaat semakin berkembang, demikian juga perlawanan dan permusuhan makin memanas, mesjid sering dikepung dan dilempari batu. Anggota jemaat diteror, ditakut-takut agar keluar dan bergabung dengan Masyumi. Tetapi tidak seorang pun dapat tergoyahkan. Perdebatan sering terjadi, baik langsung maupun

tertulis. Dalam hal ini peranan Sadkar sangat besar, ia sangat cerdas dalam menjawab tulisan-tulisan mereka.

Tahun 1941, Syarif dan beberapa tokoh Jamaat Sukapura pindah ke Tasikmalaya, kemudian mendirikan cabang baru di sana. Sukapura seolah-olah kehilangan induk. Beruntunglah Mlv. Abdul Wahib HA Muballigh yang bertugas di Garut sering datang melakukan pembinaan. Demikian pula Mlv. Malik Aziz Ahmad Khan dari Tasikmalaya dengan sepedanya rajin berkeliling sampai ke pelosok-pelosok melakukan tabligh dan tarbiyat. Untuk mencapai tempat yang tidak bisa ditempuh dengan sepeda, orang Sukapura menyediakan kuda untuk tunggangan.

Jepang dengan keganasan dan kekejamannya datang pada tahun 1942. Banyak tokoh Jamaat yang ditangkap dengan tuduhan menjadi antek-antek Inggris. Dua di antaranya Syarif dan Sadkar, anggota lainnya sebagaimana rakyat Indonesia pada waktu itu harus menjalani *romusha* alias kerja paksa. Hasil panen harus disetor kepada pemerintah dan diangkut untuk keperluan perang. Tinggallah rakyat dalam kesengsaraan yang luar biasa. Sampai-sampai *bonggol* pisang dijadikan "makanan mewah" pengganti daging.

Jemaat Sukapura mengalami pasang surut. Praktis pada masa Jepang, tabligh secara terbuka terhenti, tetapi secara sembunyi-sembunyi, tetap berjalan. Bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, ratusan ribu rakyat tak berdosa mati sia-sia. Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia merdeka tahun 1945.

Gelombang serangan baru datang kepada Jamaat, lebih berbahaya dan kejam. DI / TII dengan Hisbullahnya bekerja sama dengan Masyumi berniat menghancurkan Jamaat. Jiwa dan harta milik jemaat harus dimusnahkan. Orang-orang Ahmadi terancam, sehingga perlu *kucing - kucingan* untuk menyelamatkan nyawa. Sore mengungsi pagi pulang ke rumah

Seorang Ahmadi bernama Eras yang bai'at tahun 1945, yang rumahnya jauh terpencil, nyaris jadi korban. Pada suatu hari ia diburu, dikejar-kejar oleh gerombolan DI/TII yang dipimpin oleh Kadar Solihat, persisi seperti orang memburu babi hutan. Ia ditombak dengan bambu runcing, kemudian punggungnya dibacok dengan samurai, tetapi dengan pertolongan Allah ia masih dapat menyelamatkan diri. Dengan luka yang menganga dan darah mengucur deras ia masih kuat menyebrangi kali Ciwulan. Kemudian dengan sisa tenaganya berjalan terhuyung-huyung sampai akhirnya ambruk di tempat pemandian umum milik anggota Jamaat, tetapi jiwanya dapat diselamatkan. Ia dikaruniai usia yang panjang, mencapai 87 tahun.

Seorang Ahmadi lainnya yaitu Cucu Wiraatmaja, seorang guru yang mengajar di Cigunung, suatu tempat yang sangat terpencil, 25 km dari Sukapura, juga hampir menjadi korban. Ia sudah diputus hukuman sembelih oleh DI/TII tetapi lurah desa tersebut dapat menggagalkan maksud mereka saat eksekusi akan dilaksanakan. Tetapi tak urung mesjid, ramai-ramai diruntuhkan. Kejadian ini berlangsung tahun 1946 dan baru 46 tahun kemudian mesjid itu bisa dibangun kembali.

Masih di tahun 1946, Syarif Anwar kepala desa Cisaat Girang, didulat dan dipecat dari kedudukannya karena tidak mau keluar dari Ahmadiyah.

Tahun 1947 terjadi serangan umum Belanda, orang-orang kota berbondong-bondong mengungsi ke desa. Anggota Ahmadiyah dari Tasikmalaya pun mengungsi ke Sakapura dan diterima dengan tangan terbuka. Setelah di pengungsian, setelah suasana perang agak berangsur mereka kembali ke tempat asalnya.

Pada masa perang ini seorang ahmadi, Mayor Sujana, ditangkap patroli Belanda kemudian di buang ke Nusakambangan. Turun dari pengungsian di gunung, DI/TII makin mengganas. Hampir tiap hari di kali Ciwulan, mengambang bangkai manusia. Maka demi

keselamatan, seorang demi seorang tokoh Ahmadi Sukapura pindah ke Tasikmalaya, Sukapura ditinggalkan.

Baru setelah merangkak panjang, jatuh bangun mengatasi halangan dan rintangan, akhirnya Sukapura bisa berdiri kembali. Diresmikan menjadi cabang yang ke-75 pada tahun 1979 dengan ketua Olih Solihin, pahlawan bulu tangkis yang pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ia pernah menjadi juara Asia, beberapa kali memperkuat regu Thomas Cup, bersama adiknya Tutang Jamaludin. Kemudian ia menjadi pelatih di Tim Korea Selatan, Jerman, Canada dan terakhir Di Brunei Darussalam.

Peranan tokoh Sadkar, Sadkar yang bernama asli Sadi'an Kartawijaya, dilahirkan di Parigi, Ciamis Selatan, pada tanggal 11 April 1911. Nama Sadkar sendiri sebenarnya baru digunakan pada tahun 1935 sebagai nama samaran bagi tulisan-tulisan beliau di berbagai surat kabar dan juga bagi bukubuku karangan beliau, namun pada perkembangan selanjutnya, nama tersebut malah lebih dikenal daripada nama asli beliau yang hanya diketahui keluarga dan teman sejawat beliau di kalangan kedinasan (Departemen PD dan K).

Setelah menamatkan Sekolah Desa di Parigi, beliau melanjutkan pendidikannya di Vervolg School di Banjar, dan karena termasuk salah seorang murid yang pandai, beliau diperkenankan oleh pemerintah masa itu untuk mengikuti dan lulus tes masuk ke sekolah guru (Normal School) di Garut. Selesai pendidikan, beliau diangkat menjadi guru dan ditempatkan di Kadupandak, Cianjur Selatan.

Kirakira antara tahun 1935-1936 beliau dipindahtugaskan ke Sukapura, Tasikmalaya. Di sinilah untuk pertama kali beliau mengenal Ahmadiyah melalui perantaraan Bapak Entoy Moh. Toyyib bertemu Bapak Maulana Rahmat Ali HAOT. Bapak Rahmat Ali sendiri pernah berkunjung ke rumah beliau di Sukapura dan

bertabligh kepada warga setempat.

Sadkar bai'at pada tahun 1937, dan termasuk Jema'at awwalin untuk daerah Sukapura/Tasikmalaya. Di daerah Sukapura ini beliau banyak mencurahkan perhatiannya pada kegiatan tabligh dan menyebarkan ajaran Jema'at Ahmadiyah melalui pengajaran-pengajaran dan menerbitkan bukubuku, sehingga atasan beliau memberi ultimatum untuk memilih salah satu antara tetap menjadi guru tetapi keluar dari Jema'at Ahmadiyah dan tetap menjadi anggota Jema'at Ahmadiyah tetapi diberhentikan dari guru. Karena beliau teguh dalam pendirian, beliau memilih kemungkinan kedua yakni tetap di Jema'at walaupun harus kehilangan pekerjaannya sebagai guru. Peristiwa ini terjadi pada awal tahun 1943, dan untuk membiayai kehidupan keluarga, beliau terpaksa pindah ke Tasikmalaya dan berdagang kecilkecilan, namun kepindahan ke Tasikmalaya ini malah menjadi ujian keimanan bagi beliau.

Pada awal tahun 1944 terjadilah "peristiwa Sukamanah", yakni kyaikyai setempat memberontak terhadap pemerintah Jepang. Jepang menuduh, bahwa organisator peristiwa berdarah ini adalah Jema'at Ahmadiyah. Serentak Jepang mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin Ahmadiyah. Sadkar pun turut ditangkap Kempetai bersamasama antara lain Syarif dari Sukapura, Surjah dari Indihiang, Rasli dari Tasikmalaya, Jumria dari Singaparna, Mlv. Malik Azis Ahmad Khan dari Kebumen, Entoy Moh Toyyib dari Singaparna, Abdul Wahid H. A. dan Abdul Samik dari Bandung, Yahya dari Garut dan beberapa orang lainnya.

Sepulangannya dari tahanan Kempetai di (kini Jl. Sultan Agung) Bandung selama 82 hari, Sadkar pindah ke tempat kelahiran isterinya di Tegalpanjang Garut. Di sini pun beliau terus bertabligh dan mendirikan Ranting Jema'at Ahmadiyah Tegalpanjang.

4.5. Jemaat Ahmadiyah Singaparna, Jawa Barat

Dalam awal tahun 1936, Rahmat Ali H.A.O.T. bersama E. Mohammad Toyyib Ahmadi dan di bantu oleh Ny Sulaehanah, melancarkan pertablighan ke daerah Singaparna. Pada waktu itu kaum pria beserta kaum istrinya termasuk dalam golongan Madzab ahli Sunnah (M.A.S) pimpinan Kyai H. Moh. Anwar Sanusi. Suasana yang mengelilingi mereka terasa amat kelim dan panas karena mereka dianggap oleh golongan lain menyeleweng dari Ahli Sunnah, dan mereka dinamakan golongan Wahabiah. Kelompok ini mendapat pelajaran-pelajaran dari mubaligh. Ahmadiyah tersebut diatas dan kemudian menerima kebenaran ajaran Ahmadiyah dan masuk menjadi pengikutnya dengan meninggalkan ajaran M.A.S.

Dengan masuknya mereka kedalam jemaat ahmadiyah, timbul reaksi yang hebat dan kebencian pun semakin menjadi-jadi baik dari masyarakat maupun dari pimpinan organisasi yang pernah ditinggalkan. Sebaliknya berkat ajaran-ajaran keagamaan yang diterima, mereka menerima ejekan dan pemboikotan itu dengan sabar, bahkan mereka mendekati orang-orang tersebut dengan ramah-tamah. Walaupun orang-orang tersebut sangat membenci Ahmadi, namun berkat ketabahan dan keuletan mubaligh Ahmadiyah, dan pembantu-pembantunya, makin banyak orang-orang yang memperhatikan ajaran-ajaran Hazrat imam Mahdi a.s., lebih-lebih setelah datang dua orang mubaligh baru yaitu Mlv. Abdul Wahid HA dan Mlv. Malik Aziz Ahmad Khan, pertablighan makin meluas.

Akhirnya berkat karunia Allah SWT, suatu peristiwa terjadi mereka pada akhir tahun 1936, sebanyak 46 orang pria dan wanita menyatakan baiat kepada Hazrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masih II r.a, dipelopori oleh Ny. Jumisah dan Argadiraksa. Sejak saat itu mereka menyatakan diri sebagai anggota Ahmadiyah

Pada tahun 1940, atas prakarsa E. Moh Toyyib dengan restu Mlv Rahmat Ali H.A.O.T, didirikanlah cabang AADI Singaparna. Sejak masuknya mereka menjadi anggota AADI, telah mulai diadakan secara resmi pengajian-pengajian untu memperdalam keahmadiyahannya satu kali dalam seminggu, di mana kaum ibu tidak ketinggalan mengikutinya. Sembahyang Jum'at dilakukan di Mesjid yang didirikan oleh kelompok Madzah Ahli Sunnah, yang kemudian mesjid tersebut, diserahkan oleh pengikutnya kepada Ahmadiyah. Dalam perjalanan Sholat Jum'at pun kaum ibu tidak ketinggalan meskipun mendapat banyak cemoohan.

Pada zaman penjajahan Jepang dimana segala kegiatan organisasi dibekukan, tidak berkecuali AADI hanya pengajian dan shalat Jum'at yang masih dapat dilakukan meskipun tidak dapat dilakukan secara bebas. Khotbah hanya terbatas pada pendidikan saja. Namun tabligh tetap dilakukan anjongsama.

Pada tahun 1944, terjadi peristiwa yang menyedihkan yaitu beberapa pengurus AADI ditangkap dan ditahan antara 3 - 18 bulan oleh tentara Jepang dengan tuduhan yang tidak beralasan. Tahun 1945. Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1947 terjadi aksi polisionil. Belanda yang pertama. Pada masa itu, keadaan tidak memungkinkan bagi organisasi apapun untuk melakukan kegiatan organisasi, kecuali bergerilya dan semua anggota AADI terpaksa bercerai-berai, meskipun demikian sebagian anggota secara sembunyi-sembunyi masih dapat mendirikan sholat Jum'at.

Pada kongres ke - 1 AADI tahun 1949, nama AADI diganti dengan nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia, pada kongres tersebut seorang ibu dari Singaparna yaitu Ny. S. Majenar turut menghindarinya dan pada kongres - kongres selanjutnya, kecuali di Padang, ibu-ibu Lajnah Singaparna selalu turut menghadiri. Setelah kongres Lajnah Imaillah di Bandung, sangat dirasakan betapa pentingnya mendirikan organisasi kaum wanita. Maka di Jemaat Ahmadiyah Singaparna pada tanggal 21 Maret 1950 berdirilah

dengan resmi Lajnah Imaillah cabang Singaparna, dengan pengurus pertama, diketuai oleh Ny. Jumisah, dibantu oleh Ny. Kiroh Abdul Karim dan Ny. Majenar Uwen sebagai dilengkapi menurut kebutuhan dan sesuai dengan instruksi dari Badan Penghubung Lanjnaah Imaillah. Pada tahun 1956 Ketua Lajnah Imaillah dijabat oleh Ny. Djuriah dan pada waktu Lanjah Imaillah dijabat oleh Ny. Djuariah, dan pada waktu itu Lajnah Imaillah cabang Singaparna terbagi atas 6 orang

4.6. Jemaat Ahmadiyah Lenteng Agung, Jakarta

Pada tahun 1935 H. Saban yang tadinya tinggal di Jakarta kembali ke Lenteng Agung dan mulai memperkenalkan Ahmadiyah kepada masyarakat setempat; tetapi baru pada tahun 1954 mulai berdiri Jemaat Ahmadiyah di sna seabgai ranting Jemaat Ahmadiyah cabang Jakarta. Pada wkatu itu shalat Jum'at diadakan dirumah-rumah anggota secara berpindh-pindah, sampai R. Yusuf Ahmadi membuat Langgar di sebuah rumah sakit jiwa di sekitar itu untuk tempat ibadat Jemaat

Paa tahun 1960 ranting Lenteng Agung diresmikan menjadi Jemaat Ahmadiyah canag Lenteng Agung dengan Ketua H. Saban.

Setelah kira-kira 11 tahun menjadi Lajnah Imaillah cabang Jakarta pada tanggal 17 Tabuk 1344 HS/ September 1965 M, diresmikan Lajnah Imaillah ranting Leteng menjadi cabang dengan ketua yang pertama Ny. Asnaini, isteri Syafig Harun yang pindah ke Ambom tahun 1967. Pada waktu itu Ny./ Asnaini bekerja tanpa dibantu oleh sekretaris lain karena belum ada ibu-ibu yang bisa berorganisasi sehingga kegiatan pun belum kelihatan.

Baru kemudian pada tahun 1349 HS/1970 M, tersusun pengurus Lajnah Imaillah Lenteng Agung yang terdiri dari ketua Sekretaris Khas dan sekretaris Maal, namun demikian, kegiatan - kegiatan Lajnah Imaillah pun belum memadai.

4.7. Jemaat Ahmadiyah Bunijaya, Jawa Barat

Pada awal tahun 1927 H. Mansur anggota Jemaat dari Jakarta, datang ke daerah Bunijaya. Berkenalan dengan H. Mulyo H. Mansyur itulah yang pertama kali membawa ke daerah ini cahaya benderang. Kebenaran da'wa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s sebagai Masihil Mau'ud dan Imam Mahdi a.s yang dijanjikan. Ia tidak segan-segan mengadakan pertabnighkan tentang kebenaran ajaran tersebut, sehingga H. Asbulloh beserta isterinya H. Rokayah bersimpati dan mengikutinya.

Kemudian menyusul beberapa orang lainnya, Ujang, Turmudi dan Wari serta 7 orang wanita yang kemudian menjadi perintis Lanjah Imaillah. Mereka adalah H.Rokayah, Iyoh Uhirah, Iyah, Enjum, Irah Euteu dan Iping. Setelah ada yang menerima kebenaran itu didirikanlah sebuah mesjid kecil, sekitar tahun 1314 HS/1935 M. Mulai saat itu Jemaat baru melaksanakan shalat Jum'at di Mesjid kecil itu dan kemudian baru kaum ibu mengikuti shoalat Jum'at setelah bapak-bapak 3 kali melaksanakannya.

Pada waktu itu kegiatan kaum ibu baru terbatas hanya membantu kegiatan kaum bapak, terutama tabligh dan membantu kelancaran kegiatan lainnya. Seperti halnya tjd pada Jemaat Ahmadiyah di daerah lain, disinpun fitnahan tentangan, olok-olok dan kebencian dialami oleh pengikut Jemaat. Namun segala penghalang itu diterima dengan ketabahan, kesabaran dan ketakwaan dan akhirnya membawa berkat sehingga kemudian diantara orang yang sangat membenci Jemaat itu akhirnya taklid juga serta melkukan baiat pada sekitar tahun 1316 HS/1937 M, dari sejak itulah, Jemaat di Bunijaya mulai berangsur maju, dalam arti membina dan memberikan penyuluhan kepda para anggota yang ada pada waktu itu. Mesjid pertama yang didirikan di kampung Simpang pinggir kali dikarenakan terbawa hanyut oleh banjir dari sungai Cidadap maka mesjid berikutnya didirikan di pinggir jalan kampung itu, setelah itu baru dipindahkan di kampung Babakan,

namun dikarenakan banyak yang membenci mesjid dirusak. Akhirnya mesjid didirikan dikampung Muja-Muju hingga sekarang.

5. Perkembangan di Jawa Tengah

Pelopor perkembangan Ahmadiyah di Jawa Tengah adalah dua orang : R.Ahmad Sarida dan M. Sayyed Shah Muhammad. R. Ahmad Sarida adalah seorang guru sekolah Dasar berbahsa Belanda, khususnya untuk famili Sultan Yogyakarta. Ia bekerja di sekolah tersebut setelah lulus dari Kweekschool (sekolah guru 0 di Yogyakarta pada tahun 1923.

R.Ahmad Sarida setiap hari Kamis malam mendatangi pengajian umum yang diadakan oleh Muhammadiyah. Dan selanjutnya ia pun dipilih menjadi anggota pengurus tabligh. Seminggu sekali ia bertabligh di pertemuan-pertemuan Muhammadiyah di luar kota. Ketika itu ia tidak hanya mempelajari agama Islam saja, tetapi juga agama Kristen. Walaupun agama Islam mengemukakan yang lebih masuk akal jika dibandingkan dengan ajaran Kristen, tetapi ia belum merasa puas atas keterangan – keterangan ulama Muhammadiyah seperti : Tuhan tidak berkata-kata lagi setelah ada Quran Sudi, basib yang baik dan burusk semua dapat dikehendaki Allah, siksanan neraka utnuk selama-lamanya dan lain-lain.

Pada tahun 1924 Yogyakarta di datangi oleh muballigh dari Ahmadiyah Centrum Lahore bernama Maulana Mohammad dan Mirza Wali Ahmad Baigh. Maulana Mohamad mengajar ilmu dengan mempergunakan bahasa Arab, sedang wali Ahmad Baigh dengan bahasa Inggris mengajarkan agama Islam kepada para intelek yang tidak mengerti bahasa Arab, R. Ahmad Sarida menjaid murid dari golongan kedua. Oleh karena pengajarannya lebih dapat dimengeri dan dapat diterima oleh akal, timbul keinginan padanya untuk pergi ke Lahore guna memperluas dan memperdalam ilmu-ilmu agama Islam. Kehendak itu diperkuat oleh R. Djojosiugito, bekas gurunya di Kweekshool dan menjadi Sekretaris I Pengurus Besar

Muhammadiyah dan belakangan terkenal sebagai tokoh Ahmadiyah Lahore.

Setelah R. Ahmad Sarida dapat mengumpulkan bekal ia berangkat ke Lahore. Setelah menjalani banyak penderitaan dalam perjalanan, akhirnya ia tiba di Lahire pada tanggal 22 Desember 1924. Ia tinggal di sebuah asrama dengan beberapa pemuda Muhammadiyah yang setengah tahun sebelumnya telah dikirim oleh Muhammadiyah Yogyakarta. Mereka adalah Djumhan (Putra KH. Ahmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah) Sabitun, Maqdam, Kafi dan Djundab. Meskipun belum mengerti apa-apa, R. Ahmad Sarida sudah disuruh bai'at kepada Maulvi Mohammad Ali M.A., L.L.B

Tiga hari setelah ia tiba di Lahore di kota tersebut diadakan pertemuan tahunan yang disebut Jalsah Salanah, dihadiri oleh laki-laki 200 orang. Begitu juga di Qadian menurut kabar diadakan Jalsah Salanah, dihadiri oleh 20.000 orang. Selama di Lahore ia belajar bahasa Urdu dari seorang murid Highschool akan tetapi tidak ada yang mengajar agama. Ia sering mengikuti sembahyang di dua mesjid yakni di mesjid Ahmadiyah Lahore yang diikuti oleh lk.200 orang. Melihat kenyataan demikian, ia mulai tertarik oleh Ahmadiyah Qadian. Ia sering bertemu dengan pelajar-pelajar di Qadian. Begitu juga sewaktu-waktu bertemu dengan Chaudri Zahrullah Khan dan Mufti Muhammad Sadiq. Akhirnya R. Ahmad Sarida meminta izin kepada President Jemaat Ahmadiyah Lahore untuk pergi ke Qadian guna belajar agama lebih lanjut. Akan tetapi tidak diizinkan dan diancam akan dikembalikan ke Yogya. Ia segera menghubungi Mufti Muhammad Sadiq dan bersama-sama dengannya ia pergi ke Qadian.

Selama di Qadian ia mempelajari buku-buku karangan Hazrat Masih Mau'ud a.s., buku-buku karangan Hazrat Khalifah II r.a dan buku-buku agama lain yang ada di perpustakaan Jemaat. Pada tahun 1926 ia baiat di tangan Hazrat Khalifah II r.a

5.1. Ahmadiyah di Cepu Jawa Tengah

Pada tahun 1928 ia pulang ke Indonesia atas panggilan pemerintah Hindia Belanda untuk diperkerjakan sebagai guru HIS di Cepu. Sebagai pemuda di Cepu ia aktif bertabligh dan berhasil memasukan Markum, Abang Anang, Ahmad Badawi, Sunarya, Djasmidin, Maskun dan lain-lain. Karena kebiatannya, ia dianggap mengacaukan masyarakat dan oleh pemerintah setempat ia diusulkan kepada pemerintah pusat supaya dibuang ke Digul. Akan tetapi beberapa waktu kemudian Assisten Wadana yang tidak senang kepada perkembangan Ahmadiyah itu dipindahkan ke tempat lain atas perintah Batavia.



Foto Jemaat Ahmadiyah Cepu, 1928, Ahmad Sarido, kedua dari kanan, Sumber : Album,1934

Seorang Arab bernama Ahmad Baghdadir sangat anti kepada Ahmadiyah dan mengkafir-karifkan anggota-anggotanya. Ia

menantang untuk bermubahallah. Sebagaimana peristiwa yang pertama diawali dengan sebuah mimpi, pada peristiwa Ahmad Baghdadir ini juga dialami seperti itu. Maka sebelum mubahalah Ahmad Baghdadir meninggal dunia setelah menderita penyakit paru-paru beberapa bulan lamanya.

Pada suatu waktu seorang Ahmadi di Padangan Jawa Timur ditahan atas perintah Bupati Bojonegoro, oleh karena menjadi pengikut agama Ahmad Sarida di Cepu. Ketika itu R. Ahmad Sarida mendapat tugas dari Asisten Resident Cepu yang akan pulang ke negeri Belanda, memberitahukan kepada Wedana Padangan bahwa ia akan menghadiahkan sebuah Schakelschool, akan tetapi harus ada permintaan masyarakat. Sebagai utusan Assiten Residen R. Ahmad Sarida diterima dengan baik oleh Wedana, yang dengan sambil lalu menceritakan orang yang ditahan itu. Setelah mengetahui bahwa orang yang diajak bicara itu R. Ahmah Sarida seabgai orang dekat dari Assiten Residen, maka tahanan itu segera dilepaskan Tahanan itu bernama Ahmad Badawi.

Setelah Abang Anang menjadi Ahmadi, ia diasingkan oleh anak isterinya. Ketika ia sakit dan akan wafat, akan dan isterinya tidak menengok, meskipun serumah. Kira-kira kurang sebulan wafat, Abang Anang dan juga orang-orang Ahmadi lainnya sudah mendapat firasat dan mimpi tentang kematiannya. Ketika keluarga Ahmad Sarida menengok Abang Anang yang sedang sakit, Abang Anang minta supaya tamunya pulang sebentar oleh karena ia melihat di dekat kakinya ada 2 malaikat yang akan membawanya. Permintaannya itu dimaksudkan agar ia dengan ikhlas dapat menerima kedua malaikat itu. Tidak lama setelah R. Ahmad Sarida pulang, datang kabar mengenai wafat Abang Anang. Sebagai ketua perkumpulan kematian R. Ahmad Sarida minta rakyat dikampung diberi tahu. Seseorang membawa gong berkeliling dan mengatakan bahwa yang meninggal itu R. Ahmad Sarida sehingga para pegawai negeri dan pembesar setempat datang ke rumahnya. Para tamu

diantarkan ke rumah Abang Anang. Jenazah dipukul dalam bandosa oleh 10 orang dan diantarkan oleh puluhan orang. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh R. Ahmad Sarida untuk memberikan penerangan

Mengacaukan masyarakat dan oleh pemerintah setempat ia diusulkan kepada pemerintah pusat supaya dibuang ke Digul. Akan tetapi beberapa waktu kemudian Assiten Wedana yang tidak senang kepada perkembangan Ahmadiyah itu dipindahkan ke tempat lain atas perintah Batavia.

Pada tahun 1929 di Cepu diterbitkan sebuah majalah bulanan bernama "Ceto Welo-welo" artinya "Terang Benderang" majalah tersebut tersiar di seluruh Indonesia dan berhenti karena R. Ahmad Sarida pada tahun 1937 dipindahkan ke Purwokerto

5.2 Jemaat Ahmadiyah di Purwokerto

Pada tahun 1938 ketika R. Ahmad Sarida tinggal di Pasarmanis Purwokerto sudah ada yang turut sembahyang Jumat di rumahnya yaitu R. Idris

Setahun kemudian yaitu pada tahun 1939 Purwokerto mendapat seorang muballigh tetap bernama M. Sayyed Shah Muhammad Al Jaelani. Berturut-turut masuk ke dalam Ahmadiyah seorang guru bernama Soeroso Malangjoedo. Disusul oleh seorang bekat anggota Ahmadiyah Lahore, bernama Hasan Soewarno. Sejak itu Ahmadiyah di Purwokerto mulai berkembang.

Setelah jemaat memiliki cukup anggota, maka terbentuklah cabang Purwokerto dengan R. Ahmad Sarida sebagai ketuanya. Oleh karena terasa perlunya ada mesjid di pusat kota, maka Jemaat telah membeli tanah untuk mesjid dan rumah muballigh. Tanah tersebut dapat dibeli dengan harga mudah. Oleh karena masyarakat di situ menganggap angker (sekarang jl. Kol Sugiri, Tjegebok).



Foto Jemaat Purwokerto 1932
Sumber : Album 1934

Jemaat Purwokerto pernah menerbitkan dua buah majalah. Yang pertama ialah “Panoendjoek Djalan”, diterbitkan pada tahun 1939 dan yang kedua bernama “Alhooda “ terbit pada tahun 1940 dengan ukuran buku kantong berisi 24 halaman. Kedua majalah tersebar di seluruh Indonesia.

Kemudian Soeroso dan Ahmad Sarido, menulis buku dalam bahasa Belanda “ De Gaid op de weg Gods” (petunjuk menuju jalan Allah Swt). Buku tersebut ditujukan bagi anak-anak sekolah tebalnya 50 hal, ukuran 12 x 18 cm (hasil wawancara dengan Bpk Soekarsono Mj. 3 Maret 2000)

5.3. Ahmadiyah di Kebumen

Ketika zaman pendudukan Jepang, salah seorang anggota Jemaat di Purwokerto bernama Soeroso malangjoedo pindah ke Kebumen. Karena itu Kebumen merupakan daerah pertablighan

yang baru, baru jemaat di bawah asuhan M. Sayyid Shah Mohammad dibantu oleh R. Ahmad Sarida. Tidak berapa lamanya Soeroso dapat membeli tanah dan kemudian mendirikan sebuah rumah. Bai’at pula beberapa orang antara lain :

Kurang lebih tahun 1939 sewaktu Syayid Shah Muhammad bertugas sebagai muballigh di Purwokerto dan Kebumen termasuk daerah binaanya, bai’atlah beberapa orang antara lain:

1. M Wahidin Malangjoedo ayah dari Soeroso Malangjoedo
2. Kromo Mispar pensiunan pegawai negeri
3. M Syulbi pensiunan pegawai dinas kesehatan
4. Sunar Pensiunan guru sekolah pertukangan ;
5. R. Muso pensiunan guru sekolah pertukangan
6. Suyono pegawai negeri

Setelah beberapa lama bai’at, R. Muso mewakafkan sebidang tanah seluas kurang lebih 100 m². Selama zaman perjuangan kemerdekaan, jemaat kurang terurus dan satu persatu anggota-anggota meninggal dunia dan tertinggal Suyono

Pada tahun 1952-1953 Soeroso kembali menetap di Kebumen dan mulailah beliau berusaha menghidupkan Jemaat. Walaupun terjadi beberapa kendala, antara lain seringnya Soeroso dipanggil yang berwajib untuk memberi keterangan / pertanggungjawaban, namun Jemaat Kebumen tetap bertahan dengan jumlah anggota yang sangat sedikit.

Tanah wakaf dari alm R Muso dimanfaatkan dengan dibangunnya masjid semi permanen oleh Soeroso., yang wafat pada tahun 1984 dalam usia 85 tahun

Di tahun – tahun berikutnya mesjid jemaat dibangun permanen atas biaya putra-putra Soeroso Setelah Soeroso wafat, Jemaat Ahmadiyah Kebumen diketuai oleh Soeyono. Soeyono diganti oleh Ismail asal Pabuaran Purwokerto, yang pada waktu itu menjabat Kepala Sekolah Dasar Negeri. Pada era kepemimpinan Ismail,

pertablighan sempat dikembangkan sampai Wadaslihntang (sekitar waduk irigasi)

6. Perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur

Sebagaiman di kota – kota besar yang lain, penduduk kota Surabaya juga kebanyakan terdiri daripada pendatang dari daerah lain. Oleh karena itu perkembangan Ahmadiyah di Surabaya pun dimulai sejak dua orang warga negara India bersaudara bernama Haji Abdul Hamid dan Ohammad Abdul Ghafoor apda kira-kira tahun 1930-an menetap di Surabaya. Kedua orang ini adalah orang-orang Ahmadi yang Baiat di India dan sejak pemisahazn India pada tahun 1947 mereka menjadi warga negara Pakistan. Disamping itu seorang penduduk Surabaya yang telah lama tinggal di Jakarta dan menikah dengan wanita asal Jawa Barat, kembali lagi di Surabaya. Ia bernama Ibrahim yang mempunyai dua orang saudara yang sudah menjadi Ahmadi yaitu Abu Hasan dan Mochammad Sobari. Pada tahun 1938 telah menetap pula seorang Utusan Ahmadiyah benama M. Malik Azizi Ahmad Khan di Surabaya. Sejak itu pertablighan di kota tersebut mendapat kemajuan, antara lain dengan masuknya keluarga R. Soelaman di dalam Ahmadiyah , keluarga R. Harun, Soepardi, dll. Dari Jawa Barat datang pula keluarga Ahmadi bersama Cucu Hanafiah. Akhirnya pada tahun 1938 itu juga terbentuklah Cabang Surabaya.

Di kampung kadang sapi / Gundih terdapat sebuah langgar yang mula-mula dipergunakan sembahyang Jum'at dan hari-hari biasa yang letaknya berdekatan dengan rumah M. Malik Aziz Ahmad Khan. Juga di Kampung Kedongdong terdapat sebuah langgar yang telah diwakafkan oleh keluarga Ibrahim. Kemudian pada tahun 1952 seabgai wakaf dari Mohammad Abdul Ghofoor, Cabang Surabaya mendapat tambahan berupa sebuah mesjid dan rumah missi yang letaknya di Bubutan Gg. I No. 2 Surabaya.



Foto Jemaat Ahmadiyah Surabaya 1933
Sumber :Album 1934

Walaupun cabang Surabaya merasakan kelemahannya dalam kwantitas jumlah anggota dan keuangan, namun berkat keikhlasan dalam berkorban, pada tanggal 23 s/d 26 Desember 1954 cabang tersebut telah dapat menyelenggarakan Konggres Jemaat Ahmadiyah Indonesia VI dan pada tahun 1964 Kongres XV serta pada tanggal 15 s/d 17 April 1964. Majlis Musyawarah XXV, yang cukup mengesankan.

Berkat keuletan para Ahmadi di Surabaya, maka pertablighan di Malang dan Madiun menghasilkan beberapa orang masuk Ahmadiyah , sehingga di Malang dan Madiun sudah dapat dijadikan ranting, berdasarkan surat Keputusan PB. Jemaat Ahmadiyah Indonesia tanggal 19 Desember 1975 No., 072/K/75 disahkan menjadi Cabang Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ke – 65 dengan Imam Harsono sebagai ketuanya.

C. Tahun 1940-1960: Penyebarluasan Daerah Pertabghian

1. Jemaat Ahmadiyah Citalahab

Tahun 1959, Naad anggota Jemaat Ciparay yang pada waktu itu usianya ± 55 tahun, pergi seorang diri dari Ciparay ke Citalahab, bekerja di perkebunan Citalahab, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Setelah 6 bulan, Naad pulang ke Ciparay, lalu kembali lagi ke Citalahab dengan membawa istrinya. Di Citalahab, selain bekerja di perkebunan, Naad juga menggarap tanah yang kosong, hasil dari bekerja dan bercocok tanam tersebut dapat di belikan tanah seluas ± 2 hektar di kampung Simpang Samid. Selain bekerja dan bercocok tanam, Naad rajin bertabligh.

Satu tahun kemudian (1960) anak menantu dari Naad yang berada di Ciparay sebanyak 3 keluarga, di antaranya yaitu: Uben, Ajiji, Ici Sanusi, ikut berbaiat. Setelah datang anak menantu Naad, anggota Jemaat yang berada di Citalahab semakin bertambah dan sering melaksanakan tabligh, walaupun tanggapan yang ditabligh bermacam-macam, ada yang mengatakan “Dari pada iman kepada Mirza Ghulam Ahmad lebih baik mati”. Dan yang lainnya banyak yang mengeluarkan hinaan dan caci maki kepada Naad dan anak menantunya sering melaksanakan tabligh, ternyata ucapan mereka dizahirkan oleh Allah Ta’ala. Dalam jangka waktu ± 6 bulan, sesudah ucapan-ucapan tersebut mereka meninggal dunia, dengan perantaraan jatuh dari pohon aren, dan masuk lubang, ada juga satu keturunan dihilangkan, tidak memiliki keturunan. Setelah dizahirkan ucapan-ucapan mereka oleh Allah Ta’ala dan disaksikan oleh masyarakat, maka banyak masyarakat mulai simpati terhadap Ahmadiyah bahkan ada yang bai’at seorang ustadz dan beberapa orang lainnya.

Anggota Jemaat yang berada di Citalahab bertambah, ketua Ciparay merencanakan membentuk ranting Jemaat Citalahab. Ketua Ciparay, Adang Rahmat dan salah seorang pengurusnya yaitu Baehaki berkunjung ke Citalahab. Lima bulan kemudian sesudah kedatangan Idrom, ketua Ciparay merencanakan membentuk ranting jemaat Citalahab. Setelah bermusyawarah, mengenai pembentukan ranting, semua sepakat bahwa pembentukan ranting dilaksanakan selesai sembahyang Jum’at, kemudian mengundang Mandor Desa, Kadus Jejuh untuk menghadiri pembentukan ranting Jemaat Citalahab. Jejuh bersedia, namun Jum’at pagi, Jejuh kedatangan tamu dari kecamatan. Ia menceritakan akan menghadiri pembentukan ranting jemaat Ahmadiyah Citalahab, tetapi pihak kecamatan melarang Jejuh untuk menghadirinya, kemudian tamu tersebut, menitipkan surat kepada Jejuh, yang isinya semua anggota Jemaat Ahmadiyah yang berada di Citalahab supaya datang ke kecamatan pada Sabtu pagi.

Hari Sabtu pagi semua anggota Jemaat yang berada di Citalahab berangkat ke kantor kecamatan. Di kantor kecamatan sudah menunggu beberapa aparat pemerintah di antaranya:

1. dari kepolisian
2. koramil
3. naib (KUA)
4. dari penerangan .

Aparat mengatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah organisasi gelap dan rencana pembentukan ranting tidak dibenarkan, karena melalui rapat gelap. Kemudian Jemaat memberikan penjelasan mengenai keadaan Jemaat Ahmadiyah dan memperlihatkan juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Selanjutnya aparat menyuruh anggota Jemaat menandatangani surat pernyataan keluar, karena Ahmadiyah itu kafir dan bukan Islam. Namun maksud aparat mengeluarkan Jemaat tidak berhasil,

tidak seorang pun menandatangani surat pernyataan keluar tersebut .

Keempat orang itu di tahan di kantor Kapolsek Jampang Tengah selama tujuh hari. Setelah tujuh hari, Adang dan Baehaki di bawa ke kejaksaan Sukabumi, sedangkan Idrom dan Uben tetap ditahan di Kapolsek Jampang Tengah.

Di kantor kejaksaan, polisi memberikan verbal, kemudian jaksa memberikan penjelasan bahwa masalah agama tidak perlu diselesaikan di kejaksaan, sambil memberikan data dengan sikap marah. Setelah dari kejaksaan, Adang Rahmat dan Baehaki tidak kembali ke Citalahab namun pulang ke Ciparay, tidak lupa menitipkan surat kepada polisi untuk Idrom dan Uben yang masih ditahan di kapolsek Jampang Tengah. Akhirnya, polisi menyuruh pulang kepada Idrom dan Uben karena masalah sudah dianggap selesai.

Sesudah kejadian tersebut, Idrom meminta surat rekomendasi keanggotaan dari cabang Ciparay ke Cabang Sukabumi. Setelah menggabungkan keanggotaan ke cabang Sukabumi, anggota yang berada di Citalahab sering dikunjungi oleh pengurus Cabang Sukabumi dan Mubaligh maupun mu'allim yang bertugas di Sukabumi diantaranya: Suhaemi Karim, Abdurrahman, Somadi, Gojali, Mubaligh Zaini Dahlan, Mu'allim Sulaeman.

Dengan bergabungnya keanggotaan ke cabang Sukabumi, keberadaan anggota semakin tenang dan kegiatan-kegiatan kejematan berlangsung lancar, namun dikarenakan tidak ada tempat untuk membina atau mendidik anak-anak, maka dibangun madrasah berukuran kurang lebih 5 x 8 meter, dengan biaya dari anggota yang peresmiannya mengundang dari pemerintah desa, kecamatan, koramil dan kepolisian. Juga mengundang pengurus jemaat Sukabumi diantaranya Ketua Cabang Subaemi Karim dan Gojali

Selain para undangan banyak lagi yang hadir di antaranya : Kepala Sekolah SD Citalahab dan guru – gurunya Peresmian madrasah dilaksanakan hari Minggu dan acara peresmian dipimpin oleh Samsudin, ghair Ahmadi.

Dalam sambutannya, Ketua Jemaat Sukabumi menjelaskan keberadaan anggotanya yang berada yang berada di Citalahab, kemudian menyuruh ke depan, Idrom dan Mahmudi, karena dalam acara peresmian madrasah ini akan dilangsungkan juga pembentukan Ranting Jemaat Citalahab dengan kepengurusannya dan kemudian Ketua Cabang Sukabumi menetapkan kepengurusan yaitu :

Ketua Ranting : Idrom

Sekretaris : Mahmudin

Saat berlangsungnya pembentukan ranting Jemaat Citalahab pihak aparat kepolisian menolak diteruskannya acara pembentukan ranting Jemaat Citalahab, dengan alasan tidak sesuai aturan. Akhirnya acara peresmian madrasah dan pembentukan ranting Jemaat Citalahab, dengan alasan tidak sesuai aturan. Akhirnya acara peresmian madrasah dan pembentukan ranting Jemaat Citalahab ditutup dengan do'a oleh Gojali pengurus Jemaat Cabang Sukabumi.

Hari Senin , Idrom dan Mahmudin dipanggil ke kecamatan, untuk diminta pertanggungjawabannya mengenai pembentukan ranting Citalahab, dengan kepengurusannya, kemudian akan bertanggung jawab untuk seterusnya apabila ada sesuatu yang berhubungan dengan ranting Jemaat Citalahab. Maka Idrom dan Mahmudin menyanggupinya.

Dari saat itu kepengurusan berjalan lancar selama kurang lebih satu tahun. Namun di akhir tahun 1974 dari pihak kecamatan memanggil kembali Idrom, yang maksudnya melarang Idrom

merangkap kepengurusan sebagai ketua ranting dan sebagai Rukun Tetangga (RT), dan dari pihak kecamatan menyuruh kepada Idrom supaya berhenti dari jabatan sebagai ketua ranting, tetapi Idrom menolaknya, lebih baik berhenti dari jabatan RT – nya.

Pihak pemerintah dan juga Idrom saling mempertahankan keinginan nya , yang pada akhirnya pihak pemerintah kecamatan menyuruh Idrom melaksanakan kedua jabatan tersebut.

Pada tahun setelah pembentukan Ranting jemaat Citalahab , maka pengurus Ranting mengajukan pembentukan Cabang Citalahab. Maka pada tahun 1975, ranting Jemaat Citalahab menerima SK terbentuknya Cabang Citalahab, dengan nomor Cabang (66).

Pada saat terbentuknya Cabang Citalahab jumlah anggotanya kurang lebih 110 orang dengan susunan pada saat dibentuk sebagai berikut :

Ketua Cabang	: Idrom
Sekretaris Khas	: Sunarya
Sekretaris Mal	: Mahmudin
Sekretaris Umur Amah	: Abdurrahman
Sekr. Umur Kharijah	: Muhammad Sholeh

2. Ahmadiyah di Tasikmalaya

Yang mula-mula berkenalan dengan Ahmadiyah diantaranya penduduk Tasikmalaya dan sekitarnya adalah aum pedagang. Mereka datang ke Jakarta membawa barang - barang hasil kerajinan tangan antara lain tudung, yang antara tahun 1933-1935 banyak diekspor. Di Jakarta mereka bermalam di Hotel Mataram , Molenvliet Oost, (sekarang Jl. Hayam Wuruk). Disitu mereka bertemu dengan seorang propogandis Ahmadiyah Moh. Tayyib, yang juga berasal dari Singaparna dekat Tasikmalaya. Percakapan antara mereka terus lancar saja. Sehingga pada pembicaraan yang

pertama pun mereka telah tahu Ahmadiyah agak banyak. Hal ini tidak mengherankan, oleh kerana di antara mereka ada yang sudah mengetahui Ahmadiyah melalui :

1. Majalah “Dewan Islam” terbitan Yogyakarta;
2. Surat kabar “Pemandangan “ yang terbit di Jakarta pada tahun 1933;
3. *Verslag* debat antara Persis v.s Ahmadiyah Tahun 1932 di Bandung dan di Jakarta tahun 1933;

Dan yang lainnya telah menyaksikan sendiri berlangsungnya debat di Jakarta. Hasil pendengaran dan penglihatan mereka itu, mereka bawa sebagai oleh-oleh kepada keluarga dan kaum kerabat di kampung halaman mereka.

Oleh-oleh itu sangat menarik perhatian mereka di kampung, terutama anak-anak mudanya, yang merasa penasaran ada orang yang mengaku Nabi. Di antara pada pemuda itu terdapat seorang yang bernama Enggit Syarif, yang ketika itu mendapat kabar dari Encu Syamsudin, sayang tidak dapat memberikan penjelasan. Kaarena penasaran, E. Syarif mendatangi kyai-kyai untuk menanyakan apa Ahmadiyah itu, tetapi juga tidak memuaskan selain mendapat fatwa untuk tidak perlu didekati. Ketika itu ia dengar, bahwa yang memimpin rapat pedebatan itu R. Moh. Muhyidin, yang dikenalnya sebagai Sekrertaris PB Paguyuban Pasundan dan sebagai pengarang asal usul kebudayaan dalam orgaan Pasundan dengan nama samaran kyai Hadimullah. Maka bertambah besarlah hasrat Syarif untuk menyelidiki Ahmadiyah. Dalam pada itu kebetulan ia memperoleh buku “Officiele Verslag Debat” di gang Kenari Jakarta, di mana Muhyiddin menjadi ketua persidangannya. Di samping itu ia menerima pula sebuah majalah “Islam’ terbitan Jemaat Ahmadiyah Padang



Foto Jemaat Ahmadiyah Tasikmalaya 1975
Sumber : koleksi pribadi.

Masalah Ahmadiyah ini ia bawa kepada Sutsen (singkatan dari Sutisna Senjaya) ketua NU Cabang Tasikmalaya, seorang pemimpin yang disegani. Jawabannya tak menentu. Ini terjadi pada tahun 1934. Oleh karena tak merasa puas, pergilah ia kepada seorang kawannya bernama Surjah di Indihiang untuk memberitahukan soal Ahmadiyah itu. Atas permintaan Syarif, Surjah dan seorang kawannya bernama Endi berangkat ke Jakarta untuk menemui Moh. Tayyib, Propagandis Ahmadiyah itu. Akan tetapi ketika dalam perjalanan ke Jakarta mereka singgah di Garut, ternyata Moh. Tayyib sedang ada di kota tersebut. Setelah bertukar pikiran dan mendapat penjelasan yang memuaskan, mereka kembali ke Tasikmalaya. Setibanya di Tasikmalaya, Surjah langsung mengajak Syarif untuk mendirikan Jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya. Sebagai alimnya diunjuk moh. Tayyib sendiri. Syarif merasa ragu oleh arena anggota belum ada dari persiapan belum dilakukan. Surjah orang yang terkenal pemberani itu tidak kehabisan akal.

Ia terbitkan selebaran yang isinya singkat "Iman Mahdi sudah datang". Selebaran-selebaran ini dibagi-bagikan di pasar, di jalan-jalan. Karena usahanya masyarakat Tasikmalaya menjadi gempar dan menimbulkan keinginan untuk menyelidikinya. Untung baginya karena pertemuan dengan Moh. Tayyib, menyebabkan Moh. Tayyib sering berkunjung ke Tasikmalaya untuk mengadakan pertemuan-pertemuan penerangan Ahmadiyah. Inilah hasil usaha Surjah yang hanya bermodalkan keberanian dan semangat.

Pada tahun 1935 berdirilah sebuah Komite Ahmadiyah di Indihiang, dengan mereka yang besar untuk menarik perhatian masyarakat terhadap Ahmadiyah dan untuk menyatakan, bahwa Ahmadiyah yang di halang-halangi oleh ulama Tasikmalaya itu sekarang sudah mendapat "pasaran" di daerah itu sendiri. Komite diketuai oleh Surjah dan sebagai sekretaris, E. Syarif. Anggota belum ada kecuali simpatisan-simpatisan yang mulai berdatangan. Tugasnya hanya satu: Tabligh dengan cara perdebatan umum dengan ulama-ulama, kaum thesofi dan Kristen., di mana M. Rahmat Ali H.A.O.T. dan / atau Sdr. Moh. Tayyib bertindak sebagai debatternya. "Selain usaha seperti di atas, sering juga Syarif dan Surjah membawa 'makanan' (istilah M. Rahmat Ali) berupa orang-orang yang akan menanyakan Ahmadiyah kepadanya. Di antara mereka ada yang di beli Taufiq untuk menerima kebenaran yang di bawa oleh Hazrat masih Mau'ud a.s. yakni seorang Guru, kepala Sekolah swasta "Karang Kamulyan" bernama Suryasumirat.

Pada tahun 1941 keluarga Syarif pindah ke Tasikmalaya. Kini di Tasikmalaya ada 5 keluarga Ahmadi dan di bentuklah Cabang Tasikmalaya dengan Rasli sebagai ketuanya. Ini terjadi pada tanggal 1 Mei 1941. Dengan cara gotong royong, maka didirikanlah pada akhir tahun itu mesjid yang cukup luas di atas tanah wakaf dari Rasli sendiri, diresmikan pada awal 1942 oleh M. Malik Aziz Ahmad Khan.

Pada zaman Jepang kegiatan Ahmadiyah dibekukan. Walaupun demikian, tabligh dengan secara anjang sana dan diam-diam dijalankan terus. Berkat keuletan seluruh anggota beserta pimpinannya tewujudlah Jema'at Karsamenak, yang sebelumnya telah dirintis oleh H. Djaenal . Ia mentablighi dua orang pengurus NU bernama Abdul Manaf dan Maman. Dengan masuknya tokoh-tokoh NU Karsamenak ini Jemaat bertambah kuat. Karenanya Tablighpun lebih dipergiat lagi. Aksi ini tentu saja menimbulkan reaksi dari masyarakat setempat, tetapi tidak sampai melemahkan perjuangan anggota-anggota Jema'at.

Tahun 1949 hampir habis. Anggota-anggota Jemaat Ahmadiyah Tasikmalaya masih banyak tinggal bersama-sama – 2 atau 3 keluarga di sebuah rumah. Mereka membutuhkan rumah. Tetapi jangankan untuk menyewa atau membeli rumah, untuk makan pun seret. Dalam suasana yang demikian itu mulai Malik Aziz mengajukan usul, agar Jemaat bersam-sama membeli bekas kelenteng untuk di buat gedung pertemuan. Kebanyakan anggota Jemaat tercengang karena tak disangka mereka gagasan sebesar itu akan diajukan pada masa sesulit itu . Walaupun demikian , gagasan itu disetujui juga, setelah Maulvi Malik Aziz Ahmad Khan menegaskan dengan sungguh-sungguh tentang perlunya “Gedung Pertemuan” itu bagi Jemaat dan menerangkan tentang balasan Tuhan bagi Jemaat dan menerangkan tentang balasan Tuhan bagi orang-orang yang berkorban untuk agamanya sedikitnya akan dibalas 10 kali lipat. Selanjutnya ditandaskan olehnya , bahwa kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi usaha kita tak berhasil. Oleh karena itu dirikanlah dahulu rumah Allah, nanti Allah akan mendirikan rumah buat kita.

Dengan ucapan itu bangkitlah semangat berkorban seluruh anggota. penyumbang-penyumbang istimewa ketika itu tercatat Ny. Darma , Ibrahim , Syarif dan Didi. Dengan sumbangan itu dibeli gedung bekas kelenteng dan di atasnya di bangunlah gedung

pertemuan yang cukup baik. Dan betul saja, pengorbanan mereka diterima oleh Allah S.W.T disamping mereka memiliki gedung pertemuan menjadi kebanggaan jemaat Tasikmalaya, berdiri pulalah rumah – rumah gedung dan perusahaan milik anggota – anggota Jemaat.

3. Ahmadiyah di Singapura

Sebagaimana telah diterangkan, seorang Ahmadi bernama Entony Moh. Tayyib ditugaskan untuk menjadi pembantu mubaligh dan beroperasi di daerah Garut dan Tasikmalaya, ia sebagai orang yang berasal dari Singapura tidak melewatkan kesempatan untuk bertabligh ditempat itu. Dalam tugasnya ia dibantu oleh Ny. Sulaehanah. Pada waktu – waktu tertentu daerah Singapura pernah dikunjungi oleh M. Rahmat Ali H.A.O.T., Abdul Wahid H.A dan Malik Aziz Ahmad Khan.

Pada tahun 1983 di Singapura sudah ada 4 orang yang menerima ajakan Moh. Tayyib untuk masuk dalam Ahmadiyah yaitu Siti Masithah atau disebut juga ibu Itot, antara lain Ibu Momoh. Ibu Tayyib; Ny. Antra; D. Moh Junaedi dan Liem Hing An. Keempat orang tersebut lalu mengajak Argadiraksa, seorang tokoh Gerakan Mazhab Ahli Sunan (MAS) yang dipimpin oleh K.H. Moh. Anwar Sanusi, untuk menyelidiki Ahmadiyah. Hal ini sesuai dengan fatwa pemimpinya, bahwa kita tidak boleh menolak mentah-mentah sebelum menyelidikinya. Akan tidak boleh menolak mentah-mentah sebelum menyelidikinya. Akan tetapi ketika beberapa pengikutnya mengadakan persiapan dan mencarikan bahan penyelidikan, tiba-tiba K.H. Moh Anwar Sanusi melarang murid-muridnya untuk mengadakan hubungan dengan Moh. Tayyib dan M. Rahmat Ali dan menutup pintu untuk Ahmadiyah. Akan tetapi atas kebijaksanaan Argadiraksa dengan berdasarkan fatwa ulama bahwa segala kebenaran dari mana dan dari siapapun datangnya, hendaklah diterima, maka mulailah diadakan pengajian untuk

semua anggota MAS tiap minggu sekali, yaitu tiap hari Selasa di rumah Uwen di Kampung Kongsu Desa Cipakat. Adapun yang dipakai pokok dasar pengajian ilaah “Filosofi Islam “ karangan Hazrat Imam Mahdi a.s. Pengajian yang dipimpin oleh D. Moh Junaedi dan Argadiraksa. Apabila ada hal-hal yang belum dapat dijelaskan, ditunggukan jawabannya sampai Moh Tayyib dan M. Rahmat Ali datang Singapura. Dengan demikian para peserta pengajian selalu mendapatkan keputusan dalam menyelidiki dan mempelajari agama Islam yang dibawa oleh Ahmadiyah itu.

Pada waktu itu maka Ahmadiyah di kalangan masyarakat Singapura masih sangat dibenci dan dianggap salah. Setelah Sadili, seorang Ahmadi Tasikmalaya yang tinggal di Singapura pada tahun 1940 mendengar, bahwa Ahmadiyah Tasikmalaya sedang bersiap-siap mengadakan perdebatan di Sukapura, ia mengusulkan agar hal itu diadakan di Sukasenang, Singapura. Usulnya diterima dan perdebatan antara Ahmadiyah dan K.H. Moh. Anwar H.A. dari pihak Ahmadiyah pada hari yang ditentukan sudah hadir , akan tetapi K.H. Moh. Anwar Sanusi tidak muncul.

Para anggota MAS yang melihat pemimpin mereka yang tidak mau menghadapi Ahmadiyah dan karena sering-sering mengadakan tahajud dan istikharah di samping berkat keuletan yang bertabligh, maka dengan karunia Allah SWT di Singapura sekaligus telah masuk ke dalam Ahmadiyah dan bai'at dengan perantaraan M. Abdul Wahid H.A. sebanyak 60 orang, dipelopori oleh Nyi Djumisah Argadikraksa. Dengan maksudnya berpuluh-puluh orang ke dalam Ahmadiyah itu, maka pangajian dipindahkan ke Mesjid yang tadinya mereka dirikan atas nama MAS dan mulai saat itu menjadi milik Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia (AQDI).

Perlawanan dari masyarakat yang sebagian besar ada di bawah pengaruh NU berjalan terus K.H. Moh Anwar Sanusi menjadi orang yang sangat anti dan tidak memusuhi semua utusan dan anggota Ahmadiyah. Sekali-sekali timbul juga perdebatan yang berpokok

sekitar “*Khatamanannabiyyin*” dan “*La nabiyya ba'di*” antara Ahmadiyah dengan bekas guru mereka yang menamakan dirinya Mufti Besar, akan tetapi selalu tidak ada ujung pangkalnya.

Maka pada tahun 1940 didirikanlah cabang Ahmadiyah Singapura dengan susunan pengurusnya yang pertama sebagai berikut :

Ketua	: Argadiraksa
Wakil Ketua	: Moh Jumriya
Penulis Umum	: D Moh Junaedi
Keuangan	: Uwen
Pembantu	: Moh Dimyati Nayadiraksa

Pada tahun 1965 Cabang Singapura mampu menyelenggarakan majlis Musyawarah , yang diselenggarakan di sebuah mesjid baru yang cukup besar di pinggir jalan besar.

4. Ahmadiyah di Bandung

Ketika awal tahun 1933 diadakan perdebatan yang pertama antara ahmadiyah dengan Persis di kota bandung , di sana belum ada seorang pengikut Ahmadiyah pun. Baru pada kahir tahun tinggal seorang pedagang , yang juga seorang Tabib Ahli Kuping Ahmadi pindahan dari Padang . ia bernama Abdul Samik , pernah belajar agama dari bai'at di Qadian. Ia mendiami sebuah rumah di Jalan pejagalan No. 35 Ia pun mempunyai beberapa kawan yang membantu usaha Abdul Samik membuat jamu-jamu , berasal dari Minangkabau, yaitu Nazir , Ata,Saud dan basyir. Kepada merekalah ia sampaikan tabligh Ahmadiyah ialah Basyir dan Nazir . Dan pada tahun 1938 bertambahlah dengan seorang Ahmadi pindahan dari Jakarta seorang pegawai *Staats Spoorwegen* (SS) bernama Ajujar , berasal dari Minangkabau . menurut Ahli warisnya setelah cukup sukses, Abdul Samik membawa saudara-saudara sekandungnya ke

Bandung, yaitu 2 orang kakaknya dan seorang adiknya, Muhammad Yatim, semuanya Ahmadi²⁶



Foto jemaat Ahmadiyah Bandung, 1934
Sumber : koleksi pribadi

Pada waktu itu organisasi belum ada, karena jumlah anggota belum mencukupi syarat. pada akhir tahun itu juga pindahlah M. Abdul Wahid H.A. dari Garut ke Bandung. Tempat yang mula-mula didiami ialah Nyengseret. Disewa sebuah Pondok Panggung di Bawah serumpuan bambu. pada ketika itu tinggal juga di Bandung keluarga Aceng Basumi, merupakan keluarga Ahmadi dari Jakarta, dengan kedatangan M. Abdul Wahid H.A. itu pertablighan pun lebih diperdebat kemudian seorang demi seorang Bai'at sembayang Jumat pun didirikan. Sembahyang Jum'at yang pertama itu diikuti hanya 7 orang saja 4 laki-laki 3 perempuan, yakni: utusan HA dan

²⁶ hasil wawancara dengan Sdr Rafik Ahmad, salah satu cucu Muhamad Yatim tanggal 3 Maret 2000

istri, utusan Malik Aziz Ahmad Khan, Abdul Samik dan istri, H. Marah Wahab dan Nyonya Rokayah, tempatnya di Pondok Bambu, Nyengseret.

Di Nyengseret M. Abdul Wahid HA sekeluarga hanya tinggal 40 hari saja. Setelah itu pindah ke Jalan Pejagalan No. 35 C dekat rumah Abdul Smik. Baru di sinilah Ahmadiyah mulai menampakkan wajahnya dengan memasang merek besar yang sengaja dibawa oleh Sukri Barmawi dari Garut. Pengurus Cabang pun segera dibentuk dengan susunan :

Ketua	: Ajuzar Gelar Sutan Palindih
Sekretaris Khas	: A. Juberi
Sekretaris Keuangan	: Mami Danumiharja
Sekretaris Tabligh	: R. Usman Subandi
Sekretaris Maal	: Abdul Samik

Organisasi Jemaat ini berjalan baik sampai Jepang datang. Ketika Jepang berkuasa organisasi resminya dibubarkan oleh Jepang dan mereknya pun diturunkan. Utusan sendiri, Abdul Samik, Ajuzar beserta pengurus Ahmadiyah dari tempat lain ditawan Jepang selama 82 hari. Dalam tawanan ini pimpinan Jemaat menderita. Mereka baru dikeluarkan setelah diadakan pemeriksaan yang teliti dan mendalam. Akhirnya diketahui, bahwa penawanan itu hanya disebabkan oleh fitnah dai mereka yang anti terhadap Ahmadiyah. ini terjadi pada awal tahun 1944.

Pada zaman Jepang kecuali mendirikan sembahyang Jum'at, tidak ada kegiatan dan pertablighan yang berarti dan oleh karena itu jumlah anggota pun tidak bertambah. Jepang menyerah kalah pada tahun 1945. Revolusi phisik dimulai. semua anggota Jemaat pun turut aktif berjuang menurut kemampuannya. Abdul Wahid sendiri bekerja di RRI Studio Bandung di seksi urdu dengan di bantu oleh Malik Aziz Ahmad Khan sampai peristiwa Bandung Lautan Api.

Penduduk kota mengungsi, termasuk anggota-anggota Jemaat pun begitu juga, ada yang ke Majalaya, Garut dan lain-lain tempat . Utusan Abdul Wahid sekeluarga mengungsi ke Garut.

Ada tahun 1948 pengungsi banyak yang kembali ke kota . Utusan Abdul Wahid kembali di Garut beserta beberapa anggota . Jemaat dan menyewa sebuah rumah di Gg. Makdudi Bojongloa. Ketika itu terpikirlah olehnya pentingnya mempunyai mesjid beserta rumah untuk kegiatan jemaat. Oleh karena itu ketika di Gg. H. Sapari ada yang menawarkan tanah, ia bermaksud membelinya. Sedangkan pada saat itu Jemaat tidak punya uang, sedang anggotanya pun baru sedikit yang kembali ke kota . Mengingat pentingnya tanah itu, maka Ibu Taslimah Abdul Wahid dengan segala keikhlasan menjual sebagian dari perhiasannya . Hasilnya dibelikan tanah seluas 30 tumbak dengan harga Rp 12.00,- Ketika itu harga emas Rp 13,- pergram . setelah selesai pembelian , maka segera diaturnya di bangun sebuah mesjid dan pavilyun. Selama mesjid belum selesai , M. Abdul Wahid tinggal bersama-sama dengan Momon dan keluarga Jamhur, di Gg. Maksudi .Kedua orang ini pulalah yang mengawasi pelaksanaan pembangunan mesjid itu di bantu oleh delapan keluarga dan Garut yang sengaja , ditugaskan untuk menunggu bahan-bahan bangunan bekas pabrik dodol yang pun dua per tiga di pikul oleh kaum ibu Garut dan sebagian lagi oleh kaum ibu, dengan arsitek, R. Gumiwa Partakusumah.

Pada bulan Juli 1948 perletakan batu pertama dilakukan. Selain M.Rahmat Ali dan anggota Pengurus Besar dari Jakarta, juga hadir wakil-wakil Cabang di Jawa Barat. Mesjid ini selesai pada tahun 1950 ketika kongres II Jemaat Ahmadiyah Indonesia diadakan di Bandung dan dapat menampung seluruh pesertanya sebanyak 200 orang.

M. Abdul Wahid berusaha memperluas daerah pertablighannya. Ia sering mengadakan tabligh ke Gununghalu, Cililin, sebuah daerah perkebunan yang sudah dirintis oleh H. Mansur yang di Jakarta,

akan tetapi kebetulan beristrikan seorang wanita dari daerah Gununghalu. Selain di Gununghalu, juga Ahmadiyah melebarkan sayapnya ke Sukatali Sumedang hingga terbentuk juga kring yang ketika itu beranggotakan 10 keluarga yang Baiat pertama ialah Mama Angga.

Pada tahun 1960 di Cimahi telah berdiri pula sebuah ranting berkat pertablighan beberapa anggota Jemaat Bandung ditempat itu. Juga di Rajamandala berdiri sebuah ranting yang pada tahun 1963 ketika Cimahi menjadi cabang, oleh Cabang Bandung diberikan Kepada Cabang Cimahi yang letaknya lebih dekat. Ranting lain ialah Majalaya dengan seorang Ahmadi sebagai pelopornya ialah Wihardja. Baru ketika, Ir. Herman Priyatna mantu dari Sadkar bekerja di Induk Pencelupan, Majalaya dan dia suka bertabligh terutama atas bantuan Sadkar dari Garut maka pada tahun 1965 Majalaya disahkan menjadi ranting dengan beranggotakan 30 orang.

Dengan sudah bertambah luasnya pertablighan di Bandung dan sekitarnya, maka pada tanggal 22 s/d 24 Juli 1960 Bandung telah terpilih menjadi tuan rumah Majelis Musyawarah XI dengan dihadiri oleh 1300 orang dewasa dan 200 anak-anak dan begitu juga pada tahun 1963 telah pula diadakan Jalsah Salanah XIV yang mendapat kehormatan dikunjungni oleh WakilOut – Tabshir, Sahibzada Mirza Mubarak Ahmadh.

5. Ahmadiyah di Cikalongkulon

Perkembangan Jemaat Ahmadiyah di daerah Cikalongkulon dimulai sejak tahun 1932 ketika Dummy Number majalah “Sinar Islam” mulai beredar. Beberapa buah dikirimkan oleh S. Sumajpradja asal Cibalagung, Cianjur ke daerah Cibalagung dan sekitarnya, sehingga masyarakat di daerah tersebut mulai mengenal Ahmadiyah . juga majalah tersebut dikirimkan kepada majalan Al Mu’min di Cianjur.

Begitu juga dibawah oleh R. Hidayat dari Bogor dan diperkenalkan kepada mertuanya bernama R. Ukosukraatmadja di Cikalongkulon sekitar tahun 1932 juga. R. Ukosukraatmadja berusaha pula menyampaikannya kepada kaum kerabatnya antaranya R.H Lomri. Mereka tidak henti-hentinya menyelidiki dan mempelajari Ahmadiyah. Dari Cianjur seorang Ahmadi bernama Abdussalam adik dari R. Moh. Muhyiddin sering mengunjungi Cikalongkulon dan mengadakan kontak dengan mereka.

Pada tahun itu juga seorang bernama Sulaeman asal Cianjur telah mendengar hebohnya ada gerakan Ahmadiyah dengan anggapan masyarakat yang berlain-lainan. Ia berhasrat untuk menyelidiki sebenar-benarnya, lebih-lebih karena ia sudah pernah belajar di sekolah Arab, sehingga dasar untuk mempelajarinya sudah ada. Oleh karena itu ia pergi ke Jakarta dan menumpang pada iparnya bernama R. Tami. Kebetulan sekali iparnya itupun sedang berusaha untuk mencari keterangan mengenai Ahmadiyah dari M. Rahmat Ali, ketika ia tinggal di Gg. Kleykamp. Dengan cepat Sulaeman dapat menangkap pelajaran dari gurunya sehingga tidak berapa lama ia sudah dipercaya untuk melakukan pertablighan tidak berapa lama ia sudah dipercaya untuk melakukan pertablighan di sekitar Jakarta. Setelah ia dibai'at pada tanggal 27 Juli 1936 bersama-sama dengan anggota-anggota lainnya di Jakarta ia kemudian ditunjuk menjadi Naib Muballigh.

Mengingat bahwa Sulaeman mempunyai pengalaman bertabligh dan memiliki cukup pengetahuan tentang Ahmadiyah, maka oleh M. Rahmat Ali ia ditunjuk sebagai muballigh di Cikalongkulon untuk memenuhi keinginan H. Lomri. Setelah Cikalongkulon mendapat seorang mubaligh Ahmadiyah, tiap hari banyak orang datang minta penjelasan tentang Ahmadiyah. maka dirasakan perlunya tempat berupa mesjid untuk bersembahyang Jum'at R.H. Lomri beserta isterinya bernama Nyi. R. Rafi'Ahmadiyah tampil di muka dengan mewakafkan tanahnya seluas lk. 472 m² letaknya

di kampung Nanggaleng Desa Sukagalih, Cikalongkulon dan kemudian di atasnya mendirikan sebuah mesjid yang cukup besar.

Pada tanggal 1 Agustus 1941 dibentuklah Cabang Cikalongkulon dengan susunan pengurusnya sebagai berikut :

Voorzitter (President)	: R.H. Lomri
Sekretaris Khas	: Suriadiharja
Sekretaris Maal / Muhasib	: R. Uko Sukraatmadja
Sekretaris Tabligh / Ta'lif	: R. Abdussalam
Sekretaris Ta'lim Tarbiyat	: R.H. Lomri

Maka tibalah zaman pendudukan Jepang. Aktivitas organisasi beku. Akan tetapi tuduhan dan fitnahan dari masyarakat yang disponsori oleh para kyai semakin gencar. Berkat kuletan muballigh beserta anggota-anggota Ahmadiyah, maka semua kesuliatan dapat diatasi. Usaha mereka untuk membendung dan menghapuskan Ahmadiyah secara wajar tidak berhasil. Akhirnya mereka melancarkan fitnah yang kasar yang diajukan kepada pemerintah Jepang. Fitnah – fitnah yang kasar yang diajukan kepada pemerintah Jepang. Fitnah itu datangnya dari para Kyai yang menuduh Ahmadiyah sebagai pembuat onar yang dilaran negara. Berdasarkan itu Soncho (camat) Mande memerintahkan penahan di kantornya terhadap Martawi dan Julaemi, masing-masing ketua dan anggota ranting Warudoyong Perkara ini dihadapkan ke muka Pengadilan Negeri di Kota Cianjur dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi palsu. Oleh Hakim Mr. Isa mereka dijatuhi hukum masing-masing 4 tahun penjara dan Julaemi 3 tahun.

Dalam sidang Pengadilan Negeri itu Sulaeman hendak berusaha membela mereka, akan tetapi ditolak Hakim. Kejadian yang tidak adil ini disampaikan oleh Sulaeman kepada M. Rahmat Ali dan PB, yang kemudian memberi tugas agar hal ini dilanjutkan kepada seorang anggota Ahmadiyah berhama Taher Gelar Sutan

Tumenggung, yang menjabat Ketua Landraat di Meester Cornelis (Jatinegara), diantara oleh Bachtiar Martapura. Setelah Taher gl. Sultan Tumenggung mendengarkan laporan Sulaeman ia merasa bahwa Pengadilan Negeri Cianjur telah melakukan kecerobohan dan sambil meneteskan air mata ia bergumam, “ Alangkah bahagiannya kedua orang yang telah berkorban dan saya merasa iri hati”. Kemudian ia berjanji akan berusaha pula mengurusnya.

Tidak lama kemudian Martawi dan Julaemi dipindahkan dari rumah penjara Cianjur ke rumah penjara Cipinang, Jakarta. Akhirnya pada tanggal 4 Mei 1945 Martawi meninggal di penjara. Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un. Sedang Julaemi dikeluarkan dari penjara oleh para pemimpin perjuangan kemerdekaan di zaman kemerdekaan RI.

Dalam zaman revolusi seluruh anggota turut berjuang, lebih – lebih setelah mendapat anjuran dari Hazrat Khalifatul Masih II.a.t.b.a. supaya seluruh anggota Jemaat Ahmadiyah membantu perjuangan Republik Indonesia. Sulaeman sendiri ditunjuk oleh Panitia Umum untuk ikut serta dalam membimbing Laskar rakyat Cikalongkulon. Dari Palumbon telah mengungsi pula keluarga Madropi, keluarga Nata, keluarga Toha, keluarga Sahali dan Keluarga Naspin.

6. Jemaat Cirebon

Pada tahun 133 HS / 1952 M, H Basyari Hasan membawa kabar suka ke daerah Cirebon, tentang kedatangan Imam Mahdi Masih Mau’ud a.s yang dijanjikan. Pada waktu yang baiat pertama kali sebanyak 7 orang yaitu : Djikan, Sumardjo, Harun dan Keluarga Juwandi. Kira-kira pada tahun 1333 HS/1954 M. Jemaat Ahmadiyah cabang Cirebon terbentuk.

Pada tanggal 20 Shahadat 1333 HS/20 April 1854 M. 8 kaum ibu mengadakan rapat atau pertemuan yang disaksikan oleh bapak dan Ibu Sarimaya Hasan Ahya Barmawi dari Bandung dan

H. Basyari dari Garut, yang menghasilkan suatu putusan tentang terbentuknya Lajnah Imaillah cabang Cirebon disertai susunan pengurus yang diketuai oleh Ny. Jukaeha Juawandi. Kegiatan pada waktu itu baru dalam ibadah, yaitu setiap Jum’at berkumpul setelah selesai shalat Jumat dan sekali sebulan mengadakan pertemuan yang diisi dengan pelajaran kewanita-an. Kaum ibu tidak pernah absen dalam menunaikan tugas-tugas kejemaatan baik dalam segi ibadah maupun dalam pengorbanan. Selama ini kaum ibu berada di bawah pimpinan pengurus cabang setempat, disamping pembinaan Muballigh H. Basyari yang berkedudukan di Manislor.

7. Ahmadiyah di Daerah Manislor

Pada tahun 1952 H. Basyari Hassan, ketua Jemaat Ahmadiyah Indonesia Ranting Semarang Garut, merangkap Kuwu (Kepala Desa) Sukarasa, melepaskan jabatannya sebagai Kuwu. Ia pindah ke Garut dan tinggal di Jl. Ciledug. Kemudian H. Basyari diperintahkan oleh Abdul Wahid Sy. Pindah ke Manislor. Selama seminggu tinggal di Cirebon, H. Basyari Hassan mengadakan pertemuana di beberapa tempat dan perkenalan dengan Elang dan tokoh-tokoh Cirebon dan hasilnya 7 orang baiat, yaitu : Djikan dan Sumardjo kawan sekerja Juandi seluruh keluarga Juandi dan juga Harun.

H. Basyari menganggap perlu adanya ranting di Cirebon itu dan kebetulan syaratnya telah memenuhi. Maka ketika itu dibentuklah pengurus Jemaat ranting Cirebon dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: Juandi
Wakil ketua	: Harun
Penulis	: Udin

Setelah selesai tugasnya H. Basyari kembali ke Garut. Pada suatu waktu diadakan peringatan Mi’raj dan Isra’ Nabi besar Muhammad s.a.w., H. Basyari sengaja diundang ke Cirebon. Peringatan tersebut

mendapat perhatian dan banyak orang yang hadir. Setelah selesai peringatan itu Soetardjo, Mantri Polisi Kecamatan Jalaksana, baiat. Mantri Polisi ini yang kemudian menyebabkan Ahmadiyah berdiri di Manislor.

Pada bulan Desember 1953 H. Basyari di Garut kedatangan Juandi dari Cirebon yang meminta H. Basyari datang ke Cirebon karena ada Kuwu Minaslor yang minta keterangan-keterangan. Segeralah H. Basyari datang ke Cirebon bersama Juandi. Setibanya sudah hadir Kuwu Bening dan Sukrono. Setelah berbicara mengenai soal kedesaan dan masyarakat serta aliran agamanya, mulailah mereka membicarakan soal Ahmadiyah seperti yang dikehendaki oleh Kuwu Bening dan Sukrono. Setelah berbicara mengenai soal kedesaan dan masyarakat serta aliran agamanya, mulailah mereka membicarakan soal Ahmadiyah seperti yang dikehendaki oleh Kuwu Bening itu. Setelah jelas, keduanya baiat dengan berjanji akan mengumpulkan kyai-kyai dan tokoh-tokoh Islam di kecamatan Jalaksana untuk di tablighi. Betul saja janji mereka dipenuhi. Ketika H. Basyari datang di Jalaksana, telah berkumpul 20 orang kyai, mualim dan ustadz. Pembicaraan berkisar di sekitar wafat Nabi Isa a.s dan kedatangannya untuk kedua kali. Ketika para kyai, mualim dan ustadz. Pembicaraan berkisar di sekitar wafat Nabi Isa a.s dan kedatangannya untuk kedua kali. Ketika para kyai itu mengetahui, bahwa persoalan-persoalan itu tertera dalam Al Quran dan kitab-kitab Hadists yang biasa mereka baca, mereka ta'jub juga. Diperpanjang menjadi 4 jam, itupun masih banyak yang belum puas. Esok harinya Ni Kuwu, Trisnaprawira, Suminta, Darkin, wira dan isteri, Widjaja, Mis dan Wila, baiat. Setelah itu datang berbodong-bodong masuk Ahmadiyah sebanyak 80 orang dalam sehari. Dan selama 4 hari H. Basyari membaiatkan 450 orang penduduk Manislor.

Kuwu Bening sebelum datang H. Basyari sudah Ahmadi dengan perantaran Toha (Keterangan Taslimah Abdul Wahid). Peranan

Kuwu Bening Besar sekali dalam menyebarkan, menambah jumlah anggota Ahmadiyah. Dialah orang asal Manislor yang baiat pertama-pertama berdua saudaranya, Sukrono. Bersama dengan H. Basyari mereka membina Cabang dan Desa Manislor sesuai dengan ajaran – ajaran Ahmadiyah atau Islam yang sejati, meskipun menghadapi rintangan – rintangan yang hebat. Diantaranya Kuwu Bening beberapa kali berurusan fihak yang berwajib, samai ditahan, oleh karena fitnahan.

Dari sehari ke sehari jumlah anggota Jemaat makin bertambah sehingga mencapai 80% dari seluruh penduduk desa Manislor yang berjumlah 3000 orang. mesjid darurat sudah tidak memadai lagi dan diperlukan mesjid yang lebih besar. tempat telah disediakan oleh seorang Ahmadi Mukhlis bernama Sutawalam yang mewakafkan tanahnya. Batu pertamanya diletakkan pada tanggal 15 Agustus 1954 yand dihadiri oleh Pengurus Besar bersama Mian Rafi'Ahmad H.A.BA cucu Masih Mau'ud a.s sejak itu berbondong – bondonglah anggota kerja sambil membawa alat-alat dan bahan – bahan yang diperlukan. Baru mesjid itu akan “naik bata” (setengah selesai) Kuwu Bening dibawa lagi oleh Polisi atas desakan ulama-ulama. Tuduhan mereka ialah, bahwa Kuwu Bening sebagai pemimpin Ahmadiyah telah merusak agama, keamanan dan memecah masyarakat menjadi dua golongan. Bening terpaksa harus meringkuk lagi di kantor polisi selama 5 hari. Selesai penahanannya ia memimpin lagi pekerjaan pembangunan mesjid itu. Dan pada akhir September selesailah segala sesuatunya. Mesjid itu dibuat dari tembok batu berukuran 16 x 14 m. Orang – orang Ahmadi merada tentram menjalankan ibadahnya di mesjidnya yang baru. Sekarang perhatian Kuwu Bening beralih kepada pembangunan masyarakat desanya. Ia ingin memperlihatkan bahwa masyarakat Ahmadiyah akan sanggup memperlihatkan kecakapan, kerajinan, kepatuhannya untuk kepentingan masyarakat. Pendek kata masyarakat Ahmadiyah akan sanggup memperlihatkan kecakapan kerajinan kepatuhannya untuk

kepentingan masyarakat. Pendek kata masyarakat Ahmadiyah akan sanggup mempraktekkan anjuran-anjuran Islam yang suci dan luhur dan praktis itu di masyarakat, sebagaimana juga dulu Nabi Muhammad s.a.w. pernah mempraktekkannya di masyarakat Arab yang sebelumnya terkenal sangat sederhana peradabannya. Jalan-jalan diperluas dan ditertibkan. Rumah-rumah penduduk mendapat perhatian yang lebih besar lagi. Begitu pula kemajuan pengajaran dan alam pikiran rakyat dipergiat dengan pelajaran – pelajaran dan ceramah. Beruntung sekali oleh karena Manislor memiliki H. Basyari Hassan, yang oleh pimpinan Jemaat di Jakarta ditunjuk sebagai Pembantu Muballigh untuk Manislor. Muballigh inilah yang tak jemu-jemu mendidik mental dan spiritual mereka.

Beberapa tahun kemudian tampak hasilnya. Jalan-jalan desa beres, diperluas dan di sisi kanan-kirinya ditembok. Rumah-rumah penduduk sudah meningkat. Sekarang terdapat kurang dari 20% rumah penduduk yang dibuat dari batu. Semangat akan belajar mengejar ilmu pengetahuan sudah meningkat pula. Beberapa anak – anak desa itu telah berani ke luar meneruskan pelajarannya, baik di sekolah-sekolah menengah maupun di akademi dan perguruan tinggi. Di samping itu semua kedudukan sosial naik pula. Pertanian tampak maju. Perdagangan penduduk diperluas. Yang dulunya mereka hanya berani membawa barang-barang hasil bumi / tani mereka ke Cirebon, sekarang diperluas hingga Bandung.

Segala kegiatan desa dilaksanakan dengan dasar musyawarah dan gotong royong. Dalam bidang keagamaan nampak sekali buktinya. Akhlak penduduk maninggi. Rasa sosial dipertebal. Semua hal ini mendapat sorotan dari kecamatan dan Kabupaten.

Untuk menyempurnakan usaha Jemaat, maka anggota Manislor membentuk dan menyusun pengurus Cabang yang pertama pada tanggal 20 Februari 1956 sebagai berikut :

Ketua : Bening

Wk. Ketua : Ahmad Sukrono
Sekr. Khas : Tisnaprawira
Sekr. Maal : Suarna
Sekr Tabligh : Mardi
Sekr Ta'lim wa Tarbiyah : Sutadassin
Ekr. Umur Ammah : Miharja

Jaman gerombolan DI/TII merajalela di berbagai tempat, sedangkan di Manislor utuh tak sebuah rumah pun yang hangus dan tak seorang pun yang tewas atau hilang. Semua penduduk secara bergiliran di “-pagar betis” akn. Malam-malam sebagian berjaga-jaga sebageian lagi berduyun-duyun tiap malam mengunjungi mesjid untuk bersembahyang tahajjud, minta do'a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya seluruh penduduk dilindungi dari malapetaka.

Pertablighan terus dijalankan dan sekarang bukan saja di Manislor tetapi juga di tempat-tempat lain sering diadakan. Perhatian dari masyarakat lumayan juga. Seorang demi seorang datang menyatakan baiat kepada pengurus. Sekarang di Kuningan sudah ada beberapa orang anggota. Juga di Cipicung hampir didirikan ranting Jemaat. Di Sadasari, Majalengka, hasil tablighnya Sudjinah anggota Jemaat Manislor yang pindah tempat itu sudah berdiri cabang dengan jumlah 80 keluarga. Ditempat ini pernah timbul kehebohan karena ada larangan berjum'at bagi orang Ahmadi. Akan tetapi setelah diselesaikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kuningan yang telah mengetahui seluk beluknya Ahmadiyah sembahyang Jumat diizinkan.

Pada tahun 1965 H. Basyari Hassan pernah kedatangan kepala KUA Kabupaten kuningan, seorang Kapten Angkarang Darat, seorang Pejabat Pakem dan lima orang pengiringnya. Setelah mereka mengadakan tanya jawab, sampailah mereka kepada maksud kedatangan mereka itu. Mereka mengatakan, bahwa kewajiban

masyarakat desa itu untuk memperbaiki mesjid Jami' (untuk umum) Manislor. Sebetulnya mereka telah mengusahakannya 3 bulan berjalan akan tetapi belum terwujud. Karena itu mereka mendatangi H. Basyari untuk minta bantuan. H. Basyari menyanggupi untuk turut bertanggung jawab mengenai perbaikan mesjid itu. Akan tetapi ia tidak bersedia untuk duduk dalam panitia. Diserhkannya jabatan itu kepada Kuwu Bening ketua Jemaat Cabang Manislor merangkap Lurah setempat.

Pada hari itu H. Basyari mengajak anggota – anggota Ahmadiyah untuk bergotong royong memperbaiki mesjid Jami'. Bahan-bahan minta lekas disediakan dan diserahkan kepada Kuwu. Hanya dalam beberapa hari saja bahan – bahan telah terkumpul. Esok harinya 200 orang anggota beramai-ramai kerja bakti. Dalam tempo dua hari saja perbaikan sudah selesai. Hal ini segera diberitahukan kepada KUA Kabupaten. Mendengar ini ia kagum dan sangat berterima kasih kepada Jemaat Ahmadiyah.

Pekerjaan semacam itu bukan sekali saja diminta bantuan Ahmadiyah dan selalu mendapat perhatian dan penyelesaian yang sempurna. Sejak usaha – usaha masyarakat itulah orang-orang ghair Jemaat bertambah yakin, bahwa api Islam memang sudah digali di Manislor oleh orang-orang Ahmadiyah sendiri. Itulah Cabang Jemaat Ahmadiyah Manislor, sebuah desa yang 80% dari penduduknya adalah orang-orang Ahmadiyah.

Setelah Manislor menjadi Cabang maka Cirebon pun menyusul menjadi Cabang, yang anggotan-anggotanya sebagian besar asal Manislor yang berdagang dan tinggal di daerah Cirebon. Setelah di Cirebon didirikan sebuah mesjid, maka anggota-anggota Jemaat di Cirebon mulai dapat mendirikan sembahyang Jum'at. Sebagaimana Cabang Manislor yang sudah memperlihatkan kesanggupannya dalam menyelenggarakan berbagai pertemuan besar seperti : Jalsah Salanah dan Latihan Khuddamul Ahmadiyah dan Nasiratul Ahmadiyah, begitu juga Cabang Cirebon yang jumlah

anggotanya relatif sangat sedikit. Akan tetapi berkat keikhlasan dan keuletan para pengurus beserta anggotanya telah sanggup pula menyelenggarakan Majelis Musyarawah yang cukup meriah.

8. Ahmadiyah di Cimahi

Pada tahun 1960 di Cimahi tinggal sepasang suami-isteri Haji Syarief dan Haji Saleha, masing-masing anggota Persis dan Persis Isteri. Pada suatu hari sesudah mengadakan suatu pengajian biasa, kedua suami isteri itu mendapat keterangan tentang Ahmadiyah dari seorang cucu mereka Ibrahim Hutamaya, yang dengan tidak sepengetahuan mereka telah masuk Ahmadiyah. Sejak ini kedua orang itu rajin mempersoalkan Ahmadiyah. Hal-hal ini diketahui oleh pihak Persis. Dengan berbagai jalan dan dengan mengirimkan berbagai guru kepada itu diusahakan agar mereka menjauhkan diri dari Ahmadiyah. Namun usaha itu tidak mempan. Akhirnya kedua orang itu bertekad hendak baiat ke dalam Ahmadiyah pada suatu Jumat di Bandung.

Sementara itu Haji Saleha sering melihat mimpi-mimpi aneh. Antara lain ia melihat jembatan yang sangat indah, yang belum pernah ia lihat selama hidupnya. Kemudian ia mimpi merasa menyeberang lautan dengan jembatan. Sampai ditengah, jembatan putus, ia bingung sebentar. Ketika ia sedang merenung, tiba-tiba tampak sebatang bambu dari seberang mengulurkan pucuknya kepadanya. Tak terasa lagi ia sudah bertengger di pucuknya dan dengan suatu lemparan ia sudah berada di tepi. Di seberang dilihatnya suaminya telah menunggu. Pada malam Jum'at itu Haji Saleha berkata kepada suaminya bahwa hari Jum'at esok harinya ia akan ikut Saleha adalah yang pertama baiat di Cimahi, seorang pensiunan pegawai pengadai Cimahi di samping menjadi saudagar emas. Dalam waktu yang singkat ia sudah dapat menarik beberapa orang kawan dan keluarganya.

Sementara itu gangguan dari luar mereda. Sekarang hanya terbatas pada umpatan dan ejekan saja. Antara lain dikatakan bahwa sembahyang Jum'at orang Ahmadi juga di rumah. Hati Haji Syarief dan Isteri terbakar. Mereka sering sembahyang tahajjud dan berdoa supaya diberi rezeki untuk mendirikan mesjid. Alhamdulillah niat baik mereka terkabul. Pada tanggal 2 Juni 1963 peletakan batu pertama mesjid dilakukan dan dalam 52 hari telah selesai. Pada tanggal 24 Juli 1963, mesjid itu diresmikan oleh Sahibzada Mirzastan untuk menghadiri Konggres Jemaat Ahmadiyah Indonesia XIV di Bandung. Itulah sebabnya maka namanya diabadikan menjadi nama mesjid permanen, dengan seluruh biaya ditanggung oleh Haji Syarief suami isteri, dengan bantuan tenaga dari anggota Jemaat Cimahi dan Cabang Bandung.

Pada bulan Oktober 1964 Ranting Cimahi yang diakui pada tahun 1961, menjadi Cabang Jemaat Ahmadiyah yang ke-42.

Adapun susunan pengurus pertamanya adalah sebagai berikut:

Ketua	: Haji Syarief
Wakil Ketua	: Tb. Djuwansyah
Sekretaris	: Tb Djuwansyah
Sekr. Maal	: Haji Syarief
Sekr. Umur Ammah	: Z. Abidin
Sekr. Tahrik Jadid	: Haji Abdullah
Sekr. Muhasib	: Isra
Sekr. Tabligh	: Anang

9. Ahmadiyah di Ciamis

Sebelum tahun 1963 Jemaat Ahmadiyah Ciamis masih merupakan ranting dari Tasikmalaya. Yang menjadi tokoh-tokohnya ialah : R. Ahmad Affandi dan Husen A.A. setelah anggota Jemaat berjumlah 40 orang laki-laki dan perempuan, maka pada tahun 1963 ranting Ciamis disahkan menjadi Jemaat Ahmadiyah

Cabang Ciamis yang diketuai oleh R. Gumiwa Partakusumah, salah seorang tokoh Jemaat yang tertua, dan mempunyai mesjid, maka sembahyang Jum'at untuk sementara menggunakan mesjid Balaikambang keluarga Sutanandika termasuk R.A Affandi di Karangsuta Lembursita, Ciamis.

Ciamis pun tak ketinggalan mendapat perlawanan yang tidak sportif dari pihak yang tidak menyukai Ahmadiyah. Ketuanya sendiri tiga kali mengalami panggilan yang berkuasa atas dasar tuduhan, bahwa Ahmadiyah Ciamis menyeleweng dari Agama Islam. Satu kali ia pernah dimasukkan ke dalam tempat tawanan Komunis selama 3 hari karena dianggap berceramah yang tidak dibolehkan. Padahal teks ceramah itu kutipan 100% dari salah satu majalah resmi yang dibaca umum. Dua orang pada satu desa di luar kota dengan keyakinan yang sungguh masuk Ahmadiyah. Oleh Kepala Desa dan Pegawai Jawatan Agama mereka diancam akan diusir dan diboikot, sehingga perusahaan mereka tidak jalan. Akhirnya mereka meninggalkan desa itu karena tidak tahan menghadapi pemboikotan.

Cabang berusaha hendak mendirikan mesjid tetapi diperoleh keterangan bahwa izin untuk itu tidak akan dipelopori karena terlalu berdekatan dengan 3 tajug (mushalla) yang sudah ada. Setelah ditanyakan kemungkinan mendirikan Balai Pertemuan akan mendapat persetujuan, maka sekarang di tempat tersebut telah didirikan sebuah bangunan permanen untuk segala urusan keperluan Ahmadiyah. Letaknya di tengah kota, strategis, dipinggir jalan besar. tanahnya cukup luas, wakaf dari seorang janda bernama Isoh Husen (A.A) dan pembiayaan bangunannya didapat dari pengorbanan beberapa anggota.

Dengan bertambahnya perkembangan ranting-ranting disekitar Ciamis itu. Maka kini ranting-ranting tersebut telah disahkan menjadi cabang, yaitu: Banjar, Banjarsari dan Parigi. Demikian perkembangan Cabang Ciamis dan sekitarnya.

Di Jawa Barat masih banyak Cabang Jemaat yang pembentukan dan perkembangannya belum diketengahkan, antara lain: Cislada(Bogor), Wanasigra (Garut), Rangkasbitung (Banten), Cilegon (Banten), Talaga Cibitungkulon, dan lain-lain. Di DKI Jaya Kebayoran dan Lenteng Agung sebagai Cabang-cabang yang telah lama berdiri dan berkembang terus.

Di seluruh Jawa barat terdapat 29 Cabang Jemaat dan di DKI Jaya sebanyak 5 cabang.

10.Jemaat Panjalu, Jawa Barat

Pembawa kabar suka kedatanganMasih Mau'ud a.s. yang pertama kali ke Panjalu adalah Ghazali Hassan dan R. Gumiwa. Orang yang pertama kali baiat ialah H. Abdullah pada tahun 1943. H. Abdullah adalah tokoh Muhamadiyah Cipetir, Cisaat, Sukabumi. Dari kaum ibu tercatat Ny. H. Mu'minah Abdullah , Ny. H. Halimah (kakak H. Abdullah), dan beberapa putra H. Abdullah yaitu Shofiyah, Diding Syarifudin, dan H. Maskanan.

Pada tahun 1949 terbentuklah Lanjah Imaillah ranting Panjalu yang bernaung di bawah Lajnah Imaillah cabang Sukabumi. Ny. Saodah Syarifah Sumadi dari LI cabang Sukabumi merupakan perintis dan pembimbing dari LI ranting Panjalu sejak berdiri. Sebagai pengurus\ ranting yang pertama ialah Ny. H. Halimah sebagai ketua dan Ny. H. Maskanan sebagai sekretaris.

Kegiatan baru dalam tahap memungut uang iuran dan beras perelak, yang dipungut setiap minggu dari anggota. Dalam bidang Tarbiyat, pengajian diadakan seminggu sekali dipimpin oleh H. Abdullah.

Untuk kegiatan tarbiyah, H. Mahmud mewakafkan tanahnya untuk didirikan masjid sebagai pusat kegiatan. Dari sejak berdiri hingga tahun 1953 belum ada penambahan anggota baru, pada tahun 1975 anggota Lajnah Imaillah bertambah menjadi 13 orang, pada tahun berikutnya bertambah seorang anggota. Baru tahun

1979, Panjalu diresmikan menjadi cabang ke 72 dengan ketua pertama S.Supandi. Pada tahun 1980-1981 ada 5 orang yang baiat; jumlah anggota pada akhir tahun 1982 sebanyak 29 orang. Pada awal tahun 1980, Lajnah Imaillah ranting Panjalu diresmikan menjadi cabang, dengan ketuanya Ny.Chodidjah.

11.Jemaat Ahmadiyah Wanasigra, Tasikmalaya

Pada kira-kira tahun 1328 HS/1949 M seseorang dari Wanasigra yaitu Rosyid, mengungsi ke Kota Garut dan bertemu dengan seorang Ahmadi bernama Ujer. Setelah mengadakan pembicaraan, tentang keahmadiyah akhirnya menyatakan baiat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Kemudian Rosyid tersebut mengajak Ejen untuk mengikuti pelajaran-pelajaran tentang Ahmadiyah. Setelah itu Rosyid dan Ejen mengajak Sadkar untuk menyampaikan tabligh ke Wanasigra.

Atas karunia Ilahi, pada tahun 1328 HS/1950 M ada 50 orang kaum ibu yang baiat. Adapun ibu-ibu yang mula-mula baiat pada waktu itu adalah Ibu Epoh, Ibu Emi, Ibu Haji Enda dan Ibu Atik Suryati. Selama kira-kira 4 bulan Wannasigra bergabung dengan cabang Tasikmalaya , karena mengingatWangsigra itu termasuk kabupaten Tasikmalaya yang mana dijadikan Ranting dari cabang Tasikmalaya. Setelah kurang lebih 2 tahun, jadi ranting cabang Tasikmalaya berhubung anggotanya bertambah banyak, maka pada tahun 1331 HS/ 1952M, ranting Wanasigra dijadikan cabang.

Sejak dari tahun 1952-1957 cabang Wanasigra pernah mengalami serangan gerombolan yang cukup mengerikan, sehingga mengakibatkan rumah-rumah dan barang-barang habis dibakar. Namun alhamdulillah atas perlindungan Allah, tidak terjadi korban jiwa. Dengan terjadinya serangan-serangan mengakibatkan penduduk bertebaran mencari tempat yang aman. Pada waktu itu segala kegiatan baik organisasi maupun administrasi belum dapat

berjalan secara teratur, namun keadaan anggota terus bertambah, pertablighan tetap berjalan.

Keadaan dari tahun 1958-1972 Abdul Wahid mendidik jemaat Wanasigra secara rutin diadakan tiap-tiap dua minggu sekali, adapun tempatnya hanya di mesjid Wanasigra saja. Sedangkan keadaan pengurus sudah tersusun, tapi belum lengkap, susunan pengurus tersebut terlampir. Pada tahun 1960 mulailah kembali ke Wanasigra mulai melangkah kaki untuk sedikit-sedikit menjalankan kegiatan-kegiatan secara teratur, baik mengenai kepengurusan dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya.

12. Jemaat Ahmadiyah Paninggilan, Jakarta

Sebelum tahun 1942, Hajl Gedad sudah ditablighl mengenal Ahmadiyah (kedatangan Imam Mahdi) oleh Bapak Gomar dari Kampung Kelapa.

Meskipun pada awalnya ditentang oleh beliau namun pada akhirnya beliau menerima dan membenarkan hal tersebut setelah dipertemukan dengan Maulvi Rahmat Ali H.A.O.T. Keyakinan ini diperkuat dengan fatwa yang pernah didengar oleh beliau dari beberapa kiyai bahwa yang dinamakan IMAM MAHDI itu adalah orang yang mengenakan pakaian dan ikat kepala dari sorban yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Dan setelah mempelajari dengan cermat, kemudian beliau dengan mantap baiat ditangan Maulvi Rahmat Ali H.A.O.T. pada tahun 1942. Kemudian utusan menunjuk M. SATIRI yang tamatan ALIRSAD (salah satu perguruan Islam yang cukup terkenal) sebagai pembantu utusan Jemaat untuk daerah Tangerang dan sekitarnya. Ditangan M. Satiri ini sering diadakan pengajian kerumahrumah

Pada suatu malam Jum'at diadakan pengajian di rumah H. Gedad yang dipimpin oleh M. Satiri dan dihadiri oleh: M. Ayub, Abdullah, M. Sahid, Asikin, Amat dan Jaya

Kirakira jam 9 malam seorang upas dari kecamatan (suruhan kecamatan) yang bernama upas Tegin mengatakan pengajian harus dihentikan dan mengajak untuk bersamalama berangkat ke kantor Camat dan mengatakan Ini adalah perintah camat langsung. Di kecamatan kami disuruh tidur dimesjid. Saat sholat subuh kami melakukannya lebih dahulu daripada umum dan saat itu H. Gedad sedang pergi ke Kampung Pinang, Tangerang. Kirakira pukul 8 pagi kami disuruh oleh Camat untuk menunggu di perempatan jalan. Tak disangka datanglah H. Gedad yang baru pulang dari Kampung Pinang dan melihat Satiri dan kawankawan sedang berada di perempatan jalan lalu menanyakan "Mengapa ada disini?". Kami menceritakan apa yang terjadi. Kemudian H. Gedad mengatakan bahwa soal agama jangan takut, ikuti sekalipun dimuka ada bom, jangan mundur. Pada saat itu adalah hari pasar dan Ini disengaja oleh kecamatan agar masyarakat dari kampung yang ingin berbelanja melihat kami sebagai orang Ahmadiyah ditangkap dan agar mereka tidak mengikuti kita.

Lalu kami diajak oleh H. Gedad untuk naik mobil menuju Kebayoran ke kantor polisi. Disana kami menunggu, karena Inspektur Polisi yang orang Belanda belum datang. Setelah beliau datang, M. Satiri dan H. Gedad menghadap dan menceritakan apa yang telah terjadi. Selanjutnya Inspektur tersebut mengatakan bahwa Pemerintah tidak mencampur urusan agama dan kemudian menyuruh kami pulang.

Jumlah mubayin pertama di Jemaat Peninggilan sebanyak 20 orang, antara lain : H. Gedad, M. Ayub, Abdullah M. Syahid, Ny. Fatimah, Ny. Sena, Ny. Atih, Ny. Suliyah, Ny. Suani Sahid, Ny. Teha, Ny. Hadijah, Cantel, Teun dan Koting

Ibuibu yang tersebut namanya diatas adalah perintis LI Peninggilan ditahun 1950.. M. Satiri berusaha mendatangkan Rahmat Ali H.A.D.T. ke Peninggilan dan saat kedatangan, beliau ditemani oleh Abdurahman, Yusuf Ahmadi dll untuk peletakan batu

pertama pembangunan mesjid yang luas tanahnya sekitar 2000 m², sumbangan darl H. Gedad. Pada saat itu utusan mengatakan sambil menunjuk ke lokasi rencana pembangunan mesjid yang saat itu masih merupakan jalan setapak bahwa jalan ini nanti akan bagus dan akan berdlrl gedunggedung dan kini kita bisa lihat sendiri kebenaran katakata dari utusan tersebut dan kemudian diberi nama MESJID ARRAHMAT.

Pada suatu saat, Abdullah dikirim ke Mesjid Petojo untuk melapor kepada Maulvi Rahmat Ali H.A.O.T. Disana beliau diberi pertanyaan “Apa khabar Tuan Abdullah?”. Beliau menjawab bahwa kami ditangkap, dicacimaki dan lainlain lalu ditanggapi oleh utusan dengan mengatakan “*Itu bagus. Apablla Idta mengatakan baikbaik raja berartl kita tidak bekerja (tidak tabligh).*”

Keyakinan kami semakin kuat akan kebenaran Ahmadiyah, bahwa Imam Mahdi yang telah dijanjikan telah datang. Jemaat Peninggilan masih merupakan ranting dari Jemaat Kebayoran pada saat itu dan kegiatan LI masih belum begitu berjalan. Pada tahun 1341 HS / 1962 M Jemaat Ahmadlyah Peninggilan berubah menjadi Cabang Peninggilan. Sedangkan Lajnah Imaillah Peninggilan didirikan pada tanggal 2 Nubuwah (November)1341 HS / 1962 M dengan ketua LI pertama Ny. Atih M. Ayub

13.Jemaat Ahmadiyah Panunggan

Jemaat ahmadiyah di Panunggan berdiri padatahun 1950 melalui Gomar. Gomar, lahir di Tangerang tahun 1881, wafat juga di Tanggerang tahun 1966, dalam usia 85 tahun. Ayah beliau bernama Linjang, orang yang cukup berpengaruh di panunggan (seorang penghulu / amil) dan ibu bernama Ny. Ribut. Gomar beristrikan 9 orang, dan beliau mempunyai 2 orang anak, satu perempuan dan satu laki-laki, itu dari istri pertama beliau , Ny.Sami. Dan dari ke-8 istri yang lainnya tidak mempunyai anak. Pekerjaan Gomar yaitu : berjudi, mencuri, merampok dan membunuh serta kadang-kadang

berdagang bumbu dapur di Gg. Hober Jakarta, karena beliau mempunyai lapak atau tempat berdagang di sana.

Pada saat Gomar menjadi bandar judi dadu pincer di tempat orang pesta perkawinan, beliau bermain duduk di tanah beralaskan tikardan di atas bale / tapang ada seorang kyai bernama Kyai H. Dero, bercerita bahwa nanti akan datang Imam Mahdi, dan barang siapa yang tidak percaya orang tersebut menjadi kafir. Gomar yang sedang berjudi itu mndengar pembicaraan Kyai itu namun beliau tidak memberi tanggapan dan terus bermain judi. Kemudian ketika mencari uang dari bermain judi agak sulit, Gomar berdagang bumbu dapur di Gg Hober Jakarta, seperti disebutkan di atas. Pada saat Gomar berdagang bertemu dengan Tuan Awab, seorang warga negara Arab. Tuan Awab, sering cerita tentang agam, kemudian Gomar berguru pada Tuan Awab tersebut. Pada suatu saat Tuan Awab berkata kepada Gomar, “Pak Gomar, manusia ini akalnya, jadi bila ada orang yang berkata sesuatu kita jangan langsung saja percaya sebelum kita memeriksanya. “namun pada saat yang berlainan Tuan Awab berkata pada Gomar, sudah datang Dajjal, ada lagi yang mengatakan Nabi sesudah Nabi Muhammad saw, yang mengatakan Tuan Rahmat Ali dari Hidustan.” Kemudian Gomar bertanya kepada Tuan awab,: ”Belum” atas jawaban Tuan tersebut, ia tidak simpati lagi terhadap guru itu, karena perkataannya tidak bisa dipegang. Kemudian Gomar pulang ke Panunggan meninggalkan Tuan Awab. Sampai beberapa lama Tauan Gomar tidak berdagang lagi dan tidak bertemu tuan Awab. Selama tidak bertemu itu, Tuan Awab sering kirim salam maupun surat kepada orang yang kenal maupun dekat dengan Gomar, tetapi Gomar tidak pernah menanggapi karena sudah tidak setuju lagi dengan Tuan Awab, karena perkataannya yang demikian itu. Kemudian pada suatu malam Gomar tidur dan bermimpi. Dalam mimpi beliau, saat beliau duduk di kursi depan rumah, orang lewat berjubah dan bersorban putih, kemudian ada orang lain yang mengatakan kalau yang lewat

itu nabi, kemudian beliau terbangun , pada pagi harinya tentang mimpi itu diberitahukan kepada orang.

Pada paginya tentang mimpinya itu diberitahukan kepada bapaknya Linjang. Jawab orang tuanya , Bagus, tidak seribu satu orang yang mimpi ketemu dengan nabi.” Dan pada malam berikutnya beliau mimpi lagi hal yang serupa , pada saat beliau duduk di atas kursi di depan rumah ada orang lewat memakai jubah dan bersorban putih dan ada orang yang memberi tahu lagi, kalau yang lewat itu Nabi Muhammad saw, pada pagi harinya mimpi itu diberitahukan lagi kepada orang tuanya , Linjang , dijawab oleh Linjang bahwa tidak seribu satu orang bermimpi ketemu nabi, apalagi Nabi Muhammad saw itu paling bagus. Kemudian dalam hati Gomar berkata jangan-jangan apa yang dikatakan Tuan Rahmat Ali benar dan timbul niat Gomar untuk mencari Tuan rahmat Ali , yang saat itu Gomar tidak tahu keberadaanya, cuma mendengar kalau Tuan Rahmat Ali ada di Jakarta mencari Tuan rahmat Ali, namun tidak dapat. Akhirnya Gomar pergi ke Jakarta dengan berjalan kaki, dengan menelusuri jalan rel kereta api dari Tangerang ke Jakarta. Saat Gomar berjalan dengan mengikuti rel kereta api, sesampainya di daerah Pesing Jakarta barat, beliau beristirahat di bawah pohon Ambon yang rindang kemudian dilihat oleh Gomar, ada buah sawo yang bekas dimakan orang karena mentah oleh orang dibuang, mungkin sudah beberapa hari, Dan pada saat ditemukan oleh Gomar sudah matang maka dimakanlah buah sawo karena beliau lapar. Setelah lelah beliau hilang beliau mengeruskan perjalanannya, sesampainya di Sawah Besar, kereta api lewat hingga pintu lintasan kereta api ditutup oleh penjaganya, sambil menunggu kereta api lewat Gomar berhenti dan tangan beliau diletakkan di atas palangan lintasan penutup jalan kereta api, tiba-tiba dari belakang ada orang baik sepeda sambil memberi belnya”kerining-kerining” dan berhenti di sebelah kanan beliau, ditoleh oleh beliau ternyata Tuan Awab. Gomar kaget dan Tuan Awab pun kaget atas pertemuan yang tidak disangka itu dan

Tang Awab berkata” Tuan Gomar kemana saja, apa tidak sampai salam dan surat-surat saya?” namun Gomar tidak menjawab. Ketika kereta api selesai lewat dan pintu lintasan dibuka, Gomar berjalan dan diikuti oleh Tuan Awab yang sepedanya tidak dinaiki melainkan dituntun, sambil ngobrol dengan Goar dan setiap ada pertigaan atau belokan jalan Tuan bertanya kepada Gomar, kalau-kalau Gomar berbelok dengan pertanyaan “Gomar mau kemana?” dijawab oleh Pak Gomar ,”Tidak Tuan, saya mau kesitu”, sudah dua kali Tuan Awab bertanya demikian dan dijawab oleh Gomar sama juga. Kemudian pada tikungan / persimpangan ketiga, Tuan Awab berkata kepada Gomar, “ Tuan Gomar ini pertanyaan saya yang terakhir, sebenarnya Tuan Gomar ini mau kemana ?” dijawab, “sebenarnya saya mau menacari Tuan Rahmat Ali, orang Hindustan itu ada dimana?” Tuan Awab , “Oh mau cari Tuan Rahmat Ali, mari ikut saya,” Kemudian Gomar diajak menghadap Tuan Rahmat Ali oleh Tuan Awab yang mana tidak tahunya, Tuan Awab telah lebih dahulu masuk Ahmadiyah melalui Tuan Rahmat Ali. Saat itu Taun Rahmat Ali tinggal di Gg. Kekekam NO. 10 Pasar Baru Jakarta Pusat rumah sewaaaanya.

Pada saat Gomar bertemu dengan Rahmat Ali di rumah Rahmat Ali sedang ada pengajian, ketika itu Rahmat Ali sedang memberi ceramah di hadapan tujuh orang murid-muridnya, kemudian Gomar ikut bergabung di dalamnya. Saat Tuan Rahmat Ali berbicara, mata Gomar tertuju pada photo yang ada di dinding rumah Tuan Rahmat Ali dalam hati Gomar,” Dalam mimpinya yang beliau ketemu orang dalam photo itu, tetapi yang bicara orang lain,” (Photo itu Photo Imam Mahdi as). Pada saat Gomar memperhatikan photo Imam Mahdi as ada dalam pengajian itu namanya Sajim, memberi tahu,” itu Nabi dik, kalau kita tidak percaya, kafir kita dik”, (maksud orang itu memanggil adik kepada Gomar). Setelah pengajian selesai, Gomar diperkenalkan kepada Tuan Rahmat Ali oleh Tuan Awab, langsung Gomar bai’at masuk dalam Jemaat Ahmadiyah. Kemudian Tuan

Rahmat Ali berpesan kepada Tuan Awab agar orang ini (maksudnya Gomar) dijaga benar-benar. Setelah semalaman bermalam di Jakarta di rumah Sajim, pagi harinya Gomar pulang ke Panunggangan / Tangerang. Sesampainya di rumah disampaikan kepada orang tunay, Linjang, kalau Imam Mahdi as itu telah datang mendengar kabar itu Linjang orang tua Gomar terus-menerus menangis, kemudian pada esok harinya langsung ke Jakarta bersama Gomar, menemui Rahmat Rahmat Ali dan Linjang juga berbai'at masuk Ahmadiyah.

Setelah Gomar masuk Ahmadiyah, beliau rajin mengikuti pengajian di rumah Tuan Rahmat Ali, karena saat itu Jemaat Jakarta belum memiliki masjid. Setelah memiliki sedikit ilmu mengenai Keahmadiyah, beliau mulai giat bertabligh di daerah Tangerang dan sekitarnya. Setiap alim ulama dan kyai tersebut, sehingga banyak yang mengatakan: kafir, kresten, Dajjal kepada beliau. Namun beliau tetap terus bertabligh. Setiap hari jumat sekalian mengaji kepada tuan Rahmat Ali. Kemudian Tuan Rahmat Ali mempunyai progm, yaitu: setiap anggota dikirim ke daerahnya masing-masing untuk bertabligh, dan setiap hari Jumat datang kepada Tuan Rahmat Ali, untuk memberikan laporan hasil pertablighannya. Saat itu Gomar dikirim ke Tangerang dan Abdul Rozak dikirim ke daerahnya Sukabumi, dan sebagainya. Pada laporan setiap jum'at Abdul Rozak, ditanya oleh Rahmat Ali, "Bagaimana Tuan Abdul Rozak, "bagus Tuan, Jemaat di Sukabumi?" dijawab oleh Tuan Abdul Rozak, "Bagus Tuan orang terima semua." Dalam hati Rahmat Ali, Kamu tidak bekerja." Kemudian ditanya Gomar, "khabar Jemaat Tangerang? Dijawab oleh Gomar, "Waduh Tuan, orang mau bunuh saya semua. "dalam hati Rahmat Ali, "Kamu ini bekerja."

Selanjutnya Gomar terus saja bertabligh di daerah Tangerang dan di mana saja beliau berada, sehingga boikotan terhadap diri dan keluarga beliau bukan main hebatnya. Sehingga bila beliau lewat, orang tutup pintu, bahkan kalau duduk di rumah orang,

bekas beliau dicuci oleh yang punya rumah, karena dianggapnya suatu najis. Bahkan terhadap anak-anak beliau, tidak boleh orang memegangnya, karena dianggap haram, katanya anak orang Kristen. Suatu hari Gomar pulang dari Bertabligh, namun tidak ada orang yang dapat untuk ditablighi karena orang-orang pada menghindar menjauhi beliau. Beliau lewat sawah-sawah, karena kalau lewat kampung orang pada mencibiri beliau. Pada saat beliau berjalan, ada orang yang memanggilnya, "Mar-Mar, Gomar, kemari Mar", dilihatnya yang memanggilnya itu Kebon namanya, karena orang itu selalu berada di kebun, dan mempunyai juga gubuk di tengah kebun. Kemudian Gomar mendekati yang memanggil itu. Kemudian oleh Kebon, Gomar diajak mampir ke gubuknya. Setelah dipersilahkan duduk, Gomar duduk dan disuguhi minum teh dan kue-kue kering, yang disimpan oleh Kebon di dalam buah labu siam yang sudah kering. Kemudian Kebon berkata, "Sebenarnya gua mau tanya sama *Elu Mar*, sebenarnya Elu punya ilmu apa? Dulu semua orang takut sama *Elu*, sekarang orang, Bencil semua sama eluh bahkan bisa, mau membunuh elu." Kemudian oleh Gomar dijelaskan tentang kepercayaan dan keyakinan yang dianutnya yaitu tentang Imam Mahdi sd., dan akhir zamat. Kemudian Kebon berkata, "Kalau begitu, elu yang benar Mar, orang yang lain salah semua. Kemudian katanya lagi," *Elu* jangan takut Mar, anak gua nih 8 orang, semuanya laki-laki, kalau gua masuk Ahmadiyah, pasti semuanya masuk Ahmadiyah. Kemudian Kebon bai'at masuk Ahmadiyah. Setelah Kebon masuk Ahmadiyah, disampaikan kepada ke-8 anaknya tersebut, tetapi setelah anak-anaknya mendengar masuk Ahmadiyah, maka ke-8 orang anaknya itu semuanya mengusir Pak Kebon. Sehingga Kebon pulang ke rumah Gomar, sampai meninggal dunia.

14. Pertablighan ke Daerah Sekitar Tangerang

Karena di tempat sekitar Gomar sudah sulit untuk bertabligh, maka beliau bertabligh luar tempat tinggalnya. Sasarannya yaitu teman-teman beliau semasa menjadi jawara/jagoan. Beliau pergi ke Parigi menemui kawannya Sali, kemudian Sali di bai'at masuk Ahmadiyah dan menjadi tokoh Jemaat di Parigi. Untuk mempererat persaudaraan, anak Gomar yang laki-laki Djalaludin dinikahkan dengan anak Perempuan Sali, Dasiah. Kemudian Gomar pergi ke Paninggil menemui kawannya menjadi tokoh Jemaat di Paninggilan. Kemudian Gomar pergi lagi ke daerah Gondrong menemui kawannya H. Sidik., kemudian H. Sidik juga baiat masuk Ahmadiyah dan menjadi tokoh Jemaat di gondrong.

Kemudian nama Gomar semakin terkenal di daerah Tangerang baik dari kalangan para ulama serta kyai maupun dari Jemaat sendiri. Dari kalangan Jemaat, ada Djian Sulaeman dari Warungmangga Tangerang, mendengar di Panunggan ada orang Jemaat yaitu Gomar. Kemudian Djian Sulaeman mencari Gomar dan bertemu, atas pertemuan itu keduanya menjadi senang, karena masing-masing merasa mempunyai teman untuk bertabligh di daerah Tangerang.

Pada tahun 1937 Gomar mengadakan pengajian di rumah beliau sendiri dan mengundang orang banyak. Diantaranya para ulama dan kyai terkenal di daerah Tangerang, serta dari Jemaat hadir juga Tuan Awab, Sajim (Mu'allim Abdul Razak sebagai penceramah). Ketika pengajian sedang berlangsung dan dihadiri kira-kira 300 orang. tiba-tiba ada penggerebegan dari aparat kepolisian Tangerang, dan Gomar dipersalahkan karena mengumpulkan orang banyak tanpa minta izin dari yang berwajib. Kemudian pada esok harinya Gomar dikenakan denda sebesar Rp 42,- (empat puluh dua rupiah) dan dibayar oleh Tuan Rahmat Ali sebesar Rp 25,- (dua lima rupiah), Gomar pasang badan, artinya Gomar menyerah untuk ditahan, walaupun Jemaat atau Tuan Rahmat Ali mau membayar

kekurangannya itu Gomar tidak mau. Karena beliau anggap untuk menebus dosa – disa terdahulu, karena sewaktu beliau dahulu mencuri, merampok dan membunuh belum pernah ditahan namun setelah beliau di jalan yang benar beliau dihukum. Akhirnya beliau di penjara selama 1 (satu) bulan di penjara Tangerang.

Pada tahun 1949 Tuan Rahmat Ali, selesai tugasnya di Indonesia kemudian kembali ke Rabwah. Dan semua warga Jemaat Indonesia mengantar beliau ke lapangan terbang kemayoran, termasuk juga Gomar di dalamnya. Dengan perasaan sedih Gomar bertanya kepada Tuan Rahmat Ali, “bagaimana Tuan, Tuan mau kembali dan tidak kembali lagi, sedangkan masjid kita (maksudnya masjid Jakarta) sudah mau rubuh dan siapa yang akan meneruskan?” kemudian Tuan Rahmat Ali menjawab “ Kamu Gomar tidak usah takut, saya sudah tanam semua bibit-bibit untuk Jemaat Indonesia, dan masjid kita ini nanti akan ditingkat.

15. Jemaat Ahmadiyah Kebayoran, Jakarta

Jemaat Ahmadiyah cabang Kebayoran didirikan pada tahun 1953. Sebagai tempat peribadatan dan pertemuan, dipusatkan di rumah Abdurrahman Ahmadi, di jalan Senopati Blok R. Kebayoran Baru. Pada bulan Juli 1953 barulah dibentuk Lajnah Imaillah Cabang Kebayoran yang diketuai oleh Ny. Dahnan Mansur. Meskipun ketika itu anggota baru beberapa orang saja namun hasil gotong royong pada tahun 1955 telah dapat dibangun sebuah mushola yang terletak disebelah rumah Abdurrahman tersebut dengan biaya Rp 10.000,- pada bulan Oktober 1955 karena keberangkatan Ny. Dhanan Mansur ke Netherland dan kepindahan Ny. Arwandi yang menjabat sekretaris Khas cabang Jakarta, maka jabatan ketua dipegang oleh Ny. Markas Kuswara dan sekeratis Khas oleh Ny. Abdurrahman Ahmadi sampai 1958.



Foto jemaat Ahmadiyah Kebayoran 1970
Sumber : koleksi pribadi

Jumlah anggota pada waktu itu baru 9 orang, dan kegiatan yang dilakukan baru dalam pengajian yaitu ibu-ibu pada setiap Minggu malam bertempat di rumah Ny. Markas yang dipimpin oleh Drs. Bahrin Rangkuti. Pengajian ini sering dilakukan di rumah – rumah simpatisan Ahmadiyah. Pelajaran membaca Al Quran untuk anak-anak diadakan setiap hari di rumah Ny. Abdurrahman Ahmadi yang dipimpin oleh Ny. Sahab (alm) yang dengan ketekunan dan pengorbanan yang banyak telah berhasil mendidik anak-anak Ahmadi dan juga anak-anak *ghair* Ahmadi lancar membaca Al-Quran

Dalam kurun waktu ini terdapat dua kali penggantian pengurus. Pada tahun 1962, Abdurrahman Ahmadi pindah ke Kabayoran lama tempat peribadatan pun ikut pindah ke rumah di samping beliau karena di Kebayoran Baru tidak ada anggota yang sanggup menampung, dengan demikian daerah – daerah cabang kabayoran bertambah luas yaitu, meliputi daerah Kebayoran

Baru dan Kebayoran Lama. Anggota Lajnah Imaillah sendiri makin bertambah, sehingga tempat peribadatan sudah tidak bisa menampung Jemaat.

Keadaan ini membuahakan pemikiran untuk mendirikan sebuah mesjid yang permanen dan luas, dan kaum ibupun turut membantu dalam usaha ini. Kegiatan pengajian masih tetap dijalankan dibawah pimpinan. Maulvi Ahmadi Nurruddin. Lajnah Imaillah mendapat bantuan dari R. Ahmad Anwar, disamping pengajia yang dipimpin oleh Yahya Pontoh setiap Kamis malam. Kegiatan lainnya adalah mengadakan kunjungan kepada anggota yang sakit dan mempergiat usaha pemungutan iuran anggota yang sakit dan mempergiat usaha pemungutan iuran. Ada selan waktu 1 tahun Ny. Nurani Sumiati Anwar menjadi Ketua (1967–1968) dan sejak itu muawwanah mulai diadakan di Lajnah Imaillah cabang Kebayoran.

Dalam tahun 1971, Jemaat memiliki satu mesjid permanen yang cukup luas (9x 11 m), serta halamannya yang cukup pula. Dengan demikian kegiatan – kegiatan kaum ibu Ahmadi khususnya lebih dapat diperlancar, seperti mengadakan muawwanah 1 bulan sekali, mengikuti pengajian dengan kaum bapak membantu menyelenggarakan pendidikana athfal / banath yang sampai tahun 1974 dipimpin oleh Marzuki Barus.

Pendidikan athfal / banath ini meliputi pelajaran ilmu kesehatan senam sederhana, membaca dan menulis huruf Arab, menghafal ayat-ayat Quran dan mengaji. Setiap tiga bulan sekali diadakan ujian oleh MKAI cabang kabayoran.

16. Ahmadiyah di Yogyakarta

Pada akhir tahun 1945 M. Sayyid Shak Mohammad bersama keluarga meninggalkan Purwokerto dan menetap di Kota Yogyakarta, bersama –sama keluarga Sukarsono Malangjoedo, adik dari Suroso Malangjoedo. Kemudian menyusul R. Hidayath dari Bogor pindah pula ke Yogyakarta karena tugas di Jawatan

Kehutanan. Di Yogya telah ada pula seorang Ahmadi bernama Sukanda. Ahmadi yang mengungsi dari Sukapura, dari Purwokerto tiba pula keluarga R. Ahmad Sarida. Setiap hari Jum'at mereka mengadakan sholat Jum'at bertempat di rumah suharsono.

Karena pertablighan M. Sayyid Shah Mohammad dan R. Ahmad Sarida, seorang bernama Ahmad Dainuri masuk Jemaat. Maka pada tahun itu juga dibentuklah Cabang Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta.



Foto jemaat Ahmadiyah Yogyakarta 1969
Sumber : koleksi Pribadi

Menurut keterangan Soekarsono Malangjoedo, setelah kurang lebih beberapa bulan tinggal bersama di Jl. Melati 18 A. Ml Sayyid Syah Muhammad, mendapat rumah dinas dari Pemerintah atas jasanya membantu pemerintah khususnya dalam menyiarkan berita perjuangan RI ke benua India, beralamat di Jalan Menur yang pada saat itu kompleks para pejuang tinggal. Kemudian pada pertengahan tahun 1948. M. Sayyid Syah Muhammad dan keluarga

diberi izin menempati sebuah rumah milik pemerintah RI di Jl Bogowonto 15. Rumah tersebut merupakan peninggalan Belanda yang pada jaman Jepang telah ditinggalkan oleh pemiliknya.

Di Yogyakarta ketika itu masih belum ada mesjid Jemaat. Oleh M. Sayyid Syah Muhammad diusulkan untuk membeli rumah yang ia tempati terletak di Jl. Bogowonto (kini Atmosukarto) 15 Yogyakarta, walaupun rumah tersebut milik pemerintah RI²⁷) akan tetapi pemilik dapat membeli rumah tersebut dengan harga lebih murah dari semestinya. Oleh karena Jemaat pada waktu itu masih belum memiliki hak badan hukum (*rochtperson*), dan M. Sayyid Syah Mohammad masih berstatus WNA maka pembelian dilakukan atas nama M. Abdul Wahid H.A yang pada awal tahun 1950 bertugas di Yogyakarta, dan R. Ahmad Sarida dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah). Taslimah A, menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan sumbangan dari Bagindo Zakaria, seorang Ahmadi asal Padang yang bekerja di Semarang. Kemudian baru sekitar tahun 1980-an sertifikat rumah dan tanah mesjid diatasnamakan Jemaat Ahmadiyah sebagai Sertifikat Hak Milik oleh seorang Ahmadi karyawan BPN Yogyakarta., Nasir Ahmad.

Oleh muballigh di Yogyakarta pertablighan antaralain diarahkan ke daerah Kauman untuk menemui dan berdialog dengan anggota-anggota pengurus Muhammadiyah. Begitu juga diusahakan tabligh menghadapi ahli-ahli kebatinan. Pada masa-masa di Yogyakarta tidak ada mubaligh, pertablighan terus berjalan. Hasil pertablighan yang diadakan di langgara Klitresn Lor ialah banyak perhatian dari penduduk sekitarnya dan ada beberapa orang yang bai'at.

Para tahun 1959 di masa Mian Abdul Hayee menjadi Utusan di Yogyakarta didirikanlah sebuah mesjid yang cukup baik, terletak

27 Keterangan tersebut berasal dari Bapak Soekarsono diperkuat oleh Bapak Nasir bahwa rumah tersebut memang sudah ditempati oleh Bapak Sayyid Syah Muhammad kemudian haru tahun 1952 Bapak Wahid sekeluarga ke Yogyakarta. Laporan tersebut berbeda dengan keterangan dair Taslimah Abdul Wahid (tahun 1995 halaman 54 penyusun cenderung kepada pendapat dari saksi sejarah)

di halaman belakang rumah Jl. Atmosukarto 15. Biayanya bukan saja didapat dari sumbangan para anggota cabang Yogyakarta saja akan tetapi juga dari lain-lain cabang terutama sekalian dari Baginda Zakaria. Upacara peletakan batu pertama mesjid tersebut dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 1959. Pembangunan mesjid tersebut diketua sekaligus juga sebagai arsiteknya yaitu Soekarsono Malangjoedo.

Di Yogyakarta sudah menetap beberapa saudara anggota PB Jemaat Ahmadiyah seperti R. Hidayath dan Ahmad Sarida serta Bapak-bapak Ahmadi dari Jawa Barat, antara lain Harmaen, Sukanda (Sukapura) dan lain – lain.

Setelah mengadakan perundingan Bapak – bapak tersebut mengambil prakarsa untuk mengadakan konferensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di daerah RI bertempat di Yogyakarta. Undangan dikirimkan ke Cabang – cabang di daerah RI di antaranya : Tasikmalaya, Singaparna, Garut, Sukabumi, Purwokerto dan Kebumen dan kepada anggota- anggota tersiar di Salatiga, Magelang, Solo dan Banjarnegara.

Ringkasannya, terselenggaralah konferensi tersebut pada permulaan tahun 1947. Selain id hadiri oleh para wakil dari Cabang – cabang tersebut di atas, konferensi juga di ikuti oleh dua orang Utusan Ahmadiyah yaitu Abdul Waahid H.A., Malik Aziz Ahmad Khan, ditambah pula oleh anggota tersiar seperti Soroso Malangjoedo, Sukri Barmawi, Sujadi Malangjoedo, R. Sugeng dll. Konferensi berlangsung di kediaman R. Harmen.

Konferensi memikirkan langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh Jemaat pada waktu itu sehubungan dengan diterimanya perintah dari Hazrat Khalifatul Masih II r.a. supaya kita membantu perjuangan Republik, sedang pada waktu itu RI belum mendapat pengakuan dari luar. Tanah air Indonesia masih dipersengketakan dengan Belanda. Dan pula mengingat pembicaraan Presiden RI pada tanggal 11 Maret 1947 di Gedung Agung, Yogyakarta, bahwa

Ahmadiyah Qadian sangat kurang di kenal. Hal kedua yang menjadi pokok acara dalam konferensi itu ialah Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga.

Dalam konferensi tersebut R. Hidayatullah dipilih sebagai Ketua jemaat Ahmadiyah Indonesia di Daerah RI dan R. Ahmad Sarida sebagai sekretarisnya dan beberapa saudara lainnya sebagai komisaris di antaranya Suroso Malangjoedo. Badan itulah yang menjadi wadah bagi Jemaat untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia pada masa itu.

17. Jemaat Ahmadiyah Salatiga, Jawa tengah

Adanya Lajnah Imaillah di kota Salatiga, tida terlepas dari pengaruh datang perginya beberapa tokoh Jemaat di kota ini. Pada tahun 1943, beberapa keluarga Ahmadi tinggal di Salatiga yaitu keluarga Sukri Barmawi, R. Sugeng dan Cokrowirejo. Pada tahun 1948 datang keluarga Murtolo, SH, sehingga karena sudah cukup banyak beliau – beliau ini mengadakan shalat Jum'at di rumah R. Sugeng. Dengan sendirinya ibu-ibu dari keluarga Ahmadi tersebut sudah mengikuti Bapk-bapaknya ikut shalat Jum'at dan kadang-kadang ada pertemuan/ pengajian di rumah keluarga Bapka R. Sugeng.

Khusus Ny. R. Sugeng sebagai nyonya rumah, selam itu selalu menyediakan tempat dan fasilitas lainnya untuk penyelenggaraan shalat Jumat maupun pertemuan intern. Adapun Utusan yang sering membina ke Salatiga pada waktu itu ialah Sayyid Shah keluarga Al-jailani dan Abdul Wahid HA.

Sejak selesainya perang kemerdekaan tahun 1950, selama itu selalu ahmadi yang tinggal di Salatiga pindah ke Jakarta, Bandung dan sebagainya kecuali R. Sugeng. Pada tahun 1957 baiatlah keluarga Yasin Al-Hadi, yang kemudian sering mengadakan kegiatan jemaat di rumah R. Sugeng.

Atas perintah Mian Abdul Hayyee HP yang menjadi utusan di Jawa Tengah, maka Sdr. Nasir putra R. Sugeng bersama Yasin Al-Hadi telah menyelenggarakan pertemuan “Ceramah agam Islam” yang dihadiri oleh guru, menyampaikan ceramah yang berjudul “Mi’raj dan Isra Nabi Muhammad s.a.w ,” banyak di natara ulama yang hadir menyatakan kagum atas uraian tersebut karena belum pernah mendengarnya kemudian Mian Abdul Hayyee HP, tokoh ulama di Salatiga memberikan sambutan dan menyatakan terima kasih.

Pada tahun 1963 keluarga Sigit Harjono baiat, sehingga menambah jumlah anggota Jemaat. Di susul dengan baiatnya Ny. H. Syarifah Arjo yang selanjutnya menyediakan rumah beliau untuk tempat sembahyang Jumat , pertemuan pengajian Jemaat dan menginapnya jalan Adisucipto 12, ada papan yang tulisannya aberbunyi : Perpustakaan Jemaat Ahmadiyah”.

Tidak sedikit para pelajar PGA (Pendidikan Guru Agama) yang sering datang ke situ untuk meminjam buku-buku Jemaat karangan Hazrat Masih Mau’ud a.s., Rahmat Ali H.A.O.T. dan tokoh-tokoh Ahmadi lainnya, juga Al-Quran dengan terjemahannya terbitan Jemaat, baik yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Indonesia.

Pada tahun 1964 datang Ny. Nurul Mukminah Ahmad Sarido, yang kuliah dan mengajar di kota tersebut, sehingga jumlah wanita Ahmadi semakin bertambah Ny. H. Syarifah Arjo sering mengadakan pengajian dengan mengundang ghair.

Pada tahun 1965 Jemaat Ahmadiyah Salatiga resmi dibentuk, kemudian ibu-ibu Lajnah Imaillah dengan pimpinan Ny. H. Syarifah Arjo makin meningkat, aktifitas tablighnya dan pengajian rutin. Selanjutnya Jemaat Ahmadiyah cabang Salatiga mengadakan suatu ceramah di gedung Nasional Salatiga dengan judul “The Dead Sea’s Scowls” atau ‘penemuan Gulungan-gulungan di Laut Mati” dengan pembicara Ahmad Sarido dari Yogyakarta dan Mian Abdul

Hayyee HP berbicara mengenai “faham Ahmadiyah”.

Lajnah Imaillah Salatiga ikut mendapat tugas dalam ceramah tabligh ini, dan mendapat bantuan pula dari Lajnah serta Jemaat dari Semarang. Hadir dalam pertemuan itu kurang lebih 500 orang sehingga sangat menggembirakan. Sayang sekali bahwa setelah ceramah itu selesai, R. Sugeng dipanggil oleh yang berwajib untuk menjawab beberapa pertanyaan, namun selanjutnya tidak apa-apa. Sesudah itu Jemaat Salatiga menjadi semakin dikenal oleh masyarakat, karena ajaran Ahmadiyah. Dalam kegiatan –kegiatan ini Ny H. Syarifah Arjo selaku ketua Lajnah Imaillah, membantu sepeuhnya bahkan menjadi sponsornya. Pembantu-pembantunya ialah Ny. Yasin Al Hadi dan Ny. R. Sugeng.

Pada tahun 1969, di gedung SPG negeri diadakan ceramah umum lagi dengan pembicara Sayyid Syah Muhammad Al Jaleani dan Abubakar Ayyub (yang mana beliau-beliau ini pernah menjai Rais –ut –Tabligh Jemaat Ahmadiyah Indonesia).

Selesai ceramah, pemuda bernama Ahmad Muhammad, t, baiat masuk Jemaat Ahmadiyah yang sekarang menjadi Muallim Jemaa. Selanjutnya pada tahun 1972 Hafiz Qudratullah HA memberikan ceramah lagi di gedung SPG Negeri Salatiga, yaitu mengenai tabligh Ahmadiyah di beberapa dinegara-negara yang pernah beliau kunjungi. Pusat kegiatan Jemaat selalu di rumah Ny. H. Syarifah Arjo, beliau membantu baik moril maupun materiil.

Pada tahun 1976, aktifis Jemaat Salatiga muali menurun, karena Ny. H. Syarifah Arjo sudah berusia tua, suami beliau sudah wafat dan putra-putrinya tinggal di Jakarta. Sehingga beliau tinggal bersama putranya di Jakarta, dan Putranya membelikan rumah baru di Jalan Krodanggo 479 Salatiga, untuk diwakafkan kepada Jemaat Ahmadiyah cabang Salatiga, dengan Akte Notaris No. 9 tanggal 5 November 1976 (Notaris N.L. matu, SH.)

Sepeninggal Ny. Syarifah Arjo, Jemaat Salatiga tetap ada namun kegiatan Lajnah tidak seperti sedia kala.

Pada waktu riwayat Lajnah ini di tulis, Ny. H. Syarifah Arjo, perintis Lajnah Imaillah cabang Salatiga telah wafat. Namun benih Jemaat Ahmadiyah yang beliau rintis Insya Allah akan tetap hidup. Amin. Hingga kini segala kegiatan Jemaat, baik sembahyang Jum'at maupun pertemuan / pengajian diadakan di rumah wakaf Ny.Syarifah Arjo.

18.Jemaat Ahmadiyah Semarang, Jawa Tengah

Ali Mukhayat salah satu pelaku sejarah berdirinya Jemaat Semarang menjelaskan dalam Edaran LI no. 55 th. VIII, November1988.

Pada kira-kira pertengahan tahun 1957, di kota Semarang sesungguhnya sudah ada beberapa Ahmadi, yaitu Ahmad Dimiyati, Sudisa dan di tambah beberapa anggota keluarga. Tidak lama kemudian disusul dengan Darsum dari Purwokerto (tidak lama) dan Yasin Al Hadi dari Salatiga.

Kemudian datanglah anggota Ahmadiyah lainnya seperti Sumarlo,pindahan dari Bogor, Kartubi dari Purwokerto, dan ada pula yang baiat baru seperti Sutarjo. Di samping itu ada beberapa simpatisan seperti. Tayang,. Muhyiddin,. Yusuf,. Ayat Ruhiyat dan lain-lain (para simpatisan itu kini sudah baiat).

Adapun Missionary (mubaligh Markazi) yang diutus untuk daerah Jawa Tengah ialah.M. Abdul Hayyee HP berkedudukan di Yogyakarta, dan sering datang di Semarang mengenai masalah ke-Ahmadiyah -an. Beliau pun waktu-waktu shalat jum'at apabila datang di Semarang menjadi Imam dan Khatib.

Setelah Ahmad Dimiyati memperoleh rumah baru di Jl. Erlangga no.5, kemudian pindah ke Losmen "Wisma Jaya". Di rumah yang baru itu kegiatan Jemaat tetap diteruskan baik pengajian maupun Shalat Jumat . Karena telah ada tiga orang laki-laki, sesuai dengan

peraturan Jemaat Ahmadiyah, maka dibentuklah kelompok kecil, sebagai Ketua adalah Ahmad Dimiyati; sekretaris adalah Sapto Sumarlo; dan Sisman Satimin, pelajar SPG sebagai Sekrtaris Maal. Sebelumnya memang telah ada pengurusnya, tetapi setelah. Ali Mikhayat dan.Yasin Al Hadi pindah, kepengurusan dari kelompok itu tinggal dua orang, jadi tidak memenuhi syarat terbentuknya kepengurusan.

Pada bulan Naret 1963, datanglah Sigit Hardjono dan tinggal bersama keluarga Ahmad Dimiyati. Dia adalah pegawai yang dinonaktifkan – sebab menjadi anggota jemaat Ahmadiyah dari Departemen Agama Tk.I Jawa Tengah . Pada bulan Mei tahun itu juga baiatlah Bp Ahmad Suryaman –Letnan CPM-beserta istri, berkat ceramah Bp Abdul Hayye HP-Utusan Jemaat –yang sangat menyentuh hati nurani di rumah Ahmad Dimiyati. Dengan bertambahnya anggota maka dibentuklah cabnag susunan pengurus sebagai berikut :

1. Ahmad Dimiyati (Ketua)
2. Ahmad Suryaman (Wakil Ketua)
3. Sapto Somarlo (Sekretaris)
4. . Sigit Hardjono (Sekretaris Tabligh)
5. Sisman Satimin (Sekretaris Maal)

Setelah terbentuk kepengurusan maka tepikir untuk mencari tanah guna mendirikan masjid., perusahaan tanah ke Balai Kota mendapat kemudahan karena disertai alasan bahwa di lingkungan seluas itu (Simpang Lima dan Sekitarnya,) daerah itu masih berupa sawah yang membentang ke selatan. Pada akhir tahun 1964,. Ahmad Dimiyati dipindahkan tugaskan ke Manado.

Tahun 1964 meletusnya G30S/PKI. Tanah yang sudah tersedia itu tidak terurus. Ahmad Suryaman selaku Wakil Ketua Jemaat Semarang merangkap sebagai Ketua Pembangunan masjid belum

sempat mengurus karena di samping disebabkan oleh kesibukan tugas, situasi maupun biaya juga tak memungkinkan. Karena diketahui tanah tersebut tidak terurus, maka Wali Kota memberi peringatan sampai yang ketiga kali dengan ultimatum bilamana tanah tersebut tidak ada tanda-tanda akan didirikan bangunan maka pemberian tanah akan dicabut kembali.

Selaku Ketua Pembangunan Masjid, Ahmad Suryaman merasa sangat prihatin karena tanah yang diperoleh dengan amat susah payah itu akan di cabut kembali. Semalaman beliau tidak dapat tidur memikirkan masalah tersebut hingga pukul 03.00 dini hari. Hari itu kebetulan malam Jumat Kliwon, Ahmad Suryaman kemudian shalat tahajud, sampai tiba waktu subuh. Pada waktu sujud terakhir shalat tahajud, diperlihatkan gambar situasi masjid yang ada di atas meja kecil dengan sinar seperti di shooting. Suryaman menjawab "Insya Allah akan dilaksanakan !" Sewaktu dalam keadaan sujud itu menangis lama sekali karena terharu dan pagi harinya tanggal 1 September 1967 dimulai penggalian untuk fondasi masjid. Pada tanggal 10 September 1967 diadakan doa peletakan batu pertama oleh Saleh A. Nahdi yang dihadiri oleh seluruh anggota yang ada.

Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah mengadakan keputusan untuk menyelenggarakan Kongres Jemaat Ahmadiyah Surat Permohonan untuk keperluan ini telah dipersiapkan yang dibuat oleh (pol) Ahmad Suryahaminata dari Markas besar Kepolisian Jakarta. Untuk kepengurusan izin itu dipercayakan oleh seorang khuddam bernama Memet asal Lampung ditemani Sigit Hardjono. Setelah diketahui surat itu dari MABAK dan ditandangi oleh Brigjen (Pol) Ahmad Suryahaminata, maka mereka berdua diterima dengan baik dan diminta untuk menunggu karena segera akan dibuatkan Surat Izin penyelenggaraan Kongres Jemaat Ahmadiyah itu. Adapun penyelenggaraan Kongres pada bulan Maret 1969. Abdurahman Ahmadi, Sekretaris Kongres menyerahkan uang Rp 45.000,- untuk biaya konsumsi dan Rp

15.000,- untuk biaya sewa gedung selama 3 hari. Kongres Jalsah waktu itu sukses. Perlu pelaksana karena sebagai militer tidak boleh aktif dalam kegiatan agama, maka pimpinan diambil alih oleh Saleh A. Nahdi, Muballigh di Jateng.

Setelah selesai kongres dan mengetahui bahwa di Semarang baru saja selesai membangun masjid, pada awal bulan Maret itu untuk mengambil berkah. Abu Bakar Ayyub HA (Raisuttabligh) berkenan meresmikan masjid tersebut yang dihadiri para peserta kongres, PB Jemaat dan Korps Mubalighin. Adapun nama masjid tersebut dimohonkan oleh Saleh A. Nadi kepada Hadrat Khalifatul Masih II ra. Dan diberi nama "Nusrat Jahan" yang artinya pertolongan dunia. Karunia Allah semata, karena untuk mihrab masjid itu mendapat berkah batu bata yang telah didoakan oleh Hadrat Khalifatul Masih II ra. Dari Rabwah. Memang tidak sia-sia dan terbukti berkah dari nama masjid yang telah diberikan oleh orang yang suci itu. Ini terbukti tak lama setelah selesai kongres, Abdullah Hasan Tou dengan diantar oleh Syafii R. Batuah dari PB. Ditugaskan untuk Semarang dan sekitarnya . Abdullah Hasan Tou adalah bekas Pendeta Kristen di Lubuk Linggau, sering mengatakan telah pernah menjadi murid Rahmat Ali H.A.O.T, Mubaligh pertama di Indonesia yang diutus Hadhrat Khalifatul Masih II ra.

Kemudian setelah sukses Kongres Jemaat Ahmadiyah di Semarang pada tahun 1969 disusul Tabligh akbar di gedung GRIS Semarang yang sukses pula oleh PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia berserta Mubaligh Markazi. Alhamdulillah-dan hingga seterusnya berhasil ceramahnya di Undip dan IAIN Wali Songo sambil pameran buku Jemaat di Perguruan tinggi tersebut dan tidak hanya sekali saja.

Jemaat Semarang telah berhasil memberi buku pada pimpinan Islam Society Jepang, Prof. Dr. Abdul Karim Nakamura yang diterima oleh putrinya, Mariam Saito Nakamura. Telah datang pula ke Masjid tersebut orang asing non Islam dari Kanada, Amerikan

dan lainnya.

Maka dengan adanya gerakan menon-muslim-kan Jemaat Ahmadiyah pada tahun 1974 sewaktu Zulfikar Ali Bhutto berkuasa, tahun 1980 MUI juga mengeluarkan fatwa bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah sesaat dan menyesatkan hingga menimbulkan pertentangan terhadap Jemaat Ahmadiyah dimana – mana. Jemaat Ahmadiyah sangat prihatin dengan istiqomah dan mempergiat ibadah dan doa. Pada waktu pertentangan cukup hebat terhadap Jemaat, Jemaat Ahmadiyah Indonesia termasuk Jemaat Semarang sangat berhati-hati dalam mengadakan kegiatan. Telah berkali-kali Jemaat Ahmadiyah diusulkan dibubarkan. Drs. Sigit Hardjono satu-satunya anggota Jemaat Ahmadiyah Semarang yang selalu merasa was-was, cemas dan harap karena selalu diintimidasi di instansinya yaitu Departemen Agama Propinsi. Jateng.

Pada tahun 1991 setelah situasi membaik, Ansharullah Jemaat Ahmadiyah Semarang berhasil mengadakan Ijtimah dengan Ketua Cabang waktu itu adalah Anwar Said SE. Karena ruangan masjid tidak cukup menampung maka para peserta di tampung di rumah-rumah anggota Jemaat Semarang seperti rumah Anwar Said, SE sendiri, rumah H. Ahmad Suryaman, rumah Arief Syafie, Sigit Hardjono serta rumah Ibnu A. Sartono.

Di Jawa Tengah telah mulai bermunculan daerah – daerah anggota Jemaat Ahmadiyah dan sampai sekarangn telah berdiri 30 cabang dari 5 kodya. Semoga Allah Ta'ala cepat memberikan bibit di daerah yang belum ada. Karena tak terhindarkan berbagai masalah, maka Sekretaris Umur Kharijiah PB,. Hadi Iman Sudito SH pada tahun 1964 menetapkan Kepengurusan Tingkat Prop. Jateng dan DIY. Dari Jemaat Ahmadiyah cabanng Semarang yang ditunjuk Ibrahim Djaprawira sebagai ketua, dan Sigit Harjono sebagai sekre Khas, H. Ahmad Suryaman, sebagai Sekr. Maal dan Ibnu A. Sartono sebagai anggota.

Pada kira-kira permulaan tahun 1960 kaum Ahmadi di Semarang yang semuanya berusia kurang dari 40 tahun ketika itu mengadakan pertemuan di Losmen tersebut dengan dihadiri juga oleh. M . Abdul Hayye HP untuk membentuk Cabang Semarang

Usul pembentukan cabang ini kemudian disampaikan kepada Pengurus Besar Semarang ini telah dibuat oleh PB dalam kongres tersebut. Cabang Semarang tercatat sebagai cabang ke – 37. Adapun alamat sekretariat cabang adalah di Gebang Anom No .21

Kemudian surat keputusan tersebut, diperbanyak kemudian disiarkan kepada instansi – instansi pemerintah, partai-partai politik, organisasi – organisasi massa dan surat-surat kabar di kota Semarang ketika itu, maka muncullah berita dalam Harian “Gema Massa” (dulu “Sin Min”) tanggal 1 September 1960 dibawah judul “Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Semarang” yang lengkapnya berbunyi seperti berikut,

“Diperoleh berita, terhidung mulai tanggal 1 Juli 1960 di Semarang disahkan berdirinya Jemaat Ahmadiyah sebagai ketua Ali Mukayat, dan Yasin Al Hadi serta Sutaryo masing-masing sebagai Sekretaris Khas dan Sekretaris Maal. Penetapan Jemaat Ahmadiyah Pengurus Besar Jamata Ahmadiyah Indonesia Jakarta tertanggal 11 Juli 1960 No 134 / Sekr / Ch./ 60 yang ditandatangani oleh Sekr. Khas I dan PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Abdurrahman Ahmadi“.

Berita itu dapat diketahui juga dalam Majalah Sinar Islam No. 5-6 tahun X/ Mei – Juni 1960 pada halaman 32 Kolom I selengkapnya berbunyi seperti berikut, “ Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Semarang dengan suratnya tertanggal 11 Juli 1960 No. 134 /Sokr. Ch./ 60 disahkan beridir sejak tanggal 1 Juli 1960, Alamat pos Genang Anom 21 Semarang. Dengan berdirinya kedua cabang baru tersebut diatas Hingga sekarang sudah ada sejumlah 37 cabang di seluruh Indoensia”.

Adapun bentuk stempel yang terciptakan dan digunakan oleh Cabang Semarang adalah bulat, selain tertulis nama “Jemaat Ahmadiyah Indonesai Cabang Semarang” tetapi juga tertulis di tengah-tengah dengan huruf-huruf Arab “ Jamaah Ahmadiyah “, bentuk stempel mana kemudian dijadikan stempel resmi dalam bentuk seragam untuk Jemaat Ahmadiyah seluruh Indonesia hingga masa kini, meskipun ada perubahan tentang bentuk huruf-huruf Arab “ Jamaah Ahmadiyah “ Adapun tinta stempel yang digunakan pada waktu – waktu permulaan setelah terbentuknya cabang Semarang berwarna hijau.

Kemudian Ketua, pernah dipanggil oleh Komandan CPM di Kota Semarang untuk didengar Keterangan-keterangannya tentang apa Ahmadiyah itu. Kepadaanya diterangkan tentang yang ditanyakan itu dan sekaligus diperkenalkan siapa Hadharat Mirza Ghulam Ahmad a.s. sambil menyerahkan buku AD/ART Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dijelaskan bahwa Jemaat ini selalu tunduk kepada Undang-Undang Negara dimana mereka berada. Jemaat Ahmadiyah tidak akan melakukan huru-hara / pemberontakan terhadap pemeerintah yang ada. Juga, dijelaskan sumber-sumber keuangan Jemaat Ahmadiyah dalam bentuk akat, candah, tahrik jadid dan sebagainya. Jemaat Ahmadiyah itu bukan partai politik.

19.Jemaat Ahmadiyah Cabang Lebaksari

Dengan karunia Allah SWT seorang putra Desa yang bernama Muhamad Husban bin Sudarma yang beralamat di Kampung Ciluntung Desa Parakansalak Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, pada awal tahun 1968 setelah menamatkan pelajarannya tingkat menengah Pendidikan Guru Agama (PGA), 4 tahun, maka ia melanjutkan sekolah tingkat atas (PGAA di Jakarta. Ketika di Jakarta, ia tertarik akan sebuah pendidikan Islam bernama Al Azhar, dalam pendidikan itu sering dikunjungi oleh para penceramah terkemuka di angaraanya M. Natsir, Mohammad Rum, Bung Tomo,

Drs. Sidi Gazalba dan Porf. Dr. Hajairin disamping sebagai pemberi kuliah tetap Prof. Dr. Hamka, Lazimnya disebut Buya Hamka.

Di peguruan Islam tersebut sering ia mendengar nama sebuah organisasi Islam, yakni Ahmadiyah , namun yang sering kedengarannya bukan positifnya Ahmadiyah dalam memperjuangkan Islam namun sebaliknya terkenal bahwa Ahmadiyah itu adalah satu organisasi yang non muslim.

Dalam pada itu pun Husban terbawa arus ikut menjelekkan Ahmadiyah , hal tersebut disebabkan informasi dari buku karya A. Hasan pendiri Persis yang senantiasa mendiskreditkan Ahmadiyah .

Dalam ceramah Husban\, di satu tempat pengajian pemuda Muhammadiyah, menerangkan itikad Ahmadiyah di antara lain ialah:

- a. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad saw
- b. Tidak ada lagi terbukannya Wahyu sesudah Nabi Muhammad saw

Setelah ceramah dalam pada itu diadakan ruang tanya jawab, seorang pemuda bertanya, jika sekiranya setelah Nabi Muhammad saw tidak ada lagi wahyu sedangkan Malaikat jibril itu tugasnya pembawa wahyu, apa tugasnya Malaikat Jibril ? Saat itu ia menjawab bahwa Malaikat Jibil telah pensiun.

Setelah memberikan ceramah berselang 2 minggu, Husban mencari si penanya tadi, dan bertemu di rumahnya. Setelah menerangkan maksud kedatangan, Harmaen, nama pemuda itu, baru merasa lega hatinya dan dalam pertemuan itu menemukan satu jalan keluar yaitu dia akan membawanya ke Tasikmalaya untuk dipertemukan dengan saudaranya yang pandai di bidang Keagamaan. Setelah berminggu-minggu berdialog dengannya, Husban semakin penasaran untuk menggali lebih mendalam soal Ahmadiyah bahkan berkeinginan untuk bertemu dengan Ulama Ahmadiyah. Akhirnya bertemu dengan Maulana Abu Bakar Ayub, saat itu beliau sebagai Raisuttabligh. Dalam pertemuan tersebut terjadi dialog kecil yang cukup menarik. Akhir Husban berbait

ditangan Abubakar Ayub.

Pada awal tahun 1970, Husban pulang berlibur ke Cilutung. Pada kesempatan itu, ia memperkenalkan Ahmadiyah kepada teman dan saudaranya. Karena keilmuan kejemaatan dirasakan telah mampu untuk berhadapan dengan ghair Jemaat, akhirnya hampir tiap minggu ia pulang dan sering mengadakan diskusi.

Keadaan orang tua dan murid-murid M. Sudarma dinilai sudah waktunya untuk menyatakan bai'at, kemudian Husban mengundang Mlv. Zaini Dahlan dari Sukabumi untuk datang ke rumahnya. Maka rencana ini berjalan dengan mulus pada akhirnya telah baiat di tangan beliau yang pertama pada tahun 1971, Mubayyi'in tersebut adalah : M. Sudarman, Siti Amnah, Eyang Iwik, Ibu Masriah, Mudrikah

Pembai'atan kedua pada tahun 1972 adalah: Oong, Haris, Tasik, Ibu Yoyon, Ibu Ining Pembaiatan ketiga pada tahun 1972 adalah Dading, Aat, Uking, Ibu Ejeh Nurjanah

Maka dalam rangka melancarkan pertablighan, maka dengan karunia Allah SWT mengadakan diskusi dengan Abdul Halim, Emon dan B.I Muslih pada tahun 1972 . Setelahnya mengadakan diskusi semakin banyak orang yang masuk ke dalam Ahmadiyah, Dalam periode tabligh di Parakansalak ini yang mula pertama bai'at adalah B.I Muslih.

Tabligh bil – hal juga dilaksanakan dengan adanya pernikahan Husban dengan putri Haji Mahpudin, pada waktu upacara pernikahan dihadiri oleh Mlv. Mahmud Ahmad Cheema HA, Sy, Gojali, Rustam dan pengurus lainnya dari Jemaat Sukabumi bahkan tidak ketinggalan Cucu Ismail (tokoh pramuka Sukabumi) maka dengan kehadiran mereka itu mendapat reaksi hebat dari masyarakat, peristiwa penting ini pada tahun 1974.

Sewaktu berada di rumah Haji Mahpudin, ia didatangi oleh seorang Karyawan Perkebunan Parakansalak bernama Jajun.

Semula Jajun, diam saja memperhatikan diskusi yang dilakukan Husban, setelah acara tabligh selesai maka Jajun menghampiri, kemudian bertanya dalam Bahasa Sunda “*dupi ayi teh Ahmadiyah ?*” “ Maka dijawab”Sumuhun abdi Ahmadiyah !!!” tiba-tiba Jajun, merangkul Husban sambil menangis dan berucap, “*Bapak teh lemah pisan henteu tabligh malihan pun bojo oge ti gaer Jemaat,*” sambil menangis

Kejadian ini disaksikan oleh Haji Mahpudin dan merasa heran karena saat itu ia belum menjadi Ahmadi. Setelah banyak yang bai'at baik di Cilutung maupun di Parakansalak, Jajun mengaktifkan diri ke dalam Jemaat ini, bahkan ia menjadi ketua ranting di Parakansalak.

Kerberadaan Jemaat Cilutung (sekarang Lebaksari) dalam perkembangannya lambat dibandingkan dengan Parakansalak karena keadaannya demikian maka Cilutung menggabungkan diri dengan Parakansalak , dengan status ranting. Peristiwa tersebut, terjadi tahun 1971. Baru tahun 1980 Jemaat Cilutung merubah statusnya dari ranting menjadi cabang dengan nama Lebaksari

Kemampuan dan kegiatan Cabang Lebaksari semakin meningkat. Tahun 1980 dapat mendirikan Mesjid dengan ukuran 8 x 9 m. Pendirian masjid tersebut mengundang reaksi dari kalangan pemerintah khususnya Camat yang menghalangi pembangunan mesjid. Pejabat itu bernama Soleh Iskandar, hampir tiga tahun pembangunan mesjid terbengkalai hanya memakai atap dari plastik saja.

Dalam rangka pembangunan masjid dari masyarakat memberikan reaksi agar mesjid tidak lagi dibangun, mereka membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh ratusan anggota masyarakat, agar pembangunan masjid terhenti, namun atas karenia Allah SWT pembangunan tersebut akhirnya berjalan lagi sampai dengan selesai., Tanah masjid yang dipergunakan adalah jariah dari Ibu Iti istrinya Oong.

Sewaktu M. Sudarma mengadakan pengajian di Masjid umum (ghair) datanglah ketua Majelis Ulama Parakansalak, Amil Sanusi dan dari Kantor Urusan Agama, masyarakat Umum dari berbagai daerah mereka mengelilingi mesjid sambil membawa golok dan alat-alat pemukul lainnya, maksud mereka adalah akan menghancurkan Jemaat. Namun anehnya saat itu setibanya di Masjid amarahnya hilang hanya ngomong biasa saja dan masyarakat yang tadinya mengancam ikut bubar juga. Nama upaya untuk memprovokasi, tetap dilakukan, antara lain :

- a. Masyarakat mengundang Ustadz Fauzi Said Toha dari Jakarta dengan menggunakan tempat di Mesjid PTP XI, secara semangat membara Fauzi Said Toha mencaci maki Jemaat namun tetap tidak berhasil membubarkan jemaat
- b. Ahmad Hariadi mencoba menyerang kecamatan Parakansalak seluruh masyarakat siap mendukung Ahmad Hariadi. Namun pada akhirnya rencana-rencana mereka gagal total, karena dari pihak Kodim turun tangan untuk mengamankan, seluruh masyarakat yang tadinya mendukung Ahmad Hariadi berbalik jadi mencaci maki Hariadi
- c. Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Parakansalak mengancam akan membubarkan Ahmadiyah di suatu Masjid di Cilutung (Lebaksari di hadiri oleh Camat, KUA, ternyata rencana mereka gagal lagi.

Letak keadaan Jemaat Lebaksari berada di Desa Parakansalak Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari jalan raya Parungkuda ke Lebaksari lewat Parakansalak berjarak 9 km. Berdekatan dengan perkebunan teh PTP XI yang berareal ribuan hektar luasnya. Lebih tegas lagi bahwa keadaan Jemaat Lebaksari tepatnya dibawah kaki gunung Salak.

20. Jemaat Ahmadiyah Krucil, Bawang Banjarnegara

Basyiruddin Ahmad menceritakan pada majalah Suara Lajnah no. 11 Mei 1974 mengenai sejarah Jemaat ahmadiyah Indonesia di Krucil, Kecamatan Bawang, Banjarnegara

Krucil demikianlah orang menyebut kampung tempat tinggalku. Saya sendiri tidak tahu mengapa sampai dinamakan demikian. Letaknya disebelah barat kota Banjarnegara, sebuah kota kabupaten di Jawa Tengah. Kira – kira 10 km dari kota itu. Tempatnya di pelosok yang sedikit terpencil.

Jauh sebelum Ahmadiyah masuk ke daerah itu, tempat ini hanya di diami oleh beberapa keluarga saja. Kemudian dengan adanya keturunan mereka, mulailah rumah-rumah berdiri. Walaupun belum begitu banyak. Islam sudah dikenal pada waktu itu dan orang – orangnya pun menjalankan ibadah semestinya. Tetapi ibadah yang mereka jalankan adalah ajaran dari orang-orang tua mereka

Barulah sekitar tahun 1927 masuk ke kampung Krucil itu beberapa ulama dari lain tempat. Lalu mereka menyebarkan faham-faham yang mereka anut, yaitu PSII. Sehingga praktis hampir semua penghuni di kampung itu masuk anggota PSII. Organisasi itu berkembang dengan suburnya di kampung itu. Dalam masa periode itu, masyarakat di situ bisa membuat pertemuan dan juga dipergunakan untuk madrasah.

Hari tambah hari, tahun demi tahun, sesuai dengan perkembangan penduduk, makin ramailah kampung Krucil itu dipenuhi oleh rumah-rumah yang bertebaran di sana – sini. Akan tetapi sebagian besar dari mereka adalah masih ada hubungan keluargaan. Masjid di sana pun sudah ada sejak dahulu. Hanya sayang saya sendiri kurang tahu kapang berdirinya. Surau-surau ada di beberapa tempat. Yang kebanyakan dipinggir – pinggir sungai,

karena merupakan tempat yang strategis dekat tempat bersuci di beberapa tempat. Yang kebanyakan di pinggir-pinggir sungai, karena merupakan tempat yang strategis dekat tempat bersuci.

Penduduknya kebanyakan terdiri dari para petani. Mereka sama mengerjakan sawah ladang mereka dengan gembira. Ada juga yang berdagang, sebagian lagi menjadi pegawai. Pada zaman bergolaknya revolusi Indonesia sekitar tahun 1946-1949, kampung itu aman dari penjamahan penjajah. Berkat lindungan dari Allah Ta'ala walaupun tempatnya dekat dengan jalan raya, tetapi keadaan tetap aman.

Pendirian Ahmadiyah dimulai sejak tahun 1952, oleh salah seorang putra dari kampung itu, yaitu Ahmad Rusydi. Beliau baiat di tangan Rahmat Ali H.A.O.T almarhum. Dan pada tahun 1936-1942 menurut pelajaran di Qadian. Pertablighan pada waktu itu masih kecil – kecilan, dari orang ke seorang dair rumah ke rumah.

Baru sekitar tahun 1959 – 1960 pertablighan secara terbuka dan besar-besaran diadakan. Di waktu itu ada seorang ulama dari lain kampung yang mencoba hendak memasukan fahamnya dengan menjadikan dirinya Imam di masjid itu. Akan tetapi fahamnya itu tidak sesuai dengan faham yang telah ada di kampung itu. Sehingga masyarakat di situ menolaknya. Di waktu itulah Ahmad Rusdi yang bertindak sebagai Imam Masjid membuka tabligh Ahmadiyah secara lebih luas lagi.

Maka mulailah muncul tantangan – tantangan dan perlawanan – perlawanan dari orang – orang yang tidak senang kepada Ahmadiyah . tetapi pertablighan terus berjalan. Pada tahun 1960 mulailah Utusan Mian Abdul Hayyee HP yang pada waktu itu berkedudukan di Yogyakarta datang ke Krucil, mengadakan tabligh di sana. Ada berberapa kali beliau berkunjung ke sana. Pada tanggal 22 Juni 1960 diadakan tabligh akbar di tempat pengajian. Pengunjung pun cukup banyak ada di antaranya dari kampung lain yang terdekat. Maka bertambah yakinlah mereka akan KEBENARAN Jemaat Ahmadiyah.

Mereka yang tadinya masih ragu-ragu menjadi yakin dan yang tadinya percaya bertambah yakin. Akan tetapi yang tadinya menentang diam-diam bertambah terang-terangan. Pada tanggal 24 Juni 1960 malam, terjadilah suatu peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang masa di kampung itu. Pada malam itu ‘ ribuan ‘ malaikat turun membawa hidayah, memasukan petunjuk ke dalam kalbu – kalbu mereka. Hingga kalau tidak salah 70 orang baiat pada malam itu. Mereka dengan tulus ikhlas menyerahkan diri kepada Allah SWT, ikut dalam barisan murid-murid Masih Mau'ud a.s

Mulai saat itu jumlah murid-murid Masih Mau'ud a.s kian bertamah, tahap demi tahap. Hingga beberapa tahun saja sudah mencapai sekitar 200 orang. pada kongres XI tahun 1960, baru pertama kali murid-murid Masih Mau'ud a.s dari kampung Krucil itu mengikutinya. Pada tahun 1960 itu pula PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia meresmikan Ahmadi-Ahmadi dari Krucil membentuk cabang, dengan nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Banjarnegara.

Pada tahun berikutnya tahun 1961, kongres diadakan di Purwokerto maka banyak anggota dari Krucil diambil tenaganya masuk sebagai panitia. Hari demi hari telah terlewat. Berita tentang masuknya Ahmadiyah ke daerah sana tersebar luas. Penentangannya makin bertambah banyak. Tabligh dengan cara lisan maupun tertulis terus dilancarkan. Dalam setiap peringatan Hari Raya Islam selalu diundang orang –orang ghair Ahmadi.

D. Perkembangan Ahmadiyah di Indonesia Timur

1. Ahmadiyah Cabang Ujung Pandang

Saat itu adalah bulan April 1970 atau tepatnya tanggal 22 Shohadot 1349 HS, awal mula yang akan membawa berkat bagi

Jemaat Ahmadiyah Indonesia, khususnya bagi Jemaat di Ujung Pandang.

Saleh A. Nahdi bersama keluarga tiba di Ujung Pandang dan akan bertugas menjadi Muballigh Jemaat Ahmadiyah Sulawesi Selatan. Tidak lama sejak saat itu, Jemaat Ahmadiyah cabang Ujung Pandang diresmikan.

Sebelumnya di kota ini telah bermukim beberapa keluarga Jemaat yang kebetulan sedang menjalankan juga di daerah ini. Merka adalah Dra. Nurul Mukhlisah (sejak tahun 1964), Drs. Abdul Sobur (1969), Kol. HS Muhamad sekeluarga (1968), Ir. Zakir Halim sekeluarga dan dr. Diapari sekeluarga (1968/1969), Lettu Udara Yuwono sekeluarga di pangkalan udara Mandai (1970). Mereka belum merupakan satu kesatuan dalam organisasi Jemaat yang bernaung di bawah cabang resmi, walaupun Kol H.S Muhammad senantiasa mengusahakan shalat Jum'at bersama di rumah-rumah tertentu.

Pada waktu diresmikan anggota Lajnah Imaillah baru ada 5 orang, masing-masing Ny. Rani Saleh A. Nahdi, Ny. Yuwono, Dra. Nurul Mukhlisah, Ny. A. Muhamaad dan Ny. Tahirah Zakir yang beberapa bulan kemudian pindah ke Jakarta sehingga belum dapat membentuk cabang Lajnah. Tidak lama kemudian baiat dua orang wanita, Ny. Tawang Daeng Tajuddin dan Ny. Abdul Hamid Nangka. Pada akhir tahun 1970 Dra. Nurul Mukhlisah berangkat ke Australia dalam rangka tugas belajar selama 1 ½ tahun. Walaupun belum dapat dibentuk, tugas-tugas sebagai Lajnah tetap dilaksanakan.

Dengan kembalinya Dra. Nurul Mukhlisah ke Ujung Pandang dari Australia, dan pindahnya Ny. Abdul Sobur untuk mendampingi suaminya di Ujung Pandang, pada tahun 1351 HS/1972 M Lajnah Imaillah Ujung Pandang telah dapat dibentuk. Pengurus pertama itu diketuai oleh Ny. Yuwono sedang Ny. Rani Saleh A. Nahdi sebagai penasehat. Pada akhir tahun itu pula Let. Kol A. Mahmud bersama keluarga sehingga pengurus diperkuat oleh Ny. Aisyah A. Mahmud.

Kegiatan waktu itu terutama mengikuti kegiatan Jemaat, yakni pengajian 2 kali seminggu yang diadakan di rumah Utusan, di rumah-rumah para anggota searah bergilir dan kadang-kadang di tempat lain sesuai dengan perkembangan tabligh pada saat itu yang sangat maju. Selain itu membantu pembiayaan penerbitan dan memperbanyak buku-buku Jemaat yang diperlukan untuk tujuan tabligh.

Pada tanggal 15 Sulh 1352 HS/1973 M bertepatan dengan hari raya Idul Adha, dilaksanakan shalat Id di rumah Drs. Nurul Mukhlisah yang dilanjutkan dengan pembaiat 31 orang penduduk asli Ujung Pandang, 15 orang diantaranya wanita. Dengan demikian bertambahlah anggota Lajnah dan Nasirat sehingga bertambah pula tugas yang diurus dalam mengarahkan dan membina anggota.

Pada tanggal 23 Tabligh 1352 HS/ Feburari 1973 M diadakan pembaharuan susuna pengurus yang lebih lengkap, Ny. Yuwono tetap menjadi ketua. Dengan bertambahnya anggota Nasirat maka dibentuk pula Nasirat Cabang Ujung Pandang. Kegiatan selain mengikuti shalat tarawih pada bulan puasa yang diadakan dirumah – rumah anggota secara bergilir dan shalat tahajjud bersama pada setiap Kamis akhir bulan, seminggu yani hari Rabu dan Minggu di rumah Ny. Aisyah A. Mahmud kadang – kadang di rumah anggota kaumnya yang dimaksudkan juga untuk bertabligh kepada handai taulan dan tetangga. Karena tempat tinggal anggota saling berjauhan, waktu pengajian dikurangi menjadi seminggu sekali. Pada setiap pengajian, hadir sekitar 80 % anggota Lajnah dan Nasirat Tgl 30 Aman 1352 HS/ 1973 M., telah baiat berjumlah 6 orang di antaranya seorang wanita yang disusul 2 orang lagi. Pada tahun ini, seorang Ahmadi warga negara Pakistan yaitu dari M. Jamil beserta keluarga, serorang tenaga ahli PBB (UNESCO) yang diperbantukan di Indonesia, tiba dan bermukim pula di Ujung Pandang. Beliau telah menanamkan andil besar dalam pembangunan mesjid dan rumah missi di Ujung Pandang Ny. M Jamila adalah seorang ibu

yang memegang arisan untuk kaum ibu.

Masa gemilang dari Jemaat Ahmadiyah Ujung Pandang telah membangkitkan dan mengobarkan bibit dengki dan irihati orang – orang tertentu yang tidak senang melihat kemajuan Jemaat. Fitnah dan cacian mulai mewarnai khotbah, dahwah, ceramah, pidato yang dengan gencar disuarakan lewat media apa saja yang memungkinkan mereka laksanakan. Masyarakat dengan diam – diam mulai mereka dengar. Kegoncangan terjadi setelah 2 orang anggota Jemaat Ujung Padang ditahan oleh pihak Kodim setempat, yaitu H. Hamjah Daeng Sau dan anaknya Drs. Minhajat Hamja. Tetapi berkat do'a kepada Allah SWT disamping usaha, beberapa anggota penahanan ini tidak sampai berlarut-larut. Namun telah cukup menimbulkan kegoncangan. Di kabupaten Bone, Tahir ditahan pula oleh penguasa setempat.

Cobaan demi cobaan tidak menggetarkan hati wara Jemaa, khususnya Lajnah, sebaliknya malah semakin mempertebal iman dan taqwa. Dalam masa ini kegiatan-kegiatan pengajian yang bersifat resmi terpaksa dihentikan untuk sementara waktu menanti suasana tentang kembali.

Dalam suasana prihatin seperti itu, Rais-ut-Tabligh Maulana Mohammad Sadiq HA pada tanggal 11 Fatah 1352 HS/Desember 1973 M, berkunjung ke Ujung pandang dan telah mendapat sambutan yang hangat dan antusias dari seluruh warga Jemaat. Kunjungan ini telah menambah terjalinnya suasana kemesraan rohani.

Sebelumnya yaitu pada tanggal 2 Nubuwwah 1352 HS / 1972 M, telah dilakuakn peletakan batu pertama pembuatan rumah Jemaat yang terdiri dari tempat sembahyang dan rumah missi yang sekarang disebut Wisma Nusrat. Pembangunan wisma tersebut dapat terlaksana berkat do'a dan sumbangan dari warga Jemaat lainnya di seluruh Indonesia. Wisma tersebut telah mulai dipakai sebagai rumah Missi dan tempat shalat bersama sejak tanggal 1353

HS/ April 1974 M,. Peringatan Maulid Nabi Muhammad s.a.w. tahun ini telah diadakan di tempat itu dengan mengundang ghair yang tinggal di sekitar tempat itu dan menyambut baik walaupun suasana masih belum reda.

Pada pertengahan tahun 1354 HS / 1975 M, telah terbentuk susunan pengurus baru yang diketahui oleh Ny. Dra. Nurul Mukhlisah. Pada periode ini kegiatan terutama dalam bidang tarbiyah mulai ditingkatkan. Pelajaran yang diberikan berupa pengajian, pelajaran membaca Al-Quran, berpidato, ketrampilan wanita maupun cara berorganisasi.

Pada akhir tahun 1976 Ny. Aisyah Mahmud pindah ke Jakarta . susunan pengurus diubah, Ny. Dra. Harlim Minhayat yang semula menjabat wakil ketua menggantika Ny. Aisyah Mahmud sebagai sekretaris Khas, sedang jabatan wakil ketua ditiadakan. Pada tahun 1977, Dra Nurul Mukhlisah berangkat ke luar negeri selama dua tahun, diikuti pula oleh Ny. Rani Saleh A. Nahdi yang menjadi penasehat Lajnah Imaillah Ujung Pandang lagi karena pindah ke Yogyakarta. Ketika terjadi musibah bencana alam dan kebakaran di Kotamadya Ujung Pandang, Lajnah Imaillah ikut menyumbang pakaian untuk para korban.

Majalah intern /lokal Al-Hisyam yang beredar gratis di kalangan anggota untuk penerbitan adalah sumbangan dari anggota Lajnah. Edaran Lajnah secara teratur disebarikan kepada anggota, yang merupakan sarana tabligh dibagikan bersama-sama buku-buku lainnya kepada ghair.

Dra. Nurul Mukhlisah yang sedang dalam rangka tugas di Malaysia, telah menyampaikan kepada perpustakaan pusat nanyang University, sebanyak 35 buah buku-buku Jemaat termasuk Al-Quran dan terjemahannya. Pada setiap pengajian Lajnah yang diadakan secara bergilir di rumah-rumah anggota sebulan sekali, senantiasa diusahakan mengundang ghair. Pengajian yang diadakan oleh cabang sekali seminggu, selalu diikuti oleh kaum ibu.

2. Jemaat Ahmadiyah Denpasar, Bali

Mian Abdul Hayyee HP adalah mubaligh atau orang pertama membawa kabar suka kedatangan Imam Mahdi a.s. dalam tahun 1953 di Singaraja Bali. Kota Singaraja ketika itu merupakan ibukota propinsi kepulauan Sunda Kelapa yang meliputi pulau Bali, Sumbawa, Sumba dan Timor.

Selain beliau bertugas sampai tahun 1955 ada beberapa diantara mereka yang langsung baiat namun kemudian hubungan terputus karena sesudah Mian Abdul Hayyee HP pindah, tidak ada Utusan lain yang menggantikan di sini. Di antara orang yang ditablighi, yang baiat di Jakarata misalnya, Yusuf Ali dan putranya baiat di tanga Mubaligh Pembantu Mustari rauf, yang menjadi pembantu mubaligh pertama di Denpasar, baiat Ahmad Nurudin tahun 1969 di Mataram. Di tangan Mubaligh Pembantu Mustari Rauf, yang menjadi pembantu mubaligh pertama di Denpasar, baiat Anwar said dan istrinya Ny. Anie Sofia pada tahun 1975, Mahar Erfendi dan istrinya Ny. Sri Wahyuningrum tahun 1977.

Di tangan Hasan Tou, yang menggantikan Mustari Rauf, megambil baiat Ny. Muayanah yang disusul suaminya Moh. Noor A.M. dari singaraja. Ada lagi beberapa orang lain yang baiat namun kemudian tidak terus aktif, ada yang meninggal, pindah atau menjauh saja.

Tidak kurang pertentangan yang dialami oleh anggota Jemaat Ahmadiyah, seperti yang dialami oleh Ny. Sri Wahyuningrum tempatnya bekerja, sehingga terpaksa mengajukan permohonan berhenti dari pekerjaannya sebagai guru SD. Begitu pula yang dialami oleh Anwar Said, SE dan Ny. Anie Sofia yang mendapat tekanan bertubi-tubi dari kepala kantor Asuransi Jasa Indonesia cabang Denpasar tempat mereka bekerja, akhirnya mereka mendapat tugas ke Banjarmasin sebagai kepala di sana.

Perlawanan menyeluruh terhadap Jemaat di Denpasar adalah dari kelompok orang anggota Persatuan Islam (Persis) di bawah

pimpinan antara lain : Safi'i Usman dengan markasnya Al Gurdoba di Sanglah Bali.

Pada tahun 1971, Ny. Titik Sadiqah Sapartningsih beserta suaminya Drs. Tujito pindah dari Purwokerto ke Denpasar dan bertugas di Touririst Beach Inn, Sanur. Tahun 1974 Ny. Tati bersama suaminya Umar Muhammad datang dari Ujung Pandang pindah ke Denpasar mendirikan cabang Ansuransi Timur Jauh dan pada tahun 1976, Ny.Dedeh Rodiah yang menikah dengan H.A. Iwan Darmawan datang dari Tasikmalaya.

Pada tanggal 15 Maret 1977 diadakan pertemuan di rumah Ny. Tati Umar di jalan Serma Made Pil No. 2 Sanglah Denpasar di mana saat itu hadir juga ny. Rani Saleh A. Nahdi dari Ujung Pandang, lalu dibentuklah pengurus pertama Lajnah Imaillah ranting Denpasar, yang diketuai oleh Ny. Tati Umar K.M.

Dengan surat keputusan Pengurus Besar tanggal 3 Februari 1977, yang dimulai tanggal 21 April 1977 ranting Denpasar diresmikan menjadi cabang, dengan ketua kemudian dikenal dengan nama Mansur Ahmad.

Walaupun dalam masa hanya tiga bulan saja tetapi Abdul Wahid H.A. sempat memasukkan l.k. 40 orang ke dalam Jemaat Ahmadiyah antaranya Haji L.Y.C. Manoppo (Mertua H. S. Y. Pontoh).

Kemudian Abdul Wahid digantikan oleh Malik Aziz Ahmad Khan. Beliau ini pun tidak lama namun sempat memasukkan kurang lebih 10 orang ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Beliau kembali ke Jakarta pada bulan Juli 1952. Perlu dicatat bahwa yang meletakkan batu pertama pendirian Mesjid Jemaat Ahmadiyah Cabang Kotamobagu adalah Malik Aziz Ahmad Khan. Pada Oktober 1961 tiba M. Mansur Ahmad sebagai utusan tetap dari pusat. Berpuluh-puluh orang telah bai'at di tangan beliau.

Perlu pula diketahui bahwa kini di Manado, Ibukota propinsi Sulawesi Utara telah berdiri pula Cabang Jemaat Ahmadiyah di bawah asuhan Ahmad Dimiyati dan telah beberapa orang bai'at.

Selainnya, di sebelah Barat kota Manado (l.k. 400 km dari Manado) dan l.k. 200 km dari Motoboi Besar, pesisir Utara bagian Barat Kabupaten Bolaang Mongondow juga telah bai'at beberapa orang antaranya, Ahmad L. Pontoh dan L. Agas Pontoh keduanya adalah saudara kandung H.S. Yahya Pontoh. Mereka giat bertabligh dan mengharapkan kedatangan muballigh di daerah ini.

3. Ahmadiyah di Sulawesi Utara

Sebagaimana dinubuatkan oleh Masih Mau'ud a.s. bahwa Jemaat beliau akan tersebar ke seluruh pelosok dunia, maka berdirinya Jemaat Ahmadiyah di Sulawesi Utara merupakan salah satu bukti sempurnanya nubuwat itu.

Dengan perantaraan haji Yahya Pontoh pada tanggal 26 Juli 1948 berdirilah Jemaat Ahmadiyah di Sulawesi Utara dengan bai'atnya 12 orang dimotoi Besar, kabupaten Bolaang mongondow, Sulawesi Utara. Gelombang pertama terdiri 12 orang, kemudian menyusul gelombang kedua sebanyak 23 orang bai'at antara tanggal 11 Agustus 1949 sampai 2 Februari 1950. Mereka masuk dalam Jemaat setelah disampaikan tabligh beberapa bulan lamanya, ada di antaranya melihat mimpi-mimpi yang menunjukkan kebenaran Imam Mahdi a.s.

Kemudian, Abdul Wahid H.a tiba di Motoboi Besar kurang lebih 3 bulan dan sepulangnya ke Jakarta, beliau mengajak serta 3 pemuda Sulawesi Utara yakni : Mansur A. Kadengkang, Abdul Karim dan Abdul Hanan dengan maksud untuk di sekolahkan pada sekolah Mubaligh di pusat, Rabwah, Pakistan. Dari ketiga pemuda tersebut 952 . perlu dicatat bahwa yang meletakkan batu pertama pendirian mesjid Jemaat Ahmadiyah Cabang Kotamobagu adalh Malik Aziz Ahmad Khan. Pada Oktober 1961 tiba M. Mansur Ahmad sebagai utusan tetap dari pusat dan masih tetap tinggal hingga sekarang. Berpuluh-puluh orang telah bai'at di tangan beliau.

Perlu pula diketahui bahwa kini di Manado, Ibukota Propinsi Sulawesi utara telah berdiri pula Cabang Jemaat Ahmadiyah di bawah asuhan Ahmad Dimiyati dan telah beberapa orang baiat.

Selainnya, disebelah Barat kota Manado (l.k. 400 km dari Manado) dan l.k. 200 km dari Motoboi Besar, pesisir Utara bagian Barat Kabupaten Bolaang Mongondow juga telah bai'at beberapa orang antaranya, Ahmad L. Pontoh dan L. Agas Pontoh keduanya adalah saudara kandung H.S. Yahya Pontoh. Mereka giat bertabligh dan mengarapkan kedatangan mubaligh di daerah ini.

E. KONGRES

Data dikutip dari Ali Muhkayat, MS (1999) Kongres yang dilakukan tahun antara 1940-1960 anantara lain :

1. Kongres di Jakarta tahun 1946 berlangsung dari tanggal 9-11 Desember 1946.
2. Kongres di Yogyakarta tahun 1947
3. Kongres I di Jakarta tahun 1949
4. Kongres II di Bandung tahun 1950
5. Kongres IV di Bogor tahun 1953
6. Kongres V di Surabaya tahun 1954
7. Kongres VII di Jakarta tahun 1955
8. Kongres VIII di Jakarta tahun 1956
9. Kongres IX di Garut tahun 1958

F. Tahun 1960 – 1980 : Perluasan hingga ke Pelosok Desa

1. Jemaat Ahmadiyah Cabang Sadasari

Pada waktu Ny. Sujinah, anggota Lajnah Imaillah Manislor pindah ke desa Sadasari Majalengka, disini telah ada beberapa

Ahmadi di terutama yang mendapat pelajaran dari Manislor. Meskipun mendapat tantangan dari masyarakat sekeliling bahkan dari sanak saudaranya sendiri, kaum Ahmadi ini dibantu oleh Nasuhi dan H. Basyari Hasan terus dengan giat melakukan tabligh secara perlahan – lahan kepada kaum bapak dan kaum ibu yang mendengarkan pengajian yang diadakan.

Ny. Sujinah ikut bertabligh pula kepada kaum ibu di sini. Anggota yang pertama baiat ialah Ny. Sutimah Kasim, Ny. Supimah Jarkoni, Ny. Saemah Halumi, Ny. Nuriah Usup.

Sekitar tahun 1960 M/1339 HS terbentuklah ranting Sadasari yang bernaung di bawah Lajnah Imaillah cabang Manislor. Pada waktu itu anggotanya telah bertambah 7 orang yang baru baiat yaitu Ny. Sumanah, Ny. Aminah, Ny. Iyoh Narwiyah, Ny. Miah, Ny. Satmah, Ny. Sinar dan Ny. Rodiah. Kegiatannya belum terorganisir secara rapih, namun dalam setiap pekerjaan selalu diselesaikan secara gotong – royong dan selain itu mengikuti pula kegiatan dan pengajian yang diadakan oleh cabang setempat.

Pada 1967, diketuai oleh Ny. Salioh dibantu oleh Ny. Onong sebagai Sekretaris Khas/Muhasib. Pada tahun 1973 Lajnah Imaillah ranting Sadasari diresmikan menjadi cabang dengan ketua Ny. Sinar.

Kegiatan sesudah menjadi cabang lebih teratur, antara lain muawwanah, pengajian khusus Lajnah Imaillah di pimpin oleh Didik dan Sufni, selain mengadakan kegiatan khusus mengumpulkan dana-dana yang dianjurkan. Pada perayaan peringatan hari – hari besar Islam yang diadakan bersama-sam dengan kaum bapak, Lajnah membantu menyelenggarakan konsumsinya.

Pendidikan untuk athfal / banath diadakan setiap malam. Jumlah anggota pada waktu itu diresmikan menjadi cabang ada 20 orang, sekarang bertambah menjadi 29 orang. Jabatan ketua pada tahun 1975 hingga 1978 dipegang oleh Ny. Narwiyah.

Kegiatan yang dilaksanakan pada waktu itu selain meneruskan kegiatan terdahulu, Lajnah Imaillah turut gotong royong membangun rumah Missi. Kini Lajnah Imaillah memiliki peralatan untuk penyelenggaraan jamuan.

Pada tanggal 15 – 12 – 1969, Allah SWT menurunkan karunia – Nya di Parakansalak dengan baiatnya seorang ibu yaitu Ny. Jubaedah, yang kemudian pada tahun – tahun berikutnya diikuti oleh ibu-ibu lain, sehingga bula April 1972 berjumlah 10 orang. Pada waktu itu ibu-ibu Lajnah Parakansalak masih menjadi anggota Lajnah Imaillah cabang Sukabumi.

Keadaan Lanjah Imaillah Parakansalak semakin lama semakin kuat dengan bertambahnya ibu-ibu yang bai'at, di antaranya adalah Ny. Juwaeraiah yang baiat pada tanggal 2 Juni 1973; dan pada akhir tahun 1974 tercatat 25 orang ibu yang baiat, sehingga pada akhir bulan Februari jumlah anggota bertambah menjadi 45 orang. maka atas berkat dan rahmat Allah Allah SWT, pada tanggal 13 April 1975 berdirilah Lajnah Imaillah Parakansalak, dengan diketuai oleh Ny. Juju Juwaeriaiah.

Pada tanggal 24 Maret 1974, Lajnah Imaillah ranting Parakansalak mengirimkan 2 orang wakilnya untuk menghadiri ramah tamah yang diadakan LI cabang Bogor, yang acaranya antara lain ceramah tentang pendidikan anak-anak dalam Islam oleh Ny. Nurul nisak Sumarlo dan Jasa-jasa Rasulluloh s.a.w terhadap kaum wanita oleh Ny. Siti Hasanah Rasli (alm) dan acara tanya-jawab yang mengundang ibu-ibu ghair yang hadir pada waktu itu.

Pada bulan April 1975, wakil dari ranting Parakansalak diutus oleh LI cabang Sukabumi untuk menghadiri Ijtima LI bertempat di Mesjid Hidayah jalan Balikpapan, Jakarta. Pada Ijtima tersebut, LI Parakansalak turut serta dalam semua kegiatan dan perlombaan yang diadakan

Kegiatan dalam bidang tabligh masih terus dilakukan oleh ibu-ibu meskipun ada rintangan dan hinaan dari orang-orang yang

membenci Ahmadiyah; perkembangan anggota tetap meningkat, sehingga pada akhir tahun 1975 jumlah anggota LI tercatat 49 orang berusaha 16 tahun menjadi Lajnah, maka jumlah anggota bertambah menjadi 73 orang.

Dalam bidang Tarbiyah, ibu-ibu Lajnah Parakansalak tidak mau ketinggalan. Mereka senantiasa mengikuti shalat berjamaah, terutama Maghrib, Isya dan Shubuh, juga Tahajjud. Setiap malam diadakan dars Al Quran yang mula-mula dilakukan di mesjid umum, namun setelah orang-orang mengetahui bahwa mereka dari Ahmadiyah, mereka dilarang oleh ketua mesjid untuk ikut mengadakan kegiatan di sana. Untunglah Haji Mahpudin menyediakan rumahnya yang luas untuk dipakai oleh Jemaat dalam melaksanakan ibadah berjamaah dan pengajian. Di sini pun tidak berlangsung lama karena orang – orang yang membenci Jemaat masih tetap memfitnah dan menghasut masyarakat dan menuntut supaya pindah dari rumah tersebut. Dari rumah itu, tempat ibadah pindah ke rumah Jajun (bekas ketua cabang Leuwimanggu) selama beberapa bulan dan kemudian pindah lagi ke rumah Ibu Juju Juwaeriah; rumah ini tidak dapat menampung anggota yang semakin banyak, sehingga semua ruangan termasuk dapur terpaksa dipakai untuk shalat berjamaah.

Sejak kebutuhan masjid semakin terasa, mulailah para anggota mengumpulkan dana. Dalam waktu kurang lebih 4 hari saja, mesjid berukuran 4 x 8 meter itu telah berdiri dan telah mulai dipakai sejak baru dipasang atap dan lantainya dari papan dan bambu. Medjid ini hidup sehingga menimbulkan rasa benci dan iri dengan menyebarkan hasutan dan fitnahan kepada orang Ahmadi, di antaranya terdapat seorang kyai yang selalu mencaci habis-habisan di muka umum, ternyata akhirnya malah tidak dihormati dan tidak dihargai lagi di masyarakat karena kelakuannya yang amoral. Maka benarlah yang telah difirmankan kepada Rasul _ Nya, Imam Mahdi a.s “Sesungguhnya aku akan menghinakan orang –orang yang

menghinakan engkau ...” karena hasutan dan fitnahan tidak berhasil melenyapkan Jemaat Illahi ini, merka dengan penuh kebencian mulai melempari mesjid dengan batu tepat setelah para Jemaat selesai sholat Terawaih pada tanggal 27 Ramadhan 1395 H. Keadaan mesjid yang rusak dan sudah terasa sempit dengan bertambahnya anggota, mengguagah para anggota untuk mambangun mesjid yang lebih baik dan lebih besar. Dengan pengorbanan para anggota Jemaat dan ...

2. Jemaat Ahmadiyah Cabang Tawangmangu

Tawangmangu adalah kota peistirahatan, di atas kota Solo di kaki gunung Lawu. Penduduknya yang asli banyak yang tidak beragama secara jelas atau animis, tetapi banyak juga yang memeluk agama Islam maupun Kristen, setelah berbaur dengan pendatang baru.

Di salah satu desa yang bernama desa Kalisoro, konon ada sebuah langgar di mana warga desa mengadakan sembahyang Jum’at, dan diadakan pelajaran mangaji oleh salah seorang guru SD (Sekolah Dasar). Ini terjadi pada pertengahan 1969, ketika banyak anak-anak kecil ikut mengaji di langgar tersebut, antara lain juga anak-anak yang sekarang ini sudah menjadi Lajnah atau Khuddam di Tawangmangu.

Ketika tiba-tiba bapak guru tersebut pindah anak-anak tersebut rajin juga datang ke langgar untuk belajar mengaji sendiri meski tanpa pengasuh.

Hal ini kemudian diketahui oleh Ahmad Sutarno Sarino seorang anggota Brimob yang juga seorang Ahmadi, beliau ini adalah menantu dari Sukanda, seorang Ahmadi lama di Yogyakarta. Beliaulah yang mengajar mengaji, dan mengasuh mereka dengan kasih sayang, yang berjalan sampai satu tahun.

Pada tahun 1970 Hafiz Qudratullah adalah utusan di kota Yogyakarta, yang kemudian oleh Sutarno diperkenalkan kepada anak-anak pengajian. Sebelum kedatangan Hafiz Qudratullah, Sutarno sudah pernah bercerita tentang adanya Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. dan menjelaskan soal Kenabian dan soal Khilafat dalam Ahmadiyah. Hafiz Qudratullah sangat senang, dan anak-anak pun begitu rajin mempelajari ilmu agama dan Al-quran dari beliau. Secara periodik, Hafiz Qudratullah datang ke Tawangmangu untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak pengajian tersebut, sehingga tidak terasa hubungan mereka sebagai orang tua dengan anak rohaninya.

Sementara itu, beberapa saudara Ahmadi di Yogyakarta, baik bapak maupun ibu, ada yang ikut membina mereka. Banyak diantara anak-anak itu masih kecil-kecil, namun ada pula yang hampir dewasa, yang menyatakan ingin baiat kepada Hafiz Qudratullah.

Pada tahun 1972, setelah mendapat nasehat dari Hafiz Qudratullah, yang baiat pada beliau ada 36 orang anak, 30 orang putra dan 6 orang putri. Mereka diizinkan baiat setelah lama mereka menyatakan keinginannya, dan setelah umurnya hampir mencukupi. Khuddam dan nasirat yang kecil-kecil ini, orang tuanya belum Ahmadi, bahkan ghair, yang diantaranya malah memusuhi Islam, sehingga anak-anak yang belum bisa berdiri sendiri ini ada yang mengalami cobaan cukup berat, menurut ukuran anak, dari orang tuanya masing-masing.

Sekitar tahun 1974 Sutarno perintis Jemaat Ahmadiyah di Tawangmangu, pindah tugasnya dan Hafiz Qudratullah pun kemudian pulang meninggalkan Indonesia. Maka keadaan anak-anak pengajian yang kini menjadi Ahmadi seakan-akan kehilangan tempat berlindung. Ada putra-putri Ahmadi yang kemudian dipaksa kawin oleh orang tuanya dengan anak ghair, calon yang ditunjuk oleh orang tuanya. Dengan demikian keadaan anak-anak Ahmadi di Tawangmangu agak mengalami kemunduran, meski setiap bulan

selalu ada khuddam yang ditugaskan oleh Jemaat Yogyakarta untuk mengikuti sembahyang Jum'at di sana, sekaligus untuk melangsungkan hubungan batin antara warga jemaat.

Kadang-kadang ibu-ibu Lajnah cabang Yogyakarta berkumpul ke Tawangmangu untuk menengok mereka, sambil membawakan buku-buku Jemaat dan majalah suara Lajnah secara teratur. Selanjutnya setelah langgar itu diperbaiki oleh kita/ Jemaat, maka sampai kini menjadi langgar yang dipakai untuk kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Tawangmangu.

Sementara pada tahun 1970, putra-putri Ahmadi yang dulu sebagai Nasirat, telah menjadi Lajnah Imaillah dan jumlahnya menjadi meningkat, karena ada lagi putra-putri ghair yang baiat. Mualim Ahmad yang bertugas di Purwokerto, sering ditugaskan untuk membina Jemaat di Tawangmangu.

Pada tanggal 27 Januari 1980 di rumah saudari Naimah telah berkumpul 17 orang Ahmadi yang menghadiri peresmian berdirinya Lajnah Imaillah Tawangmangu. Ibu Nurul Nisak Sumarlo memberikan pengarahan yang penjelasan mengenai organisasi Lajnah Imaillah. Sebenarnya tercatat 30 orang anggota Lajnah Imaillah, namun banyak yang dilarang datang, oleh suami mereka yang ghair atau oleh orang tuanya. Ibu Naimah telah terpilih menjadi ketua Lajnah yang pertama, dibantu pemuda Ahmadi lainnya untuk menjadi pengurus. Uniknya di Tawangmangu, nama anak-anak semanya mendapat tambahan nama Islam yang diberikan oleh Hafiz Qudratullah setelah mereka baiat, seperti Naimah, Fathat, Najmah, Mubariqah, Mariyam, Aziz, Arif, Aslam, Basyir, Nasir dan lain-lainnya.

3. Jemaat Ahmadiyah Cabang Madiun

Dalam sejarah kebangsaan, Madiun cukup dikenal dengan peristiwa pemberontakan Madiun tahun 1948; hal ini mempengaruhi pandangan penduduknya terhadap masalah agama.

Melihat kenyataan ini, sampai sekarang cukup pun hanya sebageian kecil penduduknya yang taat menjalankan agama. Namun demikian di daerah yang gersang agama ini, alhamdulillah sudah tertanam bibit rohani murid-murid Masih Mau'ud a.s. Walaupun jumlahnya hanya sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Madya yang demikian luas dan padat.

Pembawa khabar suka kedatangan Imam Mahdi a.s. yang mula-mula sekali adalah Budi Santoso yang baiat di Semarang melalui Abdullah Hasan. Kemudian khabar suka itu disampaikan kepada teman-temannya dari Hadist, sehingga Imam Harsono menyatakan baiat pada tahun 1971 dengan mengirimkan surat baiat langsung ke Jakarta dan disusul oleh bapak-bapak yang lain dan kaum ibu yaitu Ny. Budi Santoso tahun 1971.

Dengan baiatnya beberapa kaum bapak dan kaum ibu, maka pada bulan November 1971 dibentuklah Jemaat Indonesia ranting Madiun di bawah Jemaat Ahmadiyah Indonesia cabang Surabaya, yang dihadiri oleh Raisut-Tabligh, Mlv. Muhammad Sadiq H.A. alm.

Pembentukan ranting ini diadakan sewaktu pengajian di rumah Ny. Sutomo dengan mengundang tokoh-tokoh organisasi / partai antara lain, dari PSII dan Parmusi. Tokoh-tokoh ini membuat pertanyaan pertama yang maksudnya ingin membelokkan pembicara terhadap masalah politik, namun raisut-tabligh menjawab bahwa Ahmadiyah bukan partai politik.

Bersamaan dengan pembentukan ranting Jemaat Ahmadiyah Madiun, pada tahun 1971, dibentuk pula ranting Madiun yang disponsori oleh Ny. Suciati Diapari Siregar. Susunan pengurus pertama diketuai oleh Ny. Sutomo, dan anggota pada waktu itu berjumlah 10 orang. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengajian mengikuti ibadah shalat Jumat, arisan bulanan dan kewanitaan.

LI ranting Madiun ini bernaung di bawah LI cabang Surabaya yang sering mengadakan peninjauan dan pemnbinan ke ranting Madiun.

Pada tahun 1975 bersamaan pula dengan peresmian Jemaat Ahmadiyah Cabang Madiun diresmikan pula LI ranting Madiun menjadi cabang, diketuai oleh Ny. Edi Hidayat.

4. Jemaat ahmadiyah Cabang Ikatan Saudara

Pada tahun 1949 pada saat itu di Sulawesi Selatan sedang bergejolak pemberontakan gerombolan Kaharmuzakar, maka keluarga besar Abdul Aziz Daeng Patombong yang dipimpin oleh putra beliau Ambok Sakka Daeng Malintak (Almarhum) untuk mencari keamanan dan kedamaian beliau terpaksa meninggalkan kampung halaman (Bone Sulawesi Selatan) menuju ke Riau Sumatera untuk mencari tempat kedamaian yang baru tepatnya di Pulau Kijang. Disanalah beliau membuka lahan pertanian pasang surut dan juga lahan perkebunan kelapa yang membuat kehidupan keluarga cukup makmur dan memberikan harapan cerah lebih kurang 10 tahun. Pada saat anakanak mereka telah besar dan ingin melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi, karena pada saat itu di pulau Kijang hanya ada Sekolah Dasar untuk melanjutkan pendidikannya lebih tinggi harus ke Pekan Baru, Padang atau ke Palembang. Maka pada saat anak Bapak Daeng Pasarak yang bernama Sayuti Aziz Ahmad tamat dari Sekolah Dasar di Sungai Batang ia tidak mau ketinggalan dengan temantemannya yang melanjutkan pendidikan ke Pekan Baru, Padang dan Palembang. Maka Sayuti Aziz Ahmad mendesak orang tuanya agar ia di sekolahkan juga, karena kemauan yang keras dari Sayuti Aziz Ahmad (yang kini Muballigh/Raisuttabligh) dengan berat hati orang tuanya melepaskannya seorang diri dari Riau menuju ke Tanjung Karang Lampung, dan ia pun mendaftar masuk sekolah SMEP, dan di tempat ia bersekolah tidak ada sanak saudara. Setahun kemudian yaitu pada tahun 1959 Almarhum Bpk. Daeng Malintak (Paman) Sayuti Aziz menyusul ke Tanjungkarang Lampung dan membukan lahan pertanian di Tegineneng seluas 100 hektar ± 35 KM dari Tanjungkarang. Pada

mulanya beliau hendak membeli tanah di Haji Mena Natar tetapi tidak jadi karena kurang menyenangkan, maka pada suatu saat beliau bermimpi agar ia membeli tanah yang diapit oleh Jalan Kereta Api dan Jalan Raya dan di sana beliau mendirikan sebuah menara yang dibawahnya terdapat kolam yang bersisi air yang jernih. Di sanalah beliau mendirikan gubuk dan kampung itu diberi nama Ikatan Saudara. Tiga tahun kemudian Kakanda dan adikadik Daeng Malintak menyusul ke Lampung.

6. Jemaat Lampung.

Kira kira pada tahun 1961 di Tanjungkarang sudah ada beberapa keluarga Ahmadi yaitu Bpk.M. Suwono, M. Duntjik T dan Bpk.O. Rosadi yang merupakan perintis Jemaat yang ada di Lampung pada saat itu menjadi Ranting istimewa dibawah bimbingan Bpk. Zaini Dahlan. Anggota Jemaat Lampung tersebar ditempat yang berjauhan dan agak sukar komunikasinya, sehingga harus dibagi dalam kelompok yaitu:

- Kelompok Betung
- Daerah Ikatan Saudara.
- Daerah Tanjungkarang.

Pada tahun 1963 pada saat itu diadakan perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw di Tanjungkarang/Teluk Betung yang pembicara adalah Bpk. Mlv. Zaini Dahlan setelah beliau berbicara, maka pembicara yang kedua Bpk. Daeng Malintak, yang diharapkan dapat menyangkal uraian Bpk. Mlv. Zaini Dahlan karena tidak sama dengan keyakinan mereka pada saat itu. Tetapi kenyataannya Bpk. Daeng Malintak tidak dapat berbuat apa apa, karena yang diuraikan oleh Bpk. Mlv.Zaini Dahlan tersebut. adalah benar dan tidak dapat dibantah karena berdasarkan Alquran dan Hadits, pada saat itu Bpk. Daeng Malintak langsung menghubungi Bpk. Mlv. Zaini Dahlan dan minta bukubuku dan diberikanlah sebuah buku dengan judul Kebenaran Almasih. Buku tersebut beliau pelajari dan bersembunyi

di Hotel selama satu minggu dan tidak pulang kerumah, maka keluargapun merasa gelisah dan menyangka bahwa beliau kawin lagi.

Seminggu kemudian beliau pulang ke Tegineneng dan membawa Bpk. Mlv. Zaini Dahlan ke rumahnya dan di sanalah beliau berdialog dengan leluasa. Setiap uraian/penjelasan yang dikemukakan oleh Bpk. Zaini Dahlan tidak dapat disangkal oleh Bpk. Daeng Malintak, pada malam harinya ia tidak dapat tidur memikirkan halhal luar biasa yang dikemukakan oleh Bpk. Zaini Dahlan, dan baru kali ini ia menemukan uraian ajaran Islam yang hakiki dan luar biasa, sesuai dengan pesan orang tua tua dahulu katanya. Kalau Imam Mahdi datang maka bergabunglah dengan mereka. Dengan penuh keyakinan Beliau pada tengah malam itu juga beliau membangunkan Bpk. Zaini Dahlan dan minta bai'at setelah shalat Istikharah dan saat itulah benih Jemaat mulai bersemi dan bertunas di Kampung Ikatan Saudara.

Tahun 1963 di Ikatan Saudara akan diadakan Perayaan Isra Miraj Nabi Muhammad saw dan telah ditetapkan pembicara adalah Bpk. Daeng Malintak dan pada saat Isra Miraj akan dimulai maka muncullah Bpk. Daeng Malintak dan membawa seorang Tua dan berjenggot putih dan mengenakan jubah, sehingga oleh keluarga Bpk. Daeng Malintak menyangka beliau itu adalah pendeta Kristen. Setelah beliau memberikan ceramah yang begitu menyentuh hati dan perasaan mereka mulai merasa lega dan simpatik dan sekaligus bangga karena telah menemukan orang yang akan menjadi guru mereka yang selama ini mereka cari.

Setelah acara selesai maka salah seorang adik sepupu Daeng Malintak yang bernama Mustafa yang saat itu ia seorang guru ngaji (Ustaz) mulai juga mengadakan perlawanan dengan mengemukakan dalil yang ia miliki untuk mematahkan pendapat Bpk. Zaini Dahlan, tetapi ia tidak mampu, maka mulai pada saat itu mulailah bai'at masal antara lain: Bpk. Abdul Aziz Daeng Patombong, (kakek Bpk.

Mlv. Sayuti Aziz) dan disusul oleh anak dan menantu beliau dan satu keluarga adik beliau. Kemudian disusul pula dengan bai'atnya beberapa keluarga Daeng Patanra Mamase, Daeng Palawa, Daeng Masiseng, Hi Jepu, Daeng Pasabbi dan Daeng Mamase. Pembai'atan masal ini terjadi tgl. 13 Februari 1963.

Pada tahun 1965 ketika itu Bpk. Mlv. Mohammad Ayyub bertugas sebagai Muballigh di Lahat SumSel. Sekalisekali beliau juga datang ke Jemaat Ikatan Saudara Lampung untuk memberikan tarbiyat pada Jemaat yang baru tumbuh itu, ketika beliau melihat bahwa di Kampung Ikatan Saudara ada tiga orang Pemuda yang baru selesai tamat SLTA beliau sangat besar perhatiannya kepada ketiga pemuda tersebut karena melihat keikhlasannya dalam Jemaat. Akhirnya Bpk. Mlv. Mohammad Ayyub menulis surat ke Bpk. Raisuttabligh di Jakarta (ketika itu Bpk. Sayyid Syah Muhammad AlJaelani) agar ketiga Pemuda itu yaitu: Sayuti Aziz, Muh. Mustafa dan Moh. Tahir dikirim ke Rabwah Pakistan untuk memperdalam ilmu agama Islam di Jamiah Ahmadiyah Rabwah Pakistan. Akhirnya permohonan beliau langsung diterima, beberapa bulan kemudian datanglah surat panggilan dari Wakilut Tabshir Rabwah Pakistan atas nama Sayuti Aziz Ahmad, Moh. Mustafa dan Moh. Tahir. Ketika ketiga orang ini siap akan berangkat ke Rabwah Pakistan, tibatiba timbul pemberontakan PKI. Akhirnya keberangkatan ke Rabwah tertundatunda. Bulan Juni 1966 tibatiba ada telegram dari Raisuttabligh Bpk. Mlv. Imamuddin HA yang ditujukan kepada Sayuti Aziz, agar segera berangkat ke Jakarta untuk selanjutnya diberangkatkan ke Rabwah Pakistan bersama tiga orang pemuda dari Jakarta, Zulkifli Lubis dan Lukman Idris Sulaeman dari Medan. Sungguh karunia besar bagi pemuda Sayuti Aziz karena dari antara temannya dua orang di Lampung Ikatan Saudara dia yang terpilih untuk berangkat ke Rabwah, mengingat keuangan Jemaat pada saat itu mengalami kesulitan Devisa tidak bisa beli tiket pesawat ke Luar Negeri. Dan yang memilih langsung nama Sayuti Aziz adalah Bpk

Raisuttabligh sendiri. Akhirnya bulan Juni 1966 seorang Pemuda dari Jemaat Ranting Ikatan Saudara diberangkatkan ke Rabwah Pakistan untuk belajar di Jamiah Ahmadiyah Rabwah Pakistan.

Tahun 1972 Sayuti Aziz menyelesaikan studynya di Jamiah dikirim kembali ke Indonesia sebagai Muballigh, setiba di Indonesia maka Raisuttabligh, Mln. Mohammad Sadiq H.A. pada waktu itu menugaskan Mlv. Sayuti Aziz sebagai Muballigh untuk Propinsi Lampung dan SumBagsel dan berkedudukan di Ikatan Saudara dengan bekerjasama dengan Muballigh Senior Mlnv. Mohammad Ayyub Almarhum yang berkedudukan di Lahat.

Setelah bertugas selama 24 tahun sebagai Muballigh, di beberapa tempat dan wilayah Indonesia, SumbagSel., Jabar, Jateng dan Luar Negeri seperti Philipina, Malaysia dan Singapore serta menjabat Direktur Jamiah berturut-turut selama 10 tahun dari tahun 1985-1995. Maka pada bulan Juni 1996 Maulvi Sayuti Aziz Ahmad, Sy. yang bai'at di Ranting Ikatan Saudara adalah merupakan pemuda Perintis berdirinya Jemaat Ikatan Saudara diangkat oleh Sayyidina Hadhrat Khalifatul Masih ke IV atab menjadi Raisuttabligh Jemaat Ahmadiyah Indonesia SK.No. 13587 Tgl. 18 May 1996.

Dengan diangkatnya Mlv. Sayuti Aziz sebagai Raisuttabligh yang menggantikan Maulana H. Mahmud Ahmad Cheema HA, Sy. Maka beliau merupakan Raisuttabligh Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ke VII selama kurun waktu 75 tahun berdirinya Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Tn. M1n. Rahmat Ali Raisuttabligh I, Tn. Sayyid Shah Muhammad ke II, Min. Imam Muddin HA ke III, Tin. Abu Bakar Ayyub ke IV, Mln. Moh. Sadiq HA ke V, Mln. H.M. Ahmad Cheema ke VI dan Mln. Sayuti Aziz Ahmad, Sy. Ke VII). Dan sekaligus merupakan Raisuttabligh yang ke II dari putra asli bangsa Indonseia. Putra asli bangsa Indonesia yang pertama diangkat menjadi Raisuttabligh Jemaat Indonesia Mlv. Abu Bakar Ayyub H. A. Almarhum dan yang ke II adalah Mlv. Sayuti Aziz Ahmad, Sy. Sampai sekarang. Alhamdulillah Zalika Fadlullahi ya'tihi man

yasyaa'u.

Bpk.bapak Muballigh/Muallim yang pernah bertugas di Jemaat Ikatan saudara: 1). Mln.Zaini Dahlan, 2). Mln.Mohammad Ayyub, 3). M1n. Hasan Tou, 4). M1n. Sayuti Aziz Ahmad, Sy. 5). Mln. Ismail Firdaus, b). Mln. M. Chamdani, 7). Mln. Mian Abdul Hayye HP, 8). Mln. Sufni Zafar Ahmad, Sy., 9). Mln. Munirul Islam, Sy. 10). Mln. Ahmad Nurdin, 11). Mlm. Edi Abdul Hadi, 12). Mln. Kamran Tarigan. (Penjelasan Bpk. Raisuttabligh di Kemang Bogor April 2000).

Perintis Lajnah Imaillah di Ikatan Saudara antara lain

- Ny. Zainab Daeng Mawakka (Ibu Bpk. Mlv. Sayuti Aziz).
- Ny. Munawarrah Daeng Mawelong.
- Ny. Hadirah Daeng Tanete.
- Ny. Harisa Daeng Masenang.
- Ny. Haramang Daeng Matengge.

Setelah adanya bai'at masal di Ikatan Saudara, diusulkan oleh tiga keluarga yang ada di Tanjungkarang untuk membentuk Cabang Jemaat Ahmadiyah dengan nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Lampung pada tahun 1963. Pada tahun 1968 barulah Lajnah Imaillah dibentuk dan sebagian besar anggotanya dan pengurusnya berdomisili di Ikatan Saudara, sehingga kegiatankegiatan diadakan di Ikatan Saudara meskipun demikian kemajuan yang dicapai belum begitu kelihatan, namun kegiatan dapat berjalan dengan baik disebabkan keuangan yang lancar yang diperoleh dari iuran uang perelek, sehingga dapat membeli alatalat Inventaris dan perlengkapan Masjid. Pada tahun itu juga atas anjuran Ketua Jemaat Ahmadiyah Lampung Bpk.Daeng Malintak dibentuklah badanbadan Jemaat seperti MKAI yang diketuai oleh Bpk. Rahmat AB, Ibu Ketua Lajnahnya ialah oleh Ny.Harisa Daeng Malintak. Pada tahun 1969 anggota LI Cabang Lampung bertambah dengan datangnya Keluarga Bpk. Udund Abdullah. Kedatangan Ny. Soleha

M. Muchtar (Alm) dan Ny. Lomrah Undun Abdullah, dengan segala semangat memberikan bimbingan kepada Ibuibu Ikatan Saudara dan Teluk Betung dibantu Ny. Hidurah yang datang dari Cimahi pada tahun 1965 dan membuat kemajuan LI semakin maju dan jumlah anggota LI pada waktu itu 15 orang. Kegiatan pada waktu itu selain sembahyang Juma'at ke Mesjid yang jauh letaknya dan kegiatan pengajian beserta kaum Bapak. Pada tgl. 11121972 dibentuk susunan pengurus LI yang lebih lengkap dengan Ketuaanya Ny. Hayati M. Soewono. Ibuibu yang tergabung dalam LI Cabang Lampung dibagi dalam 4 daerah domisili yaitu:

1. Kodya terdiri atas Tanjungkarang, Telukbetung dan Gunung Sula (Kedaton) yang letaknya 5 KM dari Tanjungkarang.
2. Ikatan Saudara 35 KM dari Tanjungkarang.
3. Talang Jemaat yang terletak di puncak gunung hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki selama satu hari.
4. Sidomulyo kirakira 3 jam perjalanan dengan mobil dan beberapa KM lagi dengan jalan kaki. Berhubung tempat tinggal yang berjauhan, maka kegiatan didaerah domisili masingmasing. Tercatat dikota Madya diadakan Muawanah dengan bertempat di rumahrumah anggota secara bergiliran yang bertujuan selain menambah pengetahuan tentang agama dan kejemaatan juga mempererat tali persaudaraan.

Kongres selama tahun 1960 - 1980

1. Kongres XI di Bandung tahun 1960
2. Kongres XII di Purwokerto tahun 1961
3. Kongres XIII di Bogor tahun 1962
4. Kongres XIV di Bandung tahun 19643
5. Kongres XV di Surabaya tahun 1964

6. Kongres XVI di Singabarang tahun 1965
7. Kongres XVII di Singaparna tahun 1966
8. Majelis Musyawarah XVIII di Bandung tahun 1967
9. Majelis Musyawarah XIX di Garut tahun 1968
10. Majelis Musyawarah XX di Semarang tahun 1969
11. Majelis Musyawarah XXI di Sukabumi tahun 1970
12. Majelis Musyawarah XXII di Bogor tahun 1972
13. Majelis Musyawarah XXIII di Surabaya tahun 1973
14. Majelis Musyawarah XXIV di Jakarta tahun 1975
15. Majelis Musyawarah XXV di Jakarta tahun 1976
16. Majelis Musyawarah XXVI di Jakarta tahun 1977
17. Majelis Musyawarah XXVII di Lampung tahun 1978
18. Majelis Musyawarah XXVIII di Padang tahun 1979
19. Majelis Musyawarah XXIX di Denpasar tahun 1980

G. Tahun 1980-2000 : Menebar Perbedaan, Menuai Konflik

1. Jemaat Ahmadiyah Cabang Bengkulu

Pada tahun 1976 di Bengkulu telah ada anggota Jemaat Ahmadiyah pindahan dari Padang, yakni keluarga Moch. Nafis. Kemudian, tahun 1983 keluarga R. Soewignyo KRT, datang dari Kebumen, Jawa Tengah serta anggota perorangan lainnya

Kegiatan Jemaat pada waktu itu dilaksanakan dari rumah ke rumah anggota seperti kegiatan shalat Jumat berjamaah pengajian dan pertemuan lainnya secara bergiliran.

Bapak Moch. Nafis sebelumnya (sejak pensiun dari pegawai negeri di Padang) beliau berdomisili di Muko-muko Utara lebih kurang 260 km dari Bengkulu dengan gigih beliau berdakwah menyebarkan Jemaat Ahmadiyah ini dan beliau berhasil

membai'atkan beberapa orang disekitar Muko-muko, akan tetapi yang bai'at tersebut belum mendapatkan kemajuan rohani. Beliau bercita-cita akan mendirikan masjid di Muko-muko, akan tetapi selalu mendapatkan hambatan, tidak diizinkan oleh pemerintah setempat karena Jemaat Ahmadiyah tidak bisa diterima oleh masyarakat setempat. Dari keturuan Bapak Moch Nafis, yaitu Bapak Syamsir Alam yang kebetulan pindah tugas selaku pegawai negeri ke Bengkulu tepatnya di kecamatan Pondok Kalapa dan beliau tinggal di Pekik Nyaring. Sejak itu pulalah Bpk. Moch Nafis sering berkunjung ke tempat anaknya dan juga sambil berobat di Bengkulu, beliau selalu mencari informasi kalau ada anggota Jemaat di Bengkulu. Maka bertemulah dua keluarga yaitu keluarga Moch Nafis dan keluarga Bpk. R. Soewignyo KRT.

Dari saling mencari informasi anggota Jemaat di Bengkulu maka tahun 1988 tepatnya tanggal 28 September 1988 anggota Jemaat mengadakan pertemuan di rumah Sofyan Larmardi SH. Pertemuan di hadiri sejumlah 10 orang dan pada saat itu dihadiri Bapak Ir. Ahmad Qayum dari PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Pertemuan tersebut berhasil membentuk Kelompok Jemaat Bengkulu dan akhirnya pada tahun 1990 mendapatkan SK Pengesahan dari PB Pusat No. 004 / SK / 90 dan kepengurusan periode 1989-1992. Kepengurusan tersebut sebagai Ketua adalah Bpk. R. Soewignyo KRT.

Dari fase keanggotaan ini juga dirintis berdirinya masjid di Bengkulu, dari cita-cita Bapak Moch Nafis Muko-Muko yang ingin mendirikan masjid belum dapat terealisasi, hingga akhirnya beliau lebih dahulu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Beliau meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1991 di kediaman anaknya di Pekik Nyaring Bengkulu. Sebelum beliau meninggal dunia telah membeli sebidang tanah yang terletak di gang asam Sungai Hitam (sekarang ini masjid lebih kurang seluas 420 m² dan telah diwakafkan untuk pembangunan masjid tersebut. Pada waktu meninggal dunia,

anak-anak almarhum sejumlah 6 orang pulang dan berkumpul di Bengkulu. Setelah beberapa hari dikebumikan, ibu dan sejumlah anaknya bermusyawarah untuk meneruskan cita-cita almarhum mendirikan masjid. Dari hasil musyawarah tersebut ibu dan, anak-anak dan cucu-cucunya serta anggota linannya mengumpulkan dana dan terkumpul dana awal sejumlah Rp 3.600.000,- dan akan dilunasi selama 6 bulan terhitung bulan Februari 1991, perjanjian ini disaksikan oleh Bpk Ketua Kelompok dan Bpk . Ahmad Nuruddin Muballigh Lubuk Linggau. Bulan Maret 1991 dimulailah perletakan batu pertama pembangunan masjid Mubarak yang dilakukan oleh Amir wilayah Sumatra bagian Selatan serta muballigh dari Lubuk Linggau, Ahmad Nuruddin dan diikuti oleh pengurus Jemaat Bengkulu, masjid ini oleh Huzur diberi nama Masjid Mubarak. Dan pada tanggal 27 September 1991 Masjid tersebut mulai dimanfaatkan dan diresmikan pemakaiannya oleh H. Mahmud Cheema HA dari PB Nasional.

Setiap tahun masjid ini disempurnakan dan dikembangkan secara gotong-royong dan juga bantuan dari Pengurus Besar Nasional, penyandang dana terbesar dari Ibu Hj. Saridah Nafis. Sehingga sekarang telah dibangun teras masjid, ruang administrasi, gedung serba guna dan juga telah ada rumah misi.

Tahun 1992 dari kelompok jemaat Ahmadiyah Bengkulu menjadi cabang. Hasil musyawarah pada tanggal 2 februari tahun 1991 telah menghasilkan kesepakatan pemilihan Pengurus Cabang . Maka sesuai surat Keputusan PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia No. 008/SK/92 tanggal 26 Februari 1992 tentang Pengesahan berdirinya Jemaat Ahmadiyah Indonesia cabang Bengkulu (No. 152) dan susunan pengurus 1992 s/d 1995, sebagai Ketua Cabang adalah Bp. R. Soewigyo KRT. Adapun jumlah anggota Jemaat keseluruhan 47 orang termasuk anak-anak. Mu'allim yang pertama di Bengkulu tahun 1992 s/d 1997 adalah Bapak Shagir Ahmad.

Kepengurusan periode 1995 s/d 1998 sebagai ketua adalah tetap. R. Soewigyo KRT. Tahun 1998 diadakan musyawarah Pengurus Periode 1998 – 2001. Terpilih selaku ketua cabang adalah Sdr. Mulyadi, BA. Jumlah anggota Jemaat seluruhnya lebih kurang 96 orang. Mu'allim yang bertugas akhir tahun 1998 adalah Ridwan Ahmad

2. Jemaat Ahmadiyah Cabang Cimayang

Cimayang adalah sebuah kampung yang terletak di Kelurahan Cimayang Kec. Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini dibatasi Kali Cimayang. Di kampung ini ada seorang tokoh Jemaat, Ali dari Cisolada. Setelah anak-anaknya dewasa, yaitu Sairan Armuja, Usup (Yusup) mempunyai istri, maka Yusup menjadi penerus orang tuanya.

Armuja, Yusup beserta anaknya membangun mesjid. Setelah berdirinya mesjid banyak masalah dari kalangan ghair Ahmadi. Tetapi setelah semua masalah, baik cacikan dari ghair Ahmadi di jawab semua. Maka cacikan itu menjadi sepi. Tanggal 15 Mei 1975 berdirilah Ranting yaitu dijadikan Ranting Cimayang, yang beranggotakan 11 orang, dengan ketua ranting waktu itu Yusuf.

Permasalahan setelah menjadi ranting, para ulama mengadakan pengajian tiga serangkai yaitu ulama kecamatan, ulama kelurahan merespon berkembangnya Ahmadiyah di Cimayang. Bahkan ranting ini akan diserbu, tetapi pertolongan dari Allah SWT datang, yaitu ada salah seorang ulama menyuruh kepada anak buahnya jangan dulu menyerbu."Sekarang begini," kata ulama tersebut. "Sebelum menyerbu, saya dulu masuk", katanya. "Kalau saya menang, boleh serbu tapi kalau saya kalah debat, jangan diserbu. Soalnya saya kenal baik Pak Yusuf tokohnya". Ulama tersebut namanya Bahrudin. Akhirnya ulama Bahrudin ini datang ke Ranting Cimayang dan mengadakan debat masalah dengan Ketua Ranting. Akhirnya ulama Bahrudin kalah / menyerah, maka langsung dia mereda, akhirnya anak buahnya tidak jadi menyerbu.

Pada waktu itu seorang ghair Ahmadi, Idup kenalan Yusuf mengadakan pengajian. Dan meminta supaya penceramah dari pihak Ahmadiyah. Yusup menyanggupinya. Kebetulan pada waktu itu yang ceramah yaitu. Hafiz Qudratullah, dan Entoy atas panggilan ketua ranting. Pengajian berjalan lancar dan tanggapan sangat baik dari masyarakat. Dan pada tahun 1982 maka berdirilah cabang. dari anggota 11 orang, sekarang menjadi 68 orang

3. Jemaat Ahmadiyah Cabang Madukara

Secara kronologis keberadaan dan perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Desa Limbangan Kecamatan Madukara dapat diuraikan sebagai berikut: Desa Limbangan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo. Jemaat Ahmadiyah masuk di Desa Limbangan pada tahun 1957 yang dibawah oleh seorang ibu bernama Sukinah, pada tahun 1964 telah ada tambahan anggota dari keluarga Ibu Sukinah.

Pada tahun 1966 berdiri Ranting Jam'at yang ikut cabang Bawang (Krucil) saat ini, dengan ketuanya Sugiono. Pada pendirian Ranting tersebut dihadiri oleh Muspika Kecamatan Madukara dan Mubaligh Ahmad Rusdi dan sebelumnya anggota sering mendapat pembinaan dari Mubaligh Saleh An Nahdi

Tahun 1969 Mubaligh Hasan Tau sering mengadakan pembinaan di Limbangan. Dan pada tahun ini pula Sujadi Malangyuda anggota pengurus Besar datang ke Limbangan dalam rangka kunjungan ke MUSPIDA. Tahun 1968 Jemaat bersama masyarakat mendirikan musholla di RT . 03 RW I, (saat ini sudah tidak ada). Setelah pendirian Mushola tersebut pengajian dan shalat mulai diajarkan kepada masyarakat yang dibantu khudam dari krucil diantaranya bernama Suripto. Tahun 1970 Jemaat Limbangan mendapatkan tambahan anggota dari keluarga Bapak Nurjaman yang hijrah dari Krucil. Tahun 1973 Jemaat Limbangan sudah ada 10 anggota terdiri

dari 4 KK. Kartasuwirya dan Raji Ahmad adalah orang Limbangan asli yang pertama baiat. Pada tahun 1980 Jemaat berhasil membeli sebidang tanah dan didirikan sebuah masjid bernama "NURUL HAQ". Tahun 1983 secara resmi berdiri cabang Jemaat Limbangan dengan ketua Suripto HS. Sejak berdiri sampai akhir tahun 1991 Jemaat mengalami masa sulit untuk berkembang, namun pada akhir tahun 1991 Jemaat Limbangan di ganti dengan nama Cabang Madukara. Hingga akhir Agustus 1993 Jama'at Madukara mengalami perkembangan pesat dengan jumlah 818 orang tersebar di 6 Kecamatan (12 kelompok).

4. Jemaat Ahmadiyah Cabang Mataram

Sebelum tahun 1960 deretan pulau-pulau mulai dari pulau Bali terus ke timur sampai kepulauan Timor disebut kepulauan Sunda Kecil atau Kepulauan Nusa Tenggara, dengan itu kotanya Singaraja. Tahun 1960 Jemaat Ahmadiyah telah menugaskan seorang mubaligh di Kota Singaraja, yaitu Mlv. Abdul Hayye H.P Tahun 1960 Kepulauan ini dibagi menjadi propinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Mataram. Pulau-pulau lainnya menjadi Nusa Tenggara Timur dan Timor-timur dengan ibukota Kupang dan Dili. Pada masa ini seorang anggota Konstituante asal Taliwang Sumbawa telah disebut menjadi anggota Jemat Ahmadiyah begitu pula. M. Jafar dari Singaraja yang bertugas di Kantor Pendidikan masyarakat Mataram telah mengenal Ahmadiyah dari Mlv Abdul HP. Di Singaraja. Dari kedua orang ini belum tampak perkembangan Ahmadiyah di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 1960 akhir, seorang L.I muda asal Garut, putri R. Suma Praja bernama Siti Aminah mendapat tugas sebagai bidan di R.S.U Mataram. Perkenalannya dengan teman sejawatnya seorang pemuda Hindu bernama I.Wayan Rupa. Dapat digait baiat masuk silsilah Ahmadiyah di tangan Mlv Abdul Wahid, HA. Bulan Desember 1961. Tahun 1962 mereka menikah dan kembali bertugas

di Kota Mataram. Bapak R. Sumapraja beberapa kali berkunjung ke Mataram dan ketika Dokter Ahmad dari Garut bertugas di Rumah Sakit Kemal Hikma di Ampenan, mulailah mereka berkumpul di Jl. Jambu No. 24 Mataram, dan dibentuk Jema'at Ahmadiyah Ranting Mataram yang oleh P.B. dijadikan Ranting berdiri sendiri langsung diawasi P.B. Jakarta Pusat.

Tahun 1967, Bapak Presiden Suharto memberi hadiah kepada seratus orang untuk menunaikan ibadah haji, termasuk kepada I. Wayan Rupa. Ketika selesai menunaikan ibadah haji, I Wayan Rupa yang mendapat nama baru Haji Ahmad Iwan Darmawan, mendapat mimpi kedatangan seorang malaikat yang menyampaikan salam dari Rasulullah SAW. Tahun 1968 setelah menghadiri Jalsah Salanah di Jl. Ciledug, Garut, ia pergi ke Kantor Pengurus Besar di di Jl. Balikpapan I./10 Jakarta. untuk mendapat seorang muballigh yang sesuai dengan kondisi masyarakat Lombok. Raisut – tabligh memilih Mlv. Ahmad Nurudin. Ketika dipertemukan H.A Iwan Darmawan terperanjat, karena ternyata Mlv. Ahmad Nurudin sudah dikenalnya melalui mimpi, yaitu ketika mendapat mimpi di Mekah, malaikat itu yang tadinya badannya tinggi sampai ke awan berubah menjadi orang tua yang ternyata persis seperti Ahmad Nuruddin. Dengan perasaan mantap dibawah Ahmad Nurudin ke Mataram. Dengan usaha tabligh beliau, Ahmadiyah mulai menghangat di Mataram dan sekitarnya. Pertemuan dengan beberapa pemuka agama terjadi, termasuk diskusi dengan beberapa dosen I.A.I.N Sunan Ampel Mataram, langsung beberapa kali dengan baik. Hari raya Idul Fitri 1970, Baiat 18 orang antara lain M.Jafar, Nuruddin asal Dompu, Zakaria asal Sumbawa, tokoh Tarekat Naksabandi dengan dua saudaranya asal Banjar dan lain-lain. Oleh P.B. Jemaat Ahmadiyah Mataram di jadikan Cabang nomor 51. Lalu Masta asal Lombok Timur mengambil cuti beberapa bulan dari kuliahnya di Yogyakarta. Dia aktif bertabligh kepada keluarga serta kenalannya

antara lain di Selong bai'at satu pasang suami istri, ke desa Motongsari, ke Sukamulia dan di kampungnya sendiri Suralaga. Pada kunjungan Mlv. Moh Sadiq H.A. dilaksanakan satu tabligh akbar bertempat di halaman rumahnya yang luas dengan dihadiri ghair beberapa orang. Dari tabligh ini membuahkan bai'atnya Azhar dan beberapa saudaranya yaitu putra tokoh NU. Tuan Guru Izzudin. Ditambah kemudian dengan bai'atnya anggota pengajian *Asmaul Husna* sebanyak 40 orang dan di Poncor dibentuk Jemaat Ahmadiyah Ranting Poncor.

Tahun 1973 Ahmad Nurudin kesehatannya mulai terganggu, beliau kembali ke Jakarta, dan diganti Mlv. Hasan Basri Sy., yang baru menyelesaikan pendidikan di Rabwah. Beliau membina Mataram dan Pancor. Tahun 1976 Ibu Hajah Siti Aminah meninggal dan H.A. Iwan Darmawan sekeluarga pindah ke Denpasar. Disusul dengan kepindahan anggota lainnya sehingga di Mataram tinggal keluarga M. Jafar saja dan meraka bergabung dengan Cabang Pancor yang dipimpin oleh Saleh Ahmadi. Tahun 1986, D. Kustiaman dan keluarga pindah ke Mataram dan cabang Mataram dibina kembali. Tahun 1988 H.A Iwan Darmawan dengan sepuluh orang keluarganya kembali ke Mataram. Sholat di di rumah anggota yang beralamat di Jl. Pariwisata, kemudian digugat Kepala Lingkungan H. Imran, lalu dipindahkan ke rumah H.A Iwan Darmawan di Jl. Banteng No 23 Mataram, dengan karunia Allah berjalan aman selama ± dua tahun.

Dengan dialihkannya tempat tinggal Mlv. Kamaruddin SY. Dari Pancor Jl. Surayani gang Panda IV No.28 Tahun 1990 pada kunjungan Wakil tabsir Mlv. Muchtar, Amir Ir. Ahmad Lubis menyerahkan *grant* untuk pembangunan masjid di samping rumah misi. Tahun 1993 oleh Mlv. Kamaruddin Sy. mendapat tugas di Surabaya dan digantikan markas wilayah delapan yang meliputi wilayah Bali, NTB, NTT dan Timur – Timor dibawa pimpinan mubaligh wilayah dengan Mlv. Hasan Basri Sy.

5. Jemaat Ahmadiyah Cabang Banjarnegara

Pada tahun 1960 pembantu Utusan Ahmad Rusdi giat mengadakan pertablighan di daerah Banjarnegara dan tempat kelahirannya dukuh Krucil (lebih kraugn 8 km sebelah barat kota Banjarnegara). Sampai tahun 1960 penduduk Dukuh Krucil kebanyakan adalah anggota PSII. Ahmad Rusydi berusaha mengisi pengajian-pengajian di dukuh itu berisikan ajaran Ahmadiyah, sehingga banyak yang tertarik, pada tanggal 21 Mei 1960 ditempat diadakan tabligh umum yang dihadiri juga oleh M. Abdul Hayye Utasan di Yogyakarta.

Pada tanggal 22 Mei 1960 sebagai hasil dari tabligh umum tersebut telah baiat sebanyak 70 orang. Baiat ini kemudian di susul oleh penduduk lainnya pada waktu-waktu selanjutnya, sehingga dalam tempo yang singkat sekitar 300 orang telah masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah

Sejak tanggal 24 Juni 1960, oleh P.B Jemaat Ahmadiyah Indonesia disahkan menjadi Cabang Banjarnegara. Sementara itu ada beberapa orang Ahmadi yang baiat di kota Banjarnegara keluarga dari Krucil yang pindah ke desa Simbangan, maka dikedua tempat itu didirikan Ranting.

Pada tahun 1961 ketika diadakan Konggres ke XII di Purwokerto, maka tidak sedikit sumbangan anggota Jema'at dari Krucil yang membantu panitia dalam mensukseskan jalannya Konggres tersebut. Pada bulan Juli 1963 Utusan Ahmad Rusydi dipindahkan ke Purwokerto. Pembinaan Jemaat di Cabang Banjarnegara dilaksanakan oleh beliau dari Purwokerto. Sampai tahun 1984 pembinaan terus dilakukan oleh mubaligh yang bertugas di Purwokerto. Pada tahun 1984 ditempatkan Mualim Yahya Sumantri untuk kemudian digantikan oleh Mualim Mughni Aziz Basui.

Untuk pendidikan keagamaan anak-anak, Lajnah Imaillah setempat mendirikan taman kanak-kanak dan Jemaat mendirikan

Madrasah Ibtidaiyah. Pada tahun 1985 telah diselenggarakan KPA Khuddam tingkat Nasional telah dilangsungkan di Krucil.

Pada tahun 1984 dengan adanya peningkatan status Ranting menjadi Cabang. Maka Cabang Banjarnegara dimekarkan menjadi 3 Cabang yaitu Banjar Negara, Krucil dan Limbangan.

6. Jemaat Cimayang, Cibungbulang, Bogor

Cimayanag adalah nama kampung yang terletak di kelurahan Cimayang, Kec. Cibungbulang, Bogor. Sekitar tahun 1970, di Cimayang, bermukim salah satu tokoh Ahmadiyah dari Cisalada, yakni Ali bersama istrinya, dan ketiga anaknya, Sairan, Armuja, dan Yusup. Setelah dewasa ketiga anaknya menjadi tokoh pengembangan Ahmadiyah di Cimayang.

Pada tanggal 15 Mei 1975, didirikan ranting Jemaah Ahmadiyah Cimayang, yang beranggotakan 11 orang. Dengan ketuanya Yusup. Permasalahan pendirian ranting ini, menjadi pemicu konflik dengan masyarakat yang anti Ahmadiyah. Ulama kelurahan, ulama kampung, mereka melakukan provokasi agar Ahmadiyah di Cimayang di bubarkan, bahkan ada isu untuk diserbu. Tahun 1982, Cimayang resmi menjadi cabang, dengan anggota 60 orang.

7. Jemaat Karyasari

Berdasarkan penelusuran terhadap sesepuh yang dapat dipercaya, riwayat Berdirinya Jamaah Ahmadiyah di Karyasari ini dari kejadian terhadap sosok Ahmadi bernama Asy'ari yag bai'at di tahun 1935 di hadapan Maulvi Rahmat All H.A.O.T. kemudian diusir oleh orang tua dan handai tolannya.

Seorang pemuda Asy'ari berpredikat ustadz jebolan Muhammadiyah Jasinga mendapat tugas atasan untuk mendirikan dan mengajar Madrasah Muhammadiyah bersama adik dan 2 temannya di bilangan Puraseda-Cidamar (sekarang Cibirung) dan sekitarnya (1920-1934) dan mempunyai istri di tempat tersebut.

Bagaimana awal mulanya tidak jelas Asy'ari dapat bertemu Mlv. Rahmat Ali sampai bai'at kemudian dihardik, diusir orang tua dan murid-muridnya. Bertepatan hari bai'atnya lahir seorang putra yang langsung oleh Mlv. Rahmat All diberi nama. Sejak Asy'ari menjadi Ahmadi, masih tetap dijuluki ustadz, beliau berkelana menyampaikan tabligh dan tarbiyat di tempat-tempat pemukiman Ahmadi seperti Leuwisadeng, Cisalada, Ciherang, Sindangbarang, Bogor, Jakarta dan Kaliulu/Cikarang. Beliau inilah yang mencetuskan dan mengajarkan kepada anak-anak Ahmadi lagu-lagu tabligh seperti "Khabar Suka, Kami Anak Ahmadi, Partai yang Mulia, dan lain-lain, yang sampai saat ini lagu-lagu tersebut masih lestari di kalangan Ahmadi seperti Cisalada dan Leuwisadeng. Selama pengabdian terhadap Jemaat kawan dekatnya adalah Tuan M. Yaqin Munir Jakaria, Jian (Tangerang), Rd. Gumiwa dan banyak lagi. Sedangkan murid yang terintim di antaranya Tn. Emong soleman dari Leuwisadeng. Pernah mendapat undangan dari Sukabumi dengan ditemani Tuan Ahmad Barzah untuk tabligh mengenai Ketuhanan

Dapat dicatat kemana pun Ustadz ini pergi dalam bertabligh/tarbiyat, apalagi bermukim, putra yang dilahirkan di waktu hari bai'at selalu dibawabawa. Tak pernah ditinggalkan atau dititipkan. Tidak seperti terhadap anak lainnya sering ditinggal dititipkan kepada eyang atau paman.

Operasi tabligh dan tarbiyat waktu itu dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kampung ke kampung lain seperti Cibitung, Cisalada, Leuwisadeng, Ciherang, Sindang barang-Bogor selalu ditempuh dengan jalan kaki. Kalaupun ada hanya dokar, itupun kalau kebetulan yang punya dokar atau kusimya seorang Ahmadi. Pernah tabligh ke Jakarta-Cisalada-Puraseda ditempuh jalan kaki selama tiga hari dua malam dengan menggendong anaknya. Asy'ari wafat tahun 1948 dan dimakamkan di Purasada. Istrinya wafat lebih awal di Jakarta dihadiri Mlv. M. Rahmat Ali, meninggalkan 3 orang

anak yakni 2 laki-laki, 1 perempuan, yang sepeninggal orang tuanya hidupnya/asuhannya berpencah.

Di suatu waktu Mlv. Rahmat All mengajak makan durian di rumah Ketua Jemaat (1950), penulis sempat bertanya, "*Tuan, apa artinya nama yang diberikan kepada saya?*" "*Brigijul !!! Sudah besar tanya he? Bagus! Artinya he, memperbaharui cahaya/ agama. Waktu itu, sambungnya, Asy'ari bapak tuan he, be'at tuan lahir ? Brigijul, bagus!*" seraya tangan kiri beliau mengusap-usap kepala yang bertanya (penulis), suatu kenangan yang tidak mudah terlupakan. Subhanallah. Tak mustahilkiranya peristiwa tersebut ada kaitannya sebagai pematri dari tanaman biji yang puluhan tahun silam pernah dibuang, diabaikan oleh sebagian orang terutama orang tuanya dan murid-muridnya, satu sosok (biji) Asy'ari yang tak dihiraukan kemudian dengan Kebesaran Tuhan muncul tumbuh, hidup kembali nyatanya di Karyasari.

Pada tahun 1970, di desa Karyasari, anggota jemaat memasang fondasi Jemaat Ahmadiyah dengan langkah awal dicobanya warga setempat diajak membuat musholla dan paguyuban kematian. Mulanya gagasan diterima, namun malang tidak dapat ditolak untung tidak dapat diraih, muncullah provokator dari salah seorang tokoh Muhammadiyah, H. M. Nawawi. Pemboikotan menyala merembet sehingga tiada hari tanpa sidang di hadapan RT/RW, bahkan meningkat sampai ke tingkat Intel polsek dan polres.

Berkat komunikasi surat kepada Huzur Khalifatul Masih III ra dan do'a segala persoalan selalu tuntas dengan baik. Perlu diakui, akibat gencarnya pemboikotan salah seorang balita yang dilahirkan oleh salah seorang LI menjadi anak pengecut, takut dan menggigil sambil mengeluarkan keringat dingin bila bertemu orang lain dan menderita kelainan jantung. Atas kenyataan ini binaan terhadap keluarga ditingkatkan sehingga balita tersebut berhasil menjadi terkenal dan puluhan piagam penghargaan diperoleh dari tingkat

Pemda Kabupaten/Kodya bahkan propinsi atau swasta berkat salah satu profesinya yang menonjol. Pengobatan penyakitnya pun memperoleh dana dari Presiden RI selama 4 tahun sampai sembuh.²⁸

Suatu kenyataan, dari balasan surat Huzur bahwa di sisi Allah segala-galanya tidak ada yang sulit. Tiada mustahil sebuah biji yang tadinya dibuang, dicampakkan, namun suatu ketika ternyata tumbuh dan berbuah. Kenyataan dari realisasi itu tanggal 30 Oktober 1995, setelah mendapat musyawarah dengan Muslim Daud Laday (sebelum dimutasikan), Karyasari disahkan oleh PB menjadi Cabang bernomor 188 dengan susunan pengurus pertama sebagai berikut; Ketua : Amzad Noeri, Sekretaris Khas: Saeful Anwar, Sekretaris Maal : Cece Suhendar, Sekretaris Talim D. Ta'limuddin, Sekretaris Tarbiyat : W. Kumiawan dan Sekretaris Tabligh Dadang. Satu tahu kemudian, tepatnya tanggal 03 Januari 1996 dengan dasar izin Kepala Desa didirikanlah masjid. Sewaktu masjid tengah dikerjakan, yakni tanggal 14 Mei 1996, ketua RW atas perintah tokoh agama datang meminta agar pekerjaan jangan diteruskan. Resolusi berupa surat yang ditandatangani oleh 3 orang tokoh agama juga terlampir 26 tanda tangan warga masyarakat (setelah diselidiki, banyak yang dipalsukan.), dikirim juga ke Tripika Kecamatan. Adapun isi resolusi :

Di wilayah tersebut sudah berdiri sebuah Majelis Talim dan 2 buah musholla. (salah satunya atas prakarsa penulis -pen.). Jamaah Ahmadiyah di Karyasari hanya 2 keluarga, yakni Dadang dan Amzad Noeri.

Akidah dan ajaran Ahmadiyah sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang kami pegang teguh. Agar ketertiban dan keamanan tetap stabil. Komentar terhadap point ke-2 resolusi; Mereka memicingkan mata bahwa Amzad Noeri sudah beranak cucu dewasa dan kuat. Insya Allah. Untuk meredakan resolusi, pertama-tama do'a dipanjatkan, kemudian PB dan Tripika dihubungi. Tidak

ketinggalan Ketua MUI Bogor Barat, H. Moh. Isya, yang beliau ini sudah akrab dengan Ahmadiyah clan serine hadif dalam Jalsah Salanah di Demand. Survey oleh yang berwajib pun dilaktikan dan sidang di tingkat kecamatan dilaksanakan, hanya (3 kali sidang) Sang tokoh agama tidak pernah hadir. Kesimpulan atas usdha ketua MIA H. Moh. Isya dan perwakilan dari Koramil ditulislah surat Pernyataan Kepala Desa bahwa Masjid Ahmadiyah di Karyasari boleh diteruskan pembangunannya. Bukan sampai di situ penilaian kepala desa, beliau menyatakan bahwa sosok Ahmadiyah (di Karyasari) belum pernah merugikan bahkan selalu memberi nama harum bagi desa setelah kenyataannya tampak dari tulisan-tulisan mass media ihwal karir Banta Ahmadi yang selalu tampil dalam acara-acara kebesaran/penting di tingkat kabupaten, bahkan propinsi.

Dengan kenyataan ini beberapa orang Ahmadi akhirnya ada yang diangkat menjadi perangkat desa dan salah satunya sebagai Kaur. Fem. Masjid usai dibangun, selain dipergunakan untuk sholat lima waktu dan shalat tahajud. Juga dipakai untuk musyawarah dalam kegiatan Jemaat. Tabligh pun ditingkatkan bukan saja di dalam wilayah sendiri, namun sampai menjangkau ke luar daerah, seperti Parung Panjang, Jakarta, Cibitung bahkan menyeberang ke tanah Lampung atas undangan Tuan Mubwil Sufni Zafar Ahmad, Sy dan alhamdu lillah memperoleh beberapa orang mubayyi'in barn.

Dari rentetan peristiwa serta kejadian yang mudah-mudahan menjadi kelengkapan susunan riwayat berdirinya Jemaat Ahmadiyah Karyasari, dapat diambil hikmahnya sebagaimana Hz. Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih II ra menulis tentang kepribadian dan watak Rasulullah saw; jika is menderita kemalangan atau kesusahan dipikulnya penderitaan itu dengan sabar, dan dengan demikian lagi-lagi is menjadi orang yang meraih rahmat dan berkat Ilahi

28 Majalah MKAI GEMA no.7/Nop 99 hal. 16-18

8. Jemaat Bunta, Luwuk Banggai, Sulawesi Tenggara

Sejarah Jemaat Bunta, dimulai tahun 1982, dimulai dari keluarga transmigran dari Banjarnegara, Jawa Tengah, yakni keluarga Bunasir, keluarga Kusdiyanto, keluarga Kuswari. Bunta merupakan kota kecil, yang berjarak 650 km dari Palu, Sulawesi Tenggara.

Mereka menjadi penduduk transmigrasi yang ditempatkan di Desa Sumber Mulya, Bunta, Kab. Luwuk Banggai, Sulteng. Kemudian tahun 1986, datang keluarga Wartoyo sebanyak 6 jiwa,

Tahun 1989, kelompok ini mulai merintis pembentukan cabang. Terbentuklah susunan kepengurusan yang sederhana, Bunasir sebagai ketua, Kusdiyono, sekretaris khas, Wartoyo, sekretaris Maal, dan Kuswari, sebagai Umur Ammah, dan Yahya Sumantri sebagai Muallim pertama yang ditugaskan ke daerah tersebut.

9. Jemaat Ahmadiyah di Pangol, Piyungan, Yogyakarta

Jemaat Ahmadiyah dikenal oleh masyarakat Pangol melalui Sutomo Alwi Ahmad. Melalui kegiatan yasinan yang diadakan setiap malam Jum'at secara bergilir di rumah warga, Sutono Alwi sering menyampaikan ceramah keagamaan. Dalam waktu 10 kali pertemuan, beberapa warga masuk ke dalam silsilah Ahmadiyah. Pada tanggal 15 Juni 1995, sebanyak 40 orang menyatakan baiat ke dalam Ahmadiyah. Tanggal 4 Juni 2000, jemaat Pangol menjadi Cabang Piyungan. Adapun susunan kepengurusan pertama, yakni :

Ketua	: Sutomo Alwi
Sekr Khas	: Jumadi
Sekr Maal	: Mintardiyamo
Sekr tabligh	: Sarjiyanto

Sekr Tarbiyat	: Kohar
Sekr Dhafat	: Sugeng Widodo
Sekr Um Kh	: Sujarwo
Sekr Is	: Mulyono
Sekr Jaidad	: Samsuri
Sekr Ziroat	: Ponijan

10. Jemaat Ahmadiyah Cikeusik

Gelombang pertablighan yang dicanangkan oleh Khalifah IV, telah memacu gerakan tabligh di semua wilayah Indonesia, termasuk di Pandeglang, Banten, dan Serang. Tercatat nama Mubaligh Khoiruddin Barus, AA Daeng Patundru, Lalu Masta, Mubarik Ahmad, Sholeh, Drh. Anwar Saleh sebagai perintis gerakan pertablighan ke Banten pada tahun 1991. Jemaat Cikeusik menjadi terkenal sejak kejadian Tragedi Cikeusik 6 Februari 2011, yang menewaskan 3 orang warga Ahmadiyah.

Kongres selama tahun 1980 - 2011

1. Majelis Musyawarah XXX di Bandung tahun 1981
2. Majelis Musyawarah XXXI di Selatiga tahun 1982
3. Majelis Musyawarah XXXII di Manislor tahun 1983
4. Majelis Musyawarah XXXIII di Cibubur tahun 1985
5. Majelis Musyawarah XXXIV di Jakarta tahun 1986
6. Majelis Musyawarah XXXV di Parung tahun 1987
7. Majelis Musyawarah XXXVI di Parung tahun 1988
8. Majelis Musyawarah XXXVII di Parung tahun 1989
9. Majelis Musyawarah XXXVIII di Parung tahun 1990
10. Majelis Musyawarah XXXIX di Parung tahun 1991
11. Majelis Musyawarah XL di Parung tahun 1991
12. Majelis Musyawarah XLI di Parung tahun 1992
13. Majelis Musyawarah XLII di Parung tahun 1993

14. Majelis Musyawarah XLIII di Parung tahun 1994
15. Majelis Musyawarah XLIV di Parung tahun 1995
16. Majelis Musyawarah XLV di Parung tahun 1996
17. Majelis Musyawarah XLVI di Parung tahun 1997
18. Majelis Musyawarah XLVII di Parung tahun 1998
19. Majelis Musyawarah XLVIII di Parung tahun 1999
20. Majelis Musyawarah XLIX di Parung tahun 2000
21. Majelis Musyawarah XLX di Parung tahun 2001
22. Majelis Musyawarah XLXI di Parung tahun 2002
23. Majelis Musyawarah XLXII di Parung tahun 2003
24. Majelis Musyawarah XLXIII di Parung tahun 2004
25. Majelis Musyawarah XLX IV di Parung tahun 2005
26. Majelis Musyawarah XLXV di Parung Tahun 2006
27. Saresehan Nasional JAI di Parung Tahun 2007
28. Saresehan Nasional JAI di Parung Tahun 2008
29. Saresehan Nasional JAI di Bali tahun 2009
30. Saresehan Nasional JAI di Bandung tahun 2010
31. Majelis Syura Jai di Garut Tahun 2011

H. Grafik pertumbuhan Jemaat Ahmadiyah dari tahun 1992-2011

Jumlah penambahan pengikut Ahmadiyah 12 tahun terakhir

No	Tahun	Anggota baru
1	1992-1993	5.898
2	1993-1994	7.487
3	1994-1995	8.000
4	1995-1996	6.000
5	1996-1997	17.020
6	1997-1998	41.120

7	1998-1999	25.287
8	1999-2000	20.754
9	2000-2001	10.574
10	2001-2002	4.962
11	2002-2003	1.321
12	2003-2004	1.163
13	2004-2010	5.000

Data : diolah sendiri dari dokument laporan kerja Pengurus Besar JAI

Data di atas menunjukkan selama 19 tahun terakhir telah masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah 154.586 orang. Hingga tahun 2011 ini, Jemaat Indonesia memiliki 298 jemaat lokal (berada pada tingkat kecamatan) di berbagai daerah. Keadaan tersebut, menunjukkan tidak ada alasan bahwa Ahmadiyah gagal diterima di masyarakat Indonesia, karena tiap tahun banyak orang yang masuk ke dalam Ahmadiyah. Tabel di atas menunjukkan gerakan Ahmadiyah yang ekspansif dalam melakukan pertablighan, yakni 12.465,5 orang / tahun, atau 8,33 % / tahun orang masuk ke dalam Ahmadiyah.

I. Seminar seabad buku Filsafat Ajaran Islam

Pada tanggal 17 Februari 1989 di Gedung Graha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta diselenggarakan seminar buku Falsafat Ajaran Islam yang dibawakan oleh 9 orang rektor diantaranya Prof. Dr. Soekamto Resoprodjo, M.Com., Prof. Dr. Zaini Dahlan dan lain-lain

Seminar ini dihadiri oleh kurang lebih 1.000 undangan dari Jemaat Ahmadiyah dan simpatisan. Kegiatan ini diliput oleh mass media lokal dan nasional

J. Seminar Internasional Revitalisasi Persatuan Umat Islam

Pada tanggal 24 Juni 2000 di Gedung Graha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta diselenggarakan Seminar Internasional Revitalisasi Persatuan Umat Islam memasuki era Millinium III.

Sebagai *Keynote Speaker* : Hazrat Mirza Tahir Ahmad Atba dan Pembicara lainnya yakni : Dr. Komaruddin Hidayat, Dr. Munir Mul Khan, Drs. Chabib Chirzin dimoderatori oleh Dr. Fachri Ali dan Prof. Dr. Dawam Rahardjo

Kegiatan ini diliput oleh pers lokal dan nasional seperti, Kedaulatan Rakyat, Solo Pos, Kemudian Indosiar, ANTV, TPI, RCTI, RRI, TVRI, dan MTA. Seminar ini dihadiri oleh kurang lebih 500 tamu undangan yang terdiri dari para rektor, dosen dan pejabat pemerintah se DIY, Jateng dan Jatim. Kemudian kurang lebih 500 para warga Jemaat Ahmadiyah.

K. Kontroversi Teologi yang Tak Mungkin Diselesaikan

Keyakinan Ahmadiyah yang berbeda dengan keyakinan umat Islam pada umumnya, berkaitan dengan 3 hal penting, yakni : Masalah Kewafatan Isa Almasih, Masalah kenabian, Masalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih Al-Maud. Pemahaman tersebut berbeda dengan kaum muslimin pada umumnya, baik di Indonesia maupun belahan dunia lainnya. Berkaitan dengan Nabi Isa yang tertera di dalam Alquran, (antara lain dalam surat Ali Imron, Annisa, Maryam, Al Maidah), umat Islam masih memandangnya secara kontroversial. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Isa as tidak mati di kayu Salib, tetapi disamarkan (QS.4: 157) tetapi juga ada yang menganggap masih hidup di langit (QS.3.55).

Kemudian mengenai kenabian, umat muslim pada umumnya, memahamai Nabi Muhammad sebagai *Khatamannabiyyin*, penutup kenabian untuk jenis apapun. Berkenaan dengan pendakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, umat muslim tidak mempercayainya sebagai nabi, karena bertentangan dengan prinsip khatamannabiyyin dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, masih ada yang mengakui bahwa beliau sebagai mujadid atau reformer pada abad 14, namun sebagian menganggap pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, merupakan pengakuan orang sinting, gila. Oleh karena alasan itulah, sebagian besar umat muslim menganggap Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya merupakan kelompok kafir dan sesat.

Sejauh pengamat terhadap buku-buku Ahmadiyah, ditemukan penjelasan pokok teologi Ahmadiyah. Antara lain, berkaitan dengan konsep ketuhanan, Ahmadiyah memandang bahwa Allah SWT, sampai saat ini hingga akhir jaman, masih bersifat Mutakalimin (berwawancara). Jadi, eksistensi wahyu masih terus berkesinambungan hingga akhir jaman, meskipun khatimussyarai telah terkodifikasi pada al-Quran.

Konsep kenabian yang dipahami oleh Ahmadiyah ternyata pernah dipopulerkan oleh Muhyiddin Ibn'Arabi (1165 - 1240 H/1744-1819 M), yang dikenal dalam dunia sufi sebagai *Syek al-Akbar* (Guru Besar). Ibnu Arabi selama masa hidupnya telah menulis 350 judul buku, beberapa yang terkenal antara lain *Fusus al-Hikam* (1229/627 H), *Futuh al-Makkiyya* (ditulis di Mekah mulai tahun 1202/600 H, selesai tahun 1231/629 H), *Al-Diwan al-Kabir* (1237 /634 H), dan *Tarjuman al-Ashwaq* (ditulis di Mekah tahun 1215 /Ramadan 611 H). *Fusus al-Hikam* ditulis tahun 1229 /627 H) di Damaskus, merupakan karya Ibn Arabi yang menerangkan pengertian dan hakekat dari kenabian menurut Jahudi, Kristen, dan Islam, sedangkan dalam *Futuh al-Makkiyya*, berupa ensiklopedia yang menerangkan tentang tiga pilar dari epistemologi yakni tradisi/sunnah, pemikiran (*reason*) dan pengalaman mistis (*mystical*

insight). Melalui *Futuhat al-Makkiyya* inilah Ibn Arabi menjelaskan konsep *wahdat al-wujud* “*Ana al-haq*” dan *al-insan al-kamil*. Konsep *wahdat al-wujud* Ibn Arabi inilah kemudian mengundang kontroversi yang mendalam di kalangan ulama-ulama sejamannya hingga saat ini.

Ajaran Ibn Arabi demikian, telah mendekonstruksi *pakem* para ulama sejamannya. Hingga saat ini ajaran sufistik Ibn Arabi dianggap sebagai ajaran yang “membahayakan” dan “menyesatkan”. Konsep lain yang tak kalah membahayakan adalah konsep tentang kenabian. Dalam *Fusus al-Hikam* (1229/627 H), Ibn Arabi menjelaskan rahasia kenabian dari seluruh nabiullah, baik yang diakui oleh Jahudi, Kristen, dan Islam. Bagi Ibn Arabi, sejarah kehidupan seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad saw, teruntai ibarat sebuah cincin. Tiap mereka saling memberi kekuatan rohani, yang berpuncak pada “*khataman nabiyiin*” Nabi Muhammad saw. Kekuatan rohani *khataman nabiyiin* Muhammad saw, akan terus memancar kepada penerus kenabian hingga akhir jaman. Jadi, bagi Ibn Arabi, pancaran rohani kenabian Nabi Muhammad saw, akan terus memancar. Ini artinya, pintu kenabian tidak akan tertutup setelah “*khataman nabiyiin*” Muhammad saw. Justru, dalam pandangan Ibn Arabi, kata “*khataman nabiyiin*” menjadi jaminan bahwa kenabian setelah Nabi Muhammad, harus terjadi, kalau tidak, ini artinya pancaran rohani Nabi Muhammad sangat rendah. Padahal, baik lawan maupun kawan, mengakui bahwa pancaran (*qudsiah*) kerohanian Nabi Muhammad saw, sangat tinggi tiada taranya. Ibnu Arabi, memang tidak memberi nama tentang status kenabian paska Muhammad saw. Berdasarkan hal tersebut, saya mencoba menyebut kenabian setelah “*khataman nabiyiin*” yakni “*Tajalliyat Nabiyiin*”, karena kenabian setelah “*khataman nabiyiin*” merupakan nabi penerus misi dari nabi sebelumnya, seperti kedudukan Isa as terhadap Musa as, atau nabi pembantu, seperti halnya Musa as dan Harun as. Nabi yang termasuk “*tajalliyat*” ini

tidak membawa syariat baru (*ghairu tasyrik*), mereka menjalankan syariat yang telah dibawa oleh nabi sebelumnya.

Enam abad kemudian, konsep kenabian tersebut terjadi dalam sejarah Islam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, mengklaim bahwa dirinya adalah *al-Masih al-Maud* (al-Masih yang dijanjikan). Namun, reaksi Islam sangat keras terhadap proklamasi tersebut. Untuk mengetahui penjelasan yang komprehensif tentang konsep “*khataman nabiyiin*” dan “*tajalliyat nabiyiin*” model Ahmadiyah, dapat ditelusuri dari beberapa buku menarik untuk diketahui masyarakat, antara lain : *Ek Ghalathi Ka Izalah* (Memperbaiki suatu kesalahan ditulis tahun 1901), *Khutbah Ilhamiyah*, *Ainul Ma'rifat*, *Tajalli Ilahiyyat*, *Mawahibur Rahman*, *al-Istftaa*.

Penjelasan Ahmadiyah tentang konsep nabi menang khas, yakni terminologi “nabi” yang seakan bertentangan dengan konsep *khataman nabiyiin* (QS.33 : 40). Terminologi ini kemudian menjadi pokok keimanan mereka, sekaligus menjadi penyebab kontroversi selama ini. Dalam pandangan Ahmadiyah, kata “nabi” berasal dari “*nabaa*” artinya “kabar, berita”, jadi secara sederhana “Nabi” merupakan sebutan bagi orang yang membawa kabar, berita dari Tuhan. Untuk mengetahui bahwa seseorang telah ditunjuk sebagai Nabi, maka ia harus menyatakan diri (*proclaimed*) atas mandat-Nya. Sedangkan umat, harus menguji dengan cara melakukan konfirmasi terhadap kitabullah sebelumnya. Kata “*Khatam*” dalam ayat tersebut dirujuk pada salah satu arti, yakni “penutup”, padahal “*khatam*” dalam leksikal Arab memiliki beberapa arti, selain penutup, juga paling sempurna, paling mulia, dan cincin atau cap.

Kontroversi terjadi karena konsep kenabian Ahmadiyah berbeda dengan konsep kenabian Islam arus besar di Indonesia. Bagi Islam arus besar di Indonesia, mengartikan bahwa Nabi adalah seseorang yang ditunjuk Allah untuk menyampaikan amanat Allah dikalangannya sendiri, sedangkan rasul, seseorang yang diperintah Allah untuk menyebarkan amanat-Nya kepada umat. Mereka

berkesimpulan bahwa rasul pasti membawa kitab dan *syariat* secara mandiri (*nabi tasyri wa musthaqil*). Umat Islam memiliki mitos tentang kenabian, yakni Nabi berjumlah 25 orang, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad saw, berdasarkan konsep *Khataman nabiyiin* dalam Q.S (33):40. Konstruksi keimanan ini telah mentradisi di dalam benak Islam arus besar, termasuk di Indonesia. Sedangkan Ahmadiyah membawa pengertian bahwa antara Nabi dan rasul memiliki esensi pengertian yang sama, yakni mereka adalah para pesuruh Allah yang bertugas menyampaikan amanat-Nya kepada umat. Bagi Ahmadiyah, tidak semua nabi membawa *syariat* dan kitab sendiri (*ghairu tasyri wa musthaqil*). Nabi demikian disebut nabi *zhiliy* atau *Buruji, Majazy*, (bayangan), dan *lughawiy* (kenabian tanpa *syariat*). Pengertian demikian dapat diterapkan pada posisi Nabi Harun as. dengan Nabi Musa as. (QS (20):42). Status Nabi Harun merupakan nabi *zhiliy* atau *Buruji, Majazy*, (bayangan), *lughawiy* dan *ghairu tasyri wa musthaqil* bagi Musa as.

Berkaitan dengan hal tersebut, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, menjelaskan dalam bukunya *Haqiiqatul Wahyi*²⁹, sebagai berikut:

“ Sungguh Hazrat Muhammad saw menjadi *khaatamal anbiya*. Akan tetapi dengan arti bahwa pelimpahan ruhani di masa mendatang tidak tanpa pertolongannya. Bahkan dengan makna bahwa pemilik *khaatam* tidak akan memberi berkah pada seorang pun, kecuali dengan karunia *khaatam-nya* (Nabi Muhammad) SAW, dan pintu mukalamah ilahiyy mukhthabah tidak ditutup pada umat ini sampai qiyamat. Dan di sana tidak ada nabi yang memiliki *khaatam*, kecuali beliau SAW. Dan beliau SAW, sendiri yang memungkinkan memberikan suatu kenabian (*Nubuwwat*) dengan karunia *khaatam-nya*, yang harus ada dari umat ini”

Selanjutnya dalam ‘Ainul Makrifat, lebih lanjut Mirza Ghulam Ahmad, menegaskan posisi keimanannya terhadap Nabi Muhammad

29 Dikutip dari Korespondensi tentang Hazrat Murza Ghulam Ahmad antara Prof .I.r. H. Fathurrahman Ahmadi,DJ, M.Sc. dengan Drs. Abd Rozaq, tahun 2000, halaman 23-28

SAW, antara lain dituliskan sebagai berikut :

“*Sesungguhnya saya mengimani kenabian beliau, dengan membenarkan dalam hati. Dan saya mengetahui bahwa kenabian-kenabian (nubuwwat) semuanya sungguh-sungguh telah ditutup (khatimat) di atasnya. Dan syariat beliau merupakan penutup syariat-syariat (khaatimumatusy-Syarra’i) kecuali sesungguhnya di sana ada kenabian (nubuwwah) yang tidak terputus, artinya kenabian yang diberikan dari sumber yang sempurna dan kenabian yang disinari dengan lampunya. Sesungguhnya kenabian itu tidak diputus karena kenabian itu sebenarnya kenabian Muhammadiyah, artinya sebagai bayangan (zhilli) dan kenabian ia ada karena perantarnya, dan dari kenabian itu dilimpahkan*”

Jadi, Ahmadiyah menganggap bahwa kenabian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, tidak bertentangan dengan Alquran karena posisinya seperti status Harun as dalam kenabian Musa as, Mirza Ghulam Ahmad merupakan *zhiliy* atau *Buruji, Majazy*, (bayangan), *lughawiy* dan *ghairu tasyri wa musthaqil* dalam kenabian Muhammad saw.

Pengertian tentang makna kenabian dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tersebut, dijelaskan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, antara lain :

1. nabi *buruzi khaatamin nabiiyyiin*.
“ *wa jaalnii buruzi khaatamin nabiiyyiin wa saidil mursaliin*” (kitab *khutbah Ilhamiyah*,hal 61)
2. nabi diatas *thariqatil Majazi*
Dan saya dinamakan Nabi dari Allah di atas jalan *majaz* bukan di atas wajah yang sebenarnya (Kitab *Al-Istftaa*, halan 72)
3. Nabi *lughawi*
Dan sesungguhnya saya dinamakan Nabi atas lisan sebaik-baiknya manusia, dan itulah perkaranya bayangan dari

berkat-berkat ikutan itu (Kitab *Al-Istftaa*, halaman 71)

4. nabi *Zhili*

“Sesungguhnya saya mengimani kenabian beliau, dengan membenarkan dalam hati. Dan saya mengetahui bahwa kenabian-kenabian (*nubuwwat*) semuanya sungguh-sungguh telah ditutup (*khatimat*) di atasnya. Dan syariat beliau merupakan penutup syariat-syariat (*khaatimumatusy-Syarra'i*) kecuali sesungguhnya di sana ada kenabian (*nubuwwah*) yang tidak terputus, artinya kenabian yang diberikan dari sumber yang sempurna dan kenabian yang disinari dengan lampunya. Sesungguhnya kenabian itu tidak diputus karena kenabian itu sebenarnya kenabian *Muhammadiyah*, artinya sebagai bayangan (*zhilli*) dan kenabian ia ada karena perantarannya, dan dari kenabian itu dilimpahkan (Kitab *Ainul Ma'rifat*, pada *Ruhanaii Khazaa-in* Jilid XXXIII, Additional Naazhirr Isyaat, London, 1984, juz XXIII, halaman 340)

5. Nabi *Ghairu tasyri*

Sungguhnyanya saya diberi kemuliaan ini lantaran saya mengikuti Sayyid Muhammad saw dengan sempurna. Seandainya, saya tidak menjadi umat beliau, saya tidak akan memperoleh kemuliaan mukallah mukhtablah selamanya, walaupun amal-amal saya bagaikan sejumlah gunung-gunung yang ada di dunia ini. Karena kenabian-kenabian (*nubuwwah*) semuanya telah terputus selain *nubuwwah* *Muhammadiyah*, maka tidak mungkin Nabi membawa syariat baru akan datang. Akan tetapi mungkin ada nabi tanpa syariat dengan syariat ia menjadi umat beliau SAW. Maka dalam bentuk inilah saya seorang Nabi dan tergelincir dari umat ini juga (kitab *Tajalli Ilahiyyat*)

6. Nabi *Ghairu musthaqil*

Dan kami maksudkan dengan *khatamun nubuwwah* adalah *khatamnya* kesempurnaan kenabian pada Nabi kita, yaitu

Beliau saw adalah seutama para rasul Allah dan para nabinya, dan Kami berkeyakinan bahwasanya tidak ada Nabi sesudahnya, kecuali Nabi yang berasal dari umat beliau dan karena mengikuti beliau saw dengan sempurna (kitab *Mawahiburrahaman*)

L. Metodologi Tafsir

Sedangkan karakteristik metodologi tafsir Ahmadiyah, apabila didasarkan pada kategorisasi Baidan (2000) yang menyebutkan secara umum, metode tafsir ada 4, yakni *Ijmali* (global), *tahlili* (analitis), *muqarin* (perbandingan), dan *Maudhu'i* (tematik). Dari keempat cara tersebut, masing-masing memberi kontribusi yang kuat terhadap khazanah Alquran. Baidan tidak mengatakan bahwa dari keempat cara tersebut, hanya satu yang benar. Maka, wajar jika para ulama atau *mufassirin* memiliki kekhasan cara menafsirkan. Hal tersebut disebabkan karena latar belakang pengetahuan, kekuatan *qudsiah* individu, tingkat kecerdasan, kondisi sosial yang dihadapinya, serta tingkat kepentingan dari masing-masing. Menilik hal tersebut, Ahmadiyah pun memiliki kekhasan di dalam cara menafsirkan. Sejauh cara tafsir tidak *bi al ra'y al mahdh* (tafsir berdasarkan pemikiran semata), maka metode penafsiran model Ahmadiyah, yang berimplikasi terhadap konsep teologisnya, dapat diterima sebagai khazanah ilmu yang argumentatif dan bertanggungjawab.

Karakter tafsir Ahmadiyah terhadap Alquran, menjadi penting untuk dipahami. Proyek penafsiran Alquran secara sistematis telah dirintis oleh Khalifah II, dengan menghasilkan *Tafsir Khabir*. Dalam tafsir tersebut terdapat 59 surat dari 144 surat yang ditafsirkan. Hasil minor riset tersebut menyebutkan bahwa metode penafsiran Ahmadiyah dikategorikan sebagai tafsir *Tahlili* (analitis) dengan bentuk *Al-Ra'y* (pemikiran). Corak penafsiran yang rasional dan analitis menjadi ciri dari tafsir Ahmadiyah, sehingga banyak tokoh

pergerakan di Indonesia yang menjadikan tafsir Ahmadiyah sebagai rujukan, seperti HOS Cokroaminoto, K.H. Ahmad Dahlan, Soekarno, termasuk tokoh neo-modernis Indonesia, seperti Dawam Rahardjo, Djohan Effendi, Ahmad Wahib (Barton, 2000). Ini artinya khazanah pengetahuan yang dibawa oleh Ahmadiyah tidak bertentangan dengan keimanan dari para intelektual muslim.

Diakui, tafsir Ahmadiyah dibangun oleh metode tafsir yang kuat dan argumentatif. Suka atau tidak suka, para pengamat akan mengakui bahwa argumentasi Ahmadiyah di dalam tafsirnya memiliki kekuatan ilmiah yang sulit untuk difalsifikasikan. Ini artinya, bahwa argumen Ahmadiyah memiliki potensi kebenaran. Jika menilik Baidan (2000), tafsir Ahmadiyah memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan khazanah Islam itu sendiri. Karakteristik yang dimilikinya mampu memberikan nuansa segar terhadap hal-hal *mutasyabih* yang banyak terdapat di balik simbol-simbol Alquran. Ini artinya, tafsir Ahmadiyah, termasuk teologinya, bukan *al ra'y al mahdh* (hasil pemikiran semata). Berdasarkan minor riset tadi, Saya tidak mengatakan bahwa tafsir Ahmadiyah masuk dalam kategori *Ahli Sunnah wal Jamaah*, akan tetapi metodenya memenuhi standar layaknya tafsir-tafsir besar lainnya, seperti *Tafsir Al Khasin*, karangan Al-Khazin (741 H), *Anwar Al Tanzil wa Asrar al Ta'wil* karangan Al Baydhawi (691 H), *Tafsir Al Azhar*, dari HAMKA, dll. Di dalam tafsir demikian, akan tampak proses *munasabat* terjadi di dalam mengurai pengertian suatu surat. Beberapa sumber pengetahuan yang dijadikan sandaran tafsir Ahmadiyah adalah Teks (Alquran), Sunnah, *ijma'* ulama, Ilmu, Pengetahuan, *Qiyas* (interpretasi), dan wahyu yang diperoleh dari pengalaman sufistik. Untuk lebih jelasnya lihat buku karya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, berjudul *Khutbah Ilhamiyah*

M. Komunitas eksklusif

Sementara ini banyak orang menganggap bahwa Ahmadiyah hidup dalam eksklusivisme, yakni selalu memisahkan dari dari komunitas luas. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa orang awam memandang demikian, yakni :

1. Ahmadiyah memiliki masjid sendiri
2. Ahmadiyah tidak boleh bermakmum di belakang orang non-Ahmadiyah
3. Warga Ahmadiyah melakukan pernikahan sesama anggota saja.
4. Ahmadiyah memiliki dukungan dana yang berasal dari anggota sendiri.

Tidak disangkal bahwa kenyataan bahwa Ahmadiyah bersikap demikian, namun hal tersebut tidak di dasarkan karena argumen ingin mengucilkan diri atau eksklusif. Argumen sosial yang melatarbelakangi sikap demikian dibangun oleh sejarah yang sangat panjang. Sikap demikian bukanlah termasuk dari syariat Ahmadiyah. pada dasarnya pendiri Ahmadiyah atau para khalifahnyapun tidak pernah menegaskan hal-hal tersebut sebagai syariat bagi warga Ahmadiyah.

Sejauh penelusuran terhadap literatur Ahmadiyah tidak ditemukan anjuran untuk hidup eksklusif, justru Ahmadiyah mengajarkan untuk hidup bergaul dengan masyarakat secara rahmatan lil alamin, dimana warga Ahmadiyah berada harus tidak boleh melakukan dan menjadi bagian dari huru-hara, atau perbuatan makar terhadap negara, pemerintah, maupun masyarakat di mana mereka hidup. Ahmadiyah dan warganya akan tunduk terhadap hukum di mana mereka berada. Ahmadiyah, secara organisasi tidak boleh masuk, mendukung, ataupun menjadi partai politik. Mengingat hal demikian, sebenarnya tidak ada alasan untuk menyebut Ahmadiyah eksklusif. Meskipun demikian, sejarah

Ahmadiyah selalu dipenuhi oleh penderitaan, pemboikotan, dan penindasan terhadap pengikutnya baik di Pakistan sendiri maupun di negara-negara lainnya. Misi dan ajaran yang dibawanya, menjadi penyebab umat Islam umum menolak, melarang, dan membantai ajaran Ahmadiyah, termasuk pengikutnya dari tempat-tempat di mana warga Ahmadiyah bermukim. Kondisi demikian telah berlangsung sejak Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, mendakwakan diri sebagai Masih Mau'ud. Sejak itulah secara perorangan maupun kelompok, warga Ahmadiyah selalu mendapat intimidasi sosial hingga saat ini.

Mengingat hal demikian, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, berijtihad demi memberi perlindungan terhadap warga Ahmadiyah dari penindasan umat muslim dan untuk melakukan hubungan secara intens dengan sesama Ahmadiyah. Ia menganjurkan perkawinan dengan sesama Ahmadiyah, dan mendirikan masjid untuk beribadah berjamaah. Ahmadiyah menyebut muslim di luar Ahmadiyah adalah *Ghair Ahmadi* (bukan Ahmadi), sedangkan sebutan bagi para penentangannya, disebut *anti-Ahmadiyah*, tidak pernah menyebut mereka dengan sebutan *kafir*. Ijtihad tersebut, masih dipegang sebagai *role* di dalam masyarakat Ahmadiyah dan berlaku dalam hal keimanan. Suatu ketika ijtihad ini akan dicabut apabila kondisi telah berubah. Namun, dalam aktivitas sosial, Ahmadiyah di seluruh dunia, akan terbuka untuk bekerjasama melakukan kemaslahatan dan amar ma'ruf dengan siapapun, selama kegiatan tersebut tidak ada tendensi politik. Penjelasan tersebut menjadi bukti bahwa Ahmadiyah bukan organisasi yang tertutup, menutup diri, dan eksklusif seperti dipahami orang saat ini.

N. Masalah Ahmadiyah dan Inggris

Tuduhan bahwa Ahmadiyah Qadian sebagai anak emas Inggris banyak disampaikan oleh para ahli sejarah maupun Maududi dalam berbagai literaturannya. Berkaitan dengan hal tersebut, patut

disampaikan penjelasan dari Abu Bakar Ayub, 1971, *Bantahan Lengkap, Menjawab tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada JAI dan Pendirinya :Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, a.s, cet.II, Jemaat Ahmadiyah, Jakarta* “Pada pandangan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad a.s, bangsa Inggeris itu adalah djadjal yang didjanjikan” Abubakar Ayub mengutip pandangan tersebut dari buku *Izalah Auham*, dj 2 hal. 730-731, Juga “Da’watul Islam” yang disampaikan oleh Hadrat Mirza Ghulam a.s, kepada Ratu Inggris saat itu sebagai berikut :

“Jaa ajjutahal malikatukariimatu qad kaana ‘alaika fadhullahi fii aalaniddun- ja fadilan kabiiran farghobil zana fii mulkil achirati wa tuubi waqnutti lirabbinn wahiidn lam jattachidz walada walajakun lahuu ajariikun filmulki wa kabbiriihi takbiiran. Atattachidzuunamin duunihii aalihatan laa jachluquuuna sjaiian wahum juchlaquuna jaa maliikatal ardli aslimiii taslamii aslimii.....” (Ainah Kamalaat Islaam, halaman 534)

Artinya “Hai ratu yang mulia ! Sesungguhnya kurnia Allah di bidang nikmat dunia telah besar kepada engkau, Maka sekarang tunduklah kepada Tuhan Jang Maha Esa, yang tidak mempunyai anak, dan tidak pula mempunyai sekutu dalam keradjaan-Nya, dan muliakanlah akan Dia dengan sebenar-benarnya memuliakan. Apakah kamu menganggap ada Tuhan selain-Nya, yang tidak pernah menjadikan sesuatu apapun, dan merekalah yang dijadikan ! Hai ratu bumi ! Islamlah engkau supaya engkau selamat, Islamlah ...

Ratu Inggris tersebut beliau ajak masuk Islam mula-mula pada tahun 1893 dengan surat tersebut di atas. Kemudian dengan perantaraan kitab “Tuhfah Qaisharrijjah” pada tahun 1898. kitab tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan dikirimkan kepada Ratu pada tahun itu juga melalui perantaraan

pos. melalui kitab tersebut, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, mengajak Ratu Inggris untuk masuk ke dalam Islam dengan ungkapan yang fasih dan lemah-lembut.

Berkaitan dengan tuduhan Abul A'la Maududi, yang mengatakan bahwa Ahmadiyah menyembah surat setia kepada Inggris. Untuk menjawab hal tersebut dapat digali dari keterangan Abubakar Ayub (1971: 28), mengenai tiga hal yang patut dipahami terlebih dahulu, antara lain :

1. bagaimana keadaan India dan Punjab sebelum datang Inggris, terutama jika ditinjau dari segi keagamaan ?
2. bagaimana sikap dan pandangan alim ulama yang lain kepada Inggris ketika itu ?
3. bagaimana hukumnya memuji dan berterima kasih kepada orang kafir, apabila kita beroleh kebaikan dari mereka ?

BAB IV

TRUTH CLAIM TO BE COLLECTIVE TRUTH



A. *Singular Violence: Pola Konflik tahun 1925-1945*

Kehadiran ajaran Ahmadiyah pada mulanya dipandang sangat menarik, karena apa yang dijelaskan baik melalui tafsir maupun penjelasan dari para mubalighnya, sangatlah rasional. Pola pemikiran yang rasional tersebut ternyata sangat digemari oleh para elite Indonesia pada waktu itu, seperti HOS Tjokroaminoto, Djoyosugito, dan lain sebagainya. Lambat laun, ajaran Ahmadiyah mampu menarik mereka untuk bersimpati bahkan ada secara terang-terangan menyatakan diri sebagai pengikut Ahmadiyah.

Masuknya elit-elit puncak dari organisasi masyarakat, menyebabkan lahirnya perpecahan dalam tubuh organisasi tersebut. Mereka kehilangan aset terbesar dari organisasi tersebut, yakni para elit yang kuat menjadi simpatic pada Ahmadiyah.

Keirian atas berpindahkan afiliasi elit mereka menjadi simpatisan Ahmadiyah menyebabkan terbukannya konflik organisasional dengan Ahmadiyah. Konflik semakin menguat setelah ada kekuatan dari ulama senior untuk melakukan serangan terhadap Ahmadiyah, seperti Dr. Haji Abdul Karim Amrullah dan Rasyid Ridha dari Mesir, memberikan respon keras terhadap gerakan Ahmadiyah di Indonesia pada waktu awal.

Tahun 1924 dan 1925, merupakan tahun bersejarah bagi Ahmadiyah di Indonesia, baik Lahore, maupun Qadiani. 2 Mubaligh Lahore, secara resmi tiba di Jawa tahun 1924¹, yakni Mirza Wali Ahmad Beg, dan Maulana Ahmad, menuju Yogyakarta. Kemudian mereka menjalin hubungan baik dengan para pemuka Muhammadiyah, seperti Mas Ngabehi Joyosugito, Muhammad Husni, Sadewo P.K, Soetopo, Mustopo, Syamsu Rijal, Supratolo, Kayat, Muhammad Kusban, Muhamad Irshad, Mufti Syarif, Sunarto, Ustman², dan lain-lain. Mereka adalah intelektual dan tokoh terkemuka Muhammadiyah saat itu.

Kehadiran 2 mubaligh Ahmadiyah dalam muktamar Muhammadiyah, memunculkan reaksi keras. Setelah peristiwa tersebut, datang ulama Minang, Dr. Abdul Karim Amrullah, pada tahun 1926, yang mengkhususkan diri menemui Mirza Ahmad Wali Beig, untuk berdiskusi. Terjadi dialog diantara mereka, yang pada intinya Dr. Abdul Karim, melarang Ahmadiyah disebarkan di lingkungan Muhammadiyah, sambil memberikan sebuah buku "Alqawloes'Shahih"³, bertuliskan Arab berbahasa Latin. Isi buku tersebut, penjelasan mengenai itikad-itikad Ahmadiyah yang sesat. Buku *Alqawloes'Shahih* ini, merupakan buku yang telah dipersiapkan oleh Dr. Abdul Karim Amrullah, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid *Jembatan Besi* atau *Sumatra Thawalib*,

1 *Qanun Asasi*, hal 94

2 *ibid*, hal.96

3 Hadji Abdul Karim Amroellah, *Alqawloesh'shahih*, diterbitkan di Yogyakarta oleh Datoek Nan Bareno alias Marah Intan, Yogyakarta, 1926

karena ada diantara murid-murid Sumatra Thawalib mengikuti ajaran Ahmadiyah. Tiga orang dari mereka sekolah di Lahore kemudian pindah ke Qadian, yakni Ahmad Nurrudin, Abubakar Ayub, dan Zaini Dahlan. Tiga tokoh inilah, kemudian menjadi pelopor masuknya Ahmadiyah Qadiani ke Indonesia. Jadi, buku tersebut memang sudah dipersiapkan untuk menjelaskan berbagai kesalahanan tentang Ahmadiyah.

Reaksi kedua, tahun 1927, datang ulama dari India, Abdul Alim Assidiqi, yang mempropagandakan gerakan anti-Ahmadiyah. Berdasarkan peningkatan animo tokoh-tokoh Muhammadiyah terhadap Ahmadiyah, yang dipandang akan merugikan Muhammadiyah, maka pada tahun 1928, PB Muhammadiyah membuat Maklumat tanggal 5 Juli 1928 no. 294⁴. Isi maklumat tersebut, melarang ajaran Ahmadiyah berkembang di lingkungan Muhammadiyah, karena beberapa tokoh penting di Muhammadiyah menjadi pengikut ajaran Ahmadiyah, termasuk beberapa putra K.H. Ahmad Dahlan. Kebijakan ini sangat mengecewakan simpatisan Ahmadiyah. Akhirnya, dengan berat hati Djoyosugito, Sadewo, Muhammad Husni, dll, memilih keluar dari Muhammadiyah. Sejak itulah mereka mendirikan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), yang berpusat di Yogyakarta.

Sedangkan perselisihan antara Mubaligh Ahmadiyah Qadian dengan para ulama pun berlangsung cukup sengit baik semasa di Sumatera hingga di Jawa. Rahmat Ali selalu berhadapan dengan para ulama dan orang-orang yang tidak suka. Seperti kasus di Padang di pertengahan Tahun 1926

Mereka tertarik pada dakwah beliau itu pada pertengahan tahun 1926 menghimpun diri dalam suatu Komite yang bertujuan untuk memperdebatkan Maulana Rahmat Ali dengan para Ulama di Sumatera Barat dalam suatu perdebatan yang dapat disaksikan oleh

4 *Qanun Asasi*, hal.100

orang banyak. Komite itu bernama “Komite Mencari Hak Penolak Subhat” dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua : Abu Bakar Bagindo Rajo
Wakil Ketua : Daud Bangsodirajo
Sekretaris : Muhammad Tehar Sutan Maharajo
Komisaris : Udin Rajo nan Kayo
: Bagindo Muhammad Syarif
Buyung Hitam Marah Sampono
Anggota : Marah Baya
Pakih Isa
Hamid
Abdul Jalil Marah Bungsu
Abdurrahman
Marah Simun
Husin Hasan Sutan
H. Marah Wahab

Dengan kedatangan H. Mahmud dari Qadian setelah belajar beberapa lama disana kegiatan dakwah Ahmadiyah dapat dilaksanakan lebih meningkat bukan saja terbatas di kota Padang tetapi juga di seluruh Sumatera Parat. Sejalan dengan hal itu reaksi dari ulama berupa hasutan kepada masyarakat untuk menentang dan memusuhi Mubaligh Ahmadiyah juga makin meningkat.

Pada suatu waktu H. Mahmud datang kerumah seseorang kenalan di Bukit Surungan Padang Panjang untuk bertabligh. Tetapi masyarakat setempat yang sudah mengenal beliau karena beliau

berasal dari daerah itu, mencoba menahan beliau dan memaksa beliau “Taubat” yakni keluar dari Jema’at Ahmadiyah. Usaha mereka itu tidak berhasil dan H. Mahmud berhasil meloloskan diri dan kembali ke Padang.

Tindakan masyarakat kampungnya itu menjadikan H. Mahmud gentar karena tidak lama kemudian beliau mengajak Maulana Rahmat Ali pergi ke Bukit Surungan Padang Panjang untuk berdakwah di rumah seorang anggota keluarga beliau. Reaksi masyarakat setempat atas kedatangan muballigh Ahmadiyah ini ternyata lebih brutal lagi. Rombongan muballigh Jema’at Ahmadiyah itu ditunggu oleh orang banyak dengan teriakan dan ejekan kafir dan dajal. Bahkan mereka telah mempersiapkan seekor anjing pemburu untuk mengusir dan mengejar Maulana Rahmat Ali dan rombongan, sehingga beliau dan rombongan terpaksa lari menyelamatkan diri diiringi dengan sorak sorai masyarakat yang berdiri dipinggir jalan. Maulana Rahmat Ali menyelamatkan diri pada sebuah rumah diluar kampung itu. Tentu saja ulama dan masyarakat yang telah berhasil dihasut merasa gembira telah berhasil menghina dan mempermainkan beliau dan rombongan. Menjadi tanda tanya bagi kita adalah peristiwa tersebut diatas ada hubungannya dengan peristiwa alam yang terjadi tak lama setelah itu, yaitu kota Padang Panjang yang terletak di kaki Gunung Merapi itu mengalami malapetaka yang besar, karena terjadinya gempa tektonis yang hebat. Peristiwa gempa di Padang Panjang itu tahun 1926 tercatat sebagai bencana alam yang terbesar yang dialami oleh kota dalam abad ini karena sebagian besar bangunan di kota itu hancur dan korban manusia pun tidak sedikit.

Selanjutnya perlawanan yang diberikan secara terbuka dari ulama, dilakukan oleh A.Hasan Secara formal, A. Hasan adalah tokoh yang terang-terangan menyatakan keberatannya terhadap ajaran Ahmadiyah. Untuk membuktikan argumennya, maka terjadilah perdebatan terbuka dibawah pengamatan dari Belanda saat itu.

Openbare Debatvergadering (pertemuan Perdebatan) yang pertama diadakan bulan April 1933, bertempat di Gedung Societieit "Ons Genoegen" Naripanweg, Bandung, dengan acara sebagai berikut :

- Tanggal 14 - 4 - 1933 : Tanya Jawab
Tanggal 15 - 4 - 1933 : Masalah hidup matinya Nabi Isa A.s
Tanggal 16 - 4 - 1933 : Lanjutan masalah hidup matinya Nabi Isa a.s

Sebagai debatters dari pihak :

1. Ahmadiyah terdiri dari :
 - M. Rahmat Ali HAOT
 - M. Abubakar Ayyub H.A
 - M. Moh Sadiq H.A. bin Baraktullah
2. Pembela Islam : A. Hasan cs (Persis)
 - Verslanggever : Taher gelar Sutan Tumenggung
 - Pimpinan : Moh. Syafi'i dari PSII, Bandung
 - Pengunjung : Lk. 1.000 orang

Ketika perdebatan dalam beberapa hari berlangsung di Bandung surat-surat kabar ramai measang beritanya. Nama Ahmadiyah menjadi populer. Akan tetapi disamping pujian ada juga yang mencaci maki habis-habisan yaitu alim-ulama dari Singapura, Tasikmalaya Garut yang dipelopori oleh Anwar Sanusi, dari Bogor oleh Al Haddad dan dari Cianjur oleh surat Kabar Al Mu'min

Menjelang perdebatan kedua, pihak PERSIS menerbitkan 3 buah buku diterbitkan secara serial yaitu "Risalah Ahmadiyah berisi Kepercayaan yang Sesat" tebal 56 hal, "Risalah Mirzaiyah" tebal 46 hal, ukuran kedua buku 14 x 20 cm, terbit tanggal 17 Juli 1933. Buku ini dijual dengan harga f. 0,25 berisi berbagai alasan pihak

PERSIS yang menuduh Ahmadiyah sesat, juga sebagai pembeaan atas kekalahan mereka dalam *verslage* debat I.

Sementara itu ada usaha-usaha orang-orang yang belum merasa puas untuk mempertemukan kembali kedua belah pihak dalam suatu perdebatan yang kedua. Setelah diadakan persiapan-persiana jrnaka ditetapkan bahwa pertemuan tersebut akan diadakan di Gedung Permufakatan Nasional di Gang Kenari, Jakarta dengan acara pada tanggal-tanggal 28 - 9 - 1933

Selanjutnya, seiring dengan pergolakan perjuangan di Indonesia, Pada awal tahun 1944 terjadilah "Peristiwa Sukamanah" Kyai di tempat itu memberontak terhadap pemerintah Jepang. Jepang menuduh, bahwa organisatoris peristiwa berdarah ini ialah Ahmadiyah. Serentak Jepang mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin Ahmadiyah. Tetapi setelah meringkuk tidak kurang dari 82 hari, semuanya dibebaskan. Karena setelah orang-orang yang mengadakan dipanggil ternyata orang-orang ahmadiyah tidak bersalah dan mereka benar dalam perkataan dan perbuatan.

Bebasnya Indonesia dari penjajahan membangkitkan rakyat untuk menyusun kekuatan dalam suatu wadah kepartaian yang sesuai dengan jiwa kepartaian. Di daerah Tasikmalaya dan sekitarnya, dikuasai oleh Partai Masyumi. Ia merasa kuat dan ingin agar semua organisasi Islam masuk Masyumi. Maksudnya itu disampaikan juga kepada Ahmadiyah. Tetapi setelah mengetahui, bahwa Ahmadiyah sebagai organisasi agama tetap tidak mau diajak masuk Masyumi untuk terjun di gelanggang politik, maka cara kekerasanlah yang mereka lakukan. Anggota-anggota Jemaat yang akan pergi beribadat ke masjid dicegat. Masjid *distelling* untuk menakut-nakuti. Seorang Ahmadi bernama Eras Ruhimat, yang menolak diajak masuk Masyumi di daerah tanjung, diusir dari kampungnya.

Setelah peristiwa itu terjadi, anggota-anggota Jemaat merasa terancam hidupnya, lebih-lebih pengurusnya. Oleh karena itu untuk mencari keselamatan, mereka mengungsi lagi ke kota termasuk Syarif. Ia mulai lagi berjuang untuk kepentingan pemerintah. Lebih-lebih setelah ada anjuran –anjuran dari Hazrat Khalifatul Masih II r.a. kepada seluruh bangsa Indonesia supaya membantu pemerintah RI. Perjuangan Jemaat dipergiat lagi dan semua bidang dimasuki. Syarif sendiri terjun dalam lapangan ketentaraan. Ia akhirnya diangkat menjadi penasihat pribadi kepala Staf Divisi Letkol Sujono, Menurut tanggapannya inipun untuk perjuangan tabligh juga, ialah usaha mendekati orang-orang penting.

Pada suatu hari seorang Ahmadi bernama Djaed dari Cukangkawung, Sukapura, mendapat kabar, bahwa orang-orang Ahmadi akan dibunuh. Berita ini disampaikan pula kepada kawan-kawannya, antara lain kepada kawan-kawannya, antara lain kepada Sura berdirian, bahwa kalau karena Ahmadiyah, ia tidak akan pergi berita tersebut memang benar. Orang-orang sekampungnya menyaksikan sendiri ketika 6 orang Ahmadi Cukangkawung digiring dengan tangan diikat menuju peristirahatan mereka yang terakhir Mereka yang syahid itu, ialah:

1. Jaed
2. Sura,
3. Saeri,
4. Haji Hasan,
5. Raden Saleh
6. Dahlan

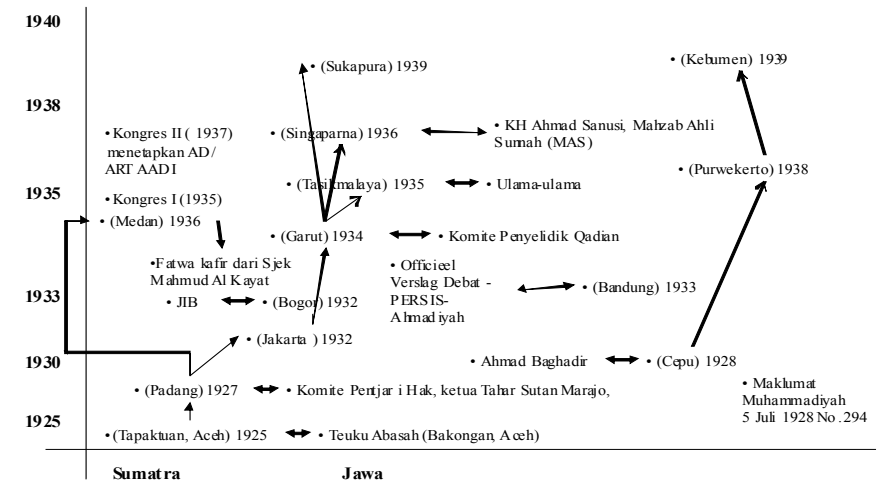
Walaupun sempat melarikan diri ke Tasikmalaya. Tetapi tidak berapa lama kemudian ia kembali ke kampungnya, lalu ditangkap oleh penyerang dan disyahidkan bersama-sama yang lainnya. Peristiwa semacam ini terjadi pula di Sangianglobang, Ranting Tolenjeng, yang jumlah anggotanya ketika tahun 1945/1946 sudah mencapai 120 orang, dan di Indihiang. Kira-kira 60 orang

bersenjatakan bedil dan pedang menyergap Sangianglobang. Orang-orang Ahmadiyah yang tak sempat melarikan diri ditangkap dan diikat tangannya. Mereka di giring untuk tidak kembali lagi. Jumlah mereka 4 orang, yaitu:

1. Haji Sanusi
2. Omo
3. Tahyan
4. Sahromi.

Gejala kekerasan yang terjadi pada fase pertama masih menunjukkan singular violence, yakni kekerasan masih bersifat atomis sebagai dampak perselisihan antara individu, belum ada gerakan yang sifatnya massif digerakan secara kolektif. Keirian dan kedengkian para ulama terhadap Ahmadiyah lebih dikarenakan alasan ajaran Ahmadiyah lebih rasional dibandingkan dengan apa yang mereka miliki dan banyak orang-orang berpotensi tertarik menjadi simpatisan Ahmadiyah. Keirian individual tersebut melahirkan kekerasan singular.

Reaksi masyarakat terhadap Ahmadiyah Qadian 1925-1940



B. *Collective violence* : Pola Konflik Paska tahun 1970

Mulai tahun 1970 pola konflik sudah menggunakan kekuatan kolektif untuk melakukan tekanan terhadap komunitas Ahmadiyah. Seperti kejadian di Lebaksari, Desa Parakansalak Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari jalan raya Parungkuda ke Lebaksari lewat Parakansalak berjarak 9 km. Berdekatan dengan perkebunan teh PTP XI yang berareal ribuan hektar luasnya. Lebih tegas lagi bahwa keadaan Jemaat Lebaksari tepatnya dibawah kaki gunung Salak Jawa Barat, Tahun 1980 jemaat Lebaksari dapat mendirikan Mesjid dengan ukuran 8 x 9 m. Pendirian masjid tersebut mengundang reaksi dari kalangan pemerintah khususnya Camat yang menghalangi pembangunan mesjid. Pejabat itu bernama Soleh Iskandar, hampir tiga tahun pembangunan mesjid terbengkalai hanya memakai atap dari plastik saja.

Sewaktu M. Sudarma mengadakan pengajian di Masjid umum (ghair) datanglah ketua Majelis Ulama Parakansalak, Amil Sanusi dan dari Kantor Urusan Agama, masyarakat Umum dari berbagai daerah mereka mengelilingi mesjid sambil membawa golok dan alat-alat pemukul lainnya, maksud mereka adalah akan menghancurkan Jemaat. Namun anehnya saat itu setibanya di Masjid amarahnya hilang hanya ngomong biasa saja dan masyarakat yang tadinya mengancam ikut bubar juga. Nama upaya untuk memprovokasi, tetap dilakukan, antara lain :

- a. Masyarakat mengundang Ustadz Fauzi Said Toha dari Jakarta dengan menggunakan tempat di Mesjid PTP XI, secara semangat membara Fauzi Said Toha mencaci maki Jemaat namun tetap tidak berhasil membubarkan jemaat
- b. Ahmad Hariadi mencoba menyerang kecamatan Parakansalak seluruh masyarakat siap mendukung

Ahmad Hariadi. Namun pada akhirnya rencana-rencana meraka gagal total, karena dari pihak Kodim turun tangan untuk mengamankan, seluruh masyarakat yang tadinya mendukung Ahmad Hariadi berbalik jadi mencaci maki Hariadi

- c. Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Parakansalak mengancam akan membubarkan Ahmadiyah di suatu Masjid di Cilutung (Lebaksari di hadiri oleh Camat, KUA, ternyata rencana mereka gagal lagi.

Keterlibatan Majelis Ulama Indonesia dalam peta kekerasan, menjadi indicator lahirnya pola kekerasan baru, yakni *collective violence*.

“the instrumental use of violence by people who identify themselves as members of a group – whether this group is transitory or has a more permanent identity – against another group or set of individuals, in order to achieve political, economic or social objectives”.

Peran MUI menjadi institusi non pemerintah yang secara aktif melakukan instrumentalisasi atas pendeskriditan Ahmadiyah di tengah masyarakat muslim Indonesia. Tentunya keterlibatan MUI bukanlah secara spontan melakulan gerakan anti-Ahmadiyah, tetapi gerakan MUI dipicu oleh seruan dari Rabitah Alam Islami, Mekkah untuk melakukan tekanan terhadap Ahmadiyah Indonesia. Berdasarkan Keputusan Majma al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) dalam Mukhtamar II di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi’ al-Tsani 1406H./22-28 Desember 1985M tentang Aliran Qodiyaniyah, yang antara lain menyatakan; bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang qath’i dan di sepakati oleh seluruh

Ulama Islam bahwa Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir.

Munculnya Keputusan MUI bahwa Ahmadiyah adalah organisasi diluar Islam dan sesat, menjadi pemicu menguatnya kesadaran Anti-Ahmadiyah di Indonesia. Keputusan tersebut diambil dalam Musyawarah Nasional II tanggal 26 Mei – 1 Juli 1980⁵, berdasarkan

1. Kajian terhadap 9 buku tentang Ahmadiyah
2. Menuntaskan Ahmadiyah harus melibatkan negara

Karena keberadaan AHmadiyah dianggap meresahkan dan akan memicu perpecahan umat dalam hal ubudiah serta berbahaya bagi ketertiban dan keamanan negara. Maka Musyawarah tersebut mengeluarkan fatwa yang berisi instruksi :

1. Agar MUI di Daerah Tingkat I dan Tingkat II menjelaskan tentang sesatnya Ahmadiyah kepada masyarakat bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam
2. Bagi mereka yang terlanjur memasuki Ahmadiyah agar segera kembali ke dalam Islam
3. Kepada seluruh umat Islam agar selalu mempertinggi kewaspadaan, sehingga tidak akan terpengaruh dengan paham yang sesat itu.

Keputusan tersebut ditanda tangani oleh Ketua Prof.Dr. HAMKA dan sekretaris MUI, Drs. Kafrawi.

Tentu saja, fatwa MUI seakan menjadi peneguh atas diperkenankannya kebencian kepada Ahmadiyah. Tak heran jika respon masyarakat pada tingkat bawah menunjukkan gejala anarkis. Tercatat pada tahun 1993, terjadi kerusakan di Sukawening, Garut, tahun 2001 terjadi tragedi Sambi Elen, Lombok, yang menewaskan 1 orang anggota Ahmadiyah. Tahun 2002, terjadi kerusuhan di beberapa kantong Ahmadiyah di Pancor, Majenang, Kuningan, Tahun 2003 terjadi juga kerusuhan di Tolenjeng, Garut, kemudian

⁵ MUI, 2011, *Himpunan Fatwa MUI sejak Tahun 1977*, Penerbit Erlangga, Jakarta, halaman 40

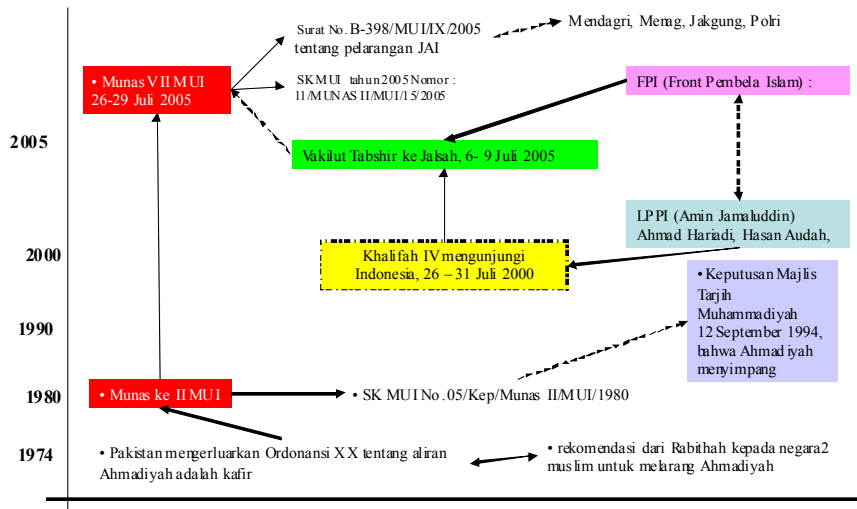
bergerak pada tahun 2004 tercatat kerusuhan terjadi di Manislor, Arjasari dan Parigi.

Meningat begitu dianggap Ahmadiyah meresahkan masyarakat, maka fatwa MUI dalam Munas II tahun 1980, pada tahun 2005 kembali dikukuhkan dengan fatwa MUI tentang Sesatnya Ahmadiyah. Keputusan Fatwa MUI **Nomor : 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang ALIRAN AHMADIYAH SESAT**

Pasca MUNAS MUI VII, dukungan terhadap fatwa mengenai Aliran Ahmadiyah juga disampaikan oleh berbagai ormas Islam, seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Syarikat Islam (SI), al-Irsyad al-Islamiyah, ICMI, YPI al-Azhar, Front Pembela Islam (FPI), Front Perjuangan Islam Solo, Majelis Mujahidin Indonesia, Hidayatullah, al-Ittihadiyah, PERTI, FUUI, al-Washliyah, dan Ormas Islam lainnya di seluruh Indonesia (terlampir). Selain itu dukungan atas Fatwa MUNAS MUI ini juga disampaikan oleh kyai-kyai Pengasuh Pondok Pesantren di Jawa, Madura dan Sumatra.

Walhasil, kerusuhan dan konflik terbuka tidak dapat dihindari lagi, karena pada tahun 2005, tercatat 12 kekerasan menimpa komunitas Ahmadiya di beberapa tempat, yakni Sintang, Kalimantan Barat (18 Februari 2005), Cenae, Wajo, Sulsel (20 Juni 2005), Kampus Mubarak, Parung, Bogor (9 Juli dan 15 2005), Cislada, Bogor, (21 Juli 2005), Ciaruteun, Bogor, (27 Juli 2005), Manislor, Jawa Barat (29 Juli 2005), Masjid Balikpapan, Jakarta, (29 Juli 2005), Cisarupan, Garut (30 Juli 2005), Masjid Ciampea, Bogor, (4 Agustus 2005), Cijati, Cianjur (5 Agustus 2005), dan Sadarsari, Majalengka (19 Agustus 2005).

Reaksi gerakan Anti-Ahmadiyah di Indonesia 1980-2005



C. Structural Violence : Negara Berkepentingan dengan Ahmadiyah

Structural violence adalah a form of violence based on the systemic ways in which a given social structure or social institution harms people by preventing them. Gerakan kekerasan struktur tersebut bagi Ahmadiyah terjadi semenjak dikeluarkannya SKB 3 menteri tentang pelarangan Ahmadiyah di Indonesia. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, No. NOMOR : 3 Tahun 2008 NOMOR : KEP-033/A/JA/ 6/2008 NOMOR : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2008

Merespon SKB tersebut, Jemaat Ahmadiyah, melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Puslitbang,, Deparemen Agama mengundang pengurus Jemaat AHmadiyah ke Kantor Departemen Agama Ri, untuk bersama-sama mencari sikap. Maka, hasil dari

kesepakatan tersebut, keluarga 12 pernyataan Jemaat Ahmadiyah. yakni sebagai berikut:

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Asyhaduanlaa-ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasullulah, artinya: aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.
2. Sejak semula kami warga jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah Khatamun Nabiyyin (nabi penutup).
3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita dan peringatan serta pengemban mubasysyirat, pendiri dan pemimpin jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW.
4. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat bai'at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata Muhammad di depan kata Rasulullah.
5. Kami warga Ahmadiyah meyakini bahwa
 - a. tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada nabi Muhammad.
 - b. Al-Quran dan sunnah nabi Muhammad SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.
6. Buku Tadzkirah bukan lah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohami Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat (1908).

7. Kami warga jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata maupun perbuatan.
8. Kami warga jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut Masjid yang kami bangun dengan nama Masjid Ahmadiyah.
9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun.
10. Kami warga jemaat Ahmadiyah sebagai muslim melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan Agama sesuai dengan perundang-undangan.
11. Kami warga jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahmi dan bekerja sama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
12. Dengan penjelasan ini, kami pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Jakarta, 14 Januari 2008

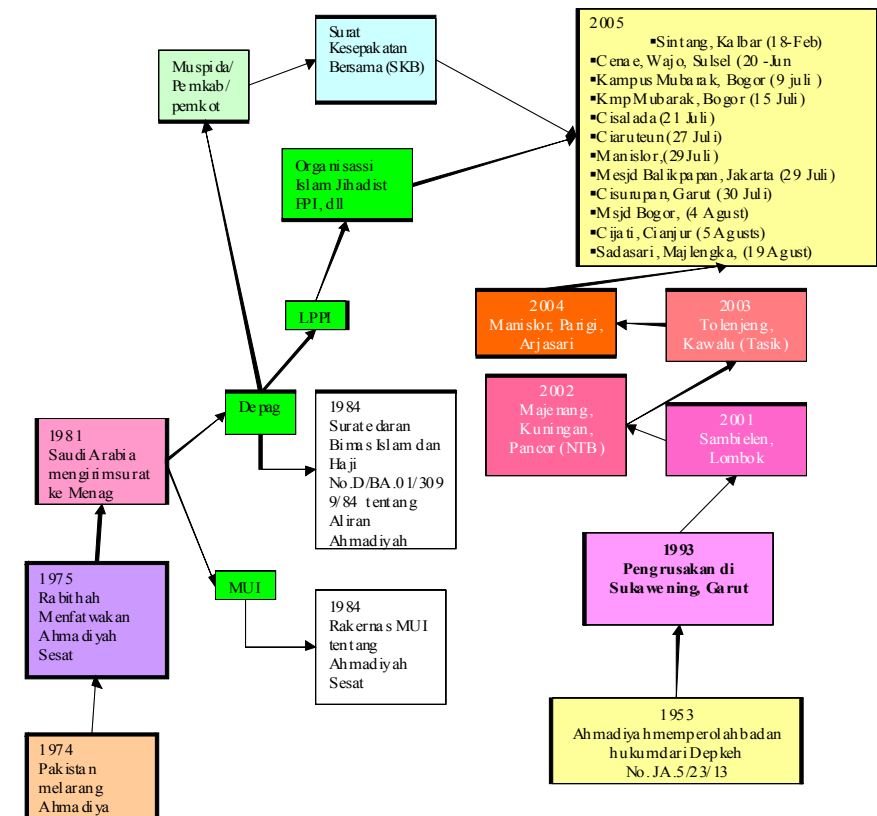
PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia

H. Abdul Basit Amir

Mengetahui (disertai tanda tangan)

1. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar (Kabalitbang dan Diklat Depag RI)
2. Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, MA (Dirjen Bimas Islam Depag RI)

3. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, MA (Deputi Seswapres Bidang Kesra)
4. Drs. Denny Herdian MM (Ditjen Kesbangpol Depdagri)
5. Ir. H. Muslich Zainal Asikin, MBA, MT (Ketua II Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia – GAI)
6. KH Agus Miftah (Tokoh masyarakat)
7. Irjen Pol. Drs. H. Saleh Saaf (Kaba Intelkam Polri)
8. Prof. Dr. HM Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
9. Ir. H. Anis Ahmad Ayyub (Anggota Pengurus Besar JAI)
10. Drs. Abdul Rozzaq (Anggota Pengurus Besar JAI)



Masuknya entitas Negara berada di salah satu pihak dalam ruang konflik, semakin melahirkan gerakan massa yang agresif. Tercatat beberapa kerusuhan dan kekerasan terhadap Ahmadiyah, namun Tragedi Cikeusik pada 6 Februari 2011 merupakan tragedi kemanusiaan yang memilukan menimpa komunitas Ahmadiyah. Catatan tersebut sebagai berikut:

14 Juli 2010

Ratusan Gerakan Rakyat Anti Ahmadiyah melakukan penyegelan beberapa kantor Pemda di Garut dan melakukan penyisiran. Menurut mereka sebanyak 10 persen dari jumlah pegawai negeri di Garut merupakan pengikut Ahmadiyah dan menduduki jabatan strategis.

29 Juli 2010

Ribuan ormas perang batu dengan jemaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa barat. Kejadian ini berlangsung setelah polisi menghadang ribuan massa ormas yang berniat mengusir jemaah Ahmadiyah. Aksi ini kelanjutan dari tindakan Satpol PP yang akhirnya berhasil menyegel 1 masjid dan 7 musola milik Ahmadiyah.

10 Agustus 2010

Ratusan massa FPI dan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) merusak paksa papan nama Jamaah Ahmadiyah yang terpasang di masjid An Nur jalan Bubutan Gang 1 No 2 Surabaya.

1 Oktober 2010

Sekitar enam bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Kampung Cislada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea,

Bogor, dibakar massa. Termasuk yang dibakar adalah masjid, surau dan madrasah serta rumah. Kerusuhan ini sudah kali ketiga sejak tahun 2008. Pada tahun 2007 keluar Keputusan Bersama tingkat Kec. Ciampea yang diteken Camat, Majelis Ulama Indonesia, Kantor Urusan Agama, yang menyatakan tidak boleh ada aktivitas jemaah Ahmadiyah. Keputusan ini diperkuat dengan SKB tingkat Kabupaten Bogor yang ditandatangani Bupati, Komandan Kodim, dan unsur Muspida lainnya.

4 Oktober 2010

Penghentian aktivitas jemaah Ahmadiyah di Kecamatan Tampan, Pekanbaru, oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

11 Oktober 2010

Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, melarang Jemaah Ahmadiyah berada di wilayahnya. Hal itu diungkapkan setelah pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama bersama Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan.

29 Oktober 2010

FPI beserta ormas se-kabupaten Ciamis berupaya menyegel masjid Ahmadiyah di Jalan Gayam, Ciamis. Rencana penyegelan gagal setelah aparat kepolisian menjaga ketat lokasi masjid.

5 November 2010

Massa dari Perguruan Tinggi Dakwah Islam Tanjung Priok menuntut penyegelan Masjid Nuruddin Jalan Kebon Bawang X, Tanjung Priok, Jakarta Utara . Menurut mereka masjid tersebut digunakan oleh jemaah Ahmadiyah. Pengurus masjid membantah mesjid tersebut eksklusif untuk jemaah Ahmadiyah.

26 November 2010

Puluhan rumah dan satu rumah milik warga Ahmadiyah dibakar di Dusun Ketapang, Lombok Barat. Perusakan dilakukan warga yang tidak ingin desanya ditinggali jamaah Ahmadiyah. Akhirnya, Bupati Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Zaini Arony, memerintahkan warga Ahmadiyah agar jangan tinggal di Dusun Ketapang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

3 Desember 2010

Sekitar pukul 00.37 WIB, sekelompok orang bersepeda motor menyerang dan merusak sebuah masjid Ahmadiyah di Jalan Ciputat Raya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

8 Desember 2010

Hasil rapat koordinasi antara pemerintah kota Tasikmalaya beserta sejumlah pimpinan lembaga pemerintahan kota Tasikmalaya memutuskan untuk menutup sejumlah sarana milik Ahmadiyah di kota Tasikmalaya.

10 Desember 2010

Sekitar seribu santri di Sukabumi, Jawa Barat membongkar masjid Ahmadiyah di Kampung Panjalu Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi. Pembongkaran dilakukan setelah keluar putusan Mahkamah Agung yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi yang menyatakan masjid tersebut bukan milik jamaah Ahmadiyah, melainkan milik warga sekitar.

27 Desember 2010

Madrasah Al Mahmud milik ahmadiyah di Kampung Rawa Ekek Desa Sukadana Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, dibakar orang tak dikenal. Seminggu sebelumnya sebuah musola juga dibakar. Selama ini madrasah dipergunakan jamaah Ahmadiyah untuk kegiatan pendidikan keagamaan.

29 Januari 2011

Puluhan massa Front Pembela Islam (FPI) berunjuk rasa setelah mengetahui terdapat kegiatan di masjid milik jamaah Ahmadiyah di Makassar. Mereka memaksa jamaah itu minggat. Akibatnya, jamaah Ahmadiyah dievakuasi ke masjid An Nushrat, di Jalan Anuang 112, Makassar.

6 Februari 2011

Warga menyerang jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga pagi ini, tercatat tiga orang dilaporkan tewas dalam insiden penyerangan tersebut. Tragedi kemanusiaan dari gerakan Anti Ahmadiyah di Indonesia semakin menjadi-jadi, terlihat dari tragedi Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu 6 Februari 2011) sekitar pukul 10.00 WIB massa berjumlah 1.500 orang menyerang lokasi Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Terjadi perlawanan, korban berjatuhan dari pihak Ahmadiyah, ada tiga orang Ahmadiyah yang tewas dan sejumlah korban luka serius dievakuasi ke rumah Sakit Serang, Banten. Pagi sebelumnya, Sabtu (5/2/2011) polisi membawa Parman, isterinya, dan Tetep. Parman merupakan mubaligh Ahmadiyah kelahiran Cikeusik, sedangkan Tetep ketua pemuda Ahmadiyah Cikeusik. Alasan polisi membawa ketiga warga Ahmadiyah tersebut untuk meminta keterangan atas status imigrasi istri Parman, warga Filipina dan

sampai saat ini ketiga warga ahmadiyah tersebut masih berada di Polres Pandeglang. Sementara 25 warga Ahmadiyah lain diungsikan ke lokasi aman guna menghindari penyerangan. Ke- 25 orang tersebut mayoritas orang tua dan anak tersebut diungsikan ke rumah keluarga Parman dengan jarak satu jam dari lokasi.

Mendengar informasi bahwa warga Ahmadiyah Cikeusik diungsikan, pemuda-pemuda Ahmadiyah dari Jakarta dan Serang akhirnya pergi menuju Cikeusik dengan tujuan melakukan pengamanan terhadap warga Ahmadiyah yang masih menetap di Cikeusik.

Mereka tiba-tiba pukul 08.00 WIB keesokan harinya, Minggu (6/2/2011), dengan jumlah 18 orang ditambah tiga orang warga Cikeusik dan melakukan penjagaan terhadap rumah Parman. Pada saat itu enam petugas polisi dan reserse kriminal sudah berada di lokasi, pada pukul 09.00 WIB, datang satu mobil pick up polisi dan dua truk Dalmas.

Mereka makan pagi bersama dan mengobrol dengan warga Ahmadiyah. Polisi memimta warga Ahmadiyah yang berada di Desa Umbulan untuk segera meninggalkan lokasi dan tidak melakukan perlawanan jika ada serangan. Warga Ahmadiyah menolak, lalu perwakilan polisi meninggalkan lokasi karena menerima telepon. Sejak saat itu tidak ada dialog kembali, warga Ahmadiyah berkumpul di dalam rumah Parman. Pada pukul 10.00 WIB pagi, massa dari arah utara mendatangi lokasi warga Ahmadiyah. Mereka berteriak-teriak sambil mengacungkan golok. “Ahmadiyah Hanguskan! Ahmadiyah buarkan!, Polisi minggir! Kami yang berkuasa di sini,” ucapan-ucapan kelompok penyerang kemarin.

Polisi di sekitar lokasi mendingkan saja. Saat mendekati halaman rumah Parman, wakil Ahmadiyah yang berjaga pun ke luar. Massa pun makin beringas dan terjadi pemukulan. Kemudian melihat terjadi pemukulan, 21 warga Ahmadiyah yang bertahan pun ke luar dari rumah dan melakukan perlawanan, sehingga sempat membuat massa yang beringas tersebut mundur.

Namun, gelombang Massa tambah banyak dari arah belakang, serangan makin beringas ditambah dari arah selatan sehingga totalnya mencapai 1500 penyerang. Saksi mata dari Ahmadiyah mengatakan sempat terjadi hujan batu. “Kita bertahan, terjadi hujan batu, mereka makin mendesak, kita terpojok, kita masuk ke sawah, kita bubar, kemudian dikejar dan dipukulin,” unjar saksi dalam realis Ahmadiyah. Penyerang berusaha mengejar anggota Ahmadiyah yang tertangkap ditelanjangi kemudian dipukuli secara brutal bersama-sama.

Akibat penyerangan yang brutal tersebut mengakibatkan tiga warga ahmadiyah tewas di tempat, ketiga orang tersebut kemudian dinyatakan Syahid oleh Khalifah Ahmadiyah., yakni

1. Tb Candra,
2. Roni,
3. Wahyono.



Warga Ahmadiyah yang bisa melarikan diri pun menerima banyak luka sabetan senjata tajam dan memar akibat pukulan dan lemparan batu. Sebagian besar tubuh jamaah Ahmadiyah yang diamuk massa yang beringas tersebut penuh dengan sayatan golok. Wajah rusak, dan luka lebam

Terhitung mulai Februari 2011, setelah meletup tragedi Cikuesik, Pandeglang, ada empat daerah yang menerbitkan keputusan melarang segala aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Keempatnya adalah keputusan Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 8 Februari 2011; Bupati Pandeglang, Banten, pada tanggal 21 Februari 2011; Walikota Samarinda pada 25 Februari 2011; dan Gubernur Jawa Timur pada 28 Februari 2011. Sejumlah pemerintah daerah telah lebih dulu melakukannya. Di antaranya: Lombok Timur pada 1983; Kuningan, Jawa Barat (2002); Garut, Jawa Barat (2005); Cianjur, Jawa Barat (2005); dan Sukabumi, Jawa Barat pada 2006.

Di Jawa Timur, Gubernur Soekarwo meneken surat keputusan Nomor 188/94/KPTS/013/2011. Isinya berisi sederet larangan bagi Jemaat Ahmadiyah untuk: menyebarkan ajaran baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik; memasang papan nama dan segala bentuk atribut lain di tempat umum, masjid, mushala, lembaga pendidikan, dan tempat-tempat umum. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat. Di hari yang sama, larangan serupa diberlakukan di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Hal itu ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bogor Diani Budianto yang dinyatakan berlaku sejak ditandatangani, 3 Maret 2011 lalu.

Ahmadiyah menjadi objek yang “menggiurkan” bagi para elit agama. Kecurigaan tersebut, secara hipotetik diungkapkan oleh Espito(1985), Sayyid Vali Reza Nasr, (1996), yang mempelajari pola penindasan Ahmadiyah di Pakistan, menyatakan bahwa posisi Ahmadiyah merupakan “bola bekel” untuk menekan pemerintah

Bhuto. Hipotetik itu tepat untuk kasus Pakistan, karena salah satu tokoh Ahmadiyah, Sir Zafrullah Khan, menjadi orang kuat dalam Kabinet Bhuto. Hipotetik tersebut, tidak dapat diterapkan untuk membaca kasus Indonesia, karena pelarangan Ahmadiyah, lebih karena masalah doktrinal⁶, bukan masalah politik. Walaupun demikian, argumen dasar hipotetik tersebut berlaku di Indonesia, yakni ketika memposisikan Ahmadiyah sebagai korban politik untuk menaikkan *bargaining* politik di mata pemerintah. Hal tersebut, mengandung arti , bahwa pihak-pihak yang mempersoalkan Ahmadiyah, memiliki kepentingan ganda, yakni, *pertama*, dicurigai sebagai bentuk kecemburuan elit agama terhadap sumber daya yang dimiliki Ahmadiyah dan atau ketakutan terhadap sikap ekspansif dari Ahmadiyah, merebut umat yang mereka miliki. *kedua*, Ahmadiyah dijadikan “alat” untuk menekan pemerintah setempat, melalui gerakan-gerakan makar atau anarkis. Kecurigaan adanya motif-motif tersembunyi tersebut, perlu diuraikan secara seksama dalam penelitian tersendiri.

Darigambaranyangtelahdiuraikantersebut,dapatdiidentifikasi anatomi antagonisme masyarakat agama v.s Ahmadiyah Qadian di Pakistan maupun di Indonesia⁷, sebagai berikut

1. Gerakan horizontal
 - a. Adanya perbenturan struktur nilai (doktrin keagamaan),.
 - b. Adanya instrumen individual berupa kecemburuan dan ketakutan terhadap sikap ekspansif dari Ahmadiyah, merambah daerah kekuasaannya, dimana umatnya berada.

⁶ Lihat, Mohammad Atho Mudzhar, 1993, 144

⁷ penjelasan lebih detail lihat Munawar Ahmad, 2004, *Anatomi Antagonisme Masyarakat Agama: Kasus Intimidasi Struktural Ahmadiyah di Indonesia dan Pakistan*, Jurnal Essensia, Vol 5, No.2, Juli 2004

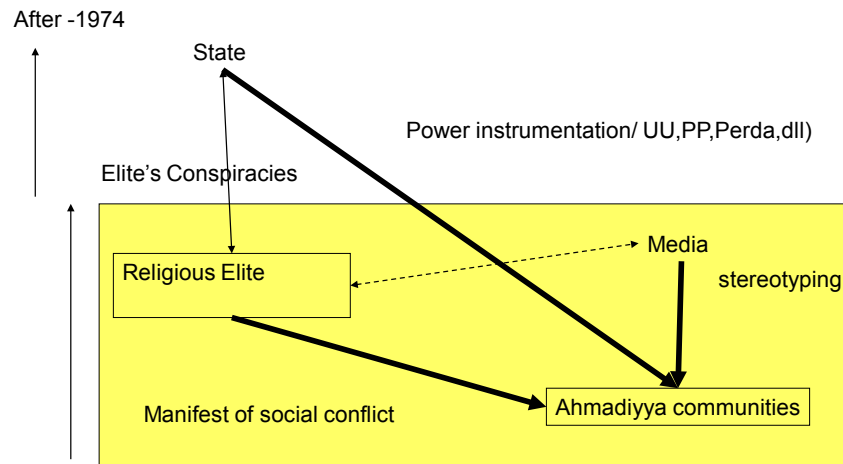
- c. Ada entitas luar doktrinal yang ikut memperkeruh konflik Ahmadiyah versus non-Ahmadiyah. Entitas tersebut berasal dari persoalan ekonomi, politik, budaya, dll

2. Gerakan vertikal

- a. Hegemoni stigma kafir kepada warga Ahmadiyah. Di Pakistan diperankan oleh *Jamaat-I-Islami* (JI), pimpinan Abul A'la Maududi, Majelis Ulama Indonesia, (Indonesia) dan LPPI
- b. Teror dan agitasi yang sistemik, baik sosiologis maupun wacana.
- c. Konspirasi struktural antara gerakan anti-Ahmadiyah dengan negara

Pola antagonistic antara elit agama – Negara versus Ahmadiyah, baik di Indonesia, maupun di Pakistan paska 1984, menunjukkan pola sebagai berikut :

**The pattern of Antagonistic
Ahmadiyah v.s anti Ahmadiyah
in Pakistan and Indonesia pre-post 1974**



BAB V

CANDY'S BOWL: KONSEP DAN PRAKTEK KERUKUNAN BERAGAMA DI INDONESIA



A. Keragaman Keyakinan: Fakta Bukan Wacana Sosial

Salah satu kekayaan bangsa ini yang amat tidak tertandingi oleh bangsa manapun di seluruh dunia adalah keragaman budaya, agama dan sosialnya. Di Indonesia, ada begitu banyak keragaman yang berakar secara alami dari seluruh proses kultural yang bergabung dengan perubahan yang terjadi secara global. Semua bentuk tersebut kini tertata sebagai bagian dari diri kita yang bisa kita saksikan seperti sekarang ini.

Semua perbedaan muncul dan berkembang. Tradisi budaya lahir dan diteruskan turun temurun, perbedaan agama menjadi sebuah warisan, dan kehidupan sosial yang sangat variatif menjadi ciri khas di setiap penjuru negeri. Mudah ditemukan bahwa di setiap wilayah

yang berada dalam satu lokasi sekalipun, terdapat perbedaan yang amat nyata. Itu sebabnya kita memiliki ribuan perbedaan yang berdeviasi dari berbagai budaya yang ada sebelumnya.

Berbicara tentang hubungan antar agama, wacana pluralisme agama menjadi perbincangan utama. Pluralisme agama sendiri dimaknai secara berbeda-beda di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia, baik secara sosiologis, teologis maupun etis.

Secara sosiologis, pluralisme agama adalah suatu kenyataan bahwa kita adalah berbeda-beda, beragama dan plural dalam hal beragama. Ini adalah kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam kenyataan sosial, kita telah memeluk agama yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap adanya pluralisme agama secara sosiologis ini merupakan pluralisme yang paling sederhana, karena pengakuan ini tidak berarti mengizinkan pengakuan terhadap kebenaran teologi atau bahkan etika dari agama lain.

Penjelasan berikut merupakan uraian yang ditulis oleh Zainul Abas, dari artikelnya yang berjudul *Hubungan Antar Agama di Indonesia: Tantangan dan Harapan* Terdapat kesan bahwa pandangan tentang *absolutisme* agama didasarkan oleh kandungan ajaran bahwa pemeluk agama tidak dapat objektif terhadap kebenaran lain. Bagi umat Islam barangkali didasarkan pada ajaran bahwa “agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam”.

Pengakuan pluralisme secara sosiologis ini juga dikemukakan oleh Mukti Ali. Mukti Ali secara sosial tidak mempersoalkan adanya pluralisme, dalam pengakuan-pengakuan sosial, tetapi ia sangat tegas dalam hal-hal teologis. Ia menegaskan bahwa keyakinan terhadap hal-hal teologis tidak bisa dipakai hukum kompromistis. Oleh karena itu, dalam satu persoalan (objek) yang sama, masing-masing pemeluk agama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, misalnya pandangan tentang al-Qur’an, Bibel, Nabi Muhammad, Yesus dan Mariam.

Menurutnya, orang Islam melakukan penghargaan yang tinggi terhadap Mariam dan Yesus. Hal itu merupakan bagian keimanan orang Islam. Orang Islam sungguh tidak dapat mempercayai (mengimani) ketuhanan Yesus Kristus tetapi mempercayai kenabiannya sebagaimana Nabi Muhammad. Kemudian, orang Islam juga tidak hanya memandang al-Qur’an tetapi juga Torah dan Injil sebagai Kitab Suci (Kitabullah). Yang menjadi persoalan, apakah Kitab Bibel yang ada sekarang ini otentik atau tidak, dan apakah seluruhnya merupakan wahyu Tuhan. Hal ini bukan berarti bahwa orang Islam selalu menolak Wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Musa, Isa atau rasul-rasul lain, meskipun orang Islam tidak bisa mengakui bahwa Bibel sebagaimana sebelum mereka hari ini terdiri dari Kalam Tuhan seluruhnya. Namun demikian, orang Islam percaya bahwa Bibel memuat/mengandung Kalam Tuhan.¹

Tampak Mukti Ali ingin menegaskan bahwa masing-masing agama memiliki keyakinan teologis yang tidak bisa dikompromikan. Islam memiliki keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai hal-hal yang diyakini oleh umat agama lain, misalnya konsep tentang Nabi Isa. Begitu juga, Kristen memiliki keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai hal-hal yang diyakini oleh Islam, misalnya konsep tentang Nabi Muhammad.

Jadi, pengakuan tentang pluralismenya berada pada tataran sosial, yakni bahwa secara sosiologis kita memiliki keimanan dan keyakinan masing-masing. Persoalan kebenaran adalah persoalan dalam wilayah masing-masing agama.

Mukti Ali menjelaskan bahwa ada beberapa pemikiran diajukan orang untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. *Pertama*, sinkretisme, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. *Kedua*, *reconception*, yaitu menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan

1 Mukti Ali, “Dialog between Muslims and Christians in Indonesia and its Problems” dalam *Al-Jami’ah*, No. 4 Th. XI Juli 1970, hlm. 55.

agama-agama lain. *Ketiga, sintesis*, yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari pelbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran) itu. *Keempat, penggantian*, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah; dan berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam agamanya. *Kelima, agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan.²

Mukti Ali sendiri setuju dengan jalan “*agree in disagreement*”. Ia mengakui jalan inilah yang penting ditempuh untuk menimbulkan kerukunan hidup beragama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar.³

Wacana pluralisme agama Djohan Effendi berbeda dengan pluralisme Rasjidi dan Mukti Ali di atas. Pengakuan pluralisme Djohan Effendi bukan hanya pengakuan secara sosiologis bahwa umat beragama berbeda, tetapi juga pengakuan tentang titik temu secara teologis di antara umat beragama. Djohan tidak setuju dengan absolutisme agama. Ia membedakan antara agama itu sendiri dengan keberagaman manusia. Pengertian antara agama dan keberagaman harus dipahami secara proporsional. Menurutnya,

2 A. Mukti Ali, “Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi”, dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta : INIS, 1992), hlm. 227-229.

3 *Ibid.*, hlm. 230.

agama –terutama yang bersumber pada wahyu, diyakini sebagai bersifat *ilahiyah*. Agama memiliki nilai mutlak. Namun, ketika agama itu dipahami oleh manusia, maka kebenaran agama itu tidak bisa sepenuhnya ditangkap dan dijangkau oleh manusia, karena manusia sendiri bersifat nisbi. Oleh karena itu, kebenaran apapun yang dikemukakan oleh manusia –termasuk kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia—bersifat nisbi, tidak absolut. Yang absolut adalah kebenaran agama itu sendiri, sementara kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia itu nisbi. Kebenaran absolut itu hanya bisa diketahui oleh ilmu Tuhan.⁴

Sumber utama dari kekacauan itu adalah ketidakmampuan masing-masing negara itu dalam mengelola perbedaan itu. Artinya, perbedaan justru dieksploitasi untuk dijadikan sebagai ideologi yang menjatuhkan satu sama lain. Di sinilah kita mengenal istilah politik keberagaman. Artinya, keberagaman yang tadinya alami kini direduksi menjadi sebuah kebijakan yang berakar dari paradigma politik yang dianut oleh negar atau pemerintah yang berkuasa.

Reduksi atas keberagaman bukan sesuatu yang salah dan dosa politik. Sebab pada dasarnya negara memang harus mengambil alih fungsinya sebagai regulator seluruh sistem yang ada di dalam masyarakat, termasuk keberagaman sekalipun. Tanpa peran negara, maka keberagaman bisa menjadi sebuah fatalisme yang amat parah.

Sayangnya, setiap kali peran negara muncul, yang ada adalah inkonsistensi antara keberadaan keberagaman itu sendiri dengan maksud pemerintah. Kita bukannya tidak pernah mengalaminya. Di masa lalu Orde Lama, ketika rezim yang berkuasa masih sangat dominan, perbedaan dikedepankan dengan jargon yang kala itu amat terkenal: Nasakom. Isinya ada tiga, nasionalisme, agama dan komunisme. Waktu itu, ideologi yang ada memang sangat berpihak

4 Djohan Effendi, “Dialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?”, dalam *Majalah Prisma 5*, Juni 1978, hlm. 16. Lihat juga Djohan Effendi, “Kemusliman dan Kemajemukan Agama” dalam Th. Sumarthana dkk. (ed.), *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, hlm. 54-58.

kepada komunisme, sehingga kemudian ideologi lain disingkirkan, termasuk perbedaan budaya yang ada. Terkait, beberapa tokoh kebudayaan kemudian harus masuk bui karenanya. Penguasa memandang bahwa keberagaman ternyata perlu disederhanakan menjadi makna dan tafsir penguasa penguasa saja.

Di masa Orde Baru, keberadaan keberagaman menjadi lebih parah. Kalau yang sebelumnya memandang bahwa keberagaman masih ada dan perlu disederhanakan, penguasa jaman Orde Baru memandang bahwa keberagaman justru tidak ada. Seluruh ideologi disatukan di bawah satu kata, sementara keragaman dianggap tabu untuk dibicarakan. Maka semua keberagaman merujuk kepada Pancasila. Padahal Pancasila sendiri di dalam dirinya memiliki keberagaman. Lalu dikenal pula nama misalnya demokrasi Pancasila. Ternyata semuanya berujung kepada penyatuan seluruh perbedaan politik mendukung penguasa. Padahal nama demokrasi itu sendiri berakar pada perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Di jaman pemerintah yang baru ini, suasana awalnya begitu terbuka dan bebas dalam berekspresi. Sayangnya, belakangan ini muncul sebuah gagasan-gagasan yang berujung kepada politik keberagaman gaya baru. Entah bagaimana caranya, namun yang terlihat di lapangan amat jelas, bahwa penguasa menggunakan legalitasnya untuk “menciptakan” keberagaman namun kemudian menggunakan keberagaman tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Pemerintah sudah saatnya melihat semuanya ini. Pemerintah harus menjadikan perbedaan tetap hidup dan berkembang, namun tidak sampai menjadi sebuah ideologi yang menentukan hidup mati kelompok, etnis, agama, atau entitas tertentu demi kekuasaan dan dukungan politik untuk mereka. Sebab bagaimanapun, keragaman kita di negeri ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Kita, menjadi bangsa seperti sekarang ini justru karena kita berbeda. Kalau mau memajukan bangsa, tidak dengan menyeragamkan.

Ketika pemerintah Singapura, China dan Jepang ingin membangun semangat untuk maju pada seluruh warganya, mereka menggali nilai budaya yang merupakan warisan leluhur mereka dan menjadikannya kekuatan untuk maju. Demikian juga seharusnya Indonesia . pemerintah harus menjadikan keberagaman sebagai alat untuk maju dan menjadikan diri lebih baik lagi. Seluruh cara harus dikerahkan supaya kita bisa maju dalam berbagai perbedaan yang ada itu dan dengan bertekun menjadikannya sebagai kekuatan untuk menyatukan bangsa.

Politik Keberagaman merupakan pola partisipasi pemerintah dalam mengembangkan politik berbasis pada kebutuhan dan keinginan dari warganya. Politik ini merupakan manifestasi lain semangat demokrasi. Pemerintah semestinya menjadi pemelihara dan penyedia tatanan masyarakat yang kuat berbasis pada harmoni, semua ide masyarakat tidak ada yang salah atau benar, tetapi ekspresi ide mereka adalah syah hadir dalam kehidupan bernegara.

Dengan demikian politik keberagaman ini memerlukan prasyarat yakni

1. Adanya kemapaman dalam masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi
2. Adanya nilai-nilai luhur yang dihargai sebagai standar kehidupan
3. Memiliki konsistensi dalam menegakkan prinsip
4. Adanya nilai-nilai luhur yang mengawal praktek demokrasi
5. Kuatnya budaya menghargai nilai-nilai kehidupan

Efek politik keberagaman terhadap paham keagamaan, telah menempatkan agama sebagai provider etis dalam menegakan harmoni social. Negara tidak diperkanankan memihak pada

nilai-nilai suatu agama, sehingga setiap agama didorong untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran agama masing-masing, termasuk memberi peluang untuk mendirikan rumah-rumah ibadah di dalam masyarakat berbasis pada clustering yang terencana. Negara tidak boleh bebas nilai agama (sekuler) karena Negara merupakan institusi politik yang bertanggungjawab terhadap keharmonisan hubungan antara agama yang dianuti oleh masyarakat, tetapi Negara juga tidak diperkenankan memihak pada satu institusi agama, Karena dipastikan akan menciptakan keberpihakan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Politik keberagaman di Indonesia memerlukan format baru, yakni kehidupan agama tidak dapat diperlakukan dalam bingkai politik, yakni selalu meletakkan kecurigaan bahwa agama menjadi kekuatan untuk melakar terhadap pemerintahan yang syah. Indonesia pernah mengalami kehidupan dimana agama menempel dalam kekuasaan, sehingga agama dijadikan instrument politik penguasa untuk bertahan dan melawan berbagai gerakan makar kepada raja dan kerajaan.

Sebagai institusi politik yang formal, Negara memang tidak boleh memihak pada satu agama, tetapi Negara harus dilandasi oleh moral agama, sehingga akan menjadi jaminan jika Negara melaksanakan moral agama, dari agama manapun, dipastikan Negara akan selalu berada dalam equilibrium yang mampu menjadi harmoni. Kejahatan-kejahatan atas nama agama harus diselesaikan secara hukum positif yang konsekuen, karena kekerasan jenis apapun bertentangan dengan norma-noma sosial dimanapun.

Mengingat betapa urgennya masalah politik keberagaman ini bagi sosial, beberapa Negara maju telah melakukan eksperimen bagaimana membuat model-model kehidupan beragam tersebut. Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia, juga beberapa Negara Arab telah berani melakukan eksperimen sosial. Eksperimentasi

merek telah melahirkan terobosan baru dalam mencari model, seperti istilah Melting Pot, Salad Bowl, sekuler, dan Agonisme.⁵

B. Sekularisme

Sekularisme adalah sebuah prinsip pemisahan antara insittusi Negara dan orang-orang yang mendapat mandate sebagai penyelenggara Negara dari institusi agama dan ajaran agama. Ajaran pemisahan ini dapat dilacak dari para filsuf Yunani dan Romawi, juga dikembangkan oleh Ibnu Rusd, kemudian diterapkan oleh beberapa filsuf abad tengah seperti Voltaire, Spinoza, John Locke, dan diterapkan oleh Thomas Jefferson.

Pada intinya para penganjur Sekuler, memandang jika pemisahan agama dari Negara akan memberikan kemajuan yang pesat bagi Negara di dalam mengelola modernitas yang dihadapinya. karena sifatnya, agama tidak boleh menjadi warna dalam pelayanan public, sehingga semua pihak dapat dilayani secara baik dan adil. Modernisasi menghendaki jika semua basis pelayanan kepada masyarakat adalah keterbukaan dan kemudahan.

Istilah Sekularisme, untuk pertama kalinya dikembangkan oleh George Holyoake pada tahun 1851 dalam *The Origin and Nature of Secularism*. Dalam pandangan Holyoake yang dimaksud dengan sekularisme itu

to describe his views of promoting a social order separate from religion, without actively dismissing or criticizing religious belief. Secularism is not an argument against Christianity, it is one independent of it. It does not question the pretensions of Christianity; it advances others. Secularism does not say there is no light or guidance elsewhere, but maintains that there is light and guidance in secular truth, whose conditions and sanctions exist independently, and act forever. Secular knowledge is manifestly that kind of knowledge which is founded in this life, which relates to the conduct of this

5 Penjelasan selanjutnya penulis kutip dari www.wikipedia.com

*life, conduces to the welfare of this life, and is capable of being tested by the experience of this life.*⁶

Dalam pengertian politik, sekularisme dimaksudkan untuk gerakan yang mengusung pemisahan agama dari pemerintahan, melepaskan hukum positif dari hukum agama menjadi hukum sipil, membatasi deskriminasi berbasis agama. Beberapa Negara yang menerapkan kebijakan sekuler, yakni Amerika Serikat, Perancis, India, Mexico, Korea Selatan, Turki

Sebenarnya politik sekularisme tersebut memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan pemerintah, seperti dijelaskan oleh para ahli sekularisme, beberapa kondisi sekularisme yang bermanfaat tersebut sebagai berikut⁷

1. *Refuses to commit itself as a whole to any one view of the nature of the universe and the role of man in it.*
2. *Is not homogenous, but is pluralistic.*
3. *Is tolerant. It widens the sphere of private decision-making.*
4. *While every society must have some common aims, which implies there must be agreed on methods of problem-solving, and a common framework of law; in a secular society these are as limited as possible.*
5. *Problem solving is approached rationally, through examination of the facts. While the secular society does not set any overall aim, it helps its members realize their aims.*
6. *Is a society without any official images. Nor is there a common ideal type of behavior with universal application.*

Di dalam masyarakat sekuler, dipastikan akan tumbuh, hal-hal sebagai berikut

1. Deep respect for individuals and the small groups of which they are a part.

⁶ Holyoake, G.J. (1896). *The Origin and Nature of Secularism*, London: Watts and Co. p.51

⁷ Wikipedia.com

2. Equality of all people.
3. Each person should be helped to realize their particular excellence.
4. Breaking down of the barriers of class and caste

Namun sayang, pada kenyataannya sekularisme telah menutup kanal kekuatan agama untuk masuk mewarnai pemerintahan. Agama dicurigai sebagai entitas lahirnya ketidakadilan dalam pelayanan public. Ketidakkampuan Negara menjadi secular sepenuhnya menjadikan Negara berkolusi dengan lembaga agama secara sembunyi-bunyi. Kenyataan ini akan menimbulkan inkonsistensi Negara terhadap agama, yang memang sebenarnya agama tidak dapat dihapus perannya dalam kehidupan politik Negara.

C. Melting Pot

Istilah Melting Pot atau Pot Tempat Mencair adalah istilah metafora terhadap kehidupan heterogenius nya masyarakat menuju masyarakat yang cenderung homogen, dengan kata lain, semua elemen yang berbeda “mencair bersama” ke dalam ruang harmoni dengan menggunakan kultur bersama. Di Amerika sendiri politik *Melting Pot* ini telah diintroduksirkan sejak tahun 1780 untuk mengantisipasi dampak dari gerakan migrant, melalui *Melting Pot*, Amereka mengajak para migrant untuk berasimilasi ke dalam kultur baru yang ada di Amerika.

Namun sejak taun 1970, politik asimilasi ini ditentang oleh beberapa orang dengan mengedepankan gerakan multiculturalisme, yang menyatakan bahwa perbedaan budaya di dalam masyarakat merupakan kekayaan masyarakat yang tidak dapat disepelekan. Perbedaan adalah mosaic yang indah seperti *Salad Bowl*, semangkuk salada, semua budaya hidup berdampingan, tetapi tetapi berbeda.

Melting Pot dipopulerkan dari sebuah naskah drama karya Israel Zangwill yang berjudul *The Melting Pot* pada tahun 1908. Dalam

naskah tersebut Zangwill menggambarkan situasi masyarakat yang mencair, hidup dalam keanekaragaman tetapi mereka mampu mengembangkan kehidupan yang damai tanpa terusik dengan perbedaan yang mereka bawa, mereka hidup dalam sebuah simpony yang romantic. Namun jauh sebelumnya, J. Hector St John deCrevecouer, pernah menulis sebuah artikel yang berjudul *Letters From an American Farmer* (1782), sebuah tulisan yang berupaya menjelaskan pertanyaannya sendiri tentang apa yang akan diperbuat oleh para imigran untuk hidup di Amerika sebagai manusia baru (*new man*), secara khusus Hector menuliskannya sebagai berikut

“What then is the American, this new man?” that the American is one who “leaving behind him all his ancient prejudices and manners, receives new ones from the new mode of life he has embraced, the government he obeys, and the new rank he holds. He becomes an American by being received in the broad lap of our great Alma Mater. Here individuals of all nations are melted into a new race of men, whose labors and posterity will one day cause great changes in the world.”

Melting pot menjadi icon politik keberagaman di Amerika hingga kini, namun bukan berarti hanya Amerika saja yang menerapkan politik Melting Pot ini, tercatat beberapa Negara yang memiliki kekuatan budaya yang aneka, juga menerapkan politik ini sebagai medium homogenitas sesuai yang dicita-citakan oleh penguasaanya.

D. Salad Bowl

Konsep *salad Bowl* lebih diarahkan pada integrasi dari berbagai budaya yang berbeda dalam ruang sosial politik. Kesadaran bahwa keanekaragaman unsur budaya adalah mosaik bagi masyarakat, tetapi tetap perlu diarahkan menuju homogenitas yang ideal menurut konsep penguasaan. Seperti halnya “wadah Salad” di dalamnya

diisi oleh berbagai jenis bahan sayuran untuk salad, sungguh ideal, menyatu dalam sebuah wadah, tanpa harus mereduksikan warna dan jenis dari kemurnian budaya masing-masing, tetapi tetap harus berada dalam homogenitas. Negara memiliki andil besar dalam membentuk asimilasi menuju format budaya baru. Sebagai contoh kehidupan Singapura yang kaya dengan budaya, juga menerapkan istilah “Masyarakat Rujak” bagi 3 basis kebudayaan Singapore, yakni Melayu, Cina dan India. Rujak adalah istilah melayu yang artinya makanan yang dibuat dari sayuran dan buah-buahan dicampur dengan diberi bumbu.

Perbedaan dalam hal budaya memang sangat strategis memainkan peran dalam masyarakat Singapur yang cenderung *welfare state*, Karena secara teritorial, keharmonisan ketiga basis budaya Singapore akan menjadi factor pengubah dinamika bisnis di Singapura, termasuk mengubah peta bisnis kawasan dan dunia.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dipandang sebagai Negara yang sangat kaya dengan budaya dan teologi lokal. Kekayaan tersebut sangatlah dominan membawa perubahan politik di tingkat nasional. Pengalaman telah mencatat jika para penjajah di Indonesia juga memandang bahwa perbedaan yang dimiliki Indonesia ini perlu ditangani dengan serius, khususnya perbedaan berbasis pada teologi.

Jika belajar dari politik asimilasi, model Melting Pot atau politik integrasi budaya model Salad Bowl, tentu Indonesia dapat menemukan model yang baru dengan beberapa perspektif baru. Politik *Melting Pot* yang diterapkan di Negara-negara multietnik, sangat tetapi jika basis negaranya adalah para migrant, tetapi berbeda jika warga negaranya secara utuh memang sangat beragama sejak mula. Politik *melting pot* tidak dapat mereduksi perbedaan yang tumbuh dari ruang asal hidupnya, tetapi sangat efektif diterapkan jika perbedaaan dibawa ke dalam satu ruang sosial politik baru, dimana adanya tujuan yang sama, mampu mereduksi perbedaan

asasi mereka. apalagi peran Negara itu terlibat dalam mengatur kehidupan baru dimana mereka berada. Proses asimilasi dapat diterapkan dengan efektif, walaupun pada akhirnya asimiliasi yang diterapkan justru melahirkan gerakan mereduksi budaya “murni” yang mereka bawa. Maka wajar jika gerakan Multiculturalism dikembangkan sebagai reaksi atas hilangnya identitas budaya murni dari para imigran. Gerakan ini cenderung dianggap sebagai ekspresi sebuah pemaksaan Negara kepada warganya untuk menghapus nilai-nilai individual di dalam masyarakat, padahal di sisi lain, Negara juga tidak mampu menciptakan nilai-nilai baru bagi masyarakat baru tersebut.

Indonesia adalah Negara yang memiliki keragaman latar belakang dari masyarakatnya, yang telah lama hidup dan berada dalam kesadaran sejarahnya. Fakta tersebut tentu tidak lantas Indonesia mengadopsi Melting Pot atau Salad Bowl dalam politik keberagamannya. Penduduk Indonesia sebegini besar adalah bukan migrant, tetapi pribumi yang telah hidup dalam keragaman sejak lama, karena itulah Indonesia patut mengembangkan politik baru berbasis kenyataan ini.

Jika Soekarno mengembangkan nasionalisme sebagai basis politik pemersatu, maka sudah selajaknya dalam perspektif keragaman budaya juga memerlukan model baru. Model ini akan menempatkan Negara sebagai kekuatan politik yang tidak value free, tetapi tetap mampu menjaga keadilan dalam melayani dan mengayomi masyarakatnya. Negara Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim, tidak lantas menempatkan diri sebagai Negara sekuler dan memusuhi agama, tetapi Negara harus terlihat dalam mengembangkan agama sebagai entitas unik dalam masyarakat Indonesia selain entitas budaya. Negara justru menjadi pemain aktif dalam menangani konflik perbedaan berbasis agama, tetapi Negara tidak boleh terjebak dalam sentiment-sentimen

keagamaan yang akan menyeret Negara ke dalam keberpihakan dan ketidakadilan. Kekonsistenan Negara dalam mengelola keadilan ketika berhadapan dengan konflik kepentingan masyarakat agama, menjadi indikator jika Negara Indonesia adalah Negara yang adil dan tidak sekuler.

E. Agonisme : Candy's bowl

Pada periode terakhir ini, muncul istilah agonisme sebagai model baru politik keberagaman. Agonisme berasal dari Yunani, Agonisme, yang artinya kontestan, juara, lawan, pergumulan. Dalam pandangan politik, Agonisme adalah teori politik yang mengembangkan berbagai potensi positif yang mungkin ada di dalam suatu konflik. Agonisme lebih berupaya sebagai upaya channeling atau kanalisasi atas berbagai potensi konflik yang positif membawa kepada keharmonisan sehingga melahirkan pemahaman yang seimbang terhadap berbagai potensi masyarakat dan menempatkan mereka pada keadaan yang selalu memiliki nilai-nilai positif bersanding dengan potensi destruktif.

Dalam artikelnya, Chantal Mouffe *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism*, menjelaskan sebagai berikut ⁸

“I use the concept of agonistic pluralism to present a new way to think about democracy which is different from the traditional liberal conception of democracy as a negotiation among interests and is also different from the model which is currently being developed by people like Jürgen Habermas and John Rawls. While they have many differences, Rawls and Habermas have in common the idea that the aim of the democratic society is the creation of a consensus, and that consensus is possible if people are only able to leave aside their particular interests and think as rational beings. However, while we desire an end to conflict, if we want people to be free we

⁸ Chantal Mouffe 2002, *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism*, Institute for Advanced Studies, Vienna, halaman 12

must always allow for the possibility that conflict may appear and to provide an arena where differences can be confronted. The democratic process should supply that arena.”

Basis perhatian Mouffe, terletak pada pemahaman terhadap demokrasi. Pada pemikiran Mouffe, demokrasi selama ini hanyalah dijabarkan pada ranah politik praktis, tidak pada ranah idealitas, yang menyatakan bahwa politik dicipta untuk menciptakan tatanan yang tentram di dalam masyarakat. Jadi sangat lah penting mengelola perbedaan dalam masyarakat. Perlawanan yang diberikan sebagai respon atas eksistensi sebuah perbedaan harus dapat disikapi dengan politik keragaman. Lebih lanjut diungkapkan sebagai berikut⁹ :

Envisaged from the point of view of “agonistic pluralism”, the aim of democratic politics is to construct the “them” in such a way that it is no longer perceived as an enemy to be destroyed, but an “adversary”, i.e. somebody whose ideas we combat but whose right to defend those ideas we do not put into question. This is the real meaning of liberal democratic tolerance, which does not entail condoning ideas that we oppose or being indifferent to standpoints that we disagree with, but treating those who defend them as legitimate opponents. This category of the “adversary” does not eliminate antagonism, though, and it should be distinguished from the liberal notion of the competitor with which it is sometimes identified. An adversary is an enemy, but a legitimate enemy, one with whom we have some common ground because we have a shared adhesion to the ethico-political principles of liberal democracy: liberty and equality. But we disagree on the meaning and implementation of those principles and such a disagreement is not one that could be resolved through deliberation and rational discussion. Indeed, given the ineradicable pluralism of value, there is not rational resolution of the conflict, hence its antagonistic dimension

⁹ *Ibid*, halaman 26

Perbedaan atau keragaman merupakan basis dan kekayaan demokrasi. Dengan demikian, kesadaran keragaman harus dijadikan dasar pembuatan keputusan politik, tidak sebaliknya. Politik keberagaman member tekanan terhadap populasi untuk saling berkompetisi pada ruang saling menghargai, sehingga di dalam ruang demikian, setiap kekuatan, baik mayoritas maupun minoritas saling menjunjung hak-hak sipil, dan penindasan.

Kembali pada kasus Ahmadiyah, dalam perspektif manajemen resolusi konflik, mekipun telah ditempuh berbagai model pendekatan, baik bersifat cultural atau dialogis, ataupun adjudicative atau jalur hukum, selama politik Negara masih berpihak pada mayoritas, selama itu juga kasus minoritas di Indonesia masih sulit untuk berada dalam dimensi demokrasi, tetapi mereka akan tetapi berada dalam hegemoni, yang suatu waktu dapat menjadi mesin pembunuh massal.

BAB VI

P E N U T U P



Kehadiran Ahmadiyah dalam masyarakat Indonesia telah memberi peran yang signifikan terhadap modernisasi pemikiran keagamaan, juga mendorong lahirnya gerakan anti kolonial berdasar pada gerakan persamaan hak dan kesetaraan tanpa melakukan resistensi politik terbuka. Namun, kini kehadiran Ahmadiyah dalam format masyarakat Indonesia post-kolonial, justru menjadi penyebab berbagai kerusuhan berbasis agama pada tingkat akar rumput.

Periode 1950-an merupakan periode perkembangan cepat namun juga periode yang penuh kepahitan bagi Ahmadiyah. Para pemberontak DI/TII, membantai beberapa orang Ahmadiyah di Jawa Barat. Kesalahan mereka hanyalah bahwa mereka tetap teguh dalam keimanan mereka, menolak untuk keluar dari Ahmadiyah. Pada tahun 1953, pemerintah mengesahkan Jemaat Ahmadiyah sebagai badan hukum dalam Republik Indonesia. Organisasi ini berbadan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sejak 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-

1953). Ini membuka pintu tabligh lebih besar lagi. Pengaruhnya tampak pada tahun 1950-1970 ketika banyak tokoh negara yang sangat akrab dengan Ahmadiyah dan dekat dengan orang-orang Ahmadiyah.

Sebagaimana upaya-upaya negara-negara Islam untuk menghancurkan Ahmadiyah melalui Rabithah Alam al Islami semakin menjadi-jadi di awal 1970-an, para ulama Indonesia mengikuti langkah mereka. Maka ketika Rabithah Alam al Islami menyatakan Ahmadiyah sebagai non muslim pada tahun 1974, sebagaimana Majelis Nasional Pakistan melakukan hal yang sama, para ulama Indonesia juga terang-terangan tak menyukai Ahmadiyah. Sejak saat itu, Jemaat Ahmadiyah Indonesia menghadapi berbagai hambatan dan halangan dalam perkembangannya, baik dalam bidang tabligh maupun dalam bidang tarbiyah. Tahun 1974, MUI memberikan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah. Halangan dan rintangan tersebut oleh kaum Ahmadiyah dimaknai sebagai penggenapan nubuwatan Nabi Muhammad bahwa para pengikut Imam Mahdi akan menghadapi keadaan yang sama dengan para sahabat Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam Al Quran Surah Al Jumu'ah: 3-4.

Periode 1980-an adalah periode perjuangan sekaligus penekanan dari pemerintah dan para ulama. Banyak mesjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa. Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyatakan Ahmadiyah sebagai non-Islam. Banyak Ahmadi yang menderita serangan secara fisik. Selanjutnya MUI menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat.

Periode 1990-an menjadi periode perkembangan pesat Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Perkembangan itu menjadi lebih cepat setelah Hadhrat Khalifatul Masih IV atba, Hadhrat Tahir Ahmad, mencanangkan program Baiat Internasional dan mendirikan Moslem Television Ahmadiyya (MTA). Tahun 1999 saat Abdurrahman Wahid menjadi presiden keempat Republik Indonesia, Ahmadiyah seperti

mendapat bapak asuh yang melindungi mereka. Secara terbuka Gu Dur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid siap membela kaum Ahmadiyah dari “serangan” umat Islam yang tak sepakat dengan ajaran Ahmadiyah.

Tahun 2000 warga Ahmadiyah berhasil menggapai mimpi lamanya untuk mendatangkan pimpinan Ahmadiyah internasional yang berkedudukan di London, Inggris, ke Indonesia. Pimpinan tertinggi Ahmadiyah Hadhrat Mirza Tahir Ahmad ke Indonesia datang dari London menuju Indonesia. Ketika itu dia sempat bertemu dan mendapat sambutan baik dari Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid dan Ketua MPR, Amin Rais. Tahun 2005, MUI menegaskan kembali fatwa sesat kepada Ahmadiyah. Akibatnya, banyak mesjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa. Selain itu, banyak Ahmadi yang menderita serangan secara fisik.

Atas nama Pemerintah Indonesia, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung pada tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam. Penyerbuan yang menimpa warga Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, 6 Februari 2011 pukul 10.45 yang mengakibatkan tewasnya tiga orang warga Ahmadiyah adalah peristiwa tragis paling aktual, setelah sebelumnya basis-basis mereka di Parung, Lombok Barat, Makassar, dan tempat-tempat lainnya diobrak-abrik massa.

Dikeluarkannya Fatwa justru telah melahirkan systemic violence, massa semakin leluasa bertindak kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah. Kehidupan mereka diganggu, rumah dan masjid yang mereka bangun, juga dirusak bahwa dibakar. Fatwa menjadi energy legal terhadap pembenaran atas sikap violence yang diproduksi oleh komunitas Anti-Ahmadiyah. Meskipun logika yang dibangun atas dikeluarkannya fatwa tersebut adalah demi menjadi

umat dari kesesatan, telah berubah menjadi sebuah legalitas surgawi atas kekerasan yang dilakukan oleh komunitas tersebut.

Mengingat betapa pentingnya masalah kerukunan tersebut, pemerintah pun berinisiatif untuk melakukan tekanan sebagai upaya menyelesaikan masalah Ahmadiyah, yakni dengan mengeluarkan SKB 3 Menteri pada tahun 2008. Ditengah upaya warga Ahmadiyah melakukan pembelaan hukum di lembaga pengadilan, sebagai perlawanan yudisialnya. Akan tetapi dikarenakan pemerintah sudah menunjukkan keberpihakannya pada mayoritas, maka, sudah dipastikan tim hukum Ahmadiyah juga mengalami kendala.

SKB 3 Menteri semakin mendesak Ahmadiyah ke ruang minoritas yang lebih parah, bahwa pada tahun yang sama, pengurus Ahmadiyah diminta oleh Negara, melalui Kementrian Agama untuk membuat kontrak politik tidak melakukan penyebaran ajarannya kepada masyarakat. Kontrak politik tersebut tertuang dalam 12 Pernyataan Jemaat Ahmadiyah. Adanya SKB 3 dan 12 Pernyataan justru semakin mempersempit ruang gerak Ahmadiyah semakin terdorong pada killing zone. Fatwa dan SKB 3 menteri pada tingkat akar rumput semakin member inspirasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah yang berisi pelarangan terhadap Ahmadiyah. Kenyataan ini semakin memicu keberanian massa Anti Ahmadiyah untuk bertindak lebih anarkis menyerang dan merusak berbagai asset milik Ahmadiyah, bahkan satu pemandangan yang menyedihkan, ada sekelompok gerakan dari militer terlibat dalam “operasi Sajadah” yakni mereka mendatangi masjid Ahmadiyah dan mengajak orang-orang Ahmadiyah untuk kembali ke Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di depan mereka. Fenomena tersebut telah membuktikan bahwa ada scenario besar untuk menekan Ahmadiyah sampai ke akar rumputnya.

Dari berbagai pengalaman dan literature yang terlacak, dapat ditemukan berbagai model manajemen resolusi konflik. Kebijakan

tersebut berbasis pada politik kerukunan umat beragama di Indonesia, yakni pola sekuler, melting pot, salad bowl dan Agonisme. Belajar dari sejarah Indonesia sendiri, bahwa kehidupan masyarakat dan juga kehidupan bernegara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari agama. Indonesia pada jaman kerajaan telah menerapkan instrumentalisasi agama oleh kekuasaan, sehingga kekuatan agama didedikasikan untuk kekuasaan raja dan kerajaan, agama menjadi ideology Negara, sehingga menutup kehidupan agama lain yang berbeda. Memang pada saat itu, kehidupan agama kekuasaan, sangatlah maju pesat karena kekuasaan melindungi dan membela ajaran agama kekuasaan tersebut. Antara agama dan kekuasaan telah terjalin hubungan yang saling sinergi dalam mempertahankan hegemoni masing-masing. Namun sayang, kehidupan tersebut telah melahirkan pemberontakan dari kelompok yang tidak menyukai para pemuka agama yang menyatu dengan kekuasaan, maka perang adalah cara kerajaan untuk meredam gerakan makar dari kelompok-kelompok anti-kerajaan.

Kemudian pada jaman penjajah, yang meskipun penjajah datang pada mulanya hanya berbekal semangat capital, tetapi, seiring dengan misi Zending yang ikut dalam gerakan Imperialisme, umat Islam pun dibuat berang karena penjajah telah memaksakan agama baru melalui hegemoni kapitalnya. Hal tersebut memancing reaksi perlawanan dari kaum agamawan untuk melawan imperialism. Politik penjinakan yang dikembangkan oleh imperialisme terbilang efektif untuk meredam gerakan anti-imperialisme berbasis agama.

Potret politik keragaman Negara dalam memandang agama terus bergulir hingga kini. Orde Lama juga menerapkan politik kanalisasi agama untuk berkembang dalam masa perjuangan Indonesia yang berlanjut pada masa Orde Baru, yang lebih intens memperhatikan agama sebagai entitas baru dalam politik kebangsaan. Masa Orde Baru cenderung menempatkan agama

dalam politik “Belah Bambu” yakni menggunakan kekuatan agama sekaligus menekan gerakan agama untuk tetap berada dalam paksi-paksi yang dapat dikendalikan sewaktu-waktu. Penumpasan sekaligus pendirian gerakan-gerakan radikal sebagai bagian dari sayap para militer yang disebar di tengah masyarakat menjadi pola baru dari fenomena politik Belah Bambu tersebut. Di sisi lain, secara ideologis, Pancasila dijadikan alat politik untuk mereduksi gerakan-gerakan anti-pemerintah ke dalam ranah subversif.

Indonesia telah belajar dari sejarahnya tentang bagaimana semestinya belajar mengelola politik kerukunan umat beragama. Dari sekian model yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai basis politik tersebut, yakni menghindari instrumentalisasi agama oleh politik dan mengembangkan konsep Agonisme Politik sebagai paradigma demokratisasi

Resolusi konflik masalah agama ternyata memerlukan ruang politik keagamaan yang jelas dari Negara. Kejelasan tersebut akan menjamin adanya penghargaan atas perbedaan yang dibawa oleh agama secara inherent, tanpa adanya keinginan untuk melakukan tekanan untuk mengubah keyakinan seseorang ataupun kelompok. Politik *Candy's Bowl* menjamin lahirnya lembaga judicial yang adil dalam menyelesaikan konflik agama serta menciptakan ruang yang kondusif untuk tumbuhnya potensi-potensi positif dari masyarakat agama dalam mengelola keharmonisan hidupnya.

Politik Agonisme berangkat dari asumsi bahwa perselisihan merupakan fakta sosial yang tidak dapat dihindari. Perselisihan akan menjurus pada kehancuran apabila semua pihak yang berseleisih saling mengembangkan semangat destruktif, saling mengalahkan dan membunuh. Konsekuensi ini juga tidak dapat dihindari, apalagi entitas yang berbeda tersebut menjadi bagian dari instrumentalisasi oleh suatu kepentingan, sehingga sesuatu yang mudah diselesaikan, akan semakin berlarut penyelesaikan karena ada dominasi

kepentingan dibalik perselisihan tersebut. Politik pada tingkat praksis memang menjadi mekanisme efektif mengembangkan konflik demi meraih suatu kepentingan. Perbedaan, baik sedikit maupun banyak, diinstrumentalisasi sebagai tenaga yang kuat untuk melakukan tekanan, serangan dan resistensi kepada pihak lain, sehingga salah satu pihak meraih kepentingan dibalik dampak paska konflik terjadi, tanpa menghiraukan apakah dampak konflik tersebut telah menghancurkan tatanan. Secara ilustrasi politik agonisme menghendaki kehidupan sosial yang plural seperti wadah permen (*candy's bowl*) dimana semua warna permen tetap eksis, tetapi mereka berada dalam ruang yang melindungi dan menjamin kehidupan merdeka dari seluruh elemen tanpa direduksi oleh nilai-nilai ideologis diluar dirinya.

Politik pada arti sebenarnya merupakan satu disiplin pengetahuan manusia yang mencita-citakan bagaimana menata tatanan masyarakat dalam harmoni, bersama-sama meraih keberkatan kolektif yang optimal. Politik keberagaman atau politik kerukunan beragama dimanapun, hendaknya berangkat dari asumsi idealis dari politik itu sendiri, bukan instrumentalisasi agama menjadi alat kepentingan. Politik *Candy's Bowl* yang dikembangkan oleh para filsuf-filsuf menekankan pada kesadaran atas fakta bahwa perbedaan adalah kenyataan empiris, namun juga menyadari jika dibalik perbedaan tersebut tersimpan potensi negatif dan positif terhadap manusia. Politik *Candy's Bowl* justru menekankan pada pemberdayaan potensi positif yang tersembunyi dalam ruang konflik, seperti konflik antar dan inter agama. Agama memiliki potensi permusuhan, karena secara teologis, setiap agama memiliki kekhasan yang tidak dapat didialogkan, tetapi hanya dihormati. Namun harus diakui, setiap agama memiliki ajaran kedamaian yang dapat diimplementasikan bersama-sama sebagai kekuatan untuk hidup dalam harmoni. Dalam hal inilah semestinya Negara

memiliki *political will* untuk mengembangkan potensi kedamaian yang dimiliki oleh ajaran agama, baik lokal maupun samawi. Jika memang Negara tidak memiliki *political will* demikian, maka Negara sebagai lembaga, telah menjadi bagian dari gonicida terstruktur karena secara sadar menggunakan kekuasaan formalnya melakukan *structural violence*.

DAFTAR BUKU RUJUKAN

- Album Showing Progress of Ahmadiyah Community outside India under Hazrat Khalifatul Masih II, 1939, Qadian, Lion Press, Lahore.
- Abdoerahman, 1985, Kegiatan Maulana Rahmat Ali, HAOT selama di Indonesia, Stensilan
- An – Nahdi, Saleh, 1975, Qadian, Rapen, Ujung Pandang
- , 1973, Mengapa dan Bagaimana Kami Masuk Ahmadiyah, Rapen, Ujung Pandang
- Anhar Gonggong, 1986. *HOS Tjokroaminoto*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta,
- Alfian, 1989, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*, Gadjah Mada Press,
- Aqib Suminto, 1989, *Politik Islam Hindia Belanda*, Penerbit LP3ES, Jakarta,
- Ali Mukhayat, 1999, Sejarah Pertablighan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Makalah
- , 1988, Sejarah Ahmadiyah Semarang, Edaran LI No. 55 th. VIII, November 1988.

- Budi Setiyono, *Jejak Tafsir Kaum Ahmadi*, <http://denagis.wordpress.com/2011/08/27/jejak-tafsir-kaum-ahmadi/>
- Basyiruddin Ahmad, Sy, Sejarah M. Rahmat Ali HAOT, Sinar Islam, tahun.....
- , Ahmadiyah di Krucil, edaran LI No. 11 Mei 1974
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1999 Benda H.J, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Penerbit Pustaka Jaya, Jakarta, 1985
- Burhanuddin Daya, 1985, Sumatra Thawalih, dalam Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam di Sumatra Barat, Sinopsis
- Burhanuddin Daya, 1999, Sumatra Thawalih, dalam Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam di Sumatra Barat, disertasi Doktor
- BPLI, 1989, Sejarah Ringkas Lajnah Imaillah Indonesia, BPLI Jakarta
- BPLI, 1989, Sejarah Lajnah Imaillah Indonesia dalam Lintas Waktu 1928- 1982, BPLI Jakarta
- Djohan Effendi, 1978, “Dialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?”, dalam *Majalah Prisma* 5, Juni 1978
- , “Kemusliman dan Kemajemukan Agama” dalam Th. Sumarthana dkk. (ed.), *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*
- Deliar Noer, 1980, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta
- Iskandar Zulkarnaen, 2000, Sejarah Ahmadiyah Indonesia dari tahun 1920–1940, disertasi Doktoral yang dipertanggungjawabkan di hadapan Senat IAIN, Ketua Prof. Dr. Azyumardi Azra
- Iwan Darmawan, 1988, Sejarah Ahmadiyah di Lombok, makalah JAI, Pancor, 1989, Sejarah Ahmadiyah Pancor, Makalah

JAI, 1995, *Glimpse of Ahmadiyah in Indonesia*, JAI Jakarta

JAI, 1994, *Souvenir Peringatan Seabad Gerhana Bulan dan Matahari*, JAI, Jakarta

JAI, 1990, *Kegiatan Perayaan Tasyakur Seabad Ahmadiyah di Indonesia*, JAI, Jakarta

GAI, tt, *Qanun Azsasi, Darul Kutubi Islamiyah*, Jogjakarta

Laporan Sekretaris Tabligh PB JAI, *Daftar alokasi Mubayin baru dari tahun 1993-1999*

Muklis Ilyas, 1999, *Kajian Perkembangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, Makalah

Moh.Nur Ichwan, 2001, "Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis, The Holy Quran in Egypt and Indonesia", *Archipel* 62. Paris, halaman 143-161

Sasmiati, 1990, *Perkembangan Ahmadiyah di Kota Lahat, Sumatera Barat*, Skripsi, IAIN Raden Patah, Palembang.

SA, Djuwaeni, tt, *Sejarah Ahmadiyah Daerah Priangan*, Makalah

-----, 1977, *Sejumlah Riwayat Lajnah Imaillah Indonesia Cabang Ujung Pandang, Rapen dan LI Ujung Pandang*

Hamka, tt. *Islam Masuk Sumatra* Pustaka Nasional, Jakarta

-----, 1960, *Ayahku*, Pustaka Nasional, Jakarta

-----, 1984, *Islam dan Adat Minangkabau*, Penerbit Pustaka Panji Mas, Jakarta

Herman L. Beck, 2005, *The Rupture between The Muhamadiyah and The Ahmadiyya*, *Bijdragen tot taalland en volkenkunde*-210-246

Rani Saleh, 1993, *Doaku yang dikabulkan Allah SWT*, Aristha, Jakarta.

JAI, 1975, *50 Tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, Edisi Yubilium, Sinar Islam, Jakarta

Taslimah A. Wahid, 1995, *Muballigh Markazi Pertama*, M. Abdul Wahid, HA, Pustaka Pribadi

Nurrudin Muneer, MA, 1957, *Tahrik Jadid*, Wakilut Tabsyr, Rubwah

Mirza Mubaraq Ahmad, 1965, *Ahmadiyah in Teh Far East*, Wakiluth tabsyir Rabwah

Muhamad Atho Mudhar, 1993, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, INIS, Jakarta.

MUI, *Kumpulan Fatwa MUI dari Tahun 1975 – sekarang*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Munawar Ahmad, 2004, *Anatomi Antagonisme Masyarakat Agama: Kasus Intimidasi Struktural Ahmadiyah di Indonesia dan Pakistan*, *Jurnal Essensia*, Vol 5, No.2, Juli 2004

Mukti Ali, 1970, "Dialog between Muslims and Christians in Indonesia and its Problems" dalam *Al-Jami'ah*, No. 4 Th. XI Djuli 1970,

-----, 1992, *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi*", dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta : INIS,.

Quintan Wiktorowict, *Islamic Activism : A Social Movement Theory Approach*, Indiana Univesity Press, USA, 2004,

Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, penerbit Pustaka Rakjat, Jakarta, 1949

Soekarno, *Di bawah Bendera Revolusi*, jilid I, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera

Sibthe A. Hasan, 1992, *Sejarah Ahmadiyah Ladongi*, Makalah

Zainul Abas, 2010, *Hubungan Antar Agama di Indonesia : Tantangan dan Harapan*, e-text.

Daftar Responden

1. Bapak Soekarsono Malangjoedo, adalah putra dari Bapak Malangjoedo dan adik dari Bapak Soeroso, Soejadi Malangjoedo. Beliau baiat tahun 1939 di Purwokerto. Menetap di Yogyakarta dari tahun 1941 hingga sekarang.
2. Amin Onah atau Ibu Onah Syarif, istri dari Alm. Syarif, Ahmadi Awaln dari Tasikmalaya, tinggal di Tasik
3. Bapak Nasir Ahmad, BSc, adalah putra dari Bapak Ahmad Sarido. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang beliau selalu terlibat dalam kegiatan Jemaat Yogyakarta. Tinggal di Yogyakarta.
4. Bapak Kol. (Purn) Mahmud Ahmad, adalah putra dari Bapak R. Abdoerahman Ahmadi, beliau menikah dengan Aisyah Nuraeni Sukri Barmawi. Keduanya sangat aktif dalam kegiatan Jemaat. Bapak dan Ibu Mahmud merupakan putra-putra tokoh Jemaat Awaln. Tinggal di Jakarta
5. Ibu AN Mahmud atau Ibu Aisyah Nuraeni Sukri Barmawi. Bapak dan Ibu Mahmud merupakan putra-putra tokoh Jemaat Awaln. Tinggal di Jakarta
6. Ny. Sirtunaeni Wirawiguna, dikenal Ibu Sukri Barmawi adalah istri dari Bapak Sukri Barmawi. Sukri Barmawi seroang tokoh Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang gigih dalam memperjuangkan keyakinannya. Beliau telah menjabat ketua PB JAI 2 periode. Tinggal di Bandung
7. R. Ahmad Anwar, adalah tokoh Jemaat yang sangat dekat dengan Bapak M. Rahmat Ali HAOT, banyak menterjemahkan karya Masih Maud dan Khalifahnya, juga sering menulis dan pernah menjabat sebagai pimpinan redaksi majalah Sinar Islam. Tinggal di Bandung
8. R. Djamhur Wiraatmadja, adalah tokoh Jemaat, banyak terlibat dalam perkembangan jemaat di Jawa Barat Khususnya. Pernah menjabat sebagai umur kharijiah untuk wilayah Priangan Tinggal di Bandung
9. Bapak Zainuddin, menantu dari Bapak R. Kartaatamadja seorang tokoh jemaat Jakarta awaln, tinggal di Jakarta
10. Rafik Ahmad, putra dari E. Suhandi, mantu Muhammad Yatim adik Abdul Samik, Juga anak angkat dari Abdul Samik, tinggal di Majalaya.
11. Ny. Enung Nasir, istri dari Bapak Nasir Ahmad, putra dari Bapak Syarif dari Sukapura, seorang tokoh yang terlibat dalam perkembangan jemaat di daerah Tasik dan sekitarnya
12. Ali Mukhayat, MS adalah tokoh jemaat kawalu, seorang Ahmadi yang banyak mengkoleksi karya-karya tokoh jemaat serta mempunyai perhatian yang tinggi terhadap sejarah Ahmadiyah Indonesia. Tinggal di Kawalu, Tasik
13. Muklish Ilyas, MBSy, seorang lulusan Rabwah , mantan Ketua dewan naskah JAI, pemerhati sejarah Ahmadiyah Indonesia, tinggal di Parung Bogor.
14. Mualim Dindin Mujahidin, putra dari Bapak Komar Sutrisna, Bunijaya, tugas di Bekasi
15. Bapak Soepardja, tokoh dan ketua dari Neratja Trading Co. Jakarta, tinggal di Bogor.

Berbagai situs internet tentang pemberitaan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, yang berasal dari majalah, Koran online

LAMPIRAN

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965

TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau penodaan agama;
 - bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden;

- Mengingat :
- pasal 29 Undang-undang Dasar;
 - pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
 - penetapan Presiden No. 2 tahun 1962 (Lembara-Negara tahun 1962 No. 34);
 - pasal 2 ayat (1) Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA.

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

- Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu

keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

- Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 5

Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1965
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 3.

PENJELASAN

ATAS

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAH-GUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

I. UMUM

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.

Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berdasar keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation-building.

2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasiorganisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.
3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut diatas yang dapat membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka

kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketata-negeraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut Agamanya masing-masing.

4. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).
5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyatanya merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diatur dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada. Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup Agama-gama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dengan kata-kata "Dimuka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia.

Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6.

Dengan kata-kata "Kegiatan keagamaan" dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai Agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran

kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.

Pasal 2

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya.

Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (jo pasal 169 K.U.H.P.).

Pasal 3

Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut.

Mengingat sifat idiiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

Pasal 4

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakeljik dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tinak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghinai sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepatasnya.

Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2726.



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 3 Tahun 2008
NOMOR : KEP-033/A/JA/6/2008
NOMOR : 199 Tahun 2008**

TENTANG

**PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU
ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI)
DAN WARGA MASYARAKAT**

**MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;
 - bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu keten-teraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah menyampaikan 12 (dua belas) butir Penjelasan pada tanggal 14 Januari 2008;
 - bahwa dari hasil pemantauan terhadap 12 (dua belas) butir Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa butir yang telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa butir yang belum dilaksanakan oleh penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sehingga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat;
 - bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional;
 - bahwa dengan maksud untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, serta berdasarkan pertimbangan pada huruf

tentang Peringatan dan Perintah Kepada Petiganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 28E, Pasal 281 ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a;
 3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 10. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
 13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
 14. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP004/J.A/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
 15. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 12 Mei 2005;
 2. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 15 Januari 2008;
 3. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 16 April 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT**
- KESATU : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
- KEDUA : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.
- KETIGA : Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.
- KEEMPAT : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
- KELIMA : Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

- KEENAM : Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.
- KETUJUH : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2008



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/94/KPTS/013/2011

TENTANG

LARANGAN AKTIFITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional ;
- b. bahwa aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dapat menjadi pemicu / penyebab terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Pebruari 2011 Nomor 300/2043/060/2011 perihal Terciptanya Stabilitas Keamanan di Jawa Timur, perlu menetapkan Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur ;
- Mengingat : 1. Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ;
9. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/A/JA/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat ;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Melarang Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dapat memicu dan/atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.

KEDUA : Larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA antara lain meliputi :

- a. menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan maupun melalui media elektronik ;
- b. memasang papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di tempat umum ;
- c. memasang papan nama pada masjid, mushola, lembaga pendidikan dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) ;
- d. menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam segala bentuknya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 28 Pebruari 2011

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Sdr. Menteri Agama di Jakarta.

3. Sdr. Kepala Kejaksaan Agung di Jakarta.

4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

5. Sdr. Panglima Daerah Militer V / Brawijaya di Surabaya.

6. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya.

7. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya.

10. Sdr. Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) di Jakarta.



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG

LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki dan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama atau kepercayaan, atau melakukan kegiatan yang menyerupai aktifitas keagamaan atau kepercayaan dan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama;
 - c. bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dan menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dan warga masyarakat;
 - d. bahwa Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah di Daerah, berwenang untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
14. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
15. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
16. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.05/Kep.103-Kesbangpol/2011 tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 223/1107 D.III tanggal 23 September 2008 perihal Pedoman untuk Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI);
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/3457/Sj tanggal 24 Agustus 2010 perihal Penanganan Jemaat Ahmadiyah dan Tindakan Anarkis;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/604/Sj tanggal 28 Februari 2011 perihal Sosialisasi SKB 3 Menteri tentang Peringatan dan Perintah kepada JAI dan Warga Masyarakat dan 12 Butir Penjelasan JAI;

5. Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor SE/Sj/1322/2008, Nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan Nomor SE/1119/921.D.III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
6. Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) tanggal 14 Januari 2008 tentang Pokok-Pokok Keyakinan dan Kemasyarakatan Warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia;
7. Pernyataan Bersama Para Pemuka Agama di Jawa Barat tanggal 14 Pebruari 2011;
8. Risalah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tanggal 2 Maret 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Ahmadiyah adalah organisasi atau aliran yang menganut/mempunyai keyakinan/ideologi/faham tertentu.
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.05/Kep.103-Kesbangbol/2011.
10. Keputusan Bersama Tiga Menteri adalah Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat, yaitu :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- b. mengawasi aktifitas Jemaat Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam;
- c. mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- d. melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam;
- e. meningkatkan koordinasi antara aparat Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam penanganan masalah Jemaat Ahmadiyah; dan
- f. meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri.

BAB III
LARANGAN
Bagian Kesatu
Aktifitas Jemaat Ahmadiyah
Pasal 3

- (1) Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
- (2) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, ataupun melalui media elektronik;
 - b. pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum;
 - c. pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan
 - d. penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.
- (3) Pemerintah Daerah menghentikan aktifitas/kegiatan Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum berkaitan dengan aktifitas Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
- (2) Tindakan terhadap aktifitas Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan aparat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan langkah-langkah percepatan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- (2) Sasaran sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Kelurahan;
 - b. warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Organisasi Kemasyarakatan Islam; dan
 - c. penganut, anggota dan/atau pengurus Jemaat Ahmadiyah.
- (3) Narasumber sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polres Metro Bekasi, Polres Metro Kabupaten Bekasi dan Polres Metro Kota Depok);
 - c. Kodam III Siliwangi, Kodam Jaya (Kodim Bekasi dan Kodim Depok);
 - d. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 - e. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat; dan
 - f. tokoh masyarakat.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Kelembagaan yang terkait dengan penanganan Jemaat Ahmadiyah, meliputi :
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
 - b. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah.

- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menetapkan kebijakan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah.
- (3) Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan Gubernur dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pengkoordinasian, dan pengkajian hasil informasi mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah agar tidak mengganggu stabilitas Daerah;
 - b. pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini atas permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
 - c. pemberian rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Gubernur dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
 - d. pembinaan terhadap penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Masyarakat yang mengetahui aktifitas Jemaat Ahmadiyah berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, dan bertentangan dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri, wajib melaporkan kepada aparat Kepolisian, dan instansi yang berwenang lainnya.
- (2) Tindaklanjut laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN
Pasal 8

- (1) Komunitas Intelijen Daerah melaksanakan pemantauan aktifitas/kegiatan Jemaat Ahmadiyah.
- (2) Komunitas Intelijen Daerah menyampaikan bahan kebijakan penanganan Jemaat Ahmadiyah kepada Gubernur.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah, dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat setempat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah untuk memperbaiki perbuatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengambil langkah-langkah tindaklanjut dalam penanganan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yang berdampak pada timbulnya konflik sosial dan tindakan melawan hukum oleh masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI
Pasal 10

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Bersama Tiga Menteri, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menghentikan aktifitas dan/atau kegiatan Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah.

Pasal 11

Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah yang tidak melaksanakan Keputusan Bersama Tiga Menteri, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENANGANAN DI KABUPATEN/KOTA

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota menetapkan langkah operasional penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan Jemaat Ahmadiyah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

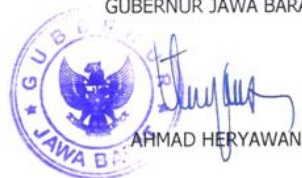
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2011

GOVERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI B.



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

LARANGAN AKTIVITAS PENGANUT, ANGGOTA DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. bahwa aktivitas penganut, anggota dan /atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Provinsi Banten telah menimbulkan keresahan sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. bahwa dengan adanya peristiwa Cikeusik yang berunsur SARA telah menimbulkan keresahan, kerusuhan dan jatuhnya korban, maka diperlukan penanganan bersama seluruh komponen masyarakat, agar tidak terulang peristiwa yang sama di wilayah Provinsi Banten;
 - d. bahwa dengan adanya pernyataan sikap ulama, tokoh masyarakat dan pimpinan Ormas Islam se Provinsi Banten dalam Deklarasi Bersama yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2011, telah menyatakan sikap menolak keberadaan Ahmadiyah di Wilayah Provinsi Banten;
 - e. bahwa untuk menciptakan kerukunan dan ketertiban masyarakat khususnya bagi umat Islam, diperlukan larangan terhadap aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Larangan

- Mengingat : Aktivitas Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Di Wilayah Provinsi Banten;
1. Undang-Undang Nomor 1/ PnPs/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
 6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia(JAI) dan Warga Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LARANGAN AKTIVITAS PENGANUT, ANGGOTA DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI WILAYAH PROVINSI BANTEN .

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Banten.
6. Ahmadiyah adalah aliran dan/atau faham yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Banten.

**BAB II
LARANGAN AKTIVITAS
Pasal 3**

- 1) Setiap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam dilarang melakukan aktivitas/ kegiatan yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama Islam di Provinsi Banten.
- 2) Aktivitas/ kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan dan / atau tulisan baik langsung maupun melalui media cetak ataupun elektronik;
 - b. memasang papan nama atau identitas lain Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dapat diketahui umum;
 - c. memasang papan nama pada mesjid, mushola, lembaga pendidikan dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI);
 - d. menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam segala bentuknya;
 - e. menyebarkan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

Pasal 4

Setiap warga masyarakat agar menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/ atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota dan/ atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

**BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5**

Pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum dan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Provinsi Banten dan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Banten.

**BAB IV
SANKSI
Pasal 6**

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama aparat keamanan/ penegak hukum lainnya akan menghentikan aktivitas/ kegiatan dimaksud dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Maret 2011

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,


ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
KEPALA BIRO HUKUM,


H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19611214 198603 1 008



Bupati Pandeglang

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

LARANGAN AKTIVITAS AHMADIYAH
DI KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - bahwa untuk mencegah timbulnya permasalahan/konflik sosial yang dikarenakan oleh keberadaan organisasi/aliran Ahmadiyah di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
 - bahwa permasalahan/konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang diakibatkan karena Organisasi/Aliran/Kelompok Ahmadiyah tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. bahwa permasalahan/konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada huruf c mengakibatkan tidak kondusifnya stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Pandeglang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, guna menjaga dan memelihara stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Pandeglang, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP 004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);

11. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah;
 2. Surat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pandeglang Nomor 03/MUI-PDG/2011 perihal Pernyataan Sikap MUI Kab. Pandeglang tentang Jamaah Ahmadiyah;
 3. Pernyataan Sikap Forum Komunikasi Ulama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 20 Februari 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG LARANGAN AKTIVITAS AHMADIYAH DI KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.

3. Ahmadiyah adalah organisasi atau aliran yang menganut/mempunyai keyakinan/ideologi/ faham tertentu.

4. Musyawarah Pimpinan Daerah yang untuk selanjutnya disingkat Muspida adalah Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Bupati, Kepala Kepolisian Resor, Komandan Distrik Militer dan Kepala Kejaksaan Negeri.

5. Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bakor PAKEM adalah Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pandeglang.

BAB II

LARANGAN AKTIVITAS AHMADIYAH

Pasal 2

(1) Untuk menjaga dan memelihara kondusifitas dan stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Pandeglang, Organisasi/Aliran Ahmadiyah tidak diperkenankan/dilarang melakukan aktivitas/kegiatan dalam bentuk apapun di wilayah Kabupaten Pandeglang.

(2) Termasuk dalam pengertian organisasi/aliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelompok, pengurus dan/atau anggota Organisasi/Aliran Ahmadiyah.

(3) Aktivitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyebaran faham, menceritakan, menganjurkan atau segala usaha, upaya perbuatan penyebaran faham.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

Pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan Organisasi/Aliran Ahmadiyah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Muspida dan Bakor PAKEM di Kabupaten Pandeglang.

BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 4

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan

dibantu oleh aparat keamanan/penegak hukum lainnya akan menghentikan aktivitas/kegiatan dimaksud.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 21 Februari 2011

Pj. BUPATI PANDEGLANG,

ASMUDJI HW

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 21 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

ENDJANG SADINA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 NOMOR 5

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENJELASAN

PENGURUS BESAR JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA
(P B J A I)

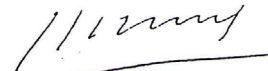
TENTANG POKOK-POKOK KEYAKINAN DAN KEMASYARAKATAN
WARGA JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW yaitu, *Asyhadu anlaa-ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah*, artinya: aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.
2. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah *Khatamun Nabiyyin (nabi penutup)*.
3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban *mubasysyirat*, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
4. Untuk memperjelas bahwa kata **Rasulullah** dalam 10 syarat bai'at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata **Muhammad** di depan kata **Rasulullah**.
5. Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa:
 - a. Tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW;
 - b. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.
6. Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada tahun 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat (1908).
7. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata-kata maupun perbuatan.

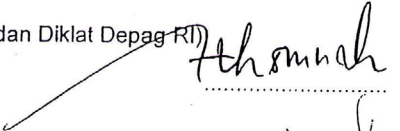
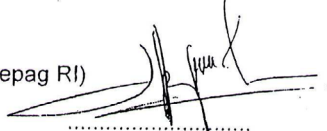
8. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut masjid yang kami bangun dengan nama **Masjid Ahmadiyah**.
9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun.
10. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai Muslim selalu melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara-perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
11. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahmi dan bekerjasama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
12. Dengan penjelasan ini, kami Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Jakarta, 14 Januari 2008

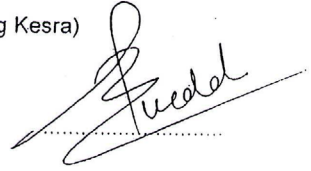
PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI),


H. Abdul Basit
Amir

Mengetahui:

1. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar (Kabalitbang dan Diklat Depag RI) 
2. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA (Dirjen Bimas Islam Depag RI) 

3. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, MA (Deputi Seswapres Bidang Kesra)



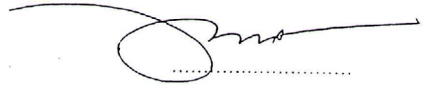
4. Drs. Denty Ierdan, MM (Ditjen Kesbangpol Depdagri)



5. Ir. H. Muslich Zainal Asikin, MBA, MT
(Ketua II Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia-GAI)



6. KH. Agus Miftah (Tokoh Masyarakat)



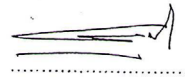
7. Irjen Pol. Drs. H. Saleh Saaf (Kaba Intelkam Polri)



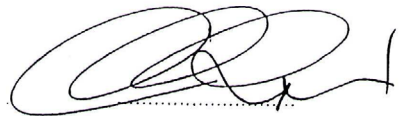
8. Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)



9. Ir. H. Anis Ahmad Ayyub (Anggota Pengurus Besar JAI)



10. Drs. Abdul Rozzaq (Anggota Pengurus Besar JAI)



Lanjutan Penjelasan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tentang Pokok-Pokok Keyakinan dan Kemasyarakatan Warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia